onghokham

Rakyat dan Negara

sh

Seri Sejarah Sosial No. 1

RAKYAT DAN NEGARA

ONGHOKHAM

RAKYAT DAN NEGARA

LP3ES

sh PENERBIT SINAR HARAPAN

RAKYAT DAN NEGARA
Oleh Onghokham
83/SP/01

Disain sampul : Krisnamurti, Studio Widya Risdi

Penerbit Sinar Harapan, anggota IKAPI
bekerja sama dengan
LP 3 ES

Cetakan pertama
Jakarta 1983

Dicetak oleh PT Grafitas
Jakarta

DAFTAR ISI

CATATAN EDITOR 7

SUKARNO : MITOS DAN REALITAS 9

REFLEKSI SEORANG PERANAKAN MENGENAI SEJARAH CINA — JAWA 29

PENELITIAN SUMBER-SUMBER GERAKAN MESIANIS. 59

SEJARAH PEMBESAR DI INDONESIA 78

KEDUDUKAN POLITIK KAUM MILITER DALAM SEJARAH 100

ANGKATAN MUDA DALAM SEJARAH DAN POLITIK 129

PEMBERONTAKAN MADIUN 1948 : DRAMA MANUSIA DALAM REVOLUSI 146

PROSES KESENIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA. 169

CATATAN EDITOR

Artikel-artikel yang merupakan bab-bab dalam buku ini, sebenarnya sudah pernah dimuat di : *Prisma*, *Horison*, dan dalam buku terbitan Lembaga Research Kebudayaan Nasional, LIPI : *Masalah-masalah Internasional Masa Kini.*
Meskipun demikian, kami merasa perlu mengumpulkan artikel-artikel ahli sejarah kita : Onghokham. Karena, bagaimanapun juga kumpulan artikel ini dalam satu buku jelas akan membuat kita lebih mudah menemukan *message* yang dikomunikasikan, daripada bila artikel-artikel itu terpencar.
Susunan artikel-artikel dalam buku ini tidak menurut kronologi terbitnya :

- Sukarno "Mitos dan Realitas", *Prisma 8*, Agustus 1977
- Refleksi Seorang Peranakan Mengenai Sejarah Cina-Jawa, terjemahan dari: "The Pranakan Reflections on the History of the Java-Chinese", Onghokham, dalam *Masalah-masalah Internasional Masa Kini (9)* ed., Lie Tek Tjeng, co-ed. C.P.F. Luhulima, Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI, Jakarta, 1980.
- "Penelitian Sumber-sumber Gerakan Mesianis", *Prisma 1*, Januari 1977.
- "Sejarah Pembesar di Indonesia", *Prisma 10*, Oktober 1980.
- "Kedudukan Politik Kaum Militer dalam Sejarah", *Prisma 12*, Desember 1980.
- "Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik", *Prisma 12*, Desember 1977.
- "Pemberontakan Madiun 1948: Drama Manusia dalam Revolusi", *Prisma 7*, Agustus 1978.
- "Proses Kesenian Indonesia dari Masa ke Masa", *Horison*/XV, hlm. 257-262.

Urutan yang disetujui pengarang dimaksudkan untuk menjaga keluwesan pemindahan topik.
Setiap artikel, kecuali *Proses Kesenian Indonesia dari Masa ke Masa*, mengikutkan daftar kepustakaan yang sangat berguna bagi semua yang menyenangi sejarah serta ilmu-ilmu sosial.
Kami harapkan agar buku ini, selain merupakan informasi serta dokumentasi, juga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan

lebih penting lagi, sebagai bahan yang dapat memancing renungan-renungan yang berguna bagi bangsa kita.

Editor

I. SUKARNO: MITOS DAN REALITAS*

Sukarno mempunyai kepribadian yang kompleks. Ia dilahirkan di bawah bintang Gemini yang, menurut pendapatnya sendiri, memberi corak beraneka-warna pada kepribadian itu. Persoalan Sukarno bersangkut-paut erat dengan persoalan bangsa kita sendiri. Pada puncak masa kekuasaannya, Sukarno digelari Pemimpin Besar Revolusi, Penyambung Lidah Rakyat, Walijul Amri, Panglima Tertinggi, dan lain-lain. Dan tiba-tiba semua gelarnya dicopot. Jasa dan peranannya ditiadakan, dan bahkan ia diejek. Persoalannya kini bukan saja "siapakah Sukarno", tetapi juga "siapa sebenarnya kita dahulu dan siapa kita sekarang?" Apa dahulu kita yang munafik atau sekarang kita munafik? Apa kita semua bersifat Gemini?

Ada berbagai pandangan sarjana luar negeri yang turut memikirkan Sukarno dan kita. Yang menyolok di antara mereka ialah Bernard Dahm.[1] Teorinya adalah bahwa Sukarno tidak lain daripada seorang tokoh dalam tradisi Ratu-adil-Ratu-adil di Indonesia yang untuk sementara dapat menghipnotis masyarakat. Dengan cara *sophisticated* ia berusaha menjelaskan teori ini. Ada pula orang-orang bodoh yang melihat Sukarno sebagai satu-satunya penyebab Revolusi Indonesia. Bagi kaum reaksioner, ini berarti bahwa kalau saja momok revolusi bisa dihilangkan maka Revolusi Indonesia akan selesai. Pihak-pihak reaksioner yang dimaksud adalah Belanda. "Sayang," kata mereka, bahwa pada waktu itu mereka tidak atau tidak mampu "mendiponegorokan" Sukarno. Kaum reaksioner inilah yang kemudian membuat legenda Sukarno. Mereka mengatakan bahwa Sukarno sebenarnya seorang Indo, atau mempunyai darah Belanda, sebab tanpa ini tentu ia tidak bisa melakukan kerja "raksasa"-nya.

Berbagai sarjana melihat Sukarno sebagai 'Ratu Jawa' yang berpeci, pemimpin tradisional dalam bentuk modern. Spekulasi-spekulasi ini memang menarik dan masih akan merupakan perdebatan yang tak berakhir.

Di sini, saya akan berusaha menempatkan Sukarno dalam perkembangan sejarah Indonesia yang terakhir; dari awal bergeraknya Sukarno sampai akhir kepresidenannya. Saya akan berusaha untuk meneliti pemikiran-pemikiran Sukarno dalam rangka pertumbuhan

pergerakan nasional Indonesia, sebab antara Sukarno dan zamannya selalu ada semacam dialektika; hubungan timbal balik. Saya akan melihat kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan serta peranannya dalam pergerakan, revolusi dan zaman kemerdekaan.

Masa Muda

Sukarno berasal dari keluarga priyayi rendahan. Ayahnya seorang guru. Kedudukan sosial-ekonomis keluarganya hanya sedikit lebih baik daripada golongan marhaen yang, di kemudian hari, nasibnya akan diperjuangkan Sukarno. Selain itu Sukarno tidak mempunyai persamaan lain antara dirinya dan kaum marhaen. Pendidikan Sukarno menempatkannya dalam kalangan atas masyarakat Indonesia: ELS (Sekolah Dasar Belanda) dan HBS (Sekolah Menengah Belanda, tamat 1921). Tahun 1927, ketika Sukarno memulai karir politik yang sesungguhnya, tidak lebih dari 78 orang Indonesia yang mempunyai ijazah HBS. Ini berarti hanya satu di antara 7 juta manusia Indonesia yang memiliki ijazah tersebut.[2] Lebih sedikit lagi jumlah orang-orang Indonesia tamatan universitas seperti Ir. Sukarno. Para pemimpin pergerakan nasional kebanyakan berasal dari mereka yang berpendidikan tinggi ini. Tanpa memperhatikan ras, agama, asal dan suku bangsa, orang-orang Indonesia yang berpendidikan tinggi merupakan suatu elite tersendiri. Mereka saling mengenal, berhubungan erat, merasa setingkat dan agak sinis satu terhadap lainnya, namun bersatu karena adanya suatu jurang dalam yang memisahkan mereka dari rakyat yang buta huruf dan yang dicengkram keterbelakangan. Neopriyayisme mudah timbul di antara mereka.
Di samping kedudukan elitisnya, ada juga gangguan terhadap kesadaran sosial pada diri mereka. Dalam hal ini Sukarno menempati kedudukan yang unik. Selama masa HBS-nya, ia berdiam di rumah HOS Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam yang kharismatis. Dengan mudah Sukarno yang cerdas diperkenalkan kepada kalangan nasionalis, anggota Jong Java, anggota SI. Sejak 1911, Sukarno telah menerbitkan tulisan-tulisan pertamanya dalam penerbitan-penerbitan nasionalis: Oetoesan Hindia. Di sana ditulisnya, "Hancurkan segera kapitalisme yang dibantu oleh budaknya imperialisme. Dengan kekuatan Islam, Insja' Allah itu segera dilaksanakan." Berhubungan dengan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi bila Indonesia telah merdeka, Sukarno muda menulis, ". . . Apa artinya memerintah sendiri kalau itu dilakukan

oleh pengikut-pengikut kapitalisme dan imperialisme?" Lebih menarik lagi di masa Sukarno muda ini adalah tindakan-tindakannya. Dalam suatu pertemuan Jong Java, bagian dari Budi Utomo, Sukarno mengagetkan semua hadirin dengan penolakannya untuk mempergunakan bahasa Jawa kromo. Sebab sebagai penganut Jawa Dwipa (gerakan untuk menghapuskan pemakaian tingkat-tingkatan dalam bahasa Jawa) yang lahir di Surabaya, ia menolak pemakaian tingkatan-tingkatan bahasa. Sukarno memakai bahasa Jawa ngoko (rendahan). Dengan jelas Sukarno mau menghilangkan kedudukan elitisnya atau menghapuskan elitisme. Populisme Sukarno terlihat juga pada tulisannya pada tahun 1921, ketika perkumpulan-perkumpulan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera dan lain-lain merencanakan persatuan. Ini dianggapnya tak berguna. Sukarno menulis untuk mempertanyakan kegunaan mengejar cita-cita yang muluk-muluk. "Para intelektual harus memikirkan nasib rakyat." Sikap ini memang sangat berlainan dengan sikap-sikapnya di kemudian hari untuk menggalang persatuan.[3]

Akan tetapi, mungkin, yang terakhir ini adalah hati nurani Sukarno yang sebenarnya: "pikirkanlah nasib rakyat". Rakyat selalu menjadi perhatian utama Sukarno. Marhaenismenya, pidato-pidato sandang-pangan, amanat penderitaan rakyat dan identifikasinya sebagai penyambung lidah rakyat, itulah yang disayanginya. Ucapan Belanda bahwa rakyat Indonesia cukup hidup dengan pendapatan segobang (2½ sen) sehari, betul-betul membangkitkan amarahnya. Bagi pemimpin-pemimpin Indonesia lain kemakmuran rakyat memang penting. Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan lain seperti kebebasan pribadi tidak kurang pentingnya. Atau pertimbangan bahwa kemakmuran rakyat tidak dapat dipisahkan dan malah tergantung dari soal produksi, yakni pembangunan. Karena itu, memikirkannya dengan segera adalah tidak realis. Bagi mereka, populisme Sukarno dapat membahayakan kebebasan pribadi dan pembangunan. Untuk apa menciptakan impian-impian muluk di kalangan rakyat, kalau itu toh tidak dapat dilaksanakan? Yang menarik dari Sukarno di sini adalah tiga unsur pokok pemikirannya, yakni anti-elitisme, anti-imperialisme-kolonialisme. Dan bagi Sukarno, ketiga-tiganya identik dengan nasib rakyat. Pemikiran-pemikiran dasar ini akan tetap menjadi tema Sukarno.

Ideologi Sukarno

Setelah tamat HBS di tahun 1921, sebenarnya Sukarno dapat

langsung terjun ke masyarakat, misalnya menjadi pemimpin politik, sebab dasar-dasarnya cukup kuat. Tetapi, Sukarno memilih meneruskan studinya ke Technische Hoge School (THS, ITB sekarang) yang baru setahun dibuka. Pematangan diri dan studilah yang dipilihnya, dan bukan *glamor* seorang politikus. Ciri pemimpin Indonesia seperti Sukarno, Hatta dan Sjahrir adalah bahwa semasa mudanya, mereka dapat mengatur hidup mereka menurut cita-cita serta peranan yang mereka idamkan. Karena itu menurut ukuran usia tokoh-tokoh politik yang lain, Sukarno sebenarnya sudah agak lanjut umurnya ketika tampil ke atas panggung pergerakan nasional secara sungguh-sungguh.[4] Setahun sebelum Sukarno tamat dari THS, pada tahun 1926, ia ikut mendirikan Algemene Studie Club Bandung, yang menerbitkan *Indonesia Muda.*

Seluruh masa belajar di THS digunakan Sukarno untuk menelan buku-buku mengenai nasionalisme, marxisme, persoalan-persoalan internasional dan sejarah. Dalam kuliah di THS, hal-hal tersebut sama sekali tidak diajarkan. Pengaruh buku-buku ini terlihat dalam pidato pembebasannya di depan pengadilan kolonial (1930) yang terkenal dengan judul "Indonesia Menggugat". Pengetahuannya mengenai Indonesia terlihat dari kutipan-kutipan para sarjana kenamaan pada zamannya. Dan ia menyandarkan diri sepenuhnya pada tingkat kesarjanaan Belanda pada waktu itu: P.J. Veth, Snouck Hurgronje dan lain-lain. Namun kesadaran akan nasib Indonesia diperoleh melalui pemikir-pemikir marxis Barat yang tergolong dalam sosial-demokrasi. Dalam hal ini, ada sekelompok pemikir sosialis Belanda yang dikutip Sukarno seperti P.J. Troelstra, pendiri partai sosialis Belanda, H. Roland Holst, seorang pengarang wanita yang sangat imaginatif dan dua pemuka sosial lain yang kurang penting yaitu H.H. van Kol, seorang anggota parlemen Belanda yang pernah mengunjungi Indonesia dan J.W. Alberds yang di tahun 1930 menjadi pembicara utama partai sosialis dalam parlemen Belanda. Namun, harus diingat bahwa pidato "Indonesia Menggugat" diucapkan dan ditujukan kepada hakim-hakim Belanda dan secara tak langsung kepada rakyat Indonesia, terutama golongan cendekiawan. Sukarno ingin menekankan ironi proses pengadilan yang dari mulanya disebut proses politik. Apa yang diperbolehkan orang-orang Belanda di Nederland tidak diperbolehkan oleh orang-orang Belanda yang sama di koloninya. Namun Sukarno tidak membatasi diri pada tokoh sosialis Belanda saja. Yang tidak jarang disebutnya, juga di

kemudian hari, adalah Otto Bauer dari Austria, H.N. Brailsford dari sayap kiri partai buruh Inggris. Ia banyak menganalisa imperialisme Inggris. Analisa serupa sesuai untuk meneropong hubungan Indonesia-Nederland. Dua tokoh lain rupanya sangat cocok dengan Sukarno yaitu Karl Kautsky dari Jerman dan Jean Jaures dari Prancis. Yang terakhir ini sering disebut-sebut dalam seluruh karir Sukarno.[5]

Mengenai kutipan-kutipannya yang diambil dari pemuka-pemuka sosialis ini, Sukarno senantiasa mendapat kritik dari para sarjana Barat.[6] Dikatakan bahwa Sukarno mengutip mereka secara salah, tidak tepat atau di luar rangkaian di mana kata-kata tersebut digunakan. Bagi Sukarno, memang hanya memikirkan kegunaan atau kecocokan dengan keadaan di Indonesia. Sosialisme Sukarno tidak tumbuh di kalangan pemikir-pemikir yang sepaham seperti lazimnya timbul dalam partai-partai sosialis atau marxis lainnya. Hal ini agak berbeda dengan pertumbuhan Hatta dan Sjahrir yang berpengalaman di luar negeri dan yang hadir dalam kongres-kongres sosialis internasional. Bagi tokoh-tokoh seperti Hatta dan Sjahrir, ideologi Sukarno terlalu bersifat "Sukarnois". Hal ini terutama karena keengganan Sukarno yang terkenal terhadap soal-soal ekonomi. Sebaliknya, bagi Sukarno, persoalan ekonomi yang dibicarakan Hatta bukan persoalan ekonomi sosialis; ia terlalu mendetail. Tekanan kebebasan manusia dalam ajaran-ajaran sosial demokrasi, oleh Sukarno dirasakan mengarah kepada elitisme. Sukarno memang hanya memikirkan pokok-pokok, bahkan cenderung untuk berpikir dalam garis besar. Program-program yang mendetail mengenai masyarakat sosial atau organisasi partai dianggap Sukarno sebagai sesuatu yang dapat memecah belah saja. Sebaliknya, ia ingin menggalangkan kesatuan dengan menanam suatu tujuan yang jelas.

Tetapi, Sukarno dan strateginya demikian sering dibicarakan sehingga, kadang-kadang, kita lupa tentang apa yang sebenarnya menjadi dasar pemikirannya: kapitalisme dan imperialisme. Kritik terhadap kapitalisme dan imperialisme terjalin erat dalam cita-cita masyarakat Indonesia idaman Sukarno. Kapitalisme, menurut Sukarno, adalah "suatu pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi . . . kapitalisme berarah ke pemiskinan." [7] Dalam pidato-pidatonya kemudian, Sukarno selalu menyebut penolakannya terhadap sistem masyarakat di mana manusia mengeksploatasi sesamanya.

Bahasa Sukarno yang imaginatif menunjukkan kebenciannya terhadap imperialisme yang baginya identik dengan kolonialisme, "Imperialisme juga suatu paham, imperialisme juga suatu pengertian. Ia bukan *ambtenaar BB* (pejabat), bukan pemerintah, bukan penguasa. Ia adalah suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri ..." Sukarno melihat imperialisme ini sebagai sebab dari segala kesengsaraan bangsanya, kemiskinan, tidak adanya kebebasan maupun pembangunan. Untuk menentang "nafsu" yang mencengkram tanah-airnya ini, Sukarno akan serahkan dirinya, dan baginya, imperialisme adalah obsesi hidup. Bangsanya tinggal di salah satu tanah-air yang terindah di dunia, tersubur dan terkaya — Ibu Pertiwi, Wanita yang Elok. Tetapi, penghuni-penghuninya miskin dan impoten. Dengan kesatuan kekuatan (*samenbundeling van alle revolutionaire krachten*), Sukarno ingin merebutnya kembali. "Nafsu" imperialisme ini mengubah tanah-tanahnya yang subur menjadi perkebunan-perkebunan. Dan tambang-tambang penuh kekayaan-alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa pada tanah-air ini dikuasai orang-orang asing. Sukarno tidak akan rela bila sejemput tanah pun dari Ibu Pertiwi ini dikuasai Belanda, simbol sebuah "nafsu" yaitu imperialisme.

Strategi: Negara Dalam Negara

Tahun 1926 - 1927, Sukarno tampil menjadi pemimpin politik. Pekerjaan sebagai asisten di THS ditolaknya. Sukarno malahan mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia), sebagai jawaban bagi tawaran kerja sama pihak Belanda ini.[9] Pada waktu itu, pergerakan Indonesia dalam keadaan yang sangat suram. Sejak bangkitnya pergerakan, kira-kira tiga puluh tahun yang lalu, perpecahan di dalam dan tekanan dari luar telah merusaknya. Keanekaragaman masyarakat Indonesia, sukuisme, agama-agama, aliran-aliran, isme-ismenya serta konflik-konflik sosial menggoncangkan pergerakan ini. Namun, dari semuanya juga dapat ditarik satu pelajaran bahwa rakyat dapat menghilangkan apatismenya untuk ikut serta bergerak. Sarekat Islam membuktikannya. Dalam waktu singkat, Sarekat Islam dapat menarik ratusan ribu anggota-anggota yang penuh semangat. Sayangnya, partai dengan penganut massal yang pertama di Indonesia ini dalam keadaan sangat merosot pada tahun 1927. Tujuan-tujuan Sarekat Islam ini tidak selalu jelas. Baru kemudian umpamanya Sarekat Islam menolak kerja sama dengan

Belanda, dan menentang kapitalisme. Kritik terhadap kapitalisme didasarkan atas agama dan bukan atas struktur sosial. Sebab bukankah Islam menghalalkan pemetikan bunga dari modal? Dan bukankah penimbunan modal merupakan unsur pokok kapitalisme yang identik dengan pemetikan bunga, sehingga menelorkan istilah kapitalisme yang "berdosa"? Dalam keadaan demikian, dengan mudah pengaruh pimpinannya digeser oleh pimpinan-pimpinan yang lebih radikal, dan lebih mempunyaii pikiran-pikiran sosial. Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Hijau dan Sarekat Merah yang kemudian tumbuh menjadi PKI. PKI mengorganisasi pemberontakan 1926 terhadap Belanda, akan tetapi pemberontakan ini gagal. Pemerintah Belanda menunjukkan tangan besi untuk menghancurkan PKI serta melarangnya. Ratusan orang dibuang ke Digul di Irian Jaya. Sejarah masa-masa terakhir tersebut meninggalkan dua kesan yang kuat membekas pada Sukarno. Daya tarik Islam dan kemampuan PKI untuk mengorganisasi pemberontakan pertama dalam skala nasional. Pada tahun 1926, Sukarno menerbitkan tulisan pertamanya yang matang dalam *Indonesia Muda;* "Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Pikiran pokok di sini adalah nasionalisme. Dengan cermat ia melihat bahwa suatu ide nasionalisme yang lebih dipertajam dengan tujuan-tujuan yang jelas akan dapat diterima semua dalam keadaan pergerakan pada waktu itu dan dengan itu mengorganisir kembali pergerakan. Tulisannya terutama ditujukan kepada elite pergerakan dan bukan kepada rakyat. Tercantum dalam konsepsi Sukarno seruan kepada para cendekiawan dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan, karena mereka biasanya memiliki kecurigaan tarhadap rakyat yang buta huruf. "Golongan-golongan konservatif," katanya, "menganggap rakyat kecil puas dengan nasibnya, puas dengan menonton peristiwa-peristiwa sejarah dan hanya mengabdi pada tuan-tuannya." Kepuasan ini menurut Sukarno telah hilang dan bersama itu hilang pula kepercayaan rakyat kepada para penguasa. Rakyat tidak lagi menerima begitu saja pembagian masyarakat antara kaya dan miskin seperti dalam keadaan masyarakat tradisional. Pada kesempatan lain, Sukarno masih akan menulis dan kita sendiri masih ingat pada ucapan-ucapannya di kemudian hari, "cacing pun bisa bangkit, bila diinjak-injak."

Sukarno, dalam tulisannya tadi, mencoba meyakinkan golongan-golongan Islam dan nasionalis untuk tidak marxis-phobi. "Saya bukan orang komunis, saya tidak memihak! Saya hanya meng-

hendaki kesatuan, kesatuan Indonesia dan persaudaraan di antara berbagai gerakan." Persatuan ini akan merupakan jembatan emas yang mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan. Namun, dasar bahwa Sukarno merasa marxisme adalah esensial dalam perjuangan mungkin terletak pada pertumbuhan intelektual Sukarno sendiri yang demikian dipengaruhi oleh marxisme. Nasionalisme maupun Islam dirasakan sebagai paham-paham yang kurang tajam untuk menganalisa keadaan. Namun, Sukarno hanya akan membatasi analisa marxisnya pada fenomena imperialisme dan tidak sampai ke masyarakat Indonesia. Justru sebaliknya, menurut penilaian R. Mc-Vey,[10] Sukarno melihat rakyat ini sebagai suatu kelompok yang tidak terbagi-bagi dalam klas tetapi sebagai suatu massa yang tak berbeda-beda. Aliran serta isme-ismelah yang membagi masyarakat dan bukan kedudukan sosial-ekonomi. Persatuan yang ingin dicapainya ini adalah melalui pemimpin-pemimpinnya. Dalam hal ini, Sukarno rupanya dipengaruhi oleh perkembangan analisa para sarjana pada waktu itu mengenai masyarakat Indonesia, di mana masyarakat terbagi dalam golongan elite (priyayi dan rakyat kecil (wong cilik), yang memang juga merupakan pandangan tradisional. Sukarno berbeda dengan Lenin - tokoh revolusi zaman Sukarno muda - yang mencapai tujuannya melalui disiplin sebagian masyarakat yaitu golongan proletar. Sukarno, pada gilirannya ingin mencapai revolusi dengan konsepsi rakyat ini. Sukarno justru melihat bahwa kaum proletar di Indonesia lemah; bahkan tidak atau belum ada, karena sistem eksploatasi Belanda yang terlalu banyak memeras dan yang hanya memerlukan Indonesia sebagai tempat buruh murah.

Tampilnya Sukarno dengan konsep nasionalismenya pada saat pergerakan mendapat pukulan dan hambatan dan di tengah-tengah kekacauan tujuan, membuka suatu babak baru dalam perkembangan nasionalisme Indonesia. Fokus baru diberikan Sukarno bagi pergerakan dan bagi semua orang yang terlibat dalam politik atau sadar akan politik. Dengan aksi dan programnya, Sukarno bertindak seolah-olah telah berdiri suatu negara di dalam negara kolonial. Salah seorang pendengar pidato Sukarno mengatakan bahwa pada saat itu dia seperti percaya bahwa Indonesia telah merdeka. Dengan susah payah, Sukarno akhirnya berhasil mendirikan PPPKI (Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Politik Kebangsaan Indonesia), di mana PNI mendapat peranan penting. Tetapi di tahun 1930 diadakan razia terhadap PNI dan Sukarno

ditangkap. Di depan pengadilan, Sukarno lalu mengucapkan tuduhan klasiknya terhadap kolonialisme baru-imperialisme. Sukarno dihukum dua tahun dan sekeluarnya dari penjara dia terjun lagi ke dalam kancah politik. Pada tahun 30-an ini, di dalam penjara dan pembuangan, Sukarno mendefinisikan konsepsi rakyatnya lebih lanjut dengan melahirkan Marhaenisme.

Pada suatu waktu, Sukarno berjalan-jalan di desa dan bertemu dengan seorang tani. Ketika ditanyakan siapa yang memiliki tanah yang sedang dikerjakan, sang petani menjawab, "Milik saya."

"Siapa yang memiliki pacul itu?"

"Milik saya," katanya lagi.

"Siapa yang memiliki alat-alat pertanian itu?"

"Milik saya," jawab petani sekali lagi. Petani itu bernama Marhaen."

"Jelas," kata Sukarno, "si petani tidak menjual tenaganya pada majikan sebagai seorang proletar, si petani memiliki alat-alat produksi. Panen adalah panennya sendiri. Akan tetapi Marhaen ini tetap miskin. Usahanya hanya sekedar untuk melangsungkan hidup dari harta miliknya." Rakyat Indonesia, menurut Sukarno adalah jutaan Marhaen seperti itu — kalau bukannya sebagian terbesar berada dalam keadaan Marhaen. Demikian juga para tukang besi, penjual di pasar, penjual sate/soto dan pedagang-pedagang kali-lima adalah Marhaen. Kemiskinan mereka ini adalah karena kolonialisme. Marhaen ini tidak akan berubah menjadi pelopor dan kekuatan revolusi kalau kesadaran mereka tidak dibangkitkan.

Yang menarik di sini adalah bahwa fokus Sukarno mengenai rakyat adalah sebenarnya "*entrepreneur* kecil". Hubungan-hubungan di dalam masyarakat ini tidak dilihatnya. Sukarno mengabaikan golongan-golongan seperti lurah, pamong desa, atau marhaen-marhaen yang mempunyai milik lebih besar ataupun tengkulak dan juragan-juragan batik yang kaya. Pun tidak dipersoalkan oleh Sukarno jutaan rakyat yang tidak memiliki tanah tetapi kerja sebagai penggarap atau buruh-tani, karena mengemukakan hal-hal ini hanya akan berarti memecah belah. Di sini rupanya Sukarno mempersoalkan strategi pergerakan yang harus membangkitkan marhaen dengan memperhatikan nasib mereka juga. Buruh tani dan lain-lain rupanya diperkirakan akan terlalu apatis untuk dapat menghadapi dunia luar. Namun, bagi Sukarno, yang menjadi pertimbangan utama untuk melancarkan konsepsi Marhaen adalah

untuk meyakinkan elite Indonesia yang terdidik untuk menghilangkan konsepsi-konsepsi mereka sendiri mengenai rakyat. Konsepsi-konsepsi tradisional kaum elite ini adalah seperti tercantum dalam kata-kata "rakyat bodoh", "kampungan", "orang dusun" dan seterusnya. Ungkapan semacam ini demikian berlimpah baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah. Konsepsi tradisional elite ini didobrak dan diganti dengan istilah Marhaen, sebab proletar tidak cocok malahan akan lebih mengagetkan elite. Terlepas dari masalah apakah itu strategis atau tidak, Sukarno bercita-cita menunjukkan bahwa Marhaen adalah sebagian besar rakyat Indonesia. Dan mereka juga mempunyai hak hidup.

Gelora Sukarno : Perpecahan

Salah satu sebab mengapa Sukarno ditangkap pada tahun 1930 adalah pemakaian bahasa yang keras. Sering dipakai kata *revolusi*, atau istilah-istilah lain yang radikal. Di depan pengadilan kolonial Sukarno menjelaskan pemakaian kata-kata tersebut. Katanya nada pidato-pidatonya adalah untuk membangkitkan semangat rakyat. Sukarno menyangkal bahwa adalah tujuan PNI untuk menggulingkan Hindia Belanda dengan kekerasan. Memang PNI telah mengambil keputusan untuk menjalankan "aksi dengan perbuatan". Namun manakah cara yang dipakai aksi ini? Apakah akan dipakai ... "bom, bedil, dinamit! Tidak ..." "Kami kaum PNI memang bukan sabar, memang kami bukan orang sedang, kami bukan uler-kambang " Sukarno lalu mengutip Karl Kautsky, "... 'sosial demokrasi adalah suatu partai revolusioner, tetapi bukan suatu partai yang bikin revolusi-revolusi." PNI tidak akan memakai "bom, golok dan dinamit ... seperti tidak ada senjata-senjata lain yang lebih tajam." "Kekuasaan semangat rakyat itulah senjata yang paling tajam yang dilihat Sukarno.[11] Namun tak ada hakim Belanda yang percaya.

Pemakaian bahasa radikal bagi Sukarno adalah alat seorang politikus untuk menggelorakan semangat rakyat dengan mana diisi keberanian serta kepercayaan akan hari depan. Bahasa radikal pun sering digunakan kaum sosial-demokrat seperti Troelstra, Kautsky dan Jaures. Gaya kepemimpinan Sukarno ini akhirnya menyebabkan keretakan dalam kalangan pergerakan nasional, yaitu antara Sukarno di satu pihak dan Hatta serta Sjahrir di pihak lain. Kedua yang terakhir ini menekankan pembentukan kader dan kursus-kursus politik. Mereka melihat Sukarno kurang memperhatikan bidang ini.

Sebab langsung dari perpecahan dalam pergerakan adalah karena Mr. Sartono membubarkan PNI tanpa konsultasi dengan ribuan anggotanya ketika Sukarno ditangkap. Kemudian, Partai Indonesia (Partindo) dibentuk. Sedangkan Hatta dan Sjahrir mendirikan PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) atau PNI-baru. Sekeluarnya Sukarno dari penjara, ia menggabungkan diri dengan Partindo.
Keretakan antara Sukarno dan Hatta-Sjahrir semakin mendalam. Tindakan sewenang-wenang Sartono dilihat sebagai hasil gaya kepemimpinan Sukarno yang menyebabkan struktur partai kurang demokratis. Sjahrir mengatakan bahwa gaya pimpinan Sukarno ini seperti orang yang memberikan jimat-jimat kepada rakyat dan membangkitkan perang jihad. Kritik mereka adalah bahwa cara *machtsvorming* (penggalangan kekuatan) akan menjebloskan pemimpin pergerakan ke dalam penjara sebelum kekuatan yang sesungguhnya terwujud. Ketika Belanda sekali lagi memukul pergerakan, Hatta menulis, "Tidak ada seorang lain kecuali dia yang membawa Partindo ... ke arah agitasi dan demonstrasi dan sekarang seluruh pergerakan kiri menderita di bawahnya karena itu."
Pihak Sukarno, sebaliknya, melihat bahaya pembentukan kader-kader yang ketat. Sejarah pemukulan terhadap PKI menginsyafkannya akan ini. "Kemauan" yang datang dari visi harus ditumbuhkan dengan segera di kalangan rakyat. Bagaimanapun juga, keretakan antara tiga tokoh pergerakan tersebut kemudian berubah menjadi saling tuduh-menuduh melepaskan prinsip-prinsip perjuangannya ketika Belanda sekali lagi memukul pergerakan nasional.[12] Dalam tahun 1933, baik Sukarno maupun Hatta dan Sjahrir dibuang. Yang pertama ke Endeh (Flores), dan yang lain ke Digul (Irian Jaya). Apa yang sebenarnya menyebabkan perbedaan antara ketiga pemimpin ini? Mungkin, pengalaman mereka berbeda. Sukarno tidak pernah berada di luar negeri. Ia tumbuh dan beraksi sendiri. Sukarno tidak pernah dikelilingi oleh orang-orang setara dalam pertumbuhan dan dalam peran politiknya. Sedangkan Hatta dan Sjahrir melihat dan mempelajari struktur partai-partai di Belanda. Dan mereka dikelilingi kawan-kawan seperjuangan yang setingkat sejak permulaan. Sukarno dikelilingi rekan-rekan Indonesia yang tidak memperhatikan politik atau oleh orang-orang yang jauh lebih rendah pendidikannya. Ciri khas Sukarno adalah bahwa ia selalu berdiri sendiri.
Ada faktor yang lebih penting yang menyebabkan perpecahan. Sukarno percaya pada rakyat, sedangkan Sjahrir melihat bahwa

rakyat berada dalam cengkeraman feodalisme. "Setiap pemuda yang bersemangat harus melihat ke Barat ..."[13] tulisnya. Sukarno melihat bahwa dalam kebudayaan Indonesia sendiri ada motor-motor yang membangun. Bagi Sukarno, pembentukan kader-kader hanya akan menimbulkan elitisme saja. Ini berarti pergerakan tanpa memperhitungkan rakyatnya. Dalam Sukarno pun sering timbul keraguan mengenai rakyatnya. Dalam tahun 1933, suatu tahun yang suram, dia menulis kepada seorang teman:

"... Kita tidak lain daripada menjiplak saja, untuk membuat hal-hal yang asli kita tidak mampu, belum mampu. Masih akan lama sekali sebelum pergerakan nasional akan berarti sesuatu ...."
Kepada seorang teman lain, ia mengatakan bahwa bila ia melihat kegunaan dari koperasi (kerja sama) maka ia akan kerja sama ....[14]
Dalam pembuangan di Flores, spirit Sukarno kelihatan masih tetap bergelora. Yang menjadi sasarannya kali ini adalah Islam. Kepercayaan Sukarno akan rakyatnya menyebabkan ia memakai cara-cara persuasi dan mencoba meyakinkan orang. Kekerasan tidak pernah atau jarang sekali dipakainya. Sukarno melihat bahwa pranata-pranata Islam di Indonesia kolot dan orang-orangnya tidak mengenal sejarah. Sukarno sadar bahwa semua negara Islam dalam keadaan mundur dan berada di bawah penguasaan asing. Sukarno menyerang status tinggi yang diberikan pada para sayid, sebab "tidak ada agama yang lebih menekankan persamaan daripada Islam." Sukarno melihat bahwa banyak hadis-hadis salah, yang masuk dalam ajaran Islam yang tidak ada hubungannya dengan agama, "... sehingga ajaran Islam dikelumuti oleh ketidaktahuan, kekolotan, tahyul, ajaran-ajaran salah dan anti rasionalisme, sedang agama adalah lebih sederhana dan rasionil daripada ajarannya." Tahun 1938, Sukarno dipindahkan ke Bengkulu. Dengan perbuatan dan pidato-pidatonya, ia mencoba memodernkan Islam di sana.
Memang, tidak banyak yang dapat diperbuat oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Namun, Belanda membayar politiknya dengan harga yang mahal. Ketika perang Pasifik pecah di tahun 1941, dengan mudah Jepang menduduki Hindia Belanda tanpa seorang Indonesia pun yang mengulurkan tangan untuk menolongnya secara sungguh-sungguh. Hindia Belanda lenyap tanpa kemampuan membangkitkan pendukung-pendukung yang berarti baginya.

Sukarno dalam Revolusi

Peranan Sukarno dan Hatta yang bersatu kembali sudah banyak

diketahui. Kritik bahwa mereka bekerja sama dengan Jepang dan mau disamakan dengan para kolaborator Jerman di Eropa, tidak tepat sebab keadaan Indonesia lain dengan negara-negara merdeka di Eropa. Sjahrir, pada waktu itu memutuskan untuk tidak ikut dalam kehidupan politik, tetapi mengadakan hubungan erat dengan yang kemudian dikenal sebagai dwi-tunggal revolusi. Yang memecah belah tokoh-tokoh revolusi pada waktu itu bukan persoalan "kolaborasi" dwi-tunggal, tetapi cara memproklamasikan kemerdekaan dan cara merebut kekuasaan dari Jepang. Benedict Anderson, sejarahwan tahun pertama Revolusi Indonesia, menulis bahwa pada saat "kritis proklamasi", elite politik Jakarta dibagi dalam dua golongan. Sukarno-Hatta di satu pihak, serta mereka yang disebut tokoh-tokoh politik sebelum perang dan kaum pemuda di pihak lain, yang diwakili oleh Adam Malik, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Wikana dan lain-lain. Kaum pemuda ingin merebut kekuasaan dari Jepang dengan kekerasan. Sukarno-Hatta menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi Jepang yang sudah menyerah tetapi Belanda. Untuk apa menjatuhkan korban-korban dan pertumpahan darah yang sia-sia. Kekuatan tokoh politik sebelum perang ini terletak pada nama mereka atau kemampuan mereka untuk berunding dengan Jepang, Sekutu dan akhirnya Belanda. Konflik di antara kekuatan-kekuatan Revolusi Indonesia selama 5 tahun didominasi oleh masalah diplomasi dan perjuangan. Sukarno, Hatta dan kebanyakan tokoh politik yang memegang pemerintahan menjalankan diplomasi perundingan-perundingan dengan Sekutu dan Belanda sebagai strategi mereka yang utama.

Pertanyaannya adalah apakah dengan demikian pimpinan nasional yaitu presiden dan kabinet-kabinetnya mengisolasi diri dari perjuangan? Terutama apakah mereka mengisolasi diri dari tenaga-tenaga revolusioner? Segera setelah Republik Indonseia diproklamasikan, Sukarno mengadakan perjalanan; *tour* ke seluruh Jawa. Tidak pernah ia tinggal diam dan di mana-mana berpidato. Dan kharismanya menangkap jutaan manusia yang sekarang hanya memiliki satu harapan. Anderson menulis, "Kalau secara rasional Sukarno setuju dengan politik hati-hati yang dilakukan kabinet, maka dalam hatinya ia memahami bahwa di mana kekuasaan administratif pemerintahan sedang berada dalam keruntuhan, maka makna gambaran-gambaran dan janji-janji akan bertumbuh dan, dalam zaman kekacauan dan pembebasan, akan merupakan tata-susunan yang nyata."[15]

Namun, Sukarno, Hatta dan tokoh-tokoh politik lain adalah orang-orang sipil selama karirnya. Dengan tiba-tiba mereka ditempatkan dalam kedudukan sebagai kepala negara dengan pemerintah yang mereka idam-idamkan. Mereka mengira akan memperolehnya dengan cara lain. Kesalahan-kesalahan dibuat. Atas desakan Jepang, PETA (Pembela Tanah Air) dibubarkan pada hari-hari pertama sesudah proklamasi - sedangkan PETA merupakan satu-satunya organisasi tentara dengan hirarki yang ketat. Atas dorongan pemuda-pemuda, Sukarno masih mencoba menghindarkan pembubarannya. Namun terlambat. Dan dengan demikian, pemerintah kehilangan kesempatan selama beberapa tahun untuk mengontrol tentara. Malahan, tentera sekarang tumbuh sendirian, dan tidak terorganisasi. Perwira-perwira PETA kembali ke kampung-kampung mereka dan mengorganisasi barisan perjuangan. Antara golongan-golongan perjuangan dan Sukarno tidak selalu ada hubungan mesra yang sungguh-sungguh, bahkan mungkin diliputi kecurigaan. Hal ini sendiri mungkin mempengaruhi politik-politik Sukarno selanjutnya.

Pimpinan Revolusi Indonesia tidak pernah mengembangkan strategi militer. Bahkan campur tangan saja pun tidak. Persoalan militer memang merupakan bagian terasing bagi Sukarno seumur hidup. Sukarno pun tidak menghasilkan anak buah yang sungguh-sungguh dapat dipercaya di kalangan militer untuk memberikan seluruh loyalitas kepadanya. Akan tetapi, sebaliknya, mungkin karena itu pengaruh politik dan ideologi Sukarno sedikit di kalangan militer. Proses perkembangan ini merupakan tragedi Revolusi Indonesia. Berlainan dengan Revolusi Indonesia, Maozedong di RR Cina dan Ho Chi Minh di Vietnam memakai militer sebagai alat revolusi dan mencampuri strategi militer kalau tidak melahirkan strateginya sendiri. Tokoh-tokoh revolusi di RRC dan Vietnam mempunyai anak buah militer seperti Jenderal Giap dan lain-lain. Dibanding kan dengan tokoh-tokoh tersebut, tidak ada satu kata pun mengenai militer maupun mengenai gerilya dalam tulisan-tulisan Sukarno. Dan inilah yang akhirnya menjatuhkannya.

Dalam zaman revolusi, Sukarno tidak saja terisolasi dari soal-soal militer, tetapi ia pun merupakan orang yang sejak permulaan dikelilingi oleh suatu pemerintahan lengkap dengan birokrasinya dan partai-partai politik yang beraneka-ragam. Republik Indonesia menjadi realitas tanpa satu pun cita-cita dan ideologi Sukarno dipraktekkan. Pada permulaan memang ada rencana untuk membentuk partai pelopor (*staatspartij*) namun rencana ini ditinggal-

kan demi menghapuskan segala sesuatu yang berbau Jepang atau fasisme untuk bisa berunding dengan Belanda. Juga dalam soal diplomasi, Sukarno tidak menunjukan banyak pengaruhnya. Satu bidang lain yang rupanya juga tidak disukai Sukarno yaitu duduk di tengah-tengah meja perundingan untuk tawar-menawar. Diplomasi diserahkan pada Sjahrir dan tokoh-tokoh yang lebih dekat dengan Hatta. Hatta sebenarnya lebih banyak mencampuri soal diplomasi dan perundingan dengan Belanda. Namun, selama tahun 1945-1950, antara Sukarno dan Hatta tidak ada persaingan atau perpecahan. Sukarno menyokong segala politik kabinet, juga dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam negeri seperti pemberontakan Madiun, dan lain-lain. Sebaliknya, meskipun mungkin peranan Sukarno kurang dalam pemerintahan sehari-hari, namun diplomasi pribadinya menjadi identik dengan revolusi. Kharismanya dipakai unguk menguasai massa rakyat. Simbolik Sukarno bagi revolusi ini menyebabkan semua lapisan masyarakat Indonesia, tokoh politik, pemuda, juga militer dan sipil serta yang penting sekali dunia luar, percaya akan realitas Revolusi Indonesia.

Sukarno dan Kemerdekaan

Tahun 1950, kemerdekaan Indonesia dicapai. Dari Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia. Sukarno menjadi presiden dari pemerintahan parlementer, yaitu presiden konstitusional. Namun dalam batinnya sendiri, Sukarno merasa ia adalah presiden bekas Hindia Belanda yang dicairkan dalam arti sosial politik. Irian Barat masih di tangan Belanda. Perusahaan Belanda masih berkuasa. Dan Indonesia adalah uni dengan Kerajaan Belanda. Militansi Sukarno dan pidato-pidatonya yang berkobar-kobar menggerakkan hati rakyat. Namun, kalau dalam zaman revolusi hal semacam ini demikian berguna, sekarang dianggap sebagai ancaman bagi kestabilan negara baru. Sukarno tak henti-hentinya menuntut Irian Barat dikembalikan, bubarkan Uni, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Banyak penguasa Republik Indonesia melihat peranan Sukarno sebagai suatu ancaman. Namun, ia adalah presiden! Perpecahan di kalangan elite Indonesia ini pada akhirnya ditandai oleh perpecahan antara Sukarno dan Hatta. Hasil pemilihan umum 1955 menambah kegawatan karena banyaknya partai. Dan hasil yang dicapai PKI semakin menambah runyamnya keadaan. Sukarno hendak memberikan tempat kepada PKI. Nasionalisme, Islam dan marxisme,

gagasannya sebelum perang mau direalisirnya sekarang. Sebagai tekanan yang paling kuat di samping segalanya ini adalah cita-cita kemerdekaan yang belum dipenuhi, keadaan sosial dan ekonomi yang masih kacau. Semua pihak mengharapkan suatu penerobosan keadaan. Kup-kup militer telah mengancam keadaan. Percobaan-percobaan pembunuhan terjadi.

Setiap pemimpin revolusi yang hidupnya berada dalam ancaman akan segera menyadari bahwa ia terkurung dalam kurun umurnya yang terbatas di dunia ini. Karena itu, Sukarno segera bertindak. Dimunculkan Konsepsi Presiden yang kemudian menuntut kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Dan memang, ia merupakan kerangka Demokrasi Terpimpin. Sistem Demokrasi Terpimpin didasarkan pada aliansi antara partai-partai (termasuk PKI), tentara dan presiden sebagai pihak ketiga. Biarpun tindakan-tindakan ini serta Demokrasi Terpimpin menjamin demokrasi dan pemimpinnya diterima secara populer, namun, semuanya mengandung kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Sebab, akhirnya, segala sesuatu akan tergantung dari presiden yang mempraktekkan politik perimbangan. Sedangkan seorang presiden adalah manusia yang terkukung dalam batas umur. Selama presiden masih diperkirakan mampu melanjutkan hayatnya dan masih lama menguasai keadaan, sistemnya diharapkan tetap kukuh. Akan tetapi, sekali tanda-tanda penyakit timbul, sistem Sukarno pun mulai goncang. Hal ini mungkin bisa menjelaskan ketidaktentraman Sukarno sejak tahun-tahun 1960-an. Ia mundar-mandir melakukan perjalanan ke luar negeri, berpesta-pora. Dan Sukarno bergerak terus. Segalanya diperbuat untuk menunjukkan bahwa ia belum mendekati akhir hayatnya dan masih sehat, penuh kesegaran hidup dan semangat. Lebih pemuda dari para pemuda. Akan tetapi, makin lama makin banyak orang melihat tanda-tanda ketuaan pada Sukarno yang semakin berumur. Kekuatan-kekuatan di luarnya mulai dipersatukan. Dan semuanya bersiap-siap untuk bertindak kalau-kalau akan terjadi sesuatu dengan pimpinan revolusi dan pimpinan negara. Semuanya berproses terus dan akhirnya menjadi sebab langsung kejatuhannya. Balon persatuan pecah berkeping-keping dalam tahun 1965.

Sukarno sendiri insaf bahwa ia hanya seorang diri. Setelah bulan September 1965, dalam salah satu pidatonya yang masih saya ingat, Presiden Sukarno mengatakan, "... Apa yang bisa saya buat? Dari permulaan saya dikelilingi suatu pemerintahan ...." Yang

dimaksudkan di sini adalah "dengan suatu *establishment*". Elite baru Indonesia oleh Sukarno sendiri, secara bersendagurau, sering disebutnya sebagai orang-orang yang berlaku seperti pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas yang namanya Republik Indonesia. Di masa puncak kekuasaan Sukarno, 1963, *establishment* ini mempunyai harpan-harapan tinggi kepada masa depan. Irian Barat sudah menjadi bagian Indonesia. Deklarasi Ekonomi (Dekon) diumumkan sebagai niat baik para pemimpin Indonesia. Dan tahap pembangunan ekonomi akan segera dimulai. Justru pada saat bangkitnya harapan, di mana mereka telah kenyang dengan visi dan kini ingin bekerja tenang, Sukarno melancarkan politik konfrontasinya dengan Malaysia. Sukarno keliru menganalisa keadaan. Malaysia jauh lebih kuat dan kukuh daripada yang dikira Sukarno dan orang-orang di sekelilingnya. Lebih berbahaya lagi baginya, karena Sukarno tidak menyelami suasana Indonesia pada saat konfrontasi dengan Malaysia. Dalam tahun-tahun 50-an, ketika Sukarno melancarkan konfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Barat, saat itu memang penuh dengan kekhawatiran akan macetnya revolusi, saat bangkitnya ketakutan. Akan tetapi Indonesia dalam tahun 1963 penuh dengan harapan. Dan dalam masa bangkitnya harapan, *establishment* tidak lagi membutuhkan Sukarno. Saat bangkitnya ketakutan adalah saat yang cocok bagi Bung Karno.

Peranan Sukarno dalam sejarah Indonesia terlihat paling besar pada saat-saat adanya kemacetan. Dalam 1927, tampilnya Sukarno ke depan menolong pergerakan nasional dan memberikan arah dan arti baru padanya. Baik situasi maupun pribadinya memang paling cocok dalam keadaan-keadaan tersebut. Pada saat pembentukan negara Indonesia, sekali lagi pidato Pancasilanya memecahkan pertentangan-pertentangan antara berbagai golongan. Pada saat (1959) kehidupan politik macet karena perpecahan partai-partai dan ancaman kup di daerah-daerah, peranan Sukarno dengan konsepsi presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar '45 sekali lagi terlihat. Pada saat itulah "aksi dengan perbuatanya" terlihat.

Penyatuan Irian Barat dengan Indonesia dapat dikatakan jasanya dan hasil keuletan pendapatnya. Selain itu, tuntutan-tuntutan dan daya upayanya mengenai Irian Barat memberikan semangat bagi sebuah keadaan yang diancam dengan kepuasan diri sendiri, kemacetan dan sinisme. Bahaya-bahaya kemacetan dalam tahun-tahun 50-an memang besar. Dan visi Sukarno mengenai Irian Barat seakan-akan memberikan semangat baru pada revolusi. Di sinilah

peranan Bung Karno yang terbesar yaitu pada masa-masa adanya kekhawatiran dan adanya kemacetan.

Establishment Republik Indonesia muncul dari masa pergerakan dan revolusi. Apakah dasar penyeleksian untuk menjadi pemimpin di antara 100 juta orang Indonesia ini? Apa latar belakang sosial pemimpin-pemimpin ini? Yang utama tentu bahwa mereka itu setuju dengan cita-cita Indonesia merdeka, berperanan dalam pergerakan dan revolusi, atau paling sedikit tidak menentang tercapainya Indonesia merdeka. Namun, salah satu ukuran yang menonjol dalam penyeleksian ini adalah dasar pendidikan *establishment* tersebut. Kabinet-kabinet yang pernah memerintah senantiasa memiliki rasio yang tinggi dari menteri-menteri tamatan universitas atau paling sedikit HBS (sekolah menengah). Pendidikan rupanya menjadi ukuran untuk memperoleh tempat penting selama pergerakan maupun pada masa revolusi dan sesudahnya. Hal ini jauh lebih penting daripada semangat, rasa nasionalisme yang lain. Hal ini membatasi dan memberikan ciri-ciri pada pimpinan revolusi dan politik Indonesia. Orang-orang yang berpendidikan tinggi biasanya berasal dari kalangan yang sudah berstatus sosial tinggi. Sukarno merupakan bagian dari elite ini dan juga merupakan tokoh unik di dalamnya.

Penutup.

Yang demikian menyolok mengenai Sukarno adalah bahwa ia berdiri sendirian, tidak dikelilingi oleh kawan-kawan seperjuangan yang sebanding. Sukarno tidak memiliki tangan-kanan dan tangan-kiri yang terpercaya, kecuali (mungkin) pada akhir-akhir kekuasaannya. Subandrio pun bukan *alter-ego* yang sebenarnya. Untuk itu, Sukarno sudah terlalu lanjut usianya. Pada akhirnya, Sukarno hanya memiliki sekutu-sekutu, fraksi-fraksi, teman atau pengikut serta para pengagum dan bukannya partner. Rencana partai pelopor masa kekuasaannya juga sudah terlambat untuk direalisir. Seperti pada awal karir politiknya, maka, dalam detik-detik terakhir kekuasaan dan hidupnya, Sukarno berdiri lagi. Sendirian. Ada semacam keagungan melihat tokoh revolusi ini mencoba memberikan arah kepada jalannya revolusi. Tetapi, di sana ia berdiri Sekali lagi sendirian, di tengah segala arus umum menentangnya. Di mana tempat Sukarno dalam sejarah? Kita ikhlaskan saja kepada sejarah untuk membicarakan itu. Untuk sementara, orang hanya dapat menilai peranannya.

CATATAN

*. Dalam mempersiapkan tulisan ini, saya mengadakan wawancara dengan Dr. Mohamad Hatta, Dr. Ruslan Abdulgani. Juga mengadakan serangkaian diskusi mengenai Sukarno dengan tokoh seperti Sudjatmoko, Karjoso SH dan lain-lain. Kepada mereka saya mengucapkan terima kasih untuk segala macam bantuan. Namun, segala pendapat dalam tulisan ini adalah tanggung jawab saya sendiri.

1. Bernhard Dahm, *Soekarno En De Strijd Om Indonesie's Onafhankelijkheid*, (terjemahan dari Bahasa Jerman) J.A. Boon & Zoon-Meppel, 1964.
   Biografi Sukarno lain adalah: J.D. Legge, *Sukarno, A Political Biography*, Pelican Book: Political Leaders of Twentieth Century.
2. B. Dahm, *op. cit.*, hlm. 41.
3. B. Dahm, *op. cit.*, hlm. 49-53.
4. J.D. Legge, *op. cit.*, hlm. 57-58. Ketika berumur 16 tahun, Hatta sudah menjabat bendahara *Jong Sumatranen Bond* di Padang. Sjahrir, sebelum berumur 20, sudah menjadi tokoh di Perhimpunan Indonesia. Tan Malaka, pada umur 20, sudah terkenal dan, sebelum umur 30, menjadi calon CPN (Partai Komunis Nederland) untuk *Tweede Kamer.*
5. Roger K. Paget, *Indonesia Accuses! Soekarno's Defence Oration in the Political Trial of 1930*, Oxford University Press, 1975, hlm. xxxi - xxxvi.
6. Lihat buku B. Dahm, *op. Cit.*
7. *Indonesia Menggugat*, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Penerbit khusus 168, hlm. 15.
8. *Ibid*, hlm. 16.
9. J.D. Legge, *op. cit.*, hlm. 79.
10. *Soekarno, Nationalsm, Islam and Marxism*, terjemahan: K.H. Warouw & Peter D. Weldon, dengan introduksi Ruth T. McVey, Cornell University Modern Indonesia Project Translation Series, Ithaca, N.Y., 1969.
11. *Indonesia Menggugat*, hlm. 104-105.
12. Ketika Moh. Hatta dicalonkan anggota Tweede Kamer oleh Partai Sosialis Nederland, ia dituduh meninggalkan prinsip-prinsip non-koperasi. Sebaliknya, ketika Sukarno keluar dari Partindo dan berada dalam

pembuangan, karena alasan-alasan untuk mendapat keringanan hukuman, pihak Hatta mengejeknya.

13. R. Paget, *op. cit.*, hlm. Lxix.

14. B. Dahm, *op. cit.*, hlm. 162.

15. Benedict R. O. G. Anderson, *Java In A Time Of Revolution*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1972, hlm. 124.

II. REFLEKSI SEORANG PERANAKAN MENGENAI SEJARAH CINA-JAWA

Untuk memahami secara lengkap sejarah orang-orang Cina-Jawa, latar belakang Indonesia perlu dipertimbangkan. Kajian mengenai orang Cina-Jawa itu sendiri tak dapat dilakukan seperti yang sering dilakukan di masa lalu.

Sejarah Cina-Jawa hingga kini selalu dimulai dengan pernyataan bahwa mereka datang ke Jawa lama sebelum kedatangan orang Belanda. Kenyataan ini hanyalah suatu keingintahuan sejarah dan tidak relevan untuk pemahaman mengenai masyarakat Cina-Jawa dewasa ini. Tak satu pun keluarga Cina di Jawa yang dapat menelusuri asal-usul keluarganya lebih awal daripada akhir abad ke-18 dan hanya sedikit keluarga yang telah tua saja yang dapat melakukan hal tersebut. Kebanyakan keluarga Cina-Jawa meniti asal-usul keluarganya sampai pada pertengahan abad ke-19. Lagi pula baru pada abad ke-20-lah wanita-wanita Cina beremigrasi dari Cina. Pemukim-pemukim Cina yang paling awal harus mengawini wanita-wanita setempat dan kebanyakan dari anak-cucu mereka terserap oleh penduduk setempat. Seorang sarjana Belanda yang bernama Lekkerkerker menyatakan bahwa kira-kira 80% dari penduduk pantai utara Jawa berdarah Cina.

Akan tetapi, akhir abad ke-18 tampaknya telah merupakan tahap yang penting dalam perkembangan masyarakat Cina-Jawa. Orang-orang Cina-Jawa mulai semakin menikah di antara mereka sendiri. Bahkan pendatang baru yang tak banyak itu berusaha mencari pasangan hidupnya di antara wanita-wanita Cina-Jawa. Singkatnya, suatu masyarakat Cina-Jawa mulai tumbuh dan mengonsolidasi dirinya. Gejala ini sangat erat berhubungan dengan perkembangan kekuasaan kolonial Belanda di Jawa. Setelah tahun 1755 (perjanjian Gianti, yang memisahkan Kerajaan Mataram menjadi tiga kerajaan kecil) Belanda menjadi kekuasaan politik yang paling dominan di Jawa.

Kolonialisme Belandalah yang mengakhiri proses asimilasi orang-orang Cina-Jawa dan yang sebaliknya memungkinkan tumbuhnya minoritas asing yang mendominasi masyarakat Jawa. Sejarah kolonialisme Belanda di Jawa dapat dibagi ke dalam dua periode: periode pramodern dan periode modern. Jika perjanjian Gianti

tahun 1755 memungkinkan perkembangannya kolonialisme Belanda yang modern, sesungguhnya hal itu baru dimulai sejak tahun 1830. Tahun 1830 dapat dianggap sebagai garis batas periode pramodern dan modern kolonialisme Belanda. Selama masa itu, perlawanan orang-orang Jawa yang terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830) baru berakhir dan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (1830 – 33) memperkenalkan sistem tanam-paksa (1830 – 70).

Jadi, tulisan ini akan membuktikan bahwa sejarah orang Cina-Jawa sangat berkaitan erat dengan perkembangan kolonialisme. Untuk itu, pertama akan ditelaah evolusi dari kata "peranakan" (Indonesia/Cina) dan kemudian sejarah orang-orang Cina Jakarta sebagai model yang dapat membantu untuk melihat hubungan-hubungan antara orang-orang Belanda dan Cina di Indonesia. Bagi periode sebelum tahun 1830, yang penting juga adalah bahwa orang-orang Cina, selain bisnis semata, juga memainkan peranan lain. Kadang-kadang mereka terlibat dalam politik yang akan juga dibahas di sini. Selama periode modern kolonialisme, perhatian juga akan dipusatkan terutama pada ekonomi orang-orang Cina-Jawa, sumber-sumber kesejahteraan mereka, dampak ekonomi mereka terhadap struktur masyarakat dan aspirasi-aspirasi seperti yang dicerminkan dalam konflik mengenai aturan-aturan masyarakat. Akhirnya, akan dibahas pula perubahan-perubahan dan perkembangan mereka selama abad ke-20.

Peranakan

Kira-kira permulaan abad ke-18, Ong Tae-hae, seorang pelancong Cina di Jawa menulis kepada kompatriotnya:

> Bila orang-orang Cina telah berada di rantau untuk beberapa generasi tanpa kembali pulang ke tanah leluhurnya, mereka sering lupa ajaran-ajaran kebijaksanaan kita (Cina); dalam bahasa, makanan dan berpakaian, mereka meniru cara-cara penduduk pribumi; dan dalam mengkaji buku-buku asing, mereka tidak segan-segan menjadi orang Jawa dan menyebutkan diri mereka Muslim ....[1)]

Orang Belanda punya suatu istilah bagi Cina Muslim yaitu "peranakan" dan sering menggunakan istilah-istilah yang kurang enak; menyebut mereka "Cina sukuran". Pada abad ke-18, simbol utama orang-orang Cina adalah kucir mereka dan orang Cina yang

menjadi Islam harus memotong kucirnya. Dari sinilah timbul istilah "Cina cukuran". Tak meragukan bahwa ada juga "sesuatu" yang kurang nampak yang juga harus dipotong, akan tetapi, kucir adalah yang paling nampak. Jelaslah Cina Islam masih dianggap asing oleh orang-orang Belanda, asing dalam arti berbeda dari Muslim lain seperti Muslim Indonesia. Sampai 1830, orang Cina Muslim masih memiliki "Kapitan" atau kepala bagi mereka sendiri, yaitu Mohammad Jafar, yang meninggal pada tahun itu. Sejak itu tak ada lagi kepala baru yang diangkat untuk orang-orang Cina Muslim karena mereka dianggap berasimilasi dengan penduduk Islam setempat dan karena itu tidak memerlukan seorang kepala untuk masyarakat mereka sendiri.

Istilah "peranakan" sejak itu secara khusus digunakan untuk orang Cina kelahiran setempat, atau istilahnya sekarang: WNI. Istilah peranakan biasanya dipakai untuk membedakan mereka yang lahir setempat dari singkeh (pendatang baru atau orang Cina yang lahir di Cina). Karena itu, akhir abad ke-18 atau permulaan abad ke-19 dapat disebut sebagai periode yang memperlihatkan konsolidasi masyarakat peranakan atau Cina-Jawa yang dapat dibedakan dari, baik penduduk setempat, maupun orang Cina kelahiran asing. Selama abad ke-19, kebanyakan dari pendatang baru diasimilasi ke. dalam masyarakat peranakan dan baru akhir abad ke-19, ketika arus migrasi yang besar dari Cina, peranakan dan singkeh sesungguhnya dapat dibedakan.

Sampai akhir abad ke-19, dapat dikatakan bahwa para peranakan terisolasi dari tanah asal-usul leluhurnya: Cina. Pada waktu itu komunikasi masih sulit. Wanita tidak beremigrasi dalam jumlah yang berarti sampai digunakannya kapal uap. Lagi pula, Dinasti Ch'ing yang memerintah Cina pada waktu itu merupakan pendukung yang paling tegar terhadap leluhur. Para emigran dianggap telah mengabaikan kuburan leluhurnya, berkhianat terhadap konfusian dan dinasti. Pemerintah Kerajaan Cina memutuskan segala ikatan dengan Cina perantau. Ketika duta Belanda atau Spanyol datang ke Istana di Peking dengan penjelasan dan pembelaan atau permintaan maaf atas pembunuhan besar-besaran orang Cina di abad ke-18, Pemerintah Cina menolak masalah tersebut dan menganggapnya tidak relevan dengan persoalan Cina. Kembalinya orang-orang Cina perantauan ke Cina secara resmi dianggap sebagai kriminal atau penjahat dan dihukum atau jika tidak, diperas oleh Cina Mandarin. Sikap resmi dari Pemerintah Kerajaan Cina yang

demikian ini baru berakhir pada akhir abad ke-19. Selama dasawarsa terakhir abad ke-19, dinasti yang telah melemah dan terancam itu mencoba untuk memperoleh bantuan keuangan dan lainnya dari Cina perantau.
Mungkin terdapat beberapa alasan kuat bagi keluhan Ong Tae-hae mengenai para pemukim yang lama berada di luar negeri, dirusak oleh cara-cara asing dan sikap dinasti Ch'ing terhadap emigran Cina sebagai non-filial dan secara automatis sebagai penghianat terhadap Cina. Dampak lingkungan setempat terhadap Cina-Jawa merupakan faktor utama. Kebanyakan dari mereka adalah turunan campuran. Makanan mereka bersifat sangat Jawa meskipun mereka tetap mempertahankan babi dalam menu makanan mereka. Agama populer peranakan biasanya bercampur dengan corak sinkretik Islam (abangan), dunia dukun serta magis. Keluarga Cina-Jawa tidak mempergunakan bahasa Cina, biasanya mereka tak mengetahui bahasa leluhurnya setelah tiga generasi di Jawa dan diganti dengan logat asli atau bahasa daerah (*vernacular*), di kota-kota besar bercampur dengan bahasa Melayu dengan beberapa kata Cina. Di mata orang Belanda dan Indonesia, para peranakan dianggap sebagai orang asing dan mudah dibedakan. Mereka punya nama Cina, mereka berkucir sampai tahun 1911, mereka makan babi dan di rumah mereka memiliki meja sembahyang untuk para leluhur. Lagi pula terdapat biara-biara Cina, di mana kadang-kadang saja mereka berziarah, serta terdapatnya kuburan-kuburan Cina.

Orang-orang Cina di Batavia

Masyarakat Cina-Jawa yang paling tua di bawah pemerintahan Belanda adalah di Batavia. J.P. Coen pendiri kota Batavia menangkap beberapa ratus orang Cina dari Banten ketika ia menyerang daerah tersebut dan membawa mereka ke markas besar VOC yang baru didirikan. Ini bukan satu-satunya contoh dari cara Coen mengisi kotanya yang baru dengan orang-orang Cina dari pantai Cina Selatan dan menahan perahu-perahu Cina di tengah lautan (lautan bebas) untuk mengambil orang-orang Cina tertentu, seperti tukang kayu dan para tukang lainnya sebagai tahanan untuk dibawa ke Batavia. Apa yang nampak bagi kita sekarang sebagai cara yang tidak lazim untuk mengisi ibu kota yang baru didirikan, pada waktu itu merupakan suatu kebijaksanaan yang biasa bagi penguasa-penguasa baru di Asia Tenggara. Ibu kota Banten,

Mataram dan berbagai kerajaan kecil lain dengan cara sama diisi dan diperkuat dengan menekankan "emigrasi" ke tempat-tempat tersebut. Akan tetapi, dengan perkembangan Batavia sebagai pusat perdagangan, kapal-kapal Cina dan emigran datang secara suka-rela ke sana, tertarik oleh kesempatan ekonomi yang ada.

Baru sepanjang abad ke-17 pedagang-pedagang besar, biasanya pemilik kapal-kapal atau bekas kapten-kapten kapal, membentuk sekelompok kecil elite pemukiman Cina di Batavia. Hal ini juga yang terjadi seperti di Banten dan tempat-tempat lain di Jawa. Kemudian para tukang dan penjaja datang menyusul pedagang-pedagang kaya. Dari awal mula memang telah terdapat pengertian antara orang Belanda dan Cina; keduanya datang ke Jawa karena alasan-alasan ekonomi, khususnya bagi kepentingan perdagangan. Karena itu, orang Belanda segera berpaling pada orang Cina sebagai pasangan dagangnya yang utama di kepulauan itu. Kebijaksanaan politik Belanda terhadap orang Cina, di awal-mula, mencerminkan hal itu. Orang-orang Cina segera cocok dengan kerangka acuan Belanda. Orang-orang Cina di Batavia dinyatakan sebagai warga kota. Dalam perjanjian dengan pengeran-pangeran Jawa, Kompeni mencoba menuntut jurisdiksi orang-orang Cina. Hal ini merupakan salah satu tujuan praktis; dengan menyatakan orang-orang Cina sebagai masalah Kompeni, mereka akan berada di bawah hukum Belanda, termasuk aturan-aturan komersialnya. Khususnya dari salah satu segi hukum dagang, tuntutan kreditor atas kekayaan, merupakan motif utama bagi kebijaksanaan ini. Sesungguhnya sudah sejak awal, secara hati-hati Belanda mencoba menjamin diri mereka terhadap segala jenis kecelakaan dan kecurangan yang diperbuat oleh orang-orang Timur. Dengan kata lain, status kewarganegaraan Belanda bagi orang Cina hanyalah mempunyai motif perdagangan (komersial) dan tak ada hubungan dengan politik atau hukum.

Di Batavia, sebagaimana halnya di tempat-tempat lain di Indonesia, orang-orang Cina mempunyai kepala masyarakat sendiri dan hidup dalam daerah yang terkenal dengan nama pecinan.

Hal ini menunjukkan lagi bahwa betapa persoalan kewarganegaraan merupakan hal yang kedua bagi orang Cina di Batavia. Kapitan orang-orang Cina ditunjuk sebagai opsir (*officer*) bangsanya. Para opsir terdiri dari seorang kapitan, letnan dan kepala kampung. Baru kemudian pada abad ke-19 sebuah pangkat tambahan ditambahkan bagi kota-kota besar yaitu mayor. Para opsir itu

ditunjuk Belanda dan secara teknik tidak dapat dianggap sebagai wakil yang sah dari masyarakat Cina. Akan tetapi, para opsir Cina biasanya merupakan orang yang sangat kaya di antara orang-orang Cina lainnya dan kekayaan biasanya merupakan suatu ukuran akan penghargaan yang tinggi dan pengaruh di antara orang-orang Cina-Jawa. Di abad ke-17, bekas-bekas kapten kapal (nahkoda) dan pemilik-pemilik kapal ditunjuk sebagai opsir Cina oleh Belanda. Wewenang dan pengaruh merupakan pertimbangan Belanda ketimbang sebagai wakil yang sah.

Para opsir ini menjelaskan dekrit Belanda dan peraturan-peraturan yang ada terhadap masyarakat Cina, menangani masalah-masalah administrasi pemerintahan seperti pencatatan kematian, kelahiran, perkawinan dan pendatang-pendatang baru. Lebih penting adalah bahwa mereka sering bertindak sebagai penjamin utang dan kredit yang diberikan kepada pedagang-pedagang Cina. Mereka juga memberi saran kepada pemerintah mengenai hukum atau aturan-aturan Cina, kebiasaan-kebiasaan serta aspirasi-aspirasinya. Dengan adanya konsolidasi dan mantapnya masyarakat Cina, posisi para opsir cenderung menjadi bersifat setengah turun-temurun sebagaimana halnya kekayaan mereka diwariskan terhadap anak-cucu dan negeri mereka. Posisi-posisi para opsir tetap dipegang oleh keluarga yang sama kayanya. Posisi dari keluarga peranakan Cina yang kaya sebelumnya merupakan satu dari sifat bangsawan di dalam masyarakat Cina lebih daripada sifat feodal atau birokratik sebagaimana halnya yang terjadi dengan para keluarga priyayi Jawa.

Sampai tahun 1740, lingkungan Batavia sangat ramah terhadap orang-orang Cina. Mereka menyebar ke seluruh kota, beberapa di antaranya menjadi petani di Tangerang dan sebagian lain mendirikan pabrik gula kecil dan industri lainnya di sekeliling kota Batavia. Sampai tahun 1740 tersebut, tak ada hukum atau peraturan yang memaksa orang-orang Cina tinggal terpisah dalam lingkungan tersendiri. Jika kebanyakan Cina tinggal bersama di daerah Pecinan, hal itu merupakan pilihan mereka sendiri. Situasi ini berubah ketika terjadi pembunuhan orang-orang Cina secara besar-besaran pada tahun 1740 yang mempunyai akibat traumatik terhadap hubungan Cina-Belanda. Sejak kejadian yang begitu sering dilukiskan dan yang tidak memerlukan pembahasan lebih lanjut di sini, pemerintah kolonial kadang-kadang sadar akan masalah Cina.

Orang-orang Cina dalam Politik

Pada umumnya, orang-orang Cina tidak melibatkan diri mereka sebagai suatu kelompok politik selama periode ini. Namun, ada satu kekecualian. Pembunuhan orang-orang Cina di Batavia pada tahun 1740 menjurus kepada apa yang disebut dengan perang antara Cina-Belanda yang melibatkan pula Kerajaan Mataram. Di Mataram timbul kelompok yang mendukung orang-orang Cina atau lebih baik dikatakan bahwa timbul kelompok anti-Belanda yang melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk menghalau pengaruh VOC. Anggota Susuhunan diganti oleh calon yang berasal dari kelompok yang anti-Belanda, yang disebut Susuhunan Kuning. Pada akhirnya, Susuhunan Kuning dapat dikalahkan oleh penguasa sah yang mendapat dukungan Belanda. Kecuali satu selingan singkat ini, orang-orang Cina tidak pernah menyaingi Belanda untuk kekuasaan politik di Jawa.

Akan tetapi, sebagai individu, ada beberapa orang Cina kaya yang mencoba memperoleh posisi politik. Yang menonjol di antara mereka adalah keluarga Han dari Surabaya. Selama masa peralihan pemerintahan Inggris (1811-1816), Gubernur Jenderal Raffles menjual Kabupaten Besuki kepada Kapitan Cina di Surabaya. Keberhasilan perjanjian ini membawa saudara muda Han yang sementara itu telah mengganti kakaknya sebagai kapitan Cina di Surabaya membeli Kabupaten Banyuwangi. Penjualan kedua kabupaten itu bukanlah sekadar merupakan penjualan tanah, akan tetapi termasuk juga hak warisan dari kedua distrik di Jawa Timur itu; termasuk hak-hak, titel-titel dan hak-hak istimewa tertentu dari seorang Bupati Jawa harus menjadi milik kedua Han bersaudara. Kekuasaan bupati pada waktu itu masih sangat berarti. Kekuasaan ini mencakup hak pemajakan, kerja paksa, kekuasaan polisi dan sebagainya. Singkatnya, kedua saudara Han tersebut dalam kenyataannya menjadi pangeran yang punya hak turun-temurun dengan anak tertua yang akan melanjutkan pemilikan tanah dan titel-titel bupati.

Saudara Han yang pertama tampaknya membeli kawedanaannya terutama untuk tujuan-tujuan bisnis. Berlainan dengan adiknya di Banyuwangi yang mengambil gaya dan titel-titel dari keluarga bupati yang terdahulu, memamerkannya beserta pusaka-pusaka tradisional, perhiasan-perhiasan kantor dan menghendaki penghormatan yang sama dari masyarakat sebagaimana yang telah masyarakat tunjukkan kepada penguasa-penguasa Jawanya. Lagipula,

dalam usaha memenuhi harga tinggi yang dibayarkan untuk Kawedanan Banyuwangi, penguasa baru mulai menaikkan pajak-pajak. Akibatnya fatal; rakyat bangkit memberontak menentang bupati Cina, menewaskannya dan menyerang garnisun Inggris. Setelah kerusuhan ini, Pemerintah Inggris membeli kembali kabupatian itu, termasuk Besuki, dari keluarga Han. Demikian berakhir suatu petualangan besar seorang keluarga opsir Cina dalam membangun landasan politiknya di Jawa.

Penjualan tanah bupati oleh Raffles berawal pada penjualan tanah partikelir oleh VOC dan selama pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) kepada orang-orang Cina dan warga negara Belanda. Tuan-tuan tanah itu mempunyai kekuasaan yang hampir sama seperti Bupati. Akan tetapi, bagaimana juga mereka tidak mengambil gaya dan titel atau gelar bupati. Tanah-tanah ini terutama dibeli untuk tujuan bisnis dan bila tuan tanah meninggal, tanah tersebut dibagi di antara ahli waris. Penjualan tanah jenis ini berakhir sekitar 1830, ketika Pemerintah Belanda mengetahui apa yang diperbuat dengan tanah dan buruh di Jawa. Sebagaian bahkan dibeli kembali oleh pemerintah di akhir abad ke-19 dan di abad ke-20.

Jika peranan orang-orang Cina di dalam politik tidak begitu berarti sebagai suatu kelompok, hal itu tidaklah berarti bahwa tak ada individu yang mencoba karir politiknya. Terdapat para opsir dan atau pejabat Cina kaya, lain di istana kerajaan yang mengambil muka pangeran yang memerintah, melayaninya, memperoleh gelar bangsawan dan pengaruh yang tinggi. Di tingkat masyarakat yang lebih rendah, kadang-kadang terdapat orang-orang Cina yang berkedok haji yang punya posisi sebagai guru dan yang menampilkan diri mereka kepada masyarakat sebagai "Ratu-adil". Juga terdapat beberapa orang Cina petapa yang selama hidup mereka dihormati sebagai guru dan yang kuburannya sampai sekarang merupakan tempat ziarah, baik bagi orang Cina maupun orang Jawa.

Suatu pola yang lebih umum adalah persekutuan antara kepentingan bisnis Cina dengan keluarga-keluarga elite Jawa setempat. Sampai pertengahan abad ke-19, hal itu kadang-kadang berbentuk perkawinan timbal-balik di kalangan para pegawai istana dengan keluarga bupati. Belanda biasanya sangat peka terhadap hubungan demikian dan mencoba menghalangi atau bahkan melarang. Pada permulaan 1850, pemerintah kolonial pernah membatalkan kerja

sama sejenis; antara kepentingan bisnis Cina dan pengaruh politik priyayi di Pasuruan. Setelah menemukan terdapatnya perdagangan gelap candu yang dikontrol oleh beberapa keluarga Cina kaya di Pasuruan yang berhubungan dengan priyayi setempat yang mengendalikan polisi, Belanda kemudian mengirim kapal meriam, menahan dan mengasingkan orang-orang Cina ke Ambon serta memecat pegawai-pegawai Jawa.
Kasus Pasuruan merupakan yang paling spektakuler mengenai kerja sama yang paling erat antara orang-orang Cina dan elite Jawa. Biasanya, hubungan antara orang Cina kaya dan priyayi setempat mengambil bentuk persekutuan yang akrab, kesetiakawanan, hadiah-hadiah dari Cina kepada priyayi, pinjaman uang dan sebagainya. Umumnya dapat dikatakan bahwa para pedagang Cina kaya dan mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut mempunyai kepentingan besar yang sama yang didasarkan atas syarat-syarat baik dengan elite Jawa setempat sebagaimana halnya dengan Belanda. Akan tetapi, dengan tumbuhnya Pemerintah Belanda dan merosotnya posisi priyayi, kebutuhan untuk mempertahankan kesenangan bupati menjadi semakin kurang dibutuhkan. Hubungan-hubungan perkawinan, sebagai contoh, tampaknya telah berakhir kira-kira sekitar pertengahan abad ke-19. Para priyayi sendiri, dengan ketakutan yang besar terhadap Belanda, mungkin telah mengerti bahwa hubungan yang erat dengan orang-orang Cina tak begitu menguntungkan. Secara politik, sosial maupun rasial, semakin ada stratifikasi pada masyarakat Indonesia di waktu itu.

Pembatasan-pembatasan Sistem Tanam Paksa

Sistem tanam paksa (1830-1870), pada dasarnya merupakan suatu sistem pemilikan dan perkebunan negara yang membuat Jawa menjadi suatu koloni yang bermanfaat. Perkebunan negera membutuhkan buruh dalam jumlah yang besar. Sekitar 65% sampai 75% petani Jawa yang tinggal di daerah perkebunan harus bekerja sebagai buruh untuk sistem tanam paksa itu. Pemerintah kolonial memandang para petani sebagai kekuatan buruh dan karena itu harus dilindungi dari akibat-akibat yang jelek dari ekonomi modern. Sejak orang-orang Cina merupakan kelompok pedagang yang utama dengan kehadirannya di daerah pedalaman Jawa, Pemerintah Belanda mulai mempertanyakan apakah mereka membahayakan atau tidak. Para pedagang Cina dan para penjaja

kadang-kadang dipandang sebagai pengaruh yang merusak harga pasar, kebutuhan konsumsi dan ekonomi petani pada yang umumnya begitu banyak dipompa ke arah kebutuhan dari perkebunan-perkebunan negara. Di pihak lain, Belanda mempunyai kepentingan atas kehadiran orang-orang Cina di pedalaman Jawa dengan alasan yang akan dijelaskan kemudian. Kepentingan ganda pemerintah kolonial ini mengakibatkan pembatasan sebanyak mungkin gerakan orang-orang Cina di Jawa namun juga larangan terhadap mereka untuk berkumpul.

Sejak 1740, orang-orang Cina secara resmi dipaksa untuk tinggal di lingkungan terpisah dalam setiap kota yang diawasi Belanda atau pecinan. Akan tetapi, aturan mengenai pecinan tidak selalu dijalankan secara ketat dan kebanyakan bergantung kepada tingkah dan pandangan pejabat-pejabat Belanda setempat. Mengenai peraturan pecinan, tertera satu kalimat baru: "... jika situasi setempat tidak menghendaki lain ...." Di tahun 1830, banyak orang Cina yang tinggal di luar daerah pecinan dan pemerintah harus menginstruksikan peraturan yang ketat mengenai ketentuan-ketentuan pecinan itu. Tampaknya perintah ini tidak dilaksanakan dengan sukses karena sangsinya ringan. Sepanjang abad ke-19, kita selalu menemukan teguran dan perintah dari Batavia untuk menterapkan hukum yang lebih tegar di pecinan. Namun demikian, pejabat Belanda setempat tampaknya selalu berhak mengambil keputusan akhir dengan melihat kepada sistem setempat.

Akibat kebijakan ini terhadap stabilitas pola pemukiman Cina adalah besar. Orang Cina tidak pernah lama tinggal di luar pecinan. Lagipula, selama abad ke-19 banyak terdapat perubahan mengenai batas teritorial pemerintahan Jawa, kota, kabupaten dan sebagainya dengan dampak pada jumlah pecinan yang dirancang sejak lama, di mana hanya kota kabupaten yang punya daerah pecinan. Jadi, dari waktu ke waktu, orang Cina yang tinggal di luar daerah pecinan atau di daerah pecinan di kota kabupaten yang baru dirancangkan digiring ke arah tempat-tempat tersebut. Bahkan pejabat-pejabat Belanda mengeluh karena penafsiran hukum yang begitu ketat atau karena dibuatnya kembali batas-batas administratif yang baru, orang-orang Cina yang telah tinggal selama dua atau tiga generasi di satu tempat harus menyingkir dari rumah mereka. Jelas bahwa hal ini melibatkan banyak kesulitan, kerugian ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan dalam pola pemukiman dan yang sangat tidak merangsang penciptaan kesetiaan setempat dan

ikatan di antara orang-orang Cina dengan tempat mereka. Akibat tersebut masih dapat dilihat sampai sekarang di beberapa tempat sepanjang pantai utara Jawa. Di luar daerah pecinan atau kota, dapat kita temukan kuburan atau kuil Cina yang bagus.

Yang kedua setelah sistem tempat tinggal adalah sistem surat jalan yang membatasi pergerakan orang-orang Cina di pedalaman Jawa. Orang-orang Cina yang akan bepergian di luar daerah pecinan memerlukan surat jalan untuk bepergian. Benar bahwa surat jalan biasanya diberikan atas dasar permintaan, akan tetapi mereka toh harus mengajukan permintaan. Bukan saja diperlukan waktu untuk meminta surat jalan akan tetapi juga untuk kontak atau berhubungan dengan para pegawai, akan timbul masalah bagi para pendatang baru atau bagi mereka yang tidak mengetahui bahasa setempat dan kadang-kadang diminta pula biaya administrasi. Surat jalan juga merupakan masalah bagi orang Cina yang tinggal dalam kota-kota besar yang semrawut seperti Batavia. Seorang Cina yang tinggal di Glodok, misalnya, memerlukan pas-jalan untuk pergi ke Senen atau Jatinegera (sekarang dalam batas kota) yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat dagang (akhir abad ke-19) akan tetapi, masih di luar batas kota yang wajar. Banyak yang memang mengabaikan pembatasan-pembatasan bepergian ini, khususnya untuk jarak pendek dan yang berwenang kadang-kadang membiarkannya. Ketaatan pada sistem surat jalan itu sangat bergantung pada pejabat atau pegawai setempat. Lagi pula pemerintah pusat, Batavia, nampaknya lebih suka ketaatan yang penuh terhadap aturannya dari waktu ke waktu memperingatkan para pegawai setempat untuk memelihara atau menjaga aturannya mengenai bepergian secara lebih ketat.

Sesungguhnya, adalah salah untuk melihat pembatasan gerakan orang-orang Cina di Jawa dari segi hukum atau aturan sistem tempat tinggal dan bepergian. Pemerintah Belanda sendiri maupun bisnis swasta mempunyai suatu kepentingan mengenai kebebasan bergerak orang-orang Cina di pedalamaan. Sebagai contoh, pemerintah bergantung kepada penerimaan bagian yang penting dalam menyerahkan monopolinya atas penjualan candu, rumah gadai, pembuatan garam, perahu tambang, pajak pasar dan lain sebagainya kepada orang Cina. Orang Cina yang terlibat dalam pendapatan pemerintah untuk usaha tani seharusnya tinggal di pedalaman dan harus diberi kebebasan bergerak. Dengan kata lain, ada kekecualian yang dibuat terhadap orang Cina yang merupakan

pemegang sewa pajak hasil bumi pemerintah. Karena mereka membawa keuntungan bagi usaha pemerintah, mereka harus dapat bergerak secara leluasa. Orang-orang Cina yang membawa keuntungan bagi usaha pemerintah diberi keleluasaan bergerak di Jawa.

Namun demikian, hal itu membawa pemerintah untuk memandang orang-orang Cina sebagai hal buruk yang diperlukan. Pada pertengahan abad ke-19 pemerintah mengambil alih pengumpulan pajak, pajak pasar, pengumpulan pajak kapal tambang, pembuatan garam dan sebagainya. Akan tetapi, penjualan candu dan rumah gadai masih tetap di tangan orang-orang Cina sampai permulaan abad ke-20. Jadi, sampai di mana diizinkan atau dibatasinya ruang gerak orang-orang Cina di pedalaman Jawa merupakan dilema bagi pemerintah. Setelah 1870, dengan berakhirnya sistem tanam paksa, bisnis partikelir Belanda menjadi bertambah lebih penting dan karena itu perlu dijelaskan di sini. Distribusi barang-barang impor Belanda ke daerah pedalaman kemudian tergantung pada pengecer-pengecer Cina. Kebebasan gerak orang-orang Cina di pedalaman Jawa masih tetap di bawah tekanan kepentingan Belanda yang berbeda sampai pemerintah kolonial menentukan untuk menghapuskan sepenuhnya sistem pemukiman dan surat jalan pada dekade kedua abad ke-20.

Kesejahteraan dan Struktur Masyarakat Peranakan

Sistem penyewaan monopoli perkebunan negara tidak hanya menguntungkan pemerintah saja akan tetapi juga orang-orang Cina yang memegang hak sewanya. Kenyataannya, selama abad ke-19, hasil pajak sewa dari pemerintah merupakan sumber utama kekayaan orang-orang Cina dan kegiatan bisnisnya. Dampaknya terhadap struktur masyarakat peranakan sangat besar. Penguasa Belanda cenderung menjual tanah perkebunan-atas-sewa negara kepada keluarga-keluarga pegawai Cina yang kaya. Keluarga-keluarga pegawai Cina yang kaya merupakan orang-orang yang paling dipercayai oleh Belanda dan yang dikenal kepercayaan serta kemampuan mereka. Permainan curang pegawai Cina juga kurang mungkin. Lalu, untuk apakah orang Belanda takut terhadap gagasan monopoli candu? Harga perkebunan candu sangat bergantung pada ada tidaknya perdagangan gelap candu. Pemegang sewa monopoli candu dapat dilibatkan pada candu gelap dalam usaha untuk mempertahankan agar harga monopoli tetap rendah

dan dengan memperoleh keuntungan maksimum. Sementara itu, sebagian dari para petani candu bertanggung jawab dalam mengatur kebijaksanaan mengenai perdagangan candu. Pemerintah pun punya taktik sendiri. Jelas bahwa penjualan candu gelap sangat ditindak, secara keras dan mengakibatkan kerugian posisi serta kepercayaan terhadap seluruh keluarga. Para pegawai Cina yang bonafid tidak mungkin akan terlalu terlibat dalam persekongkolan demikian untuk menentang monopoli pemerintah. Mereka akan memilih pendapatan yang tetap daripada keuntungan besar dan cepat dengan risiko yang besar. Singkatnya, orang perlu mempunyai hubungan yang baik dengan Belanda sebelum ia dapat memperoleh hasil dari pemerintah yang, dalam teori, dilelang secara terbuka untuk menjaga harga dan mengontrol kemungkinan pemihakan dan persekutuan menentang pemerintah.

Di samping keuntungan yang besar dari pajak pertanian pemerintah, pemegang sewa memperoleh keuntungan tambahan dari sistem tersebut. Para petani dapat bergerak secara leluasa di dalam negeri sebagai agen monopoli pemerintah. Jadi, perdagangan dalam negeri dengan orang-orang Jawa di desa-desa dan kota-kota jatuh ke tangan para petani dan agen-agennya. Petani, pada waktu yang sama, merupakan pengecer barang-barang impor seperti tekstil dan komoditi lain sementara mereka juga memborong produk-produk petani dan menjualnya di kota-kota. Pinjaman uang juga berada di tangan mereka. Singkatnya, secara praktis, mereka menjadi penghubung antara orang-orang Eropa dan masyarakat Jawa dalam bidang ekonomi.

Seperti yang telah kita lihat, pejabat atau pegawai-pegawai Cina cenderung bersifat semi-keturunan dan karena tak banyaknya keluarga ini juga, dari generasi ke generasi, mereka memegang sumber-sumber kekayaan dan perlindungan dalam masyarakat peranakan seperti sewa-sewa atas tanah pemerintah, perdagangan dan pinjaman uang. Akan tetapi, keberuntungan keluarga biasanya terbagi rata di antara keturunan lelaki. Di sini, anak, saudara lelaki dan kadang-kadang bahkan ipar pegawai akan juga punya kesempatan untuk memperoleh tanah pemerintah. Biasanya berbagai anggota dari satu keluarga akan menggabungkan kekayaan mereka untuk membeli tanah yang disewa dari pemerintah. Namun demikian, kadang-kadang, terdapat halangan atau bahkan merosotnya keluarga-keluarga oleh karena beberapa kematian yang awal, keturunan yang masih kecil atau yang tanpa keturunan lelaki

sama sekali. Namun, terlepas dari kemungkinan yang hanya kadang-kadang saja terjadi ini, modal terhimpun di tangan sedikit keluarga. Hal ini menjelaskan bangkitnya kelas bangsawan kapitalis di antara masyarakat peranakan yang menginvestasikan lagi uangnya di didalam daerah pecinan. Bisnis merupakan dasar kelas kapitalis ini. Dan yang lain, seperti manufaktur, pertukangan, penjaga toko, penjaja dan lain sebagainya yang sesungguhnya terlibat di dalam usaha persewaan tanah pemerintah itu sendiri juga memperoleh manfaat daripadanya. Akan tetapi, tak seorang pun di dalam masyarakat Cina yang dapat menandingi kekayaan atau pengaruh keluarga-keluarga pegawai atau pejabat yang memegang tanah-tanah sewa lebih lagi ketika pengolahan tanah itu sendiri merupakan sumber sistem perlindungan kegiatan bisnis (perdagangan) di antara orang-orang Cina di pedalaman Jawa. Jadi, ini menjelaskan pengaruh dan kekayaan keluarga-keluarga para pegawai atau pejabat masyarakat peranakan di abad 19.

Dalam usaha untuk memahami posisi masyarakat peranakan di dalam masyarakat Indonesia, kita harus membandingkan perkembangan-perkembangannya secara singkat dengan perkembangan-perkembangan seluruh masyarakat Jawa. Jika elite masyarakat Cina merupakan para pengusaha, elite Jawa atau priyayi, di lain pihak, merupakan pejabat atau pegawai pemerintah yang bagi mereka, bisnis tidak merupakan daya tarik dan bahkan dikutuk sebagai tidak sesuai bagi para pejabat. Penolakan ini bahkan meluas sampai pada saudara-saudara mereka. Yang lebih penting adalah bahwa priyayi telah kehilangan tanah *estate* mereka sejak Belanda membujuk mereka untuk menerima gaji bulanan dalam bantuan uang dan menyerahkan tanah mereka kepada pemerintah. Di abad ke-19 tanah merupakan apa yang disebut milik komunal dan bukan milik pribadi.[2)] Hingga akumulasi modal melalui pemilikan tanah menjadi tidak mungkin. Juga orang-orang Jawa tidak dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi dengan menggunakan tanah mereka untuk menanam komoditi ekspor. Beras, hasil utama dari tanah sawah tidak pernah diizinkan menjadi komoditi perdagangan bebas di pasar. Lebih awal lagi, pada abad ke-19, orang-orang Jawa masih sangat terikat pada pembayaran upeti kepada priyayi, pesta komunal dan rendahnya upah buruh. Kemudian impor beras secara besar-besaran dapat menekan harga beras di Jawa. Dalam situasi ini, kapitalisme akan sulit tumbuh dari petani sebagai bagian komunitas hanya karena

tiadanya suatu dasar untuk menjamin kredit bisnis. Panen pertanian yang berharga rendah hanya cukup untuk memberikan kredit bagi keperluan-keperluan konsumtif dan tidak untuk investasi bisnis. Akhirnya, baik priyayi maupun orang Belanda tidak berkepentingan atau menaruh perhatian dalam melihat perkembangan kapitalisme di masyarakat Jawa.

Hukum dan Masyarakat

Tak satu pun menunjukkan mana yang lebih baik antara posisi-posisi berbeda yang dipakai oleh orang-orang Jawa dan Cina atau struktur hukum yang dibentuk oleh pemerintah kolonial terhadap tiap kelompok. Orang-orang Jawa diizinkan untuk tinggal terasing dari dunia modern di bawah hukum adat. Sejak kekuasaan VOC, orang-orang Cina, di satu pihak, dalam hal yang bertalian dengan bisnis, tergantung pada kode hukum Eropa. Undang-undang pidana sekali lagi adalah sama bagi orang Cina dan Jawa sementara bagi orang Eropa berbeda. Dalam masalah-masalah keluarga, orang-orang Cina diizinkan untuk tetap menggunakan hukum adatnya sendiri.

Jika pada saat VOC, orang-orang Cina bergantung kepada undang-undang Eropa oleh karena mereka dipertimbangkan oleh VOC sebagai "warga negara", hal ini berubah pada abad ke-19. Sebenarnya Kompeni telah mengumumkan orang-orang Cina sebagai warga negara dalam corak yang agak sembarangan dan bagi tujuan-tujuan pragmatis. Tak pernah hal itu dipikirkan secara serius. Konsepsi orang Belanda mengenai status kewarganegaraan sementara itu berkembang di bawah pengaruh kode hukum Napoleon dan Eropa. Akan tetapi, kebutuhan untuk membuat orang-orang Cina patuh terhadap undang-undang hukum dagang Belanda masih tetap sama seperti di abad ke-17 dan ke-18. Karena itu pembuat undang-undang *Regerings Reglement* (Konstitusi Hindia Belanda) tahun 1854 menyatakan bahwa orang-orang Cina, sebagai warga asing, tidak patut menerima hal-hal yang bertalian dengan hukum dan kebiasaan mereka seperti orang Jawa. Tidak seperti orang-orang Jawa, orang Cina harus menyesuaikan diri mereka terhadap undang-undang dan lembaga di Hindia Belanda. Kecuali alasan-alasan modern untuk membuat orang Cina dari "warga negera" menjadi orang asing, hasilnya sama; membuat orang-orang Cina patuh terhadap undang-undang hukum dagang Eropa. Pandangan salah seorang ahli hukum Belanda mengenai

masalah ini mungkin dapat lebih mengungkapkan bagaimana motivasi sesungguhnya orang Belanda sepanjang abad:

> Adalah kepentingan yang utama masyarakat Hindia Belanda agar orang Cina akan bergantung atau tunduk kepada hukum Belanda dengan melihat kepada masalah bisnis. Sebaliknya, orang-orang Eropa tak akan sanggup memasuki transaksi bisnis dengan orang-orang Cina .... [3)]

Sangat disayangkan bahwa sifat yang sepragmatis kebijaksanaan kolonial Belanda berakhir setelah pengaturan hukum dagang dan undang-undang pidana bagi orang Cina. Hukum keluarga dibiarkan seperti "kebiasaan" Cina. Di permukaan, ini tampaknya seakan-akan merupakan konsepsi terhadap orang-orang Cina, yang dilakukan demi penghormatan terhadap adatnya. Akan tetapi, kenyataannya adalah bahwa hukum keluarga Cina tidaklah menyentuh langsung kepentingan Belanda. Ini menjadi sepenuhnya jelas seperti yang ditunjukkan abad ke-19. Hukum keluarga Cina merupakan suatu yang tak berarti dan pemerintah kolonial tidak melakukan apa pun mengenainya kecuali mempertahankannya agar lebih semrawut dengan akibat yang membahayakan kehidupan keluarga dan masyarakat Cina.
Masalah utama yang muncul di sekitar masalah apakah hukum keluarga peranakan merupakan hukum adatnya? Apakah mereka mengikuti hukum Cina atau hukum adat peranakan? Kadang-kadang VOC mengajukan rencana undang-undang mengenai hukum keluarga Cina-Jawa, misalnya hak untuk mewarisi anak-anak perempuannya-undang-undang yang belum dicabut. Apakah ini akan diterima oleh Hindia Belanda sebagai hukum adat peranakan? Yurisprudensi Belanda selama abad ke-19 tidak selalu jelas dalam masalah ini. Kadang-kadang ditetapkan dalam cara ini, kadang-kadang pula ditentukan dengan cara lain. Dari permulaan abad ke-19 dan seterusnya, tampaknya, orang-orang Cina bersengketa secara hukum mengenai warisan. Hal ini menjadi bertambah sering dengan berkurangnya keluarga besar. Hampir tak ada warisan Cina yang besar yang tidak diganggu-gugat oleh beberapa pihak lain. Di akhir abad ke-19 seorang sarjana hukum Belanda serta pengacara yang terkenal: P.H. Fromberg pernah ditanya siapakah pewaris yang sah dari warisan seorang Cina. Jawaban-sinisnya atas masalah ini adalah: "yah, biasanya pengacara." [4)]
Salah satu masalah utama hukum keluarga Cina adalah tidak

terdapatnya catatan sipil. Jadi, masalah di sekitar hukum "adat" peranakan seperti anak yang sesungguhnya, pengakuan terhadap mereka, anak angkat, istri pertama, kedua atau ketiga, gundik dan anak-anaknya semuanya merupakan landasan hukum yang kabur sama sekali. Pada akhirnya, persoalan tersebut hanya dapat dipecahkan dengan membawa cerita-cerita "kamar tidur", kesetiaan dan ketaatan, tempat dan posisi dari mereka yang berkabung pada saat kematian maupun pada penguburan ke pengadilan. Cerita-cerita pengadilan etnografik ini belum menentukan apakah hukum adat peranakan adalah seperti perundang-undangan VOC. Hak anak perempuan untuk mendapat hak warisan, sebagai contoh, merupakan pertengkaran yang paling berat dan dituntut oleh anak-anak perempuan selama abad ke-19.

Seluruh masalah warisan ini mungkin dapat diselesaikan di antara orang-orang Cina itu sendiri jika lembaga pemerintah yang disebut *Boedelkamer* (semacam dewan pengawas untuk warisan-warisan; di sini disebut Dewan) tidak ada. Di abad ke-17, Belanda telah mendirikan Dewan ini untuk menjaga dan mengawasi warisan yang diturunkan kepada mereka yang belum dewasa. Pranata tersebut sebenarnya diperlukan dalam suatu masyarakat emigran yang baru dan berfungsi baik bagi Belanda maupun orang Cina. Karena itu Dewan juga mempunyai anggota orang Cina, tentu, sekali lagi, sebagai pejabat atau pegawai. Namun demikian, Dewan ini menjadi sangat tidak populer di masyarakat Cina ketika masyarakat Cina mengkonsolidasikan diri dan tak lagi menyebutkan diri mereka sebagai masyarakat pendatang. Orang peranakan merasa bahwa, sebagai halnya di Cina maupun di mana-mana di Indonesia, keluarga besar yang masih ada harus mengawasi warisan bagi anak-anak yang belum dewasa. Dewan itu kemudian dipandang sebagai keagenan negara yang mencampuri harta atau kekayaan orang Cina dan keluarganya. Celakanya, struktur keluarga orang-orang Cina sangat sering mencakup mereka yang belum dewasa. Hingga, Dewan itu dapat bertindak menuntut bagian dari warisan tersebut bagi para ahli waris yang belum dewasa. Ini sering berakibat dijualnya suatu usaha pada sangat awal dalam itikad untuk membagi harta warisan itu secara sama. Orang tua atau janda, serta ahli waris yang belum dewasa dapat dirampok hidup mereka begitu kekayaan mereka diawasi oleh Dewan yang dalam hatinya hanya mempunyai perhatian terhadap ahli waris yang belum dewasa, dan bukan kebiasaan lain. Kadang-kadang hal itu

nampak bahwa seakan-akan wakil-wakil Dewan begitu ketat mengawasi harta warisan yang dinyatakan untuk diawasi atau dipertengkarkan. Dalam ketiadaan ahli waris, Dewan akan menuntut harta warisan itu untuk digunakan rumah sakit bagi orang-orang Cina dan tampaknya negara seakan-akan mencoba memperkaya dirinya melalui tindakan Dewan. Ketidakpopuleran Dewan dalam beberapa hal dipakai oleh para peranakan untuk memperkuat alasan mereka agar bebas menentukan mana yang sesungguhnya merupakan ahli waris.

Kebebasan untuk Masalah Wasiat

Kebanyakan masalah hukum yang bertalian dengan warisan dan nasihat para pegawai Cina kepada pemerintah berkisar sekitar keabsahan testamen yang ditinggalkan oleh seorang Cina yang telah meninggal. Kebanyakan orang-orang Cina jika memiliki harta meninggalkan surat wasiat, yaitu menyatakan kehendaknya untuk menyerahkan hartanya seperti yang ia pandang sesuai. Di abad ke-18 para pejabat Cina telah mengajukan saran kepada Kompeni mengenai hak mutlak dari seorang pemberi wasiat untuk menyerahkan hartanya yang ia kehendaki. Mereka berpendapat bahwa di dalam keluarga Cina *pater-familias* merupakan suatu kewenangan mutlak. Kehendaknya adalah di atas segala pertimbangan hak-hak anaknya, adat peranakan, undang-undang Cina atau negara.

Akan tetapi, Belanda selalu agak enggan menerima hal ini sebagai aturan. Jurisprudensi mengenai masalah ini sekali lagi tak menentu. Sebagaimana biasa, Belanda mencurigai permainan curang di balik kehendak untuk kebebasan memberi wasiat. Karena anak yang memiliki utang-utang yang besar dapat sengaja tidak diberi hak waris hingga para kreditor akan tertipu mengenai tagihan mereka. Baik Belanda, hakim Belanda maupun pemerintah tidak dapat menerima kebebasan sepenuhnya dari orang-orang Cina untuk meninggalkan wasiat. Sementara itu orang Cina yang meninggalkan harta berkeinginan agar harta itu dipertengkarkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak mendapat warisan. Mungkin hal ini sendiri merupakan suatu petanda dari tumbuhnya keluarga inti di antara para peranakan.

Pada akhirnya, pemerintah bertanya pada sarjana atau ahli hukum dan teman orang Cina: Mr. P.H. Fromberg yang telah berkecimpung di dalam masalah-masalah Cina dan persoalan hukumnya, untuk memberi saran. Meskipun ia bersimpati kepada orang-orang

Cina, Fromberg menyatakan bahwa kebebasan untuk berwasiat bagi masyarakat peranakan secara praktis berarti hak anak sulung. Kebebasan untuk berwasiat, bagi Fromberg bukanlah merupakan hukum atau aturan peranakan maupun Cina. Hak anak sulung di antara peranakan akan mempunyai konsekuensi yang mendalam terhadap masyarakat Hindia Belanda. Baik orang Eropa maupun orang Islam, di lingkungan orang Cina yang tinggal di Hindia Belanda, mengenal hak anak sulung. Hukum adat Indonesia maupun Eropa memberikan imbangan yang sama dari harta warisan itu terhadap ahli warisnya. Jika Anda memberikan kebebasan berwasiat kepada orang Cina, hal itu tentu akan menjurus kepada hak anak sulung, yang berarti terdapatnya penumpukan modal di satu tangan dari generasi ke generasi. Hal ini akan menyebabkan bangkitnya suatu kelas kapitalis yang sangat kuat dan kaya dan berkuasa. Lagi pula, orang-orang Cina yang berharta akan dapat memborong segala tanah pribadi yang masih ada dan mempertahankan diri sebagai tuan tanah feodal di dalam satu tangan. Fromberg sangat menyarankan untuk menentang diterimanya kebebasan untuk berwasiat di antara orang-orang Cina.

Fromberg telah menemukan masalah Cina yang sesungguhnya. Sesungguhnya, aspirasi orang-orang Cina adalah mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan kekayaan sedapat mungkin di satu tangan atau sekurang-kurangnya di dalam satu keluarga. Hak anak perempuan terhadap harta warisan selalu tidak diakui, karena anak perempuan membawa harta mereka keluar keluarga setelah mereka kawin. Mereka selalu dihibur dengan peninggalan atau mas kawin yang besar jika mereka berasal dari keluarga kaya. Masih dalam usaha untuk mempertahankan harta kekayaan bahkan bagian yang terkecil dari yang meninggalkan keluarga, keluarga kaya biasanya melakukan perkawinan antar mereka sendiri.

Hal ini sangat benar bagi keluarga-keluarga yang merupakan para pejabat atau pegawai pemerintah yang kawin di antara mereka sendiri. Sampai hari ini, harta kekayaan yang meninggalkan keluarga, diharamkan oleh orang-orang Cina. Bahkan sampai sekarang, dengan tumbuhnya masalah bisnis peranakan, usaha yang khas Cina adalah usaha keluarga. Kadang-kadang orang luar yang dianggap sanggup dapat dipekerjakan oleh suatu bisnis

keluarga, akan tetapi promosi sepenuhnya bergantung atas apakah ia mengawini salah satu anggota famili atau tidak. Jadi, bila hukum gagal mengatur sesuatu secara memuaskan, masyarakat akan menjaganya sebaik mungkin.

Pada akhirnya, pemerintah menjadi sadar mengenai keadaan hukum keluarga orang Cina yang semrawut meskipun orang-orang Cina sendiri melakukan yang terbaik untuk mengurangi keadaan itu dengan sistem perkawinan. Pemerintah meminta Fromberg untuk merancang suatu peraturan mengenai hukum keluarga peranakan. Fromberg telah lama merupakan kawan orang Cina dan telah menulis banyak mengenai masalah-masalah hukum keluarga peranakan.[5] Akan tetapi, bukan rancangan usulnya mengenai hukum keluarga Indo-China yang diterima pemerintah. Rancangan usulnya terlalu banyak berlandaskan atas hukum keluarga sebelum revolusi (1911). Kejadian-kejadian revolusioner di Cina menyusul kemudian. Sebaliknya, di tahun 1917 pemerintah menyatakan bahwa para peranakan atau orang-orang Cina harus tunduk kepada hukum keluarga Eropa dengan kekecualian pada hukum adopsi yang diatur terpisah buat orang Cina. Pada waktu yang sama, pemerintah memperkenalkan catatan sipil mengenai perkawinan, kelahiran dan kematian pada orang-orang Cina.

Perubahan-perubahan yang diterapkan oleh Belanda ini tampaknya segera diterima oleh masyarakat peranakan. Ketidakpastian mengenai hukum keluarga Cina tak dapat dipertahankan lama. Hal itu menyebabkan pernyataan populer di antara keluarga peranakan bahwa "warisan merupakan sebab bagi perpecahan keluarga". Bahkan hak-hak yang sama bagi anak perempuan untuk memperoleh warisan diterima dan sehingga menyebabkan jumlah pengangkatan anak menjadi menurun. Pada waktu yang sama, perkembangan ini memperlihatkan kemerosotan sistem keluarga besar di antara peranakan dan tumbuhnya keluarga inti. Hal itu juga berarti menurunya pemujaan terhadap leluhur, kuburan keluarga dan berbagai pranata Cina lainnya dalam abad ke-20. Dipaksakannya hukum Belanda terhadap pranata-pranata keluarga Cina hanyalah merupakan sebagian dari yang dapat disalahkan sebagai penyebab kemerosotan ini, karena masih ada dampak modernisasi lain terhadap masyarakat peranakan selama abad ke-20, yang menyebabkan perkembangan ini.[6]

Abad ke-20

Mungkin tampak aneh bagi kita dewasa ini bahwa kejadian-kejadian di Cina, seperti revolusi 1911, merupakan faktor utama dalam dipaksakannya hukum keluarga Belanda terhadap masyarakat peranakan. Akan tetapi, dalam mencoba memecahkan hukum keluarga peranakan, Fromberg juga melihat kepada hukum-hukum keluarga Cina sebelum revolusi. Rancangan Fromberg pun ditolak oleh pemerintah bersamaan dengan jatuhnya dinasti imperial. Belanda mengharapkan bahwa Cina akan memodernisasikan sistem hukumnya, seperti halnya yang telah dilakukan oleh negara Asia lain dan mengambil hukum Eropa; bahkan untuk hukum keluarganya. Sesungguhnya, pemikiran di permulaan abad ke-20 di sekitar masalah peranakan adalah mengaitkannya dengan perkembangan yang terjadi di Cina itu sendiri. Karena itu tidak mengherankan apabila dalam situasi ini, tumbuh perhatian yang kuat dari orang-orang Cina terhadapnya bahkan juga di antara keluarga-keluarga peranakan yang sudah lama sekalipun. Orientasi ke Cina ini makin diperkeras di akhir abad ke-19 karena masyarakat Cina-Jawa dihadapkan dengan krisis sosial ekonomi yang tercermin dalam tuntutan akan kesamaan hak dengan orang Eropa.

Pemerintah kolonial mengabaikan tuntutan orang-orang Cina-Jawa sementara tuntutan orang Cina totok mendapatkan penanganan yang istimewa. Akibatnya adalah bahwa sejak 1740, untuk pertama kali di permulaan abad ke-20 timbul pergerakan di Jawa dengan orientasi terhadap Cina dan penekanan terhadap solidaritas etnis.

Pencarian identitas Cina ini disebabkan oleh krisis sosial ekonomi di antara orang-orang Cina-Jawa. Krisis ini ditimbulkan oleh kebijaksanaan pemerintah untuk menghapuskan sistem monopoli penjualan candu dan rumah-rumah gadai. Kebijaksanaan itu sendiri merupakan hasil dari sikap etis yang baru dari Belanda yang menyadari bahwa mereka telah menyerahkan orang-orang Jawa kepada orang Cina dan sekarang mereka ingin mengakhirinya. Kehadiran orang-orang Cina di pedalaman selalu menghantui para pejabat atau opsir Belanda yang kemudian menekankan hal ini sebagai sesuatu yang membahayakan orang-orang Jawa. Akan tetapi, pemerintah kolonial tidak menghapuskan penjualan candu atau rumah gadai. Penjualan candu serta rumah gadai tetap dilanjutkan bahkan makin ditangani pemerintah. Kecuali pengelolaannya saja yang berpindah tangan.

Dihapuskannya perkebunan ganja dan usaha rumah gadai oleh pemerintah membawa pukulan berat terhadap salah satu sumber utama pendapatan orang-orang Cina, kesempatan-kesempatan kerja dan perdagangan. Sementara itu sistem pas-jalan dan tempat tinggal tetap dipertahankan dan mungkin lebih ketat dari biasanya oleh karena prinsip-prinsip etis. Dihapuskannya sistem kontrak menciptakan pengangguran yang besar di daerah pecinan, sementara sejumlah modal utama dari orang-orang Cina yang biasanya diinvestasikan pada perkebunan tersebut menjadi terlantar dan memerlukan penyaluran. Pula terdapat arus pendatang baru dari Cina sehingga mereka semakin bertambah jumlahnya. Pendatang baru ini - tidak seperti biasanya - membawa serta istri dan anak-anak. Mereka tetap mempertahankan bahasa dan kebiasaannya lebih lama daripada pendatang sebelumnya. Juga beberapa di antaranya ada yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda bahasanya yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan masyarakat di Hindia Belanda. Masyarakat Cina yang tidak pernah merupakan suatu kelompok homogen, kemudian dibagi secara sangat tajam di antara para peranakan dan singkeh. Kedua kelompok ini menghadapi krisis ekonomi serta berkurang atau terbatasnya kesempatan kerja di daerah pecinan. Untuk sementara, kedua kelompok tersebut minta dipulihkan dari kondisi yang mencekik di daerah pecinan yang kemudian mengambil bentuk daerah pemukiman yang terisolasi *(ghetto)*.
Dari ketidakpuasan di daerah pecinan ini, timbul pergerakan orang-orang Cina pada permulaan abad ke-20. Tuntutan pertama mereka adalah mengakhiri sistem pas-jalan dan tempat tinggal, memberikan pada orang-orang Cina keleluasaan bertempat tinggal dan bergerak. Secara umum, pergerakan orang-orang Cina menuntut persamaan hak dengan orang-orang Eropa, terutama yang menyangkut undang-undang hukum pidana. Orang-orang Jepang dan Muangthai mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa Jepang dan Muangthai adalah negera-negara modern sedangkan Cina belum mencapai taraf itu. Jadi sekali lagi harapan orang-orang Cina-Jawa mengarah ke Cina.
Berhasilnya pergerakan di antara kalangan peranakan juga harus dijelaskan dalam pengertian perubahan-perubahan internal di dalam masyarakat itu sendiri. Penghapusan sistem kontrak menghancurkan sistem *patronage* para keluarga opsir atau pejabat yang

lama. Dalam kenyataannya, sejak itu kedudukan opsir menjadi merosot dan karena itu di beberapa tempat di Jawa dihapuskan atau diizinkan untuk tetap dalam keadaan hidup segan mati tak mau. Di samping itu, para pendatang baru merasa sakit hati terhadap para opsir pejabat karena berbagai alasan. Para Cina totok tak dapat berkomunikasi dengan para opsir yang tak dapat berbahasa Cina dan bersikap angkuh terhadap para pendatang baru. Para totok ini melihat para opsir sebagaimana mereka melihat para Cina Mandarin yang di tanah airnya diadakan banyak agitasi terhadap mereka. Terutama kelompok Cina yang berbeda bahasa, seperti Tio-Chu yang kemudian giat dalam mendesak bentuk baru dari cara pemotongan kucir, selalu ditentang oleh keluarga opsir peranakan lama serta mereka yang setia kepadanya. Gambaran yang menyamaratakan opsir Cina dengan para Mandarin memang tidak sepenuhnya salah. Para opsir sering angkuh, terlalu dekat dengan Belanda dan tak bernafsu memahami masalah-masalah para totok. Bahkan di antara para peranakan timbul suatu cerita yang menggambarkan opsir Cina dan para penyewa perkebunan candu seperti seorang kepala Mafia. Dalam situasi ini para opsir Cina yang harus menafsirkan masalah-masalah Cina untuk orang-orang Belanda menjadi tak berguna di mata pemerintah. Pada 1920 pemerintah secara resmi menghapuskan lembaga opsir Cina.

Merosotnya para opsir sebagai pemimpin dan sebagai lembaga memungkinkan timbulnya lembaga-lembaga dan pemimpin baru. Tidak seperti para opsir yang merupakan para pelaksana Belanda, para pemimpin baru ini melihat pemerintah sebagai lawan yang dari padanya harus diperoleh konsesi. Para pemimpin baru ini menghendaki kebebasan ruang gerak, persamaan hak antara orang Cina dan Eropa, pendidikan dan sebagainya. Perjuangan untuk memperbaiki status orang-orang Cina merupakan suatu perasaan etnosentris yang sempit, terutama karena orientasinya ke Cina. Mereka hanya memperhatikan atau memerihatinkan orang-orang Cina dan bukan masyarakat Indonesia secara keselurhan. Keadaan ini mengandung bahaya di kemudian hari karena dengan bangkitnya pergerakan nasional Indonesia dan Revolusi, watak etnosentris pergerakan Cina ini akan menyebabkan mereka terasing dari berbagai pergerakan dan aspirasinya di Indonesia.

Manifestasi pertama pergerakan orang-orang Cina adalah pendirian sistem sekolah-sekolah Cina, yaitu *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK)

pada 1900. Bahasa Cina dan Inggris diajarkan pada sekolah-sekolah tersebut dan bukan bahasa Belanda. Sekolah-sekolah tersebut merupakan jawaban terhadap krisis sosial-ekonomi dan menjadi lembaga yang penting dari pergerakan orang-orang Cina. Berakhirnya sistem *patronage* para opsir menyebabkan setiap orang sadar bahwa mereka hidup dalam suatu dunia yang penuh persaingan, dan karena itu pemuda-pemuda Cina, atau yang terbaik di antara mereka harus dipersiapakan untuk itu. Bahasa Cina dan Inggris diberikan sehubungan dengan para pendirinya, lebih didasarkan atas pertimbangan keuangan daripada pertimbangan politik. Bahasa Cina digunakan sejak Cina menjanjikan akan mengirim para guru membantu sekolah-sekolah tersebut. Bahasa Inggris diberikan sebagai ganti bahasa Belanda oleh karena guru-guru bahasa Belanda lebih mahal sementara guru bahasa Inggris murah dan satu atau dua mudah diperoleh dari Singapura atau Hongkong. Sekolah THHK meminta pemerintah Belanda memberikan subsidi untuk kursus bahasa Belanda, namun hal ini ditolak pemerintah.[7)]

Belanda melihat perkembangan ini dengan khawatir. Mereka tidak dapat membiarkan sebagian warga Cinanya, yang sejak tahun 1910 telah menyatakan menjadi warga negara Belanda, bangkit sebagai "nasionalis" Cina. Di lain pihak, Belanda juga tak dapat melarang pendidikan di antara para warganya sendiri. Pemerintah Belanda menanggapi dengan mendirikan Sekolah Cina-Belanda (HCS) tahun 1908 yang secara praktis merupakan sekolah Belanda untuk golongan etnis Cina, hanya saja, tak satu pun orang Cina yang bersekolah di situ. Di samping itu, orang-orang Cina diizinkan memasuki sekolah-sekolah Indonesia (HIS) dan Belanda. Sekolah HCS dan HIS sama saja, kecuali berbeda landasan etnisnya, program pendidikannya sepenuhnya berorientasi Belanda. Akan tetapi, batas perbedaan atara orang Cina yang memasuki HCS dan THHK tampaknya lebih bersifat sosial daripada budaya atau politik. Untuk dapat memasuki HCS para orang tua perlu mempunyai pendapatan minimum 50 gulden sebulan, yang tidak semua Cina mampu menyediakannya, sementara iuran sekolah THHK lebih rendah. Mungkin perbedaan di antara Cina totok dan peranakan sebenarnya merupakan perbedaan kelas seperti yang dapat diperkirakan dalam suatu masyarakat migran.

Pendirian sekolah HCS pada tahun 1908 menunjukkan semangat damai pemerintah kolonial terhadap keluhan-keluhan orang-orang Cina. Satu demi satu masalah-masalah Cina diselesaikan pemerin-

tah kolonial. Pemerintah kolonial mengeluarkan undang-undang baru mengenai ketentuan-ketentuan tempat tinggal dan bepergian bagi orang-orang Cina, yang secara praktis memberikan mereka kebebasan menetap dan ruang gerak. Ada kepentingan bisnis Barat dalam mencabut pembatasan tersebut. Permintaan persamaan hak dengan orang-orang Eropa dipecahkan lebih secara perorangan, bagi suatu keluarga Cina, daripada secara massal. Orang Cina, secara perorangan, dapat mengajukan permintaan persamaan hak dengan orang Eropa (dalam arti Belanda) dan istilahnya adalah *gelijkstelling*; mereka bahkan dapat meminta naturalisasi. Bagi seorang Cina, untuk dapat berderajat sama dengan Belanda, diharuskan membuktikan bahwa ia paham benar mengenai Belanda, mempunyai teman orang Belanda dan mempunyai hubungan dengan Eropa serta mempunyai standar kehidupan yang sama dengan Belanda. Kemudian bagi semua tindakan hukum ia harus tunduk pada hukum atau undang-undang Hindia Belanda. Untuk dinaturalisasikan sebagai Belanda, ia harus membuktikan keterasingan sepenuhnya dari masyarakat Cina, tinggal dalam suatu lingkungan Belanda dan terikat pada aturan-aturan Belanda. Semua orang Cina dinyatakan sebagai warga Belanda, tetapi tak banyak yang mengajukan permintaan untuk persamaan hak dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengajukan naturalisasi.

Kebijaksanaan kolonial untuk memenuhi tuntutan orang-orang Cina menyebabkan perpecahan di dalam pergerakan Cina yang didasarkan atas kelas dan kedudukan budaya di dalam suatu masyarakat campuran *(hybrid)* di Hindia Belanda. Masih juga ada sekelompok orang-orang Cina yang aktif secara politik dan tetap memperjuangkan status yang sama dengan orang-orang Eropa. Kelompok ini berorientasi ke Cina dan menganggap tidak sederajatnya Cina dan Belanda sebagai menurunkan martabat. Mereka menganggap orang-orang Cina yang menuntut persamaan hak sebagai pengkhianatan dan *drop-out* dari masyarakat Cina. Orang-orang Cina, yang secara politik giat ini, tetap menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian di Cina, mengorganisir boikot terhadap barang-barang Jepang dan Inggris; tergantung atas negara mana yang merupakan musuh Cina. Di lain pihak orang-orang Cina kelas-atas, secara politik kurang aktif; mereka lebih bersifat kebarat-baratan, mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Eropa dan bahkan meminta persamaan bagi mereka dan keluarganya. Sejarah pergerakan Cina pada periode antara dua Perang Dunia dan pada periode pasca kolonial, seperti yang telah sering

disebutkan, memerlukan pembahasan lebih lanjut.[8] Dampak hasil-hasil pergerakan tersebut, seperti undang-undang hukum Eropa dan sistem pendidikan (baik THHK dan HCS) adalah sangat besar dan mempunyai arti langgeng terhadap perubahan masyarakat peranakan Cina tradisional di abad ke-19. Hal ini jarang dibahas.

Jika kehidupan masyarakat peranakan tradisional pada abad ke-19 berkisar pada keluarga besar dengan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, maka abad ke-20 menandai tumbuhnya keluarga inti sebagai unit dasar dari masyarakat peranakan. Faktor utama dalam membawa perubahan struktural ini adalah sistem pendidikan masyarakat bagi para Cina. Anak-anak dididik dan dilatih mempersiapkan diri mereka bagi suatu pekerjaan di dalam masyarakat. Ini membebaskan mereka dari ketergantungan hidup terhadap orang tua, kakek atau setiap anggota keluarga lain yang dalam abad sebelumnya mengawasi kekayaan dan pendapatan keluarga. Kekuasaan para kepala keluarga atas dasar uang berkurang sejak yang muda dapat mencapai jalan hidup melalui pendidikannya. Harta pusaka atau peninggalan tidak lagi menjadi obsesi para pemuda atau tanggungannya. Di samping itu, hukum keluarga Belanda sekarang mengatur warisan dan bahkan kehendak dari yang mati pun dibatasi olehnya. Dengan melunturnya corak hirarki keluarga besar, makin berkurang pula pemujaan pada para leluhur. Meja persembahan dan kuburan Cina dihapuskan dan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh keluarga inti, khususnya pada periode pascakolonial.

Tumbuhnya sistem keluarga inti membantu para peranakan untuk tetap tanggap secara perorangan dan dalam kenyataan, membuat mereka dapat bertindak pada masa perang dan revolusi. Ketidaktentraman pada tahun-tahun tersebut telah memberi tekanan yang berat bagi orang-orang Cina, mungkin lebih daripada terhadap orang Eropa yang dapat meninggalkan tempat kelahiran dan kehidupannya. Kekristenan, baik Protestan maupun Katolik, menarik perhatian orang-orang Cina sebagai suatu kekuatan pelindung dan sebagai suatu cara untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. Emigrasi dari Jawa ke Belanda bagi sebagian orang merupakan pemecahan. Usaha-usaha yang lebih besar di bidang pendidikan merupakan suatu jalan keluar lain. Bagi setiap pemuda Cina diberikan pesan untuk mempersiapkan dirinya berdiri atas kaki sendiri.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ketidaktentraman situasi Indonesia setelah penjajahan telah lebih memperenggang ikatan masyarakat peranakan daripada membantu menempa solidaritas etniknya. Warisan kolonial, di mana politik dan ideologi merupakan hal yang terkutuk, tambah menimbulkan tanggapan individual ini. Warisan yang sama ini mengasingkan masyarakat peranakan dari politik Indonesia dan masalah-masalah sosialnya. Perjuangan untuk kelangsungan hidup pribadi sebaliknya lebih mendominasi orang-orang Cina. Tak banyak tempat bagi politik komunal, lokal maupun nasional. Singkatnya, manifestasi komunal, dari permulaan abad ke-19 tetap lemah dan tidak berkembang. Sesungguhnya, hal itu juga gagal membuka perspektif baru untuk sekarang dan masa akan datang.

Kesimpulan

Proses dan periode dalam sejarah memang berjalan lambat. Tidak seperti kejadian-kejadian, proses atau periode tak punya tanggal pasti, kapan mulai dan kapan berakhir. Jika para sejarawan memberikan tanggal proses pergerakan, hal itu hanyalah untuk mempermudah dan demi relevansi dan yang perlu diingat dalam membahas perubahan sosial.

Masyarakat Cina-Jawa merupakan salah satu yang lebih dulu datang ke Kepulauan Indonesia. Beberapa hal dapat terjadi terhadap masyarakat emigran, misalnya, kemungkinan terserap ke dalam masyarakat setempat, menjadi suatu kelompok minoritas yang mempertahankan unsur-unsur kebudayaan tanah leluhurnya dan menyesuaikan diri dengan situasi-situasi setempat, atau dapat juga menjadi suatu kelompok minoritas yang dominan seperti Belanda di Jawa. Para pendatang Cina yang tertua mungkin mengambil jalan pertama. Sampai pertengahan abad ke-18, orang-orang Cina tampaknya telah terserap dalam jumlah besar ke dalam masyarakat setempat. Proses pembauran sesungguhnya menjadi tidak penting setelah tahun 1830, meskipun masih tetap terdapat beberapa kasus kecil sampai sekitar pertengahan abad ke-19.

Timbulnya masyarakat peranakan serta konsolidasinya terjadi setelah pertengahan abad ke-18. Pembentukannya bertalian dengan timbulnya kekuasaan Belanda di Jawa yang menjadi dominan setelah perjanjian Gianti 1755, yang membagi kerajaan Mataram ke dalam beberapa kerajaan kecil. Yurisdiksi VOC terhadap orang-orang Cina merupakan suatu kenyataan dan yang kemudian

berfungsi setelah Belanda berkuasa di Jawa. Kecenderungan ini terkonsolidasi pada periode setelah 1830, selama masa penjajahan modern. Orang-orang Cina terlembagakan sebagai golongan perantara, antara orang Eropa dan Jawa. Mereka menjadi minoritas kelas dua, kebudayaan mereka disesuaikan kepada kondisi-kondisi orang Jawa atau Hindia Belanda.

Ini berarti bahwa secara hukum orang-orang Cina-Jawa harus meleburkan diri ke dalam sistem hukum Belanda. Hal ini terbukti sulit karena keduanya datang ke Hindia Belanda karena kesempatan ekonomi. Struktur dan nilai masyarakat peranakan tumbuh di sekitar tiga unsur; harta kekayaan, keluarga dan warisan dan dalam zaman modern: kelangsungan kedudukan keluarganya. Unsur-unsur ini menjelaskan posisi ekonomi mereka, pengerahan modal dan sistem kredit yang di waktu sekarang memberi mereka sebuah posisi ekonomi yang kuat di dalam masyarakat yang tak banyak memiliki prinsip-prinsip tersebut. Cukup ironis bahwa nilai-nilai ini di tanah leluhur Cina dicurigai sebagai borjuis. Walaupun demikian para peranakan telah terpatri pada nilai-nilai atau terikat dengan nilai-nilai ini dalam suatu dunia yang sedang berubah. Nilai-nilai tersebut, lebih daripada sekedar ideologi adalah untuk atau menentang kolonialisme: nasionalisme Indonesia atau orientasi ke Cina masih tetap merupakan kekuatan motivator masyarakat peranakan. Perwujudannya mungkin berbeda dari periode ke periode, namun nilainya secara dasar tetap sama. Dalam permulaan abad ini, nilai-nilai tersebut makin kurang didasarkan atas keluarga besar, dan pada abad ke-20 atas keluarga inti. Cara untuk mencapai tujuan mempertahankan status keluarga mungkin berbeda antara warisan atau pendidikan, namun substansinya tetap sama. Akan tetapi, mungkin selalu terdapat suatu pengaruh yang sedang-sedang saja terhadap sistem nilai dasar masyarakat peranakan yaitu elitenya yang selalu lebih merasa aman dalam hidupnya, posisi dan hak-hak istimewa dan yang karena itu selalu menekankan lebih banyak pada kemampuan penyesuaian diri terhadap kondisi-kondisi setempat sebagai jalan keluar bagi keamanan mereka.

Secara implisit, sistem nilai keluarga peranakan: harta milik dan warisannya, tepat menyentuh masalah dasar dalam mempertahankan posisi ekonomi-sosial di Indonesia. Orang-orang Indonesia menganggap periode kolonial didominasi oleh minoritas asing. Di antara minoritas asing ini, peranakan telah menjadi warganegara

Indonesia (WNI). Secara mendasar orang Indonesia tidaklah menaruh perhatian terhadap masalah WNI keturunan Cina. Masalahnya adalah bagaimana mewujudkan hak-haknya sendiri. Masalah-masalah Indonesia adalah sangat besar, kompleks dan menanti penyelesaian. Masalah Indonesia ini sesungguhnya akan ditentukan bukan sebagai masalah terpisah melainkan harus dilihat dalam konteks Indonesia sendiri.

CATATAN

1). W.H. Mendhurst, *Chineesche Aantekeningen Omtrent Nederlandsch-Indie.* The Hague, 1858, hlm. 21 - 22 (terjemahan dari bahasa Inggris).

2). Onghokham, *The Residency of Madiun, Priyayi and Peasant in 19th Century*, tak diterbitkan, Yale University, disertasi Ph.D., 1975.

3). Mr. M.H. van Valk, "De Rechtspositie der Chineezen in Nederlandsch-Indie", *Koloniale Studien*, 20/5 and 6, 1936, hlm. 23.

4). *Ibid.*, hlm. 58.

5). Mr. P.H. Fromberg, *Verspreide Geschriften*, Leiden, 1925, hlm. 335.

6). L.H.W. van Sandick, *Chineezen Buiten China*, The Hague, 1909, hlm. 248 - 255.

7). D.R. Diffelen, "Het Onderwijs van Chineezen", *Koloniale Studien*, 1936.

8). *The Chinees in Indonesia*, J.A.C. Mackie (ed.). Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976.

III. PENELITIAN SUMBER—SUMBER GERAKAN MESIANIS

Pada bulan November 1885, para pemilik tanah di desa Patik (Kawedanan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Karesidenan Madiun) yang berjumlah kira-kira 100 orang mengangkat carik-desa mereka sebagai ratu baru dengan gelar Pangeran Lelono, yang akan menghapuskan pajak-pajak. Selain itu, gerakan itu bertujuan untuk membunuh semua pejabat Belanda setempat. Sebab mereka membebani rakyat dengan pajak-pajak tinggi yang merusak "*wong-cilik* " yang "tidak bisa memakai celana karena uangnya dipakai untuk membayar pajak". Pemberontakan ini dapat dipadamkan dalam satu hari tanpa meminta korban manusia. Hanya rumah kontrolir Belanda di Pulung dirusak.[1]

Biarpun isyu yang dikemukakan para pemberontak adalah soal pajak, tetapi para pejabat Belanda yang meneliti persoalan ini mengabaikannya. Hanya secara kebetulan saja soal pajak itu terbongkar. Ternyata, sejak 1883, pajak desa Patik setiap tahun naik dan untuk 1886 akan menjadi lebih tinggi lagi. Lebih-lebih karena persenan pajak yang dipungut dari para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan statistik resmi (6,196), tetapi mencapai 16,196. dari penghasilan seorang petani.

Fakta-fakta ini dilaporkan ke Batavia oleh seorang pejabat Belanda. Namun demikian, dia menambahkan bahwa, "... Para pemberontak mengaku bahwa pajak-pajak tinggilah yang menyebabkan gerakan mereka. Ini tidak benar! Ini hanya tipu akal mereka...." Rupanya, ideologi pejabat-pejabat Belanda tidak dapat menerima bahwa pajak-pajak adalah sebab utama pemberontakan Patik. Hal ini terungkap dalam laporan Residen Madiun kepada Gubernur Jenderal, "... Bila isyu pajak adalah sebab pemberontakan, maka kekuasaan kita (Belanda) berdiri atas dasar-dasar yang lemah dan kita akan terserang berkali-kali oleh kejadian-kejadian yang sama."[2]

Dalam meneliti sebab-sebab pemberontakan di desa Patik itu, pejabat-pejabat Belanda justru menelusuri kemungkinan adanya intrik-intrik keluarga bupati setempat, biarpun yang terakhir ini berjasa sekali dalam memadamkan pemberontakan. Kemudian diketemukan bahwa salah seorang pemimpin pemberontakan

adalah seorang priyayi keturunan bekas keluarga Bupati Ponorogo. Hal ini dijadikan alasan utama dalam menilai sebab-sebab pemberontakan. Priyayi ini membujuk carik untuk menjadi Ratu Adil. Karisma priyayi ini memperkuat takhyul penduduk. Lebih-lebih antara priyayi ini dan petani-petani yang mampu di Patik ada hubungan keluarga. Demikianlah seberkas lampiran dengan silsilah nenek-moyang para pemberontakan dikirim ke Batavia. Singkatnya, takhyul dan loyalitas buta penduduk dijadikan dasar untuk menilai pemberontakan Patik.

Isyu pajak dipindahkan kepada persoalan lain; perbandingan tingkat kemakmuran para pemberontak dan kemiskinan penduduk lain. Para pejabat Belanda berdalih: bila pajak menyebabkan kemiskinan, tentu penduduk miskin lain akan ikut serta dalam usaha membunuh orang-orang Belanda. Padahal, para pemberontak itu justru para pemilik tanah yang termasuk golongan mampu. Jadi, tidak mungkin kemiskinan yang menyebabkan pemberontakan. Belanda rupanya tidak mau melihat proses kemiskinan golongan mampu di desa sebagai akibat perpajakan. Tentu, bila timbul pemberontakan karena tingginya pajak tanah, hanya golongan yang memiliki tanah yang akan bergerak. Sebab merekalah yang diwajibkan membayar pajak. Bagi petani miskin yang tidak memiliki tanah, isyu pajak tanah sama sekali tidak relevan.[3] Selama abad ke-19, hampir setiap tahun ada kejadian seperti di desa Patik ini.[4] Tetapi para pejabat Belanda terus saja menilai gejala-gejala demikian dengan dasar pikiran seperti diuraikan di atas. Dalam pandangan pejabat-pejabat Belanda, masyarakat Jawa terdiri dari golongan priyayi (elite) dan massa petani yang penuh takhyul. Masyarakat tani ini tidak memiliki struktur, tidak bervariasi. Ukuran yang dipakai dalam mengambil kebijaksanaan adalah lapisan yang termiskin, hingga menghancurkan struktur yang ada. Sekalipun demikian, Belanda masih juga merasa bahwa mereka tetap mempertahankan tradisi masyarakat Jawa. Ini dilakukan melalui upacara-upacara sandiwara kenegaraan untuk memuaskan perasaan feodal masyarakat tani. Sebab, kekunoan masyarakat ini justru menjadi legitimasi kekuasaan asing di Jawa. Kesalahan yang dibuat para pejabat Belanda adalah, bahwa mereka menilai soal pajak sebagai retorik belaka, sedangkan kepercayaan akan Ratu Adil justru dianggap sebagai sumber utama pemberontakan.[5] Tetapi, apakah kita sendiri tidak terpengaruh oleh warisan-warisan intelektual para pejabat Belanda itu? Ada kecenderungan untuk menempatkan fenomena pemberontakan dalam

rangka eskatologi, mesianisme, fanatisme agama, masyarakat tradisional, ideologi primordial dan sebagainya.[6] Apa bukan hal-hal ini yang justru merupakan bagian retorik dari para pemberontak? Bagaimana dengan masalah tanah dan pajak ketika peristiwa itu terjadi?
Sehubungan dengan itu, saya akan membahas susunan masyarakat dan negara kolonial, terutama yang menyangkut kedudukan golongan petani mampu. Juga akan disoroti pokok-pokok sejarah Jawa yang menjelaskan gejala Ratu Adil dan mencoba menelaah apakah gejala Ratu Adil itu dapat ditempatkan dalam kerangka persoalan yang lebih luas pada masyarakat Jawa abad ke-19. Persoalan-persoalan itu tentu tidak bisa dibahas secara terperinci, tetapi beberapa segi penting akan dicoba dikemukakan.

Konsep Kawula - Gusti dan Oposisi

Kerajaan Mataram adalah bentuk terakhir dari negara tradisional yang dikenal orang Jawa. Dalam kerajaan tersebut, kraton dan sekitarnya (negara agung) merupakan pusat kosmologis dan pemerintahan. Pasisir, *mancanegera* (propinsi) Timur dan Barat dianggap daerah-daerah pinggiran. Dalam konsepsi politik Jawa, bukan luas perbatasan yang penting melainkan jumlah penduduk dan kemampuan untuk memobilisasi penduduk ini untuk keperluan produksi, pendirian bangunan dan perang. Dalam kerajaan Mataram, sang raja berada di atas hirarki sosial. Hirarki disusun menurut jauh-dekatnya seseorang dalam hubungannya dengan raja, atas dasar hubungan darah maupun kedudukan. Yang pertama adalah para *sentana-dalem* (pangeran), yakni mereka yang berdarah raja. Kemudian menyusul para priyayi (yayi = adik raja dalam arti spiritual). Priyayi merupakan penghubung antara dinasti dan rakyat tani. Petani sendiri dianggap sebagai pendukung atau penghasil bagi golongan elite.[7]
Raja berkuasa, karena ia dianugerahi *wahyu-kedaton* oleh Tuhan, yang katanya dinyatakan dalam bentuk *cahaya.* Teori politik tradisional yang lebih ekstrem kadang-kadang mengatakan bahwa raja sendiri adalah titisan Tuhan dalam arti spiritual. Mungkin sekali konsep-konsep mengenai kedudukan raja ini berakar pada kebudayaan Hindu. Akan tetapi, pada zaman Mataram, banyak konsep demikian diambil dari agama Islam, terutama dalam segi-segi mistik. Mistik Islam dijadikan dasar untuk menjelaskan hubungan rakyat dan raja. Menurut praktek Sufi, tujuan manusia

yang tertinggi adalah untuk bersatu dengan Tuhan (*manunggaling kawula-Gusti*).[8] Karena itu, di dunia ini, manusia tak akan bisa lebih sempurna kecuali kalau *manunggal* dengan kehendak raja. Pada zaman sekarang, konsep *kawula-Gusti* sering diterjemahkan dengan istilah-istilah *patron-client* atau bapak-anak buah. Tetapi, maknanya tentu lain dengan dahulu. Konsep *kawula-Gusti* adalah unsur terpenting untuk menjelaskan mengapa penduduk lebih penting dari wilayah, mendasari konsep kekayaan dan kekuasaan golongan priyayi, mengatur hubungan antara bupati dan desa selama zaman kolonial, dan merupakan pegangan orang Jawa untuk kelanjutan hidup (*survival*) dalam masyarakat dari masa ke masa. Namun, baik dahulu maupun sekarang, ikatan-ikatan *kawula-Gusti* tidak sekuat yang diduga. Misalnya, pemberontakan-pemberontakan terhadap raja sering terjadi baik dari kalangan istana, priyayi atau petani. Sebenarnya, dalam sejarah Jawa, kedudukan raja dan dinasti lebih sering goncang daripada stabil. Dinasti dan kraton mereka, baik dalam zaman pra–Islam maupun Islam, paling lama berumur seabad lebih sedikit. Dalam teori, *wahyu-kedaton* dapat hilang dari raja, untuk kemudian jatuh pada siapa saja, kapan saja. Mungkin teori ini muncul karena adanya banyak perebutan tahta dari kalangan rendah seperti Ken Arok atau Senapati (pendiri Mataram) yang memerlukan pengesahan kedudukan mereka. Akar-akar kebudayaan Hindu lalu menjadikan kerajaan suatu lembaga reinkarnatif. Wahyu lebih penting daripada keturunan atau dasar-dasar lain. Konsep *kawula -Gusti* sendiri tidak lebih menjamin kestabilan, sebab persatuan mistik antara *ndoro* dan *batur* ini tercapai pada saat *kesurupan (trance)*. Akan tetapi, mungkin tidak ada pengaruh yang lebih mempercepat demoralisasi raja, dinasti dan istana, daripada ramalan bahwa umur kerajaan tidak akan lebih lama dari 100 tahun. Atau ramalan bahwa masa pemerintahan raja dibatasi dengan umur jagung. Hal yang terakhir ini rupanya suatu tradisi yang kuat di keraton Mataram.

Oposisi terhadap kerajaan Mataram datang dari Pesisir yang katanya lebih mementingkan Islam daripada kerajaan di pedalaman. Lebih-lebih, tokoh-tokoh Pesisir ini adalah keturunan wali-wali, yang tersohor sangat sakti dan memiliki kemampuan untuk meramal. Tokoh terpenting dan yang pertama memainkan peranan peramal mengenai umur dinasti Mataram adalah Raden Kajoran. Dalam tradisi, ia dikenal sebagai Penembahan Rama. Dalam sejarah dinasti Mataram, ia disebut sebagai Raden Ambalik (*pengkhianat*)

dan katanya berumur 100 tahun pada saat cucunya Trunojoyo memberontak. Pada saat itu (sekitar tahun 1670), keraton Mataram telah berusia 100 tahun dan Raden Kejoran meramalkan bahwa kerajaan ini hanya diberi jatah waktu sekian saja. Pemberontakan Trunojoyo didukung oleh invasi perompakan Bugis yang merusak seluruh Jawa Timur dan Tengah. Tanpa dukungan VOC, kraton Mataram sebenarnya tidak pernah akan sembuh kembali secara sungguh-sungguh dari peristiwa ini. Kelangsungan hidupnya hanyalah karena adanya dukungan itu.[9] Ini semua sangat penting untuk menilai pengaruh Raden Kajoran dan ramalan-ramalannya.

Ramalan-ramalan itu merupakan cara oposisi ketika orang merasa lemah dan tidak berdaya lagi mengubah keadaan. Proses sejarah dan fantasi lalu saling mengisi. Sebenarnya, ada beberapa pemerintahan raja Jawa yang berlangsung cukup lama, misalnya, pemerintahan Amangkurat I (tahun 1645 - 1677) yang dihadapkan dengan pemberontakan Trunojoyo pada masa akhir pemerintahannya. Lepas dari persoalan bahwa pemerintahan Amangkurat I mungkin yang paling kejam di Jawa, masa lamanya seorang raja berkuasa menimbulkan persolan-persoalan baik pada masa hidupnya maupun untuk pemerintahan kemudian. Amangkurat I memerintah dengan alat teror. Pembunuhan musuh secara massal dilakukan terhadap golongan-golongan ulama tertentu. Tidak ada seorang yang kelihatannya mampu melawan kekuasaan mutlak raja yang memegang semua jaringan pemerintahan. Orang lalu mengharapkan bahwa alam akan mengakhiri riwayat raja ketika mereka sendiri tidak dapat lagi melakukan apa-apa. Memang, pada akhirnya, proses alam mempunyai efek terhadap keadaan. Usia raja menjadi tua dan putra-mahkota tidak sabar menantikan saat wafat ayahnya untuk menjadi raja. Oposisi dan semua golongan yang tidak puas memberikan dukungan kepadanya. Suasana perubahan zaman lebih dikesankan, sebab, sebenarnya, pertentangan Amangkurat I dengan putra-mahkota adalah seperti pertentangan antara kaum tua dan muda di kalangan kraton. Akan tetapi, intrik-intrik kraton adalah awal disentegrasi politik yang disusul dengan dengan pemberontakan-pemberontakan di daerah. Pola ini berulang kali terjadi selama sejarah Mataram. Perang saudara, perebutan tahta dan pemberontakan merupakan peristiwa rutin sampai Mataram dipecah menjadi dua, kesultanan dan kesunanan (1755). Zaman dominasi Belanda kemudian menyusul, di mana penguasa-penguasa setempat diperkuat kedudukannya tanpa mem-

punyai wibawa yang sama karena dukungan Belanda dan tanpa memecahkan persoalan-persoalan masyarakat atau mendatangkan keadaan *tataraharja.*

Apa yang sebenarnya menyebabkan adanya dukungan-dukungan sebagian rakyat pada setiap pemberontakan yang muncul? Penelitian-penelitian ke arah ini sama sekali belum ada dan penulis terpaksa membatasi diri pada perkiraan-perkiraan sementara saja terutama dari bahan-bahan menjelang pemberontakan Diponegoro (1825 - 1830).

Tanah, Pajak dan Proses Pemiskinan

Kekayaan suatu negara agraris, seperti Jawa, terletak pada tanah. Dan menurut teori, raja adalah pemilik tunggal dari semua tanah. Raja berhak menyerahkan tanah-tanah ini pada siapa saja dan berhak pula mencabutnya kembali. Orang yang diserahi tanah wajib memberi upeti kepada raja. Untuk mudahnya di sini, upeti ini akan disebut pajak tanah; sebutan yang memang sesuai dengan perkembangannya. Raja berhak menaikkan pajak tanah ini. Kegunaan lain dari tanah, bagi raja, adalah untuk menggaji para pangeran dan priyayi, antaranya dengan *lungguh* (tanah-tanah jabatan). *Lungguh* kembali ke tangan raja pada saat priyayi wafat atau turun dari jabatannya. Dalam konsepsi priyayi, bukanlah tanah yang penting, akan tetapi jumlah petani atau jumlah pengikutnya. *Lungguh* tidak pernah dinyatakan menurut luas tanah, umpamanya dalam hektar, akan tetapi menurut jumlah petani; *cacah* keluarga petani yang bekerja di atasnya.

Tanah sendiri tidak berarti apa-apa bagi priyayi, sebab tak mungkin mereka mengerjakannya. Justru perbedaan antara priyayi dan petani terletak pada prinsip bahwa priyayi menikmati hasil tanah tanpa bekerja di atasnya. Priyayi menjauhkan diri dari urusan-urusan produksi, bahkan pengumpulan hasil sering diserahkan kepada para *demang* dan *bekel.* Sebaliknya, *cacah* memberikan kepada priyayi kedudukan ekonomis dan politis. Sebab, jumlah *cacah* berperanan dalam perang dan pemberontakan. Yang terakhir ini tentunya juga sangat tergantung dari ketat atau longgarnya penguasaan priyayi terhadap *cacah*-nya.[10]

Berlainan dengan konsepsi priyayi, para petani menilai tanah dengan tinggi. Sebab mereka langsung hidup daripadanya. Tanah yang diperoleh melalui warisan dinamakan tanah-pusaka, dan tanah yang dibuka sendiri disebut tanah *yasan.* Penggolongan

tingkat-tingkat sosial di kalangan petani didasarkan atas penguasa-annya terhadap tanah. Golongan yang menguasai tanah disebut kaum *sikep*; mereka yang menanggung beban-beban atas tanah. Tanggungan beban atas tanah ini berupa pajak dan kerja bakti pada priyayi atau raja sendiri, tergantung dari kedudukannya sebagai *cacah*. Di bawah golongan *sikep*, terdapat kelas petani yang terendah: golongan *numpang* atau *bujang* yang tidak dibebani apa-apa oleh negara. Seluruh tenaga orang numpang diberikan kepada *sikep*. Kekayaan dan pengaruh seorang *sikep* lalu diukur dari jumlah orang yang numpang di bawahnya. Sebab numpangnya ini terutama menjadi modal *sikep* untuk memperluas tanah *yasan*. Orang numpang kadang-kadang juga bisa dipakai untuk mengisi tugas kerja bakti *sikep*, namun ini jarang terjadi. Sampai di mana seorang sikep bebas memperluas tanah *yasan*-nya tidak kita ketahui. Selain itu hak milik atas tanah pusaka dan *yasan*[11] sebenarnya tidak pernah terkonsolidasi bagi golongan petani. Sebab, priyayi tidak ada perhatian atau kepentingan terhadap perkembangan demikian.

Sampai di mana stabilitas hak penguasaan terhadap tanah golongan *sikep* rupanya berbeda dari masa ke masa dan dari daerah ke daerah. Persoalan ini masih agak gelap, namun, ada beberapa bukti yang menunjukkan pengaruhnya terhadap kestabilan hak milik. Beban pertama pada para *sikep* adalah pajak tanah. Menurut sumber-sumber Belanda - yang tidak bisa kita percayai seluruhnya berhubung dengan berbagai sebab - pajak tanah ini tinggi karena, prinsipnya, merupakan janji antara pemilik tanah (raja) dan petani. Jumlahnya kira-kira 50% dari hasil padi.[12] Namun, tanaman-tanaman lain, misalnya palawija, tidak dikenakan pajak. Pajak ditetapkan pada masa permulaan dinasti. Kadang-kadang pada masa pemerintahan baru ditetapkan kembali, biasanya ini berarti dinaikkan. Praktek perpajakan kerajaan tidak memperhitungkan naiknya kesuburan tanah karena irigasi ataupun karena perluasan dengan pembukaan tanah baru.

Jadi, pajak ini - 1/2 dari penghasilan padi - agak fiktif, namun tetap tinggi. Menurut sumber Belanda, setiap kali raja dapat menaikkan pajak dengan memperhitungkan keadaan-keadaan baru mengenai tingkatan produksi. Ini antara lain terjadi pada masa pemerintahan Amangkurat I. Akan tetapi, hak raja dan priyayi untuk meminta pajak dan beban-beban yang terlalu tinggi rupanya juga terbatas. Pada abad-abad tersebut, tanah relatif masih luas,

dan penduduk relatif sedikit. Hingga bila ada beban-beban yang terlalu berat, petani dapat lari dari tanahnya untuk membuka tanah baru atau mencari *gusti* lain yang tidak sedemikian menekan petani. Menurut laporan-laporan Inggris pada permulaan abad ke-19, setiap kenaikan beban atau pajak selalu menjadi bahan perundingan yang sengit antara para *bekel* atau kepala desa dengan penduduk petani. Penduduk petani dapat menolaknya.

Mungkin karena pajak-langsung sukar dinaikkan, maka, kira-kira pada pertengahan kedua abad ke-18, diperkembangan berbagai pajak tak langsung seperti pajak bea-cukai dengan pos-pos *(tollgates)* yang memungut pajak pada setiap orang yang melewatinya, termasuk golongan priyayi.[13] Pajak tersebut sangat tidak populer. Di samping ini, ada pajak kepala, pajak rumah dan denda-denda untuk pelanggaran segala macam peraturan, yang masuk akal maupun tidak. Pentingnya peranan pajak dalam persoalan-persoalan pergolakan terlihat bahwa setiap pemberontakan selalu menjanjikan penghapusan pajak-pajak yang dibenci dan menurunkan pajak tanah. Tindakan para pemberontak Diponegoro (1825-1830), umpamanya, adalah pertama-tama membakar pos-pos bea cukai, Diponegoro sendiri menjanjikan penghapusan beberapa pajak tidak populer yang lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa, pada pendirian tiap dinasti, pajak-pajak diringankan untuk menarik hati dan membujuk rakyat daerah-daerah lain agar pindah ke kraton baru, sebab dari padat penduduklah tergantung kekuatan politis dan militer negara baru. Namun, dengan makin kukuhnya dinasti, pajak-pajak makin berat. Ini salah satu pengaruh kuat terhadap populernya ide-ide Ratu Adil serta munculnya pemberontakan-pemberontakan pada abad ke-18 dan ke-19.

Dalam zaman prakolonial, persoalan pajak mungkin bukan merupakan persoalan yang sebenarnya dan hanya sangat dibenci bila dihubungkan dengan proses-proses lain yang mengganggu milik para petani *sikep.* Proses ini adalah konsolidasi negara atau suatu pemerintahan. Biarpun hal ini menambah produksi tanah dengan usaha-usaha peningkatannya tetapi juga lebih banyak memerlukan *cacah.* Negara juga memerlukan tenaga kerja baru dalam jumlah banyak untuk mendirikan gedung-gedung, istana, jalan-jalan atau irigasi. Para pekerja ini digaji dengan tanah. Raja selalu dapat memerintahkan kepada kepala desa untuk membentuk 5 atau 10 *sikep* baru, atau untuk menambah jumlah pembayaran pajak dan wajib kerja bakti.[14] Tanah untuk menggaji mereka itu diambil dari

tanah-tanah *sikep* tua. Hingga golongan terakhir ini menjadi kurang kaya. Timbullah proses pemiskinan di antara mereka, yang disebut sebagai *pancasan* (pengurangan milik).[15] Hal ini juga terjadi bila negara memerlukan jabatan-jabatan baru, hingga jumlah priyayi menjadi lebih besar, atau merasa perlu menambah jumlah *cacah* para priyayi. Semua kebutuhan baru yang biasa dihubungkan dengan konsolidasi pemerintah dibebankan atas tanah golongan *sikep*. Pokoknya, bukan pajak tanah dalam bentuk hasil atau uang saja yang memberatkan petani, akan tetapi, terutama, beban baru yang timbul bila sejumlah *cacah* baru diperlukan.

Tentu saja penciptaan *sikep* baru hanya dapat dilaksanakan bila penduduk cukup banyak, sebagai akibat dari pemerintahan raja yang lama dan tetenteram Proses *pancasan* ini rupanya terjadi sejak akhir abad ke-18; di daerah-daerah Barat *mancanegara* menjelang pemberontakan Diponegoro. Sedangkan di daerah-daerah Timur seperti Madiun dan Kediri, yang dahulu merupakan daerah pergolakan, kedudukan para *sikep* lebih stabil. Di sana terdapat tanah-tanah subur yang luas dan masih kosong, hingga terkenal dengan istilah *cacah-mati*. Dengan timbulnya proses *pancasan* di propinsi-propinsi barat, pajak tanah menjadi beban berat bagi pemilik tanah.

Akan tetapi, proses ini juga menghasilkan semacam mobilitas sosial, sebab petani yang dahulu tidak memiliki tanah diberi hak-hak atas tanah dengan segala konsekuensinya. Rupanya proses ini berlangsung tidak secara damai, tetapi dengan kekerasan yang timbul dalam skala kecil di daerah pedesaan.

Bila proses-proses di atas dapat merusak kedudukan ekonomis beberapa golongan dalam masyarakat pertanian, maka gejala "anak buahisme" yang berakar pada politik *partisan* (pengikut) dapat menimbulkan ketidakpuasan lain. Jatuh bangunnya keluarga-keluarga priyayi dapat mengakibatkan jatuh bangunnya keluarga-keluarga petani. Artinya, seorang pejabat baru akan mencoba menggeser petani yang menjadi pengikut pejabat sebelumnya. Jadi, bukan saja si pejabat dicabut *lungguh*-nya tetapi juga para pengikut petaninya. Di sini, ada semacam mentalitas bahwa milik priyayi yang digantikan kedudukannya dapat dirampas, karena miliknya menjadi hak si pemenang. Jangan dilupakan bahwa golongan priyayi lebih berfungsi sebagai ksatria dalam perang daripada sebagai birokrat. Priyayi yang menang lebih mementingkan ditempatkannya anak-anak buahnya di tanah mereka daripada

kelangsungan produksi untuk menjamin kesetiaan para petani terhadapnya.[16] Sebagai akibatnya, para pemilik tanah, para *sikep* tidak mempunyai kedudukan stabil. Ini dengan sendirinya tidak membuat keadaan jadi tentram. Sebab, para pemilik tanah lama tidak demikian saja mau menyerahkan miliknya kepada penuntut baru. Mereka mempertahankan milik tanah dengan gigih, kalau perlu dengan kekerasan senjata. Jadi, di tengah-tengah daerah inti kerajaan sendiri, terdapat banyak perang desa karena penggeseran-penggeseran atas tanah ini. Bekas pemilik tanah tidak bisa berbuat lain kecuali mengharapkan perubahan politik baru. Mereka ini merupakan sumber bagi pemberontak-pemberontak. Cerita *cowboy* rupanya juga berlaku di Jawa purba.

Mungkin, sebagai akibat proses di atas, laporan-laporan Inggris pada permulaan abad ke-19 jadi menjelang pemberontakan Diponegoro — mengatakan bahwa tidak ada satu keluarga yang memiliki tanahnya selama 30 tahun berturut-turut. Desa pun tidak merupakan satu persatuan komunal (*community*). Orang saling tidak kenal, tidak ada hubungan darah, keturunan ataupun asal-usul antara penghuni-penghuni desa. Setiap keluarga memberikan kesetiaan kepada gusti lain, sampai kepada raja lain. Laporan-laporan ini adalah mengenai bagian-bagian barat *mancanegara.*

Di timur, keadaannya mungkin agak berlainan. Namun, daerah-daerah barat ini dikenal di kraton sebagai daerah kaki-tangan kerajaan, karena tidak pernah bergolak seperti daerah timur dalam abad-abad sebelumnya. Keadaan berubah dalam beberapa puluh tahun. Dalam perang Diponegoro, daerah-daerah barat inilah justru yang paling bergolak, sedang daerah timur *mancanegara* relatif aman. Dalam pemberontakan Diponegaro ini, seperti juga pada masa-masa yang lampau, isyu-isyu lokal banyak menentukan. Sering timbul pergolakan-pergolakan yang tidak ada hubungannya dengan Diponegoro, namun memakai namanya. Pemimpin-pemimpin gerombolan misalnya, mengusir penguasa-penguasa setempat. Keluarga-keluarga priyayi menjamin nasib mereka dengan membagi anggota-anggota keluarganya di antara pihak-pihak yang berperang.[17]

Selesai pemberontakan besar ini, kekuasaan sultan, sunan dan raja-raja Jawa lain dikebiri oleh Belanda sampai di daerah-daerah inti. Sedangkan daerah-daerah *mancanegara* diambil alih dan dijadikan wilayah gubernemen Hindia Belanda.

Hindia Belanda mendasarkan kekuasaan negara pada para bupati yang sudah ada sejak zaman prakolonial. Akan tetapi, sekarang, segala sesuatu yang merupakan kedudukan kekuasaan raja Jawa dipindahkan kepada bupati-bupati di daerah gubernemen seperti kedudukan turun-temurun. Desa pun dijadikan kesatuan teritorial dan administratif yang dikepalai oleh lurah yang berada di bawah susunan *pangrehpraja* yang dikepalai bupati. Belanda tidak ada perhatian untuk mendirikan istana-istana atau politik "anak-buah-isme", akan tetapi, sebenarnya, bangunan-bangunan berupa kantor, rumah, gudang, jalan-jalan dan lain-lain memerlukan cukup banyak tenaga. Belanda juga bertujuan untuk menjadikan Pulau Jawa suatu koloni yang menguntungkan dan untuk ini sistem Tanam Paksa (1830-1870) dilaksanakan. Sistem Tanam Paksa tidak lain daripada perkebunan-perkebunan negara kolonial (seperti gula, teh, kopi, nila dan lain-lain) untuk keperluan ekspor. Untuk menjamin kerja sama yang baik antara Belanda dan para penguasa Jawa, dari bupati sampai kepada lurah diberi *kultuurprocenten* yang merupakan persentase dari hasil-hasil ekspor tersebut.

Akan tetapi, sistem ini memerlukan banyak, tenaga kerja dan kebutuhan ini diperoleh dengan sistem pajak tanah. Hal ini tampak jelas di daerah Madiun di mana pemberontakan Patik terjadi. Di Madiun, pajak tidak dipungut dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk tenaga kerja. Ini berarti bahwa rakyat yang bekerja di perkebunan-perkebunan tidak diberi upah, karena sudah diperhitungkan dengan pajak tanah. Desa, sebagai kesatuan, dipaksakan memberikan jatah (*quota*) tenaga kerja. Di desa-desa lalu terjadi proses *pancasan*, atau *verkaveling* dalam istilah Belanda, yang berarti hak atas tanah makin lama makin kecil. Prinsipnya seperti, bahwa kerja paksa di perkebunan adalah ganti pajak tanah. Jadi, hanya orang yang berhak atas tanah yang wajib bekerja di perkebunan. Untuk memenuhi jatah tenaga kerja, desa terpaksa membagi tanah-tanah *sikep* kepada yang tidak punya tanah, agar dapat dikenakan wajib kerja. Pada akhirnya, proses ini mengakibatkan tanah yang dahulu milik pribadi menjadi milik komunal atau milik desa. Sebab, tiap tahun, kebutuhan akan tenaga kerja naik dan untuk menyesuaikan jumlah yang berhak atas tanah dengan jatah tenaga kerja, maka, untuk mudahnya, para bupati menekan supaya tanah pusaka dan *yasan* diubah menjadi tanah

desa. Beberapa keluarga elite desa menjadi *pamong* desa dengan tanah-tanah jabatan *(bengkok)*, namun banyak yang kehilangan status.[18] Seperti dalam zaman Mataram, beberapa orang numpang naik statusnya dengan pembagian hak-hak atas tanah dewa itu. Hal ini hanya untuk sementara. Sebab, dengan naiknya kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan ekonomi kolonial, tanah-tanah mereka makin lama makin juga menjadi kecil.

Proses pemiskinan golongan yang berhak atas tanah dan perubahan sosial ini terlihat pada hilangnya istilah *sikep* dari masyarakat desa. Sebagai gantinya, orang yang berhak atas tanah dikenal dengan istilah kuli (pekerja kasar). Istilah ini berasal dari dunia kolonialisme internasional, aslinya India di bawah Inggris. Masyarakat desa dibagi dalam *kuli-kenceng, kuli-setengah kenceng* dan seterusnya, sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Dahulu, tanah komunal dikenal dengan istilah tanah *ulayat.* Fungsinya memang berlainan dengan yang timbul di zaman kolonial, yang terkenal dengan nama *tanah-kongsen* (dari kongsi, juga istilah kolonial dari Pasisir). Transformasi petani menjadi kuli juga berhubungan dengan proses isolasi desa dari dunia yang lebih tinggi, yakni kraton. Dahulu, petani dengan tanah merupakan pengikut priyayi, membayar upeti dan kerja bakti kepada raja. Pada zaman kolonial, ia melakukan kerja bakti di perkebunan kolonial, tenggelam dalam massa petani lain dalam desa yang menjadi kesatuan administratif.

Setelah 1870, pajak tanah semakin sering dipungut dengan uang, dan para pekerja dibayar dengan upah. Akan tetapi, upah mereka tetap rendah, sedangkan pajak tetap saja tinggi, karena tetap didasarkan atas prinsip kontrak sewa-menyewa antara tuan tanah — negara kolonial — dan petani-petani. Dan karena itu, seperti dalam tiap negara feodal, pada dasarnya tinggi.[19] Seorang sarjana ekonomi Belanda, H.J. Boeke, sampai mengatakan bahwa "desa membeli uang". Artinya, tidak cukup menghasilkan untuk bisa menabung atau melakukan investasi.[20)]

Peranan Golongan Perantara

Belanda sering membanggakan diri bahwa salah satu anugerah *Pax Neerlandica* adalah keamanan dan ketentraman Pulau Jawa dibandingkan dengan peperangan-peperangan zaman dahulu. Ini memang benar, namun hanya pada permukaan. Hal ini penting untuk menjelaskan gejala pemberontakan. Bukankah kekerasan

selalu menimbulkan kekerasan yang lain? Di Hindia Belanda, dasar-dasar pemerintahan adalah juga kekerasan. Biarpun kekerasan ini diberi nama melalui pengadilan, polisi resmi, alat pemerintahan dan lain-lain, tetapi rakyat tidak kurang melihatnya sebagai kekerasan, terutama bila peraturannya tidak dimengerti. Kekuasaan setempat diberi hak untuk menghukum *politierol* atau pengadilan singkat berada di tangan eksekutif. Sampai tahun 1870, para lurah yang melanggar peraturan masih dipukuli di depan umum. Selain itu, sering dikatakan bahwa ciri administrasi Belanda adalah keinginan mengatur segala segi kehidupan masyarakat seperti pagar-pagar desa, jalan-jalan, lampu-lampu di depan rumah, sampai-sampai pada cara orang harus jalan, naik kuda dan seterusnya. Ada seribu satu macam peraturan yang kebanyakannya tidak masuk akal siapa juga.[21)]

Banyak penguasa insaf akan hal ini namun tetap menciptakan peraturan-peraturan sehingga timbul ancaman psikologis terhadap masyarakat. Bila perlu, ini digunakan untuk memukul musuh-musuh. Akibatnya, ada perasaan takut dan terancam di kalangan penduduk. Hal ini terlihat pada gejala-gejala amok, pembunuhan-pembunuhan sekonyong-konyong, dan panik-panik umum lainnya. Bila, misalnya, ada gedung, jembatan atau pabrik yang mau didirikan, sering timbul desas-desus yang menyebarluas mengenai diperlukannya seorang anak kecil untuk tumbal bangunan tersebut. Orang Belanda atau orang luar yang kebetulan jalan-jalan di desa, dapat dikroyok rakyat yang berteriak: "culik-culik". Maksudnya ada usaha penculikan anak oleh orang-orang asing tersebut. Kadang-kadang, rakyat di dekat bangunan yang mau didirikan itu lari karena takhyul tersebut. Namun, panik umum ini berhubungan erat dengan kenyataan bahwa bangunan baru memerlukan kerja paksa baru, atau bentuk campur tangan lain dari pemerintah ke dalam kehidupan desa.[22)] Dari uraian di atas, baik mengenai perubahan-perubahan sosial maupun mengenai suasana masyarakat, dapat diduga bahwa jalannya roda pemerintahan atas dasar administratif dan peraturan-peraturan sangat minim sekali. Yang tetap menjadi pedoman para penguasa adalah manipulasi penguasa-penguasa setempat.

Di kalangan penduduk desa, pada masa itu, timbul berbagai tokoh penengah atau *tussenpersonen*, kata Belanda. Perantara-perantara ini adalah calo-calo kekuasaan yang timbul dari golongan sederajat (*peer-group*). Dalam zaman Tanam Paksa, umpamanya,

para perantara ini diberi nama *palang* atau *penatus*. Dia adalah seorang lurah yang timbul di antara lurah-lurah sekelompok desa yang berdekatan. Lurah-perantara ini dekat dengan bupati karena berbagai soal dan karena itu mendapat kepercayaan pada lurah lain dan penduduk setempat untuk berunding dengan bupati mengenai jatah tenaga kerja. Akan tetapi, *palang* bukan wakil dari para lurah atau rakyat desa tersebut. Sebaliknya, dia bisa mengancam mereka; bila kuota kerja paksa yang sudah berhasil ditawarnya serendah mungkin tidak dipenuhi, maka kuota kerja tersebut akan dinaikkan, biarpun *palang* bekerja untuk bupati, dia dapat memberikan kesan bahwa dia membela kepentingan rakyat, untuk mana dia mendapat tanah di tiap desa yang berada di bawah pengaruhnya. *Palang* malahan lebih berpengaruh daripada lurah-lurah desa. [23)]

Perantara-perantara terutama timbul di mana keaktifan negara terlihat, seperti dalam hal perpajakan dan ketatatentraman. Ketika pajak dipungut dengan uang, *kebayan* memainkan peranan penting dalam soal tawar-menawar dengan setiap penduduk desa menganai jatah pajaknya. Dalam soal-soal ketentraman, *weri* (penjahat/*informan*), yang juga disebut *blater* (orang pintar), muncul. Perantara ini menolong penduduk dalam menghadapi beribu peraturan atau tingkah-laku polisi yang sewenang-wenang. Pada zaman itu, polisi belum memakai metode detektif dalam mencari penjahat, mereka lebih sering memaksakan pengakuan para penduduk dengan cara-cara yang menyukarkan mereka. Sebenarnya, para perantara ini juga melakukan kontrol sosial yang tidak resmi dan berguna bagi penguasa. Sampai di manakah struktur perantara-perantara ini sendiri menghalangi sampainya keluhan-keluhan penduduk kepada penguasa? Apakah bukan sistem kontrol sosial melalui informan-informan ini yang justru akan menimbulkan eksplosi-eksplosi melalui gerakan Ratu Adil ?

Adanya perantara-perantara ini, *palang*, *kebayan*, *weri* atau *blanter*, menunjukkan semacam keterlibatan (*involvement*) dalam arti perundingan-perundingan antara golongan-golongan tertentu di desa dan pemerintah. Tentu hal ini terjadi di lapangan-lapangan di mana kedua pihak paling banyak berhubungan. Golongan yang paling banyak berurusan dengan penguasa adalah golongan-golongan yang sedikit lebih berada di desa; dengan kata lain golongan pembayar pajak dan pemilik tanah. Pokoknya, golongan ini tidak menerima secara pasif semua yang dititahkan dari atas. Selain itu, golongan ini juga yang secara relatif terorganisasikan dengan baik

di desa. Golongan pemilik tanah dalam zaman kolonial diwajibkan untuk berlaku sebagai badan-badan keamanan desa; mengadakan patroli-patroli jalan, jaga malam, jaga gardu, menahan orang yang datang dari luar desa dan lain-lain. Justru golongan ini dalam zaman kolonial merosot kedudukannya menjadi kuli ekonomi kolonial. Di belakang keadaan yang tampak aman di desa, terdapat banyak tekanan-tekanan dan ancaman yang terwujud dalam gejala-gejala kekerasan dari golongan penjaga keamanan, seperti *kroyokan* dan kecurigaan terhadap orang luar desa. Namun, untuk mengatakan bahwa pemberontakan golongan ini, di sekitar tokoh Ratu Adil, sebagai semacam tindakan amok atau tidak rasional adalah terlalu jauh. Sebaliknya, penulis harus melihatnya sebagai akibat perkembangan-perkembangan sejarah sebelumnya, dari ancaman kekerasan atasan yang menimbulkan kekerasan bawahan, dari sudut jatuhnya kedudukan golongan-golongan elite desa. Ideologi kepentingan-kepentingan petani dan tradisi-tradisi oposisi atau keterlibatan mereka dalam politik sehari-hari sebaiknya menjadi arah penelitian kita.

Ratu Adil dalam Pakem Jayabaya

Bukti-bukti yang sampai sekarang menunjukkan bahwa Serat Jayabaya berasal dari kira-kira pertengahan abad ke-18 dan yang menjadi populer selama abad ke-19. Pejabat dan sarjana Belanda sangat tertarik terhadapnya, karena eskatologi masyarakat tentang datangnya Ratu Adil ini dilihat sebagai sumber kerusuhan. Ada juga yang menunjukkan kepada pandangan tentang siklus sejarah yang terwujud dari dokumen tersebut. Ini semua mungkin benar, sebab dokumen ini sangat kompleks sifatnya. Di sini Serat Jayabaya akan dianalisa sebagai dokumen sosial. Ditinjau dari sudut ini, sebenarnya, bagi masyarakat hanya ada dua zaman, yakni, zaman *edan* di mana mereka hidup, dan zaman emas yang diharapkan. Bagi kita adalah sangat penting untuk melihat perbedaan antara kedua zaman itu, untuk melihat apa yang dirasakan sebagai isyu-isyu di masyarakat:

> Senapati adalah raja pertama Mataram ... Akan tetapi, setelah 100 tahun, perang saudara hebat akan pecah antara para anggota keluarga raja yang saling mencoba merebut takhta dan kerajaan akan jatuh. Pada zaman ini, pelaut-pelaut akan datang ke Jawa ... pada akhirnya, mereka akan menjadi

pemenang dan membagi kerajaan ... akan datang zaman kekacauan yang lebih besar. Kemarahan Tuhan akan menghukum tanah Jawa. Kemakmuran hilang ... Yang agung menindas rakyat. Kebenaran diganti dengan kebohongan. Keris-keris emas, sapi, kerbau, kuda, dan senjata-senjata dijual dari negara. Kalau ada panen orang tidak memungutnya .... Uang emas dan mata uang Inggris diekspor keluar negeri ... Rakyat kekurangan. Orang tidak bisa tinggal tenteram di rumah, karena itu mereka tinggal di sepanjang jalan ... Yang agung kejam terhadap yang rendah. Keadilan tidak tetap. Pajak-pajak dipungut dengan uang dan 'realen', yang selalu berbeda-beda jumlahnya, dan yang selalu saja naik. Perintah-perintah raja mengakibatkan sengsara. Rakyat *ngalor-ngidul*, "ke Utara dan Selatan", kebingungan.[24]

Yang mengakhiri zaman *edan* ini adalah Sri Tanjung Putih, Ratu Adil pertama setelah zaman yang sangat jelek, yang membunuh musuh-musuhnya. Namun, di bawah pemerintahan Ratu Adil Sri Tanjung Putih pun terdapat pajak-pajak "satu dinar atas empat buah tanah". Selanjutnya, "raja mengambil keputusan-keputusan melalui musyawarah dengan rakyat". Sayang zaman emas ini juga bersifat sementara saja sebab disusul dengan zaman "angkara murka", di mana para bupati saling berebutan kedudukan. Apa yang menyebabkan hilangnya zaman emas ini tidak jelas. Dalam zaman Ratu Adil ke-2, di bawah Erucakra, pajak-pajak bersifat lebih rendah lagi, namun dalam taraf kesimpulan-kesimpulan. Yang menarik perhatian kita ialah bahwa rupanya pemerintah pada zaman *edan* tetap dapat memungut pajak-pajak tinggi, menindas rakyat dan lain-lain. Dengan kata lain, wahyu dan legitimasi suatu pemerintah tidak terletak pada baik buruknya kebijaksanaan. Kekuasaan itu sendiri dapat dipergunakan untuk hal-hal buruk dan baik. Hal ini rupanya sangat erat hubungannya dengan keadaan konsolidasi kekuasaan — yang memerintah secara baik atau buruk namun tetap berkuasa karena dibantu Belanda — sepanjang masa yang dibicarakan oleh Serat Jayabaya. Lalu, satu-satunya yang dapat mengubah keadaan adalah takdir (predestinasi). Tiap kekuasaan hanya diberi waktu singkat, namun yang menggantikannya bukan selalu masa baik Dalam Serat Jayabaya, apa yang disebut sebagai periode jelek biasanya disebabkan karena manusia, seperti pajak tinggi, pemberontakan, perang tahta dan

lain-lain. Tidak ada, atau hanya sedikit sekali disebut bencana-bencana alam seperti gagalnya panen, meletusnya gunung berapi ataupun bencana kelaparan sebagai gejala-gejala masa jelek.

Serat Jayabaya bukan satu-satunya tulisan yang memuat eskatologi, yang mengesahkan kekuasaan buruk. Serat-serat dan babad-babad lain yang ditulis pada zaman tersebut perasaan atau ideologi anti-negara di kalangan masyarakat? Ideologi anti-negara tidak ada hubungannya dengan anti kolonialisme atau nasionalisme, biarpun ideologi ini ditimbulkan dalam keadaan kolonial. Persoalannya adalah antara negara dan masyarakat. Gerakan Ratu Adil tidak dapat dianggap sebagai persoalan polisi biasa. Seringnya pemberontakan-pemberontakan dan popularitas konsep Ratu Adil menunjukkan adanya persoalan-persoalan fondamental dalam hubungan negara kolonial dan rakyat. Konsepsi Ratu Adil sendiri tentunya hanyalah suatu ilusi yang memuaskan perasaan-perasaan untuk bernegara, asal saja rajanya hanya dalam impian.

CATATAN

1. Anoniem, "De Zaak van Poeloeng, een ernstige vingerwinzing: "Het Onderzoek in de zaak Poeloeng", dalam *Indische Gids*, 1886 Vol. VIII, prt. I hlm. 231–238 hlm. 378 – 380.

2. Mainhapport 1885 nos. 677 & 721; Mainhapport 8a & 8b, 1886, Arsip Kolonial, Nederland.

3. *Ibid.*

4. Sartono Kartodirdjo, "The Peasants' Revolt of Banten in 1888", 's–Gravenhage, 1966. Sartono Kartodirdjo, *Protests Movements in Rural Java*, (Oxford: Oxford University Press, 1973).

5. Onghokham , "Pulung–Affair: Pemberontakan Pajak di Desa Patik. Beberapa Aspek Politik Desa di Madiun pada Abad ke-19", *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, jilid VII, No. i, Jan. 1977, hlm. 1 – 24.

6. Sartono Kartodirdjo, "Agraria Radicalism in Java: Its Setting and Development", dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, berkat bantuan Benedict R.O.G. Anderson, James Siegel, (Cornell University Press, 1972).

7. Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century, (Cornell University Press, 1968) hlm. 93.*

8. *Ibid.* hlm. 15.

9. M.C. Richklefs, *Jogyakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792. A History of the Division of Java*, (Oxford University Press, 1974) hlm. 16.
   H.J. de Graaf, "Het Kadjoran Vraagstuk", *Djawa*, XX, hlm. 273 dan seterusnya.

10. Private Collection Mackenzie, Ms., In India Office Library, London. Arsip yang berasal dari zaman "pemerintahan Inggris" di Jawa (1811-1816) mungkin yang terbaik mengenai soal-soal agraria pada permulaan abad ke-19 berhubung dengan pelaksanaan perkembangan pajak tanah oleh Inggris.

11. W.B. Bergsma, (ed.) Eindresume van het bij Gouvernements-besluit dd. 10 Juni 1876, No. 2, *bevolen Onderzoek vaarde Rechten ban den Inlander op den Grond op Java en Madoera*, 3 jilid, Batavia 1876-1896, Jilid III, hlm. 104 (disingkat sebagai: *Onderzoek ...*).

12. G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", dalam *Adatrechtbundel*, Vol, XXXIV, hlm. 302. Penulis harus hati-hati mengenai sumber-sumber Belanda mengenainya, sebab justru sistem perpajakan Mataram ini akan dijadikan legitimasi bagi sistem Tanam Paksa dan sistem perpajakan Hindia Belanda. Penulis menduga bahwa teori-teori yang paling ekstrem dipakai untuk ini karena menguntungkan Belanda. Rouffaer sendiri pada halaman di atas menyebutkan bahwa pajak tanah pada zaman Mataram tidak tinggi dan ini disebabkan oleh *slordigheid* (keteledoran) administrasi kerajaan Jawa akan tetapi penulis sendiri berpendapat karena sebab-sebab lain.

13. Private Collection McKenzie. *op. cit.*

14. *Onderzoek* Vol. II, hlm. 200; hlm. 206.

15. Mc Kenzie, *op. cit.*

16. *Ibid.*

17. *Babad Negara Patjitan*, L.O.R. no. 8563, Naskah, Leiden University Oriental Library, hlm 30-39.

18. Onghokham, *The Residency of Madiun. Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century*,Disertai Ph. D., Yale University 1975.

19. *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*, Vol. I. 1917, (2nd ed.) Artikel "Belastingen", hlm. 234.

20. H.J. Boeke, *De Economie van Indonesia*, Haarlem, 1935,

21. J.S. Furnivall, *Colonial Policy and Practice. A Comparative Study of Burma and Netherlands India*, 1st. ed. (Cambridge University Press, 1948) hlm. 271 dan seterusnya.

22. *Onderzoek naar de Mindere-welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera*, 1904-1915, "Recht en Politie", Vol. VIII, hlm. 114-117. (kemudian disingkat dengan: *Minderewelvaart*).

23. *Koloniaal Verslag*, 1877, appendix N.

24. Versi Serat Jayabaya yang dipakai di sini adalah: J.A.B. Wiselius "Djaja-Baja, Zijn Leven en Profetien", *Bijdragen Koninklijk Instituut*, vol. XIX, 1872 hlm. 172-217.

IV. SEJARAH PEMBESAR DI INDONESIA.

Sarana penting untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu negara modern adalah birokrasi atau aparatur negara seperti yang lazim disebut di Indonesia. Secara ideal, birokrasi bersifat sangat rasional serta impersonal, tanpa ciri subyektif apa pun. Dan karena sifatnya yang impersonal bagaikan mesin itulah birokrasi menjadi sangat efektif di masyarakat. Legalitasnya adalah atas dasar sifat tersebut. Mekanisme birokrasi diatur berdasarkan undang-undang dan berjalan secara otomatis, tanpa "pandang bulu". Promosi, perekrutan (penerimaan dalam birokrasi tersebut), gaji atau sumber penghasilan, hak pribadi dan jabatan para anggota yang terpisah, fungsi-fungsi (sifat yang menyolok dari birokrasi modern), khususnya hirarki, atasan dan bawahan dan lain-lain diatur dengan undang-undang.[1]
Negara menyerahkan kekuasaan untuk memerintah masyarakat kepada birokrasi ini. Salah satu segi penting dari birokrasi adalah keuangan.
Keuangan untuk keperluan kantor berbeda dengan gaji pegawai. Juga berbeda halnya antara penghasilan pribadi pegawai (umpamanya dari warisan) dan gajinya. Bila perlu, ada dana-dana istimewa untuk menjamin kejujuran anggota birokrasi tersebut, seperti dana politik, dana resepsi, dana ini dan itu, yang diatur lagi oleh undang-undang. Segi keuangan ini penting. Kalau kebutuhan birokrasi tidak cukup dibiayai, maka karena kekuasaannya ia akan memungut secara liar apa yang tak diperolehnya secara legal dari masyarakat.
Birokrasi negara ini demikian efektifnya sehingga dalam keadaan di mana sering terjadi pergantian kabinet seperti di Italia atau Prancis di bawah Republik keempat, birokrasi inilah yang menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, jatuh-bangunnya pemerintahan tidak demikian mengganggu umum. Di pihak lain, sifat mesin dari birokrasi menyebabkan ia dapat dipakai oleh rezim apa saja, baik rezim demokratis, fasis maupun diktatur. Bahkan pemerintah pendudukan militer dari musuh pun dapat menggunakan birokrasi yang telah ada, seperti terbukti ketika negara- negara Eropa diduduki Jerman selama Perang Dunia II. Selama itu, birokrasi negara-negara Eropa yang diduduki Jerman

tetap menjalankan tugasnya dan bekerja sama dengan musuh, termasuk dinas kepolisian dan bahkan kadang-kadang termasuk tugas-tugas rahasianya. Hingga, setelah Jerman kalah dan negara-negara Eropa dibebaskan, terhadap anggota-anggota birokrasi yang bekerja sama dengan musuh pada umumnya tidak diambil tindakan apa-apa sedangkan terhadap polisi atau orang lain yang bekerja sama dengan musuh diambil sanksi-sanksi hukum. Sebaliknya, kontrol hukum di bidang administrasi atas birokrasi berjalan sangat ketat. Betapa pun orang mengeritiknya, birokrasi modern inilah yang mendasari perusahaan modern dan lembaga atau badan negara dalam kehidupan abad ke-20. Pilihan kita antara ada atau tidak adanya birokrasi modern adalah pilihan antara administrasi teratur dengan kekacauan dan kekanak- kanakan (*dilettantisme*) dalam administrasi.
Bagaimana dengan alat-alat negara tradisional, misalnya kerajaan Mataram (abad ke-16) dan lain-lain? Tulisan ini khusus akan menyoroti persoalan alat- alat kekuasaan negara tradisional, artinya, negara-negara yang didasarkan bukan atas hukum namun atas orde yang sakral (keramat).

Aspek Hubungan Pribadi (Personal Links)[2]

Dalam kerajaan-kerajaan Jawa, baik pada zaman Hindu-Budha maupun di zaman Islam, raja merupakan pucuk pimpinan tertinggi. Pada dasarnya, raja adalah seorang Dewa-Raja, suatu konsepsi yang berasal dari zaman Hindu-Budha. Namun, dalam masa dinasti Islam Mataram yang sebenarnya posisi Dewa-Raja tidak dikenal. Dengan berbagai macam rasionalisasi dan legitimasi, raja tetap memiliki ciri-ciri dan sifat magis serta keramat, semacam Dewa-Raja dengan interpretasi agama Islam yang berlaku pada waktu itu di Indonesia (Jawa). Biarpun dalam teori raja adalah penjelmaan kehendak Tuhan, namun, dalam praktek perintah raja tidak dapat demikian saja dituruti dan ditaati rakyat. Dengan kata lain, antara raja dan rakyat perlu ada penghubung. Raja tetap memerlukan aparat, suatu golongan yang di Jawa disebut priyayi yang melaksanakan kebijaksanaannya atau yang memerintah rakyat untuk kepentingan raja.
Dalam kerajaan tradisional, antara teori dan praktek atau antara konsepsi dan kenyataan memang sering sangat berbeda. Prinsip muluk-muluk acap kali hanya untuk memberikan legitimasi kepada kekuasaan, tanpa selalu melahirkan kontrol kongkret. Bukan

saja raja mempunyai kedudukan keramat (Dewa—Raja) akan tetapi, juga para pangeran dan pejabat-pejabat lain dalam negara. Gelar magis sakral juga disesuaikan dengan kedudukan, tinggi atau rendahnya, besar dan kecilnya kekuasaan atau dekat dan jauhnya seseorang dari raja. Jadi, pangeran yang terdekat atau pejabat-pejabat kerajaan yang tertinggi menyandang gelar magis yang paling besar dibandingkan dengan pejabat yang lebih rendah. Menurut teori ini, kekuatan magis sakral juga didasarkan atas derajat kepangkatan dan jabatan.[3] Umpamanya, gelar pangeran mahkota menunjukkan kedudukannya seperti Mangkubumi. Sedangkan gelar ayahnya, sang Raja, adalah Hamengkubuwana atau Pakubuwana. Di sini jelas *bumi* dan *buwana* menunjukkan derajat kedudukan yang berbeda. Panglima perang umpamanya, diberi gelar Kusumoyuda (kembang perang). Seorang perwira rendahan diberi nama Prawiranegara atau Yudonegoro (panglima perang), sedangkan seorang pejabat administratif dinamakan sosro negoro (penulis negara) dan lain-lain. Di daerah, seorang penguasa bergelar *adipati, tumenggung, kyai, ngabei* dan lain-lain yang kadang-kadang, seperti juga antara pejabat-pejabat pusat, tidak menunjukkan kedudukan sakral, namun berdasarkan penguasaan terhadap jumlah orang.

Gelar-gelar itu datang dan bersumber dari raja. Inilah bedanya dengan birokrasi modern. Antara aparat negara dan raja ada hubungan pribadi dan sesuatu yang obyektif seperti umpamanya hukum. Dengan singkat, dalam negara tradisional ada hubungan pribadi antara raja dan aparatnya.

Pertama-tama, yang dijadikan alat terpercaya - para pejabat tinggi itu — adalah teman-teman seperjuangan dalam perang (*warcompanions*) atau para pengikut pribadi (*personal retainers*). Golongan yang mungkin dapat menjadi alat sang Raja adalah penguasa-penguasa lokal (daerah) yang telah ditundukkan raja namun tetap dipercaya sebagai pemegang kedudukan. Terhadap keluarga raja sendiri, seperti saudara-saudaranya, paman ataupun kemenakan-kemenakan, dalam berbagai tingkatan, sering hanya diberi jabatan-jabatan di pusat, yaitu keraton, agar dapat diawasi secara lebih ketat, sebab dari pangeran-pangeran inilah biasanya timbul pemberontakan dan rongrongan terhadap takhta. Namun, umumnya dapat dikatakan bahwa keluarga dinasti dipakai untuk alat pemerintahan. Di antara para pangeran ini, ada juga yang diangkat untuk jabatan di daerah, sebab, akhirnya tidak saja terhadap para

pejabat-pangeran ada kesulitan-kesulitan kontrol politik, tetapi juga terhadap semua pejabat.
Dalam membentuk para pejabat ini menjadi alat- alat kerajaan, kekuasaan juga didelegasikan pada mereka seperti tercantum dalam gelar-gelar sakral magis. Namun, di sini terletak persoalan terbesar dari pusat (keraton) yaitu keharusan menciptakan kontrol politik. Dengan kata lain, loyalitas para pejabat terhadap pribadi raja harus dijamin. Ada berbagai cara untuk ini. Secara ideologis diajarkan melalui dongeng-dongeng ajaran-ajaran lain, atau lakon-lakon wayang, nilai loyalitas dan akibat-akibat kemarahan raja terhadap para pengkhianat (cerita Hang Tuah, misalnya). Para pengkhianat yang durhaka akan ditimpa mala petaka langsung dari raja atau kalau tidak, dari Tuhan. Sering juga diadakan upacara-upacara, di mana para pejabat disadarkan bahwa "durhaka" akan menimpa mereka yang berkhianat, (dongeng *Keris Mpu Gandring* adalah contoh, demikian juga dengan *Batu Sriwijaya* yang memperingatkan para Datuk supaya jangan melakukan pengkhianatan; para datuk mungkin harus menjalankan upacara meminum air yang disiramkan atas batu tersebut).
Secara lebih kongkret, raja sering menahan anggota-anggota keluarga para pejabat tinggi dan para penguasa lokal di dalam keraton. Kadang-kadang, dengan dalih bahwa anggota-anggota keluarga ini - para priyayi muda — harus mendapat pendidikan di pusat, di mana nanti akan dipilih pejabat-pejabat baru atau untuk dijadikan calon menantu keluarga raja. Tinggal di keraton, bagi para priyayi muda, anak pejabat, memang sering tidak dirasakan sebagai sandera-sandera politik untuk menjamin loyalitas para ayah mereka. Baru kalau ada kecurigaan terhadap ayah-ayah mereka, para bangsawan muda ini dapat merasakan nasib yang berlainan.
Sifat hubungan pribadi antara pejabat dan penguasa lokal dengan pribadi raja, akhirnya sering dijamin melalui perkawinan dengan dinasti kerajaan. Keraton rupanya memiliki putra dan putri yang berdarah raja yang hampir tak terbatas jumlahnya. Melihat laporan-laporan pada permulaan abad, ke -19 ketika kerajaan Mataram masih menguasai hampir seluruh pedalaman Jawa Tengah dan Timur kecuali pesisiran, orang heran melihat bahwa bukan saja para *bupati*, *dipati*, *tumenggung* dan para *ngabei* atau *priyayi* yang memiliki pertalian darah dengan keluarga raja melalui ayah/ibu atau perkawinannya dengan putri keraton,

akan tetapi juga kepala-kepala desa yang berpengaruh dan kyai-kyai pesantren atau *perdikan-desa* (desa-desa yang dibebaskan dari pajak dan kerja bakti karena berjasa dalam hal lain).[4] Aliansi melalui perkawinan dengan dinasti memang menjamin kedudukan setempat para priyayi, meletakkan hubungan pribadi yang paling nyata antara para pejabat dan raja serta akhirnya, sedikit banyak menjamin loyalitas para pejabat terhadap rajanya.

Struktur Feodal Aparatur Raja

Di atas telah dibicarakan alat-alat kerajaan tradisional secara umum, yaitu bahwa antara priyayi dan pribadi raja ada hubungan erat, seperti melalui derajat magis sakral, politik, sandera atau dinasti (kekeluargaan). Corak ini berbeda dengan birokrasi modern, di mana hukum dan rasio menjadi dasar hubungan. Di bawah ini akan dibicarakan golongan para pejabat itu sendiri, yakni mengenai kedudukan sosial, fungsi dan aspek-aspek lain mereka. Akan disoroti dua golongan aparatur kerajaan tradisional: *priyayi* di Jawa dan *orang-kaya* di Sumatra Utara.

Priyayi

Dalam kerajaan tradisional Jawa, golongan priyayi merupakan para *kawula* raja yang langsung. Rakyat biasa bukan *kawula* raja, tetapi tunduk dan takluk pada masing-masing pejabat yang ditunjuk raja. Pada umumnya, raja tidak terlalu banyak memperhitungkan atau menghiraukan rakyat, sebab hanya golongan priyayi yang masuk dalam perhitungannya. Dengan sendirinya, pada para priyayi, timbul berbagai sikap mengenai rakyat mereka sendiri, yang sedikit banyak dianggap sebagai taklukan. Dan karena itu, para priyayi merasa memiliki hak penuh atas kekayaan maupun tenaga rakyat bawahannya itu.

Di samping itu, sifat penakluk dari golongan priyayi diperkuat, karena kebanyakan dinasti/keraton didirikan melalui kekerasan, peperangan atau pemberontakan. Penguasa-penguasa lokal juga lahir melalui penaklukan. Selain itu peperangan dan penaklukan merupakan aspek yang hampir abadi dalam kehidupan kerajaan-kerajaan tradisional. Kadang-kadang hal tersebut seakan-akan menjadi satu-satunya obyek kerajaan tradisional. Kalau tidak dipergunakan untuk ekspansi kekerasan digunakan untuk menaklukkan golongan--golongan tertentu di dalam kerajaan, sehingga

penyelesaian melalui senjata menjadi kebiasaan yang berlaku sehari-hari.[5]

Peperangan dan penaklukan menimbulkan, antara lain, golongan priyayi yang terdiri dari pimpinan perang. Setiap priyayi umpamanya, diberi sejumlah *cacah* (keluarga petani) di bawah mereka. Artinya, rakyat yang dibagi dalam *cacah-cacah* atau keluarga-keluarga petani tidak saja merupakan kesatuan pajak (=pemberi upeti dan kerja bakti), akan tetapi juga merupakan satu kesatuan militer (wajib ikut dengan priyayi yang ditunjuk sebagai tuan mereka dalam peperangan). Para *cacah*, yaitu rakyat, secara militer diikat sebagai pengikut priyayi.

Dalam hubungan ini, di kalangan raja dan para priyayi sebagai golongan penakluk — timbul pandangan serta kepentingan-kepentingan bersama menghadapi rakyat. Demi kepentingan golongan penguasa ini, timbullah pandangan bahwa penguasaan terhadap rakyat adalah juga penguasaan dalam bidang ekonomi seperti yang dinyatakan lewat upeti dan, dalam kedudukan sosial lewat ikatan kerja bakti. Jadi, sebagai penarik pajak dan pengorganisasi tenaga kerja bakti, baik bagi kepentingan sendiri maupun bagi raja, para priyayi berfungsi sebagai alat administrasi kerajaan. Hanya saja, administrasi kerajaan di sini tidak dapat ditafsirkan sebagai hal yang kaku. Jumlah upeti dan tenaga kerja umpamanya, sangat eklektis dan selalu disesuaikan dengan keadaan. Ia dapat ditawar. Artinya bahwa pihak atasan juga dapat menuntut sangat lebih dari semestinya atau sebaliknya bawahan dapat menyerahkan jauh lebih sedikit daripada yang ditentukan.

Kesan yang diperoleh dari laporan-laporan mengenai bagian yang diterima raja melalui sistem upeti dan pengerahan tenaga petani bagi keperluan raja sebenarnya tidak demikian banyak. Sebelum jatuh ke tangan pribadi raja, bagian terbesar masuk ke kantong-kantong para pejabat.[6] Sebab utamanya ialah: sistem keuangan kerajaan Jawa tidak diatur oleh pusat, akan tetapi setiap pejabat berdiri secara otonom sehingga orang menganggap biasa jika setiap pejabat menerima "persen" atau bagian kecil dari upeti-upeti yang dikumpulkan seorang pejabat misalnya. Otonomi dalam hal keuangan yang dimaksud adalah: setiap pejabat tidak digaji dari pusat dengan sejumlah uang tunai. Pembiayaan untuk tugas jabatannya pun tidak dibiayai dari atas. Antara keperluan pribadi dan keperluan jabatan memang tidak ada pemisahan. Pejabat harus mencari biaya-biaya sendiri dari *lungguh* (sejumlah *cacah* atas

sebidang tanah). Setiap orang dari kalangan rakyat yang untuk sesuatu harus berhubungan dengan pejabat diharuskan memberikan "persen" termasuk para pemegang *lungguh*. Sebaliknya seorang pemegang *lungguh*, sebelum dapat menyerahkan upeti atau tenaga kerja ke tangan raja, harus melewati berbagai pejabat keraton atau pengeran pada siapa "persen-persen" harus pula diberikan.[7] Namun, pada prinsipnya upeti atau apa yang ada padanya, akhirnya tetap harus jatuh ke tangan raja. Hanya saja, upeti yang jatuh ke tangan raja hanya sedikit. Karena itu salah satu hal yang menonjol dari kerajaan tradisional adalah kekurangan uang secara kronis. Selain itu dari sistem otonomi keuangan para pejabat tersebut, tumbuh sistem pungutan liar . Dapat dikatakan bahwa dengan sistem otonomi keuangan, pejabat dapat membiayai diri sendiri dan jabatannya melalui pungutan dari masyarakat, yang pada waktu itu belum bersifat "liar" tetapi legal.

Suatu unsur lain yang sangat menonjol dalam sistem pemerintahan dahulu adalah banyaknya perantara sebelum orang datang pada penguasa bersangkutan itu sendiri. Ada tiga faktor yang menyebabkan hal ini. Yang pertama adalah bahwa semua orang tentu ingin mendapat "persen " dari urusan negara. Ini adalah salah satu sumber kehidupan yang penting dari orang-orang di sekitar pejabat. Yang kedua, bahwa memang setiap pejabat mengukur prestise serta tingginya kedudukan sosial politik dari jumlah pengikut-pengikut di sekitarnya (kalau sekarang stafnya). Dan pengikut-pengikut (*retainers*) di sekitar seorang penguasa ini tentu mencari tambahan pendapatan sebanyak mungkin. Sedangkan pejabat yang merasa tidak perlu membiayai pengikut-pengikutnya, sebab mereka hidup dari "persen-persen", dapat menambah jumlah pengikutnya seakan-akan sampai jumlah tak terbatas. Yang paling dirugikan adalah pembayaran upeti dan yang harus bekerja bakti bagi penguasa; si petani di desa. Ketiga, jumlah besar perantara-perantara di sekitar seorang penguasa ini bersumber juga dari sikap yang harus diambil seorang priyayi, yaitu bahwa dia berada di atas segala hal duniawi, dan karena itu harus bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang sebenarnya terjadi di antara bawahannya. Dengan sikap angkuh dan menjauhkan diri, seakan-akan priyayi menjaga prestisenya di mata rakyat sebab dia sendiri tidak tahu pengorbanan-pengorbanan apa atau beban-beban apa yang diletakkan di atas pundak rakyat.[8] Ini juga menyebabkan sering dipakainya orang dari lapisan bawah sekali atau dari luar daerah bahkan orang asing — umpamanya Cina atau Arab

sebagai alat-alat eksploatasi. Orang-orang asing ini lebih efisien. Priyayi dapat lebih terbuka pada mereka tanpa takut kehilangan muka.[9]

Pada akhir abad ke-18 dilaporkan bahwa di kerajaan Mataram, beberapa *demang* dan *bekel* atau penarik-penarik pajak ditingkat desa adalah orang-orang Cina. Mereka dikatakan berhasil mengumpulkan lebih banyak uang dan tenaga dari rakyat dibandingkan dengan penduduk setempat. *Demang* dan *bekel* ini adalah pejabat-pejabat non-priyayi. Biasanya kalau bukan orang asing mereka itu adalah orang-orang terkemuka di desa dan ditunjuk oleh pemegang *lungguh* (priyayi) atau raja sebagai pejabat penarik pajak dan pengumpul tenaga kerja. Mungkin dari pejabat-pejabat ini kemudian timbul jabatan kepala desa.

Bila tadi dikatakan bahwa golongan priyayi adalah suatu kelas, maka kelas ini sebenarnya dibatasi oleh ketergantungan priyayi pada kehendak raja. Pada prinsipnya, kedudukan priyayi atau seorang pejabat tidak bersifat turun-temurun, hanya tergantung dari kehendak raja, walaupun dalam praktek prinsip tersebut dapat berlainan. Lebih penting lagi adalah hirarki. Dalam melakukan tugas--tugas yang seharusnya dilakukan pejabat bersangkutan, pengikut tersebut dapat lebih berkuasa dari atasannya sendiri sehingga timbul pergeseran fungsi-fungsi pejabat ke pengikutnya itu. Prinsip yang sama berlaku antara pejabat priyayi sendiri. Umpamanya, fungsi *patih* dapat diambil-alih oleh seorang bupati keraton urusan *dalem* yang sangat aktif. Pemindahan fungsi dan wewenang itu disebabkan oleh tidak adanya garis tegas administratif hingga akhirnya tergantung dari individu-individu dalam pemerintahan raja.

Orang-Kaya

Golongan priyayi serta kerajaan Mataram bukanlah satu-satunya contoh dari sistem pemerintahan tradisional di Indonesia. Masih ada kerajaan-kerajaan lain seperti Melayu, Aceh, Bugis dan lain-lain. Tentu tidak semua bisa kita tinjau. Di sini, Mataram akan dibandingkan dengan Aceh, kerajaan di bagian Sumatra Utara yang besar dan kira-kira sezaman dengan Mataram; permulaan abad ke-17.[10] Akan tetapi berlainan dengan Mataram yang bersifat agraris, Aceh adalah kerajaan maritim.

Bila di Mataram golongan penguasa disebut priyayi, di Aceh mereka disebut orang-kaya (artinya orang daya atau jaya, suatu

istilah yang kini paling dekat dengan istilah yang sehari-hari dipakai seperti: pembesar, penguasa dan pejabat). Istilah orang-kaya bagi golongan berkuasa juga dipakai di Sulawesi, kerajaan-kerajaan Sumatra dan pada umumnya di Indonesia. Tetapi tidak berarti bahwa di semua tempat, fungsi mereka sama dengan yang di kerajaan Aceh.

Berlainan dengan priyayi di Mataram, para orang-kaya Aceh tidak menarik pajak, ataupun berhak atas tenaga kerja rakyat setempat. Ikatan-ikatan feodal dengan rakyat hampir tidak ada, kecuali dalam peperangan. Aceh adalah negara maritim dan dagang. Penguasaan terhadap perdagangan menjadi tujuan dari sultan sampai pada orang-kaya yang juga terkenal dengan istilah hulubalang. Para hulubalang menguasai perdagangan setempat dan sering menguasai muara-muara sungai atau pelabuhan kecil lainnya. Penguasaan ini memberi para hulubalang hak untuk membebani segala impor dan ekspor dengan pajak sebesar 5 persen dan lebih banyak lagi atas ekspor lada dan pinang. Hulubalang ini sering juga membiayai penanaman lada dan hasil-hasil ekspor lainnya. Dengan demikian, mereka menguasai perdagangan hasil-hasil ekspor ini di samping hak bea cukainya.

Hulubalang sebenarnya tidak lain daripada pemimpin perang, kapital dan pengusaha (dagang) setempat.[11] Hulubalang tidak menyerahkan baik upeti maupun tenaga kerja kepada sultan atau pemerintah pusat. Sejak kira-kira abad ke-18, para sultan kelihatannya hanya "boneka" belaka. Bila para sultan mencoba menandatangani perjanjian-perjanjian dagang dengan kompeni asing seperti VOC dan lain-lain, maka para hulubalang menekannya untuk menghapuskan perjanjian-perjanjian tersebut. Sejak pemerintahan Iskandar Muda (1607 — 1636) lambat laun kekuasaan berpindah ke tangan para bangsawan, sesuatu yang tidak terjadi di Mataram meskipun di sini kekuasaan pusat terhadap daerah juga berubah.

Aristokrasi versus Monarki

Salah satu persoalan yang dihadapi kerajaan-kerajaan tradisional, baik Mataram maupun Aceh, adalah konflik kepentingan dan persaingan kekuasaan antara raja dan para priyayi atau orang-kaya. Baik priyayi maupun orang-kaya memiliki kekuasaan yang cukup besar. Mereka sangat sukar diawasi. Kekuasaan para pejabat bersifat otonom atau berdiri sendiri baik dalam keuangan (tidak ganti Sultan Aceh. Para orang-kaya sampai bertindak untuk

mendapat gaji tetap dari pusat, pendapatan adalah hasil sendiri) maupun di bidang politik, dengan penguasaan terhadap para pengikut atau rakyatnya. Persaingan kekuasaan antara bangsawan dan raja, baik pada tingkat pusat maupun daerah, hampir tidak terhindarkan.

Di Mataram sering terjadi pemberontakan, baik dari daerah (Trunojoyo, 1672) maupun di pusat, misalnya, dari kalangan keluarga raja (Diponegoro, 1825—1830). Di sini, nampak bahwa pemberontakan para priyayi atau pangeran terhadap kekuasaan raja sering berkisar pada seorang pemimpin yang bertujuan menjatuhkan dinasti atau menggantikan raja, sehingga tujuan pemberontakan-pemberontakan tersebut seakan-akan merombak seluruh hidup kerajaan. Penindasan terhadap berbagai pemberontakan ini akhirnya hanya dapat dilakukan oleh raja dengan bantuan VOC dan dengan harga yang tinggi. Daerah-daerah Mataram lambat-laun terpaksa dilepaskan, dan para penguasa daerah mengaitkan kepentingan mereka dengan Belanda atau dalam kata-kata Belanda "menempatkan diri di bawah perlindungan kekuasaan Belanda". Bagi Belanda yang hanya bertujuan memperoleh hasil-hasil agraria mendapatkannya melalui raja Mataram atau para bupati di pesisir adalah sama saja.

Jadi, aliansi raja Mataram yang pada mulanya bertujuan memperkuat kedudukan raja baik terhadap golongan pangeran, priyayi di pusat maupun daerah akhirnya menyebabkan terpecah-belahnya kerajaan menjadi daerah demi daerah, pertama-tama Jawa Barat, kemudian pesisir utara dan akhirnya Mancanegara Timur dan Barat.

Berlainan dengan proses di Mataram, para orang-kaya di Aceh, dari permulaan, rupanya memiliki berbagai kekuasaan terhadap pusat sebagai suatu golongan, seperti pengaruh untuk memilih sultan baru dan lain-lain. Iskandar Muda, sultan Aceh ketiga, terbesar, dan yang sezaman dengan Sultan Agung dari Mataram, ketika hendak berkuasa sebagai raja absolut, terpaksa membunuh seluruh golongan orang-kaya dan mengangkat orang-kaya baru, dari kalangan dan pengikut-pengikutnya sendiri, yang selama pemerintahannya ia kekang dan ia awasi.[12]

Namun, tindakan-tindakan radikal Iskandar Muda ini rupanya tidak mengubah kesadaran kepentingan bersama para orang-kaya Aceh. Sesudah Iskandar Muda wafat pada tahun 1936, golongan orang-kaya merebut kembali hak untuk memilih pengganti-peng-

memilih beberapa kali sultan-sultan putri, dan tidak pria, sebagai raja untuk menjamin bahwa takhta tidak diduduki oleh seorang kuat dan mereka dapat menjadikan kesultanan sebagai suatu lembaga "boneka".

Di Aceh, rupanya, proses politik yang disebabkan oleh pertentangan antara raja dan bangsawan tidak berkisar melalui kepemimpinan seorang tokoh kharismatis seperti Trunojoyo atau Diponegoro yang ingin menggantikan dinasti atau raja. Proses ini berjalan melalui tindakan suatu golongan terhadap raja dan suatu proses tawar-menawar mengenai pembagian kekuasaan antara kedua belah pihak. Hasilnya adalah: kerajaan tetap utuh sampai Belanda menyerang Aceh pada tahun 1870, yang berakhir dengan pendudukan militer Belanda di Aceh sampai 1942. Di Jawa terjadi proses politik yang sebaliknyya, yaitu lahirnya integrasi kekuasaan priyayi dengan kekuasaan Belanda.

Apakah sebenarnya yang menyebabkan proses politik di Aceh dan Mataram ini demikian berbeda? Di sini hanya dapat dikemukakan hipotesa sementara bahwa perbedaan proses politik ini mungkin terletak pada perbedaan tujuan negara masing-masing. Aceh nampaknya hanya berkepentingan pada kontrol terhadap perdagangan, kecuali pada masa Iskandar Muda, sedangkan Mataram hidup dari upeti dan tenaga bakti rakyatnya. Di Mataram, hanya kedudukan raja yang memberi orang kekuasaan absolut. Struktur yang ada bersifat feodal di mana hubungan saling berkaitan. Sedangkan di Aceh persaingan antara para orang-kaya (hulubalang) dengan sultan, terutama di bidang perdagangan, sehingga proses politik yang terjadi lebih bersifat proses persaingan antara para pedagang. Para orang-kaya hanya bertujuan memecah kedudukan sultan sebagai pemegang monopoli atas perdagangan dan usaha penarikan bea cukai dan lain-lain Tanpa mengganti dinasti atau sultan sendiri, biasanya para orang-kaya telah dapat mencapai tujuan-tujuan mereka sebab upeti pada sultan pun tidak perlu dibayar. Sultan memiliki gelar nama kedudukannya sebenarnya tidak lain daripada salah satu dari orang-kaya belaka. Singkatnya, untuk membedakan secara ekstrem dan umum, dapat dikatakan bahwa persaingan antara priyayi dan raja di Mataram berkisar pada kekuasaan, sedangkan di Aceh persaingan antara orang-kaya dan Sultan didominasi oleh persaingan dagang serta usaha pengumpulan dana antara kedua pihak.

Orang-kaya Aceh sebenarnya lebih dari para usahawan dan pedagang. Mereka juga adalah elite militer yang berfungsi sebagai

elite tradisional. Dari fungsi-fungsi perang golongan hulubalang, sebenarnya, terlihat juga suatu aspek penting, yaitu bahwa baik priyayi maupun orang-kaya pada dasarnya adalah suatu kelas elite militer. Salah satu fungsi penting elite ini adalah peperangan dan kepemimpinan militer. Ini yang memisahkan mereka dari rakyat biasa. Berlainan halnya dengan Eropa pada abad pertengahan. Di abad pertengahan, kelas bangsawan Eropa memiliki monopoli atas senjata-senjata karena adanya pakaian besi baja, kuda-kuda dan benteng-benteng mereka. Di Indonesia, pakaian besi baja tidak begitu diperkembangan. Monopoli elite militer terletak pada benda-benda lain. Namun monopoli ini tetap ada, umpamanya atas gajah. Senjata militer yang paling ampuh di Asia pada zaman itu adalah senapan dan mesiu yang biasanya dimiliki raja. Para priyayi ini juga memiliki senjata magis-keramat yang hebat seperti keris pusaka atau tombak pusaka dan lain-lain yang tidak dimiliki rakyat petani.

Namun, akhirnya, keunggulan militer baik dari orang-kaya maupun priyayi terhadap rakyat mungkin terletak pada kepemimpinannya. Rahasia kepemimpinan militer seperti formasi-formasi pertempuran, dan lain-lain, hanya dimiliki elite dibantu oleh pemuka-pemuka agama atau ahli perbintangan, karena formasi-formasi militer sering didasarkan atas ilmu perbintangan dan para ahli nujum yang dapat meramalkan waktu yang tepat untuk peperangan. Memang, keunggulan militer dalam pikiran orang zaman itu juga sangat bersifat magis keramat. Dan ini dimiliki para bangsawan. Jabatan militer dan disiplin pada zaman itu tak ada bedanya.[13] dan kedudukan tersebut akhirnya menjamin kedudukan politik ekonomi golongan bangsawan tradisional.

Kelemahan Struktur Tradisional

Di atas, terlihat betapa sukarnya mengawasi aparat suatu kerajaan tradisional, baik Mataram maupun Aceh. Kesadaran tentang sukarnya mengontrol wilayah yang luas mungkin melahirkan suatu konsepsi mengenai kekuasaan atas wilayah negara. Luas wilayah takhta dan raja adalah penting. Pusat kerajaan adalah penting. Kalau ada wilayah yang terpikirkan, maka itu hanyalah meliputi daerah-daerah di sekitar keraton yang di sebut *negara agung*, daerah yang dieksploatasi dan diperintah langsung oleh keraton. Memang, selain *negara agung* Mataram memiliki wawasan-wawas-

an seperti *mancanegara* timur dan barat yaitu daerah-daerah di sebelah *negara agung* pesisiran (pantai utara) dan daerah-daerh seberang. Namun daerah-daerah tersebut hanya dilihat sebagai pengaruh atas keagungan dan keselamatan keraton pusat.[14] Dari keraton, tampak terpancar pengaruh atas wilayah-wilayah di atas dan makin jauh letak daerah dari keraton, makin lemah pengaruh keraton itu dan juga makin tidak membahayakannya.[15] Di sini juga terletak sebab, mengapa Mataram dapat melepaskan daerah demi daerah ke tangan Belanda, asal keraton mendapat bantuan dari VOC dan tetap aman. Pada akhirnya, Mataram tidak menguasai daerah-daerah pesisiran dan lain-lain yang tidak banyak merugikan daerah agung dan yang dapat melepaskan diri dari keraton tersebut.[16]

Karena sukarnya mengawasi dan memerintah daerah-daerah, peperangan yang dilakukan kerajaan jarang sekali bertujuan untuk menganeksasi daerah-daerah. Daerah yang ditaklukkan biasanya dipaksa menyerahkan sandera yang terdiri dari penguasa (bangsawan) setempat dan putra-putra diikat dengan pertalian dinastik dengan keraton serta dilarang berdagang atau berproduksi oleh monopoli kerajaan yang menaklukkan daerah tersebut. Namun, pemerintahan langsung oleh kerajaan yang menang terhadap kerajaan atau daerah yang ditaklukkan tidak pernah terjadi. Untuk ini, aparat kerajaan tradisional terlalu lemah. Upeti dan tenaga bakti adalah suatu bentuk penaklukan lain.

Kelemahan aparat pemerintahan kerajaan tradisional mengakibatkan suatu cara lain untuk menghadapi daerah-daerah di mana raja merasa perlu ditaklukkan dan yang banyak menyebabkan penderitaan orang pada waktu itu. Peperangan dapat dilakukan dengan tujuan menghancurkan sama sekali daerah musuh dan menghapuskannya dari peta bumi. Untuk ini, dihancurkan kota tempat penguasa musuh berdiam. Sedangkan daerah tersebut, sebagai daerah produksi, dibumihanguskan dan seluruh penduduk diangkut ke daerah keraton yang menang. Penduduk musuh yang diangkut lalu dijadikan semacam budak untuk keperluan produksi dan tenaga bakti, sebab kerajaan tradisional selalu dihadapkan pada kekurangan tenaga manusia. Sultan Agung, umpamanya, menghancurkan Surabaya dan mencoba menghentikan segala macam oposisi dari Madura dengan menawan 40.000 penduduknya.[17] Berbagai daerah Semenanjung Melayu seperti Pahang, Perak dan lain-lain tunduk pada Aceh yang memiliki monopoli atas produksi lada di berbagai daerah tersebut. Namun, ketika

dilihat kontrol menurun di daerah-daerah tersebut, penghancuran diperintahkan oleh Iskandar Muda. Aceh tidak menginginkan produksi lada daerah Semenanjung Melayu jatuh ke tangan saingan dagang Aceh. Daerah--daerah lada dibumihanguskan. Penduduk yang ditawan berjumlah 22.000 orang dan diangkut ke Aceh, namun, dalam perjalanan banyak yang mati sehingga tinggal 1500 orang.[18] Dalam zaman yang demikian banyak memerlukan tenaga manusia itu, nyawa dan penderitaan manusia sangat tidak dihiraukan.

Teror semacam itu tidak saja dilancarkan pada musuh-musuh di luar kerajaan, akan tetapi juga sering ditujukan pada oposisi dalam kerajaan sendiri. Tiba-tiba dapat terjadi pembunuhan massal terhadap pengikut beserta keluarga musuh politik atau eksekusi dan proses pengadilan. Pembunuhan dapat dilakukan terhadap seorang pejabat tinggi, pangeran atau dalam keadaan lunak penangkapan dan pembuangan dapat menimpa setiap pejabat yang dicurigai.[19] Kebijaksanaan teror dari kerajaan ini berhubungan dengan konsep untuk menimbulkan ketakutan terhadap kesanggupan negara menindas musuh-musuhnya, baik di luar maupun di dalam. Kebijaksanaan tersebut harus menutupi kelemahan sebenarnya dari aparat negara. Teror yang dilakukan kerajaan-kerajaan tradisional sebenarnya menunjukkan adanya kelemahan lain dari struktur aparatur kerajaan tersebut. Negara rupanya hanya mampu memobilisasikan alat-alatnya guna satu aksi dengan satu tujuan untuk suatu saat yang agak singkat dan tertentu. Kerajaan-kerajaan tidak dapat melahirkan aparat yang dapat diawasi terus-menerus. Ia terlalu banyak tergantung pada faktor-faktor manusiawi dan pribadi, tidak pada faktor-faktor obyektif, sebab penguasa-penguasa berdiri dalam otonomi yang besar dan masing-masing dengan kekuatan sendiri. Mereka merupakan suatu kasta yang dijadikan alat kerajaan dan bukan sesuatu yang tidak punya kepribadian seperti para birokrat modern.

Mata-mata

Faktor pribadi dari alat-alat kerajaan ini melahirkan suatu kebijaksanaan lain, yaitu sistem intelejen (mata-mata). Kalau ada suatu bagian dari alat pemerintahan kerajaan yang agak efisien, maka alat itu adalah sistem untuk memperoleh informasi melalui mata-mata. Seluruh aparat priyayi dan orang-kaya sebenarnya diawasi melalui mata-mata. Tindakan-tindakan, pembicaraan atau-

pun kalau dapat rencana-rencana para priyayi serta pangeran dan lain-lain selalu ingin diketahui. Perjalanan orang, adanya tamu dari luar, harus dilaporkan. Pertalian-pertalian keluarga di antara priyayi, pemuka-pemuka agama, kekayaan, harta-milik, pembuatan senjata dan lain-lain senantiasa diawasi.[20]

Informasi melalui mata-mata memiliki beberapa kelemahan. Pertama, informasi hanya terbatas khusus mengenai hal-hal pribadi, tidak mengenai cara-cara pemerintahan yang memang tidak menjadi tujuan informasi. Kedua, informasi dari mata-mata harus diperlakukan dengan hati-hati sekali dan dengan sangat bijaksana. Faktor pribadi seperti balas dendam, memberikan informasi sekadar supaya kelihatan awas dan rajin dan seterusnya, atau "asal Bapak senang" sering merupakan faktor-faktor dalam keterangan mata-mata. Jadi, untuk memperteguh kecurigaan-kecurigaan dari atas terhadap seorang priyayi atau pangeran. Singkatnya, informasi mata-mata bila tidak diperlakukan dengan sangat bijaksana dapat lebih merugikan raja daripada menguntungkan.. Mata-mata dengan mudah menjadi sistem tirani yang sangat menekan dan yang justru menimbulkan pemberontakan dan perlawanan dari golongan priyayi. Senjata mata-mata akhirnya dapat memakan tuannya sendiri. Kelak dalam sejarah pemerintahan Hindia Belanda, tidak hanya sekali atau dua kali, sering seorang residen atau pejabat Belanda dijatuhkan karena penyalahgunaan dan kepercayaan terlalu besar terhadap keterangan-keterangan mata-mata, entah apakah karena "kerajinan" memang merupakan intrik mata-mata.[21]

Dengan singkat, penggunaan mata-mata dapat menimbulkan suasana curiga-mencurigai yang memang sudah merupakan unsur kuat dalam pemerintahan kerajaan tradisional, dan menambah kecurigaan dari atasan terhadap bawahan yang tidak jarang menimbulkan desintegrasi aparat pemerintahan. Korps mata-mata ini bersifat umum. Mereka tidak direkrut dari suatu golongan tertentu seperti priyayi atau para ulama, akan tetapi siapa saja bisa dijadikan mata-mata dan merupakan unsur "kerakyatan" kalau orang dapat menyebutnya demikian — dari kerajaan tradisional. Hanya saja mata-mata tidak memiliki wewenang bertindak sendiri. Dia hanya sebagai sumber informasi. Dia bukan pelaksana kebijaksanaan. Pelayan, pengawal pribadi atau priyayi, selir, tukang pijat dan lain-lain tidak terbatas dari kalangan sosial yang mana pun juga dapat dijadikan mata-mata. Informasi sering tidak datang dari mata-mata resmi akan tetapi dari seorang yang hanya karena salah

satu sebab, memberikan keterangan pada pusat .... Informasi dari kalangan masyarakat ini dapat diberikan karena masyarakat setempat takut pada pusat, benci pada penguasa setempat dan lain-lain hal.
Di samping mata-mata ini, pusat sering mengirimkan misi ke daerah-daerah yang dipimpin pejabat pusat, seorang pangeran terpercaya atau seorang menteri. Golongan ini sering merupakan "para utusan raja" *(ministeriales)* dan orang-orang terpercaya. Para utusan raja itu tidak saja mengawasi priyayi-priyayi lokal dan membuat laporan mengenai mereka, namun kadang-kadang juga diberi hak untuk bertindak terhadap seorang pejabat setempat. Kedudukan para utusan raja ini jadi sedikit lebih berkuasa daripada para mata-mata.[22]

Ideologi dan Agama

Pembicaraan di atas telah meninjau kerajaan tradisional dalam aspek-aspek fisiknya yaitu aparatur pemerintahannya dan sifat kelas dari aparat ini, akibat-akibat dari lemahnya struktur kerajaan terhadap konsepsi wilayah, metode peperangan dan alat-alat pengawasan terhadap seluruh struktur melalui mata-mata serta teror terhadap oposisi. Sekarang kita masuki dua aspek yang tidak kurang pentingnya yaitu ideologi dan agama. Dua unsur terakhir ini tidak dapat dipisahkan dari kerajaan tradisional atau mungkin dari setiap negara tradisional dan modern. Dalam kerajaan tradisional, ideologi berfungsi khusus sebagai sesuatu yang datang dari atas untuk masyarakat. Dalam negara modern, ideologi seakan-akan milik seluruh masyarakat dan merupakan refleksi yang otomatis (contoh: kemenangan regu bulu tangkis melahirkan antusiasme umum secara otomatis atau peperangan menimbulkan semangat nasionalisme di negara-negara modern tanpa perintah dari atas).
Ideologi dalam kerajaan tradisional mempunyai aspek mengikat lapisan "bawah" (masyarakat dan golongan-golongannya) dengan lapisan "atas" (raja), dan berkisar pada raja, takhta dan keraton. Keagungan raja dan keraton merupakan unsur terpenting. Berbagai tulisan menjelaskan kebesaran raja dan kebijaksanaan serta kekeramatannya. Pengkhianatan akan menimpa orang yang berkhianat. Digambarkan bahwa hanya ada dua pilihan, yaitu keagungan raja dan keratonnya atau kekacauan besar. Mungkin ada benarnya. Raja dan kehidupan keraton adalah puncak peradaban kerajaan. Di sini orang bersastra, melahirkan berbagai macam kesenian dan

adanya berbagai hiburan. Upacara-upacara kenegaraan penting. Ini menyebabkan orang mengatakan negara tradisional sebagai negara-sandiwara atau negara-panggung, artinya kehidupan politik dan konsepsi ideologi maupun struktur dimainkan dalam upacara-upacara di depan umum dan divisualkan pada masyarakat.[23]

Ada benarnya mungkin bahwa antara ada atau tidak adanva raja dan keraton adalah sama dengan pilihan antara adanya peradaban atau kekacauan khususnya bagi golongan *elite*. Keraton menjamin kehidupan enak dan beradab. Namun *elite* juga sering bermain politik; dan dalam hal ini sering bermain terlalu jauh sehingga membawa bencana. Di sini terletak kelemahan kerajaan tradisional yang begitu menekankan ideologi sebagai alat pengawasan tanpa memperkembangkan alat-alat kontrol kongkret yang lain.

Sehubungan dengan ideologi, agama juga memiliki struktur yang terdiri dari pemuka-pemuka agama atau para ulama yang dengan sendirinya dapat dipakai untuk pemerintahan kerajaan tradisional. Dalam kerajaan tradisional, baik itu kerajaan Hindu-Budha atau Islam, agama dijadikan dasar legitimasi. Bila dalam zaman pra-Islam konsepsi berkisar pada seorang dewa-raja maka dalam zaman Islam ditekankan konsepsi "*manunggaling kawula lan Gusti*", bersatunya *kawula* (rakyat) dengan tuannya (raja). Itu berarti bahwa rakyat harus tunduk pada kehendak raja untuk mencapai kemurnian di dunia dan di akhirat.[24]

Integrasi antara agama dan kerajaan adalah penting walaupun tidak semua raja berhasil mencapainya. Integrasi merupakan unsur yang sangat penting bila kita mengingat fungsi agama di masyarakat. Kalau priyayi mewakili satu golongan di masyarakat, agama cenderung mewakili seluruh lapisan masyarakat, baik raja, priyayi maupun petani atau pedagang dan tukang. Dengan singkat, agama bersifat non-golongan dan non-kelas. Ini menyebabkan kerajaan-kerajaan tradisional mencari legitimasi dalam agama. Dan memang tidak mungkin lain, sebab pada zaman itu segala macam fenomena manusia dijelaskan melalui agama atau pemikiran agama yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Namun, ini tidak mengurangi sifat teokratis kerajaan-kerajaan tradisional.[25]

Ideologi yang merupakan aspek sentral dari negara teokratis atau negara atas dasar-dasar agama pada zaman itu, pada akhirnya berfungsi sebagai alat-alat fisiknya sangat lemah. Makin lemah struktur nyata negara makin besar peranan ideologi dan upacara-upacara untuk menutupi realitas kelemahan struktur fisik kerajaan-

kerajaan dengan selimut mistik. Namun, akhirnya, yang nyata inilah yang selalu membuka selubung penutup kelemahan, dengan melihat umur dinasti-dinasti maupun keraton-keraton di Indonesia yang tidak lama, dan raja-raja besar yang mengakhiri pemerintahannya dengan pemberontakan atau munculnya oposisi. Sayang bahwa yang nyata itu selalu menguapkan impian-impian dan detik-detik kesurupan (*trance*) dari upacara-upacara dan di keagungan raja, takhta dan keraton.

Kesimpulan

Penguasaan atas daerah-daerah yang dipengaruhi VOC (Belanda), menimbulkan persoalan-persoalan yang hampir sama dengan persoalan bagi kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia. Persoalan itu adalah lemahnya aparatur kekuasaan. Cara munculnya kekuatan VOC di Jawa sudah menunjukkan hal itu. Kekuasaan tidak timbul karena kemenangan-kemenangan militer, tetapi karena perjanjian-perjanjian dengan keraton atau penguasa-penguasa daerah seperti para bupati Pesisir dan Priangan. Kalau VOC tidak memperoleh monopoli atas produksi setempat mereka melancarkan aksi-aksi militer kilat untuk menghindarkan produksi jatuh ke tangan musuh-musuhnya atau merusak monopolinya atas rempah-rempah. Demikianlah tingkah laku VOC terhadap Kepulauan Banda dengan ekspedisi *Hongi*-nya yang terkenal kejam dalam sejarah atau melalui blokade-blokade pelabuhan dan lain-lain cara yang bisa dianggap sebagai perompakan bila dilihat dari hukum sekarang.

Yang lebih penting adalah terintegrasinya penguasa-penguasa Indonesia baik yang bersifat lokal (bupati) atau pusat (keraton) dengan kekuasaan Belanda. Pada masa permulaan antara Belanda dengan penguasa Indonesia, timbul perjanjian-perjanjian yang berarti bahwa untuk memperoleh hasil produksi Indonesia, Belanda menggunakan priyayi setempat atau keraton.[26] Aliansi ini memberikan monopoli atas produksi pada Belanda dan keuntungan serta dukungan politik bagi priyayi setempat baik terhadap rakyat maupun terhadap keraton. Sedangkan raja dibantu dalam menghadapi penguasa setempat atau saingan-saingan lain dari kalangan keluarga raja atau priyayi.

Pada abad ke-19, timbul konsep di kalangan Belanda untuk juga memakai golongan priyayi sebagai alat--alat pemerintahan (H.W. Daendels 1806 - 1810). Konsepsi-konsepsi ini sedikit banyak baru

dapat direalisasi dalam abad ke-19 dengan terwujudnya sistem Tanam Paksa (1830 -- 1870). Tanam Paksa tidak lain daripada suatu sistem perkebunan kolonial, dan para priyayi sebenarnya dipakai sebagai alat untuk mengawasi produksi agraria ini. Namun, sifat kontrak penyerahan hasil produksi setempat pada Hindia Belanda masih terlihat dalam adanya persen-persen Tanam Paksa (*Kultuur procenten*) yang memberikan persen dari naiknya produksi pada para priyayi sampai ke kepala desa. Pegawai-pegawai Belanda sendiri juga menikmati *Kultuurprocenten* tersebut. Selain itu, di setiap daerah ada ketentuan-ketentuan lain bagi Tanam Paksa sehingga orang tidak dapat menyebutnya sebagai suatu sistem.[27]

Apa yang sebenarnya terjadi dengan kedudukan priyayi sebagai sekutu Belanda yang pada mulanya menghadapi Belanda? Lambat laun kekuasaan pindah ke tangan Belanda. Dari persekutuan, terjadi penundukan terhadap priyayi. Namun, bagi Belanda, kedudukan priyayi ini dipandang penting sebagai pendukung utama politik dan untuk menutupi penjajahan serta sebagai alat kontrol terhadap penduduk yaang dapat menjamin tetap dipertahankannya tata-tentram (*rust en orde*). Dua hal berkembang sejak 1870. Pertama, Tanam Paksa hapus dan priyayi tidak diperlukan lagi sebagai pengurus produksi hasil bumi. Kedua, setelah 1870 juga berkembang dinas-dinas khusus pemerintahan Hindia Belanda seperti irigasi, kesehatan polisi dan lain-lain yang kebanyakan dikuasai Belanda sehingga mengurangi hak administratif priyayi. Masa sejak 1870 ditandai juga oleh makin birokratisnya jalur-jalur peraturan pemerintahan Hindia Belanda yang mengurangi wibawa priyayi yang dasar politiknya justru hubungan pribadi (*patron client/kawula-gusti*).

Kedudukan golongan orang-kaya di Sumatra atau para sultan Melayu agak berbeda dengan priyayi di Jawa. Berhubung penjajahan di Sumatra, khususnya Aceh, baru terlaksana pada akhir abad ke-19 (diserang tahun 1870) maka misalnya hubungan antara hulubalang di Aceh dengan Belanda menunjukkan ciri yang paling asli dari hubungan penguasa Indonesia setempat dan Belanda, yaitu aliansi. Sampai 1942, betapa pun hulubalang menyalahi peraturan-peraturan Belanda atau mengeksploatasi penduduk, kedudukannya tetap tidak dapat diganggu-gugat. Aceh memang mungkin merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang terpaksa diduduki secara militer oleh Belanda dan para hulubalang diperlukan sebagai pendukung politik *Pax Neerlandica.*[28]

Sebenarnya, kedudukan priyayi di Jawa, di samping ciri-ciri kepegawaiannya dari Hindia Belanda yaitu diintegrasikannya mereka dalam mesin birokrasi *Beambtenstaat* (negara kepegawaian) serta di sekitar kedudukan para bupati tetap terlihat pada simbol-simbol keramat seperti payung, kain-kain batik tertentu, kabupaten, upacara dan lain-lain. Kedudukan para bupati juga masih dijamin dengan prinsip turun-temurun sedapat mungkin menurut kecakapan, pendidikan dan ketepatan para ahli warisnya. Sampai akhir masa Hindia Belanda, pada golongan priyayi ini masih terlihat fungsi sebagai pendukung politik Hindia Belanda, sedangkan upacara kebesaran di sekitar para priyayi dipakai untuk menutupi penjajahan. Namun, sedikit banyak priyayi makin terikat dalam organisasi birokrasi Hindia Belanda; hal yang mengungkapkan hilangnya kekuatan politis mereka di mata Belanda. Tetapi justru sifatnya sebagai alat politik, *pangreh-praja* tidak dapat menjadi alat efektif bagi masyarakat. Sebab, akhirnya, yang nyata menang dalam berlomba menghadapi kabut.

CATATAN

1. Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Free Press, 1964), hlm. 324.
2. *Ibid*
3. C. Geertz, *Islam Observed*, The University of Chicago Press, 1975.
4. Arsip Lokal Madiun di sekitar 1830-an. *ANRI* (Arsip Nasional R.I.).
5. Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java*, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, N.Y., 2968.
6. *Ibid*
7. *Ibid.*
8. Onghokham, "The Inscrutable and the Paranoid: An Investigation into the sources of the Brotodiningrat Affair", in *Southeast Asian Transition*, R.T. McVey (ed) hlm. 110 ff.
9. J. Crawfurd, "Report on Kedu", *Arsip Nasional Republik Indonesia.*
10. A. Reid, *The Blood of the People, Revolution and the End of the Traditional Rule in Northern Sumatera*, Oxford Univ. Press, K.I. 1979.
11. D. Lombard, *op.cit.*
12. M.C. Rickleffs, *Yogyakarta under Sultan Mangkubumi*, 1749--1792, London 1974.
13. Soemarsaid Moertono, *op.cit.*
14. B.R. Anderson, "The Idea of Power in Javanese Culture" 2 in *Culture and Politica in Indonesia*, Claire Holt ed. with the assistance of B.R.O.G. Anderson and J. Siegel, Ithaca, N.Y., 1972.
15. M.C. Rickleffs, *op. cit.*
16. H.J. de Graaf, *Sultan--Agung*, The Mague, 19.
17. D. Lombard, *loc. cit.*
18. *M.C. Rickleffs, Modern Javanese Historical Tradition*, London, 1978.
19. Serat Centini.
20. Onghokham, *op. cit.*
21. B. Schrieke, *Indonesia Sociological Studies*, The Hague, 1957, Nol. I.

22. C. Geertz, *op. cit.*

23. Soemarsaid Moertono, *Loc. cit.*

24. Onghokham, "The Residency of Madiun, Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century" (Disertasi) Yale University, 1975.

25. R.T. McVey, "Introduction", in *Southeast Asian Transitions* ed.

26. Onghokham, "The Residency of Madiun", *ibid.*

27. A. Reid, *ibid.*

28. K. Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite*, Heineman Educational Books, 1979.

V. KEDUDUKAN POLITIK KAUM MILITER DALAM SEJARAH

Pembahasan mengenai politik tidak dapat dilepaskan dari masalah *ruling class* (golongan yang memerintah), yaitu suatu minoritas yang memegang kekuasaan di setiap masyarakat dan negara atas golongan terbesar yakni rakyat.[1]

Di negara mana pun, baik di negara kita maupun di negara-negara lain, tidak mungkin setiap warga memiliki pengaruh yang sama atas pemerintahan. Yang memerintah hanyalah segolongan kecil orang berpengaruh yang memberikan arah serta jalan pada negara dan masyarakat. Golongan kecil ini menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan dari fungsi-fungsi itu. Dengan bermacam-macam cara, kekuasaan ini dijalankan oleh golongan tersebut. Kadang-kadang menurut hukum yang berlaku, kadang-kadang secara sewenang-wenang dan kadang-kadang dengan kekerasan, kadang-kadang atas nama Tuhan atau atas nama rakyat, atas nama revolusi atau demi tujuan mencapai masyarakat adil dan seterusnya.

Golongan Bersenjata, Pemilik Kekuatan

Golongan yang memerintah ini sering kali pula disebut *political class.* Politik di sini berkaitan erat dengan persoalan kekuatan (*power*). Biasanya yang paling besar kekuatannya dalam suatu masyarakat atau negara adalah golongan bersenjata atau sering disebut juga golongan militer atau tentara. Malahan seorang sejarawan dan pengarang Prancis abad ke-18, F.A.M. de Voltaire, mengatakan bahwa raja pertama-tama merupakan seorang tentara. Biarpun ucapan sinis Voltaire ini dimaksudkan untuk mengeritik doktrin kekuasaan mutlak raja Prancis yang di waktu itu dianggap sebagai karunia Tuhan, namun ucapan itu mengandung segi kebenaran juga.

Pada mulanya, dan sepanjang sejarah umat manusia, golongan yang memerintah terdiri dari golongan militer *men of sword* 'orang yang berpedang'. Namun demikian, golongan ini biasanya membagi kekuasaan atau berpasangan dengan *men of the pen* 'para cerdik-pandai' yang dikenal dengan berbagai istilah seperti klerk, literati, cendekiawan dan kadang juga disebut kaum teknokrat.

Golongan cendekia ini dapat ditemukan dalam berbagai lembaga resmi, tergantung dari zaman dan masyarakat masing-masing seperti, misalnya, para Brahmana (India/Jawa), Ulama (Islam), Gereja (Eropa Abad Pertengahan), birokrat (Kekaisaran Tiongkok). Pada zaman sekarang, golongan ini dapat ditemui di antara para politisi, cendekiawan dan sebagainya.
Dalam tulisan ini akan dicoba dikaji sifat militerisme dalam negara tradisional, kedudukan militer dibandingkan dengan golongan masyarakat lain dan, terakhir, ·peranan militer profesional dalam abad ke-20.

Kekuasaan dan Kekayaan [2]

Militer adalah ahli perang atau ahli dalam menggunakan kekerasan. Dalam sejarah, perang merupakan suatu jalan pintas untuk mencapai kekuasaan atau memperoleh kekayaan yang besar. Pokoknya, untuk meningkatkan status. Lebih dari golongan masyarakat lain, militer menerima persiapan dan latihan karirnya melalui pengembangan kekuatan fisik dan ketrampilan dalam penggunaan senjata. Di keraton atau kabupaten Jawa, pada setiap hari Senin diadakan *senenan* atau sodoran (*tournoi*) di depan alun-alun, oleh para priyayi. Di Eropa, *Tournoi* merupakan unsur penting dari kehidupan bangsawan. Rakyat biasa yang harus mencari nafkah dari pertanian atau lapangan kerja lain memang tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperkembangkan kondisi fisiknya. Dan biarpun jumlah rakyat jauh lebih banyak, mereka masih tetap kalah dari bangsawan militer. Lagi pula, seperti halnya para bangsawan di Eropa yang memperkembangkan pakaian baja dan berkuda atau para priyayi yang aktanya memiliki senjata pusaka yang ampuh, rakyat secara psikologis selalu berada di pihak yang lemah.
Terbentuknya imperium-imperium besar dalam sejarah sering dimulai dengan ekspansi militer suatu negara yang mengalirkan kekayaan dari daerah-daerah dan rakyat yang ditaklukkannya ke negara induk. Sebab, secara tradisional, milik atau harta pihak yang kalah, baik berupa benda, tanah ataupun nyawa manusia, dianggap sebagai pampasan perang bagi pihak yang menang. Sama halnya bagi suatu negara yang berekspansi, demikian pula bagi perorangan yang memilih karir militer. Menjadi militer berarti menjadi ahli perang atau ahli menggunakan kekerasan dengan mana dapat diperoleh 'jarahan perang' *war booty*.

Baru pada akhir-akhir ini saja, yaitu sejak Perang Dunia I (1914—1918), orang mulai menganggap perang sebagai hal yang merusak, sebab persenjataan telah semakin dahsyat dapat mengancam kemanusiaan.[3] Perdamaian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I merupakan perdamaian terakhir di dunia Barat, di mana negara-negara mencari perluasan daerah dan pampasan perang yang melimpah-limpah yang melebihi biaya perang pihak yang menang. Ini memang akibat tradisional dari penggunaan kekerasan yaitu sebagai jalan atau cara untuk memperluas daerah, merampas harta kekayaan musuh, mengambil alih sumber kekayaan, menawan pihak yang kalah untuk dipekerjakan sebagai budak oleh pihak yang menang, menuntut pembayaran upeti, pampasan perang dan sebagainya. Sering terjadi dalam sejarah, tanah musuh yang ditaklukkan dibagi-bagikan oleh raja pemenang.

Penakluk Rakyat

Bila sebelumnya disinggung peranan militer dan artinya dalam ekspansi negara melalui perang terhadap negara lain, bagaimanakah peranan dan kedudukan militer di dalam masyarakatnya sendiri, terutama bila masyarakat tersebut masih bersifat tradisional dan belum mengenal nasionalisme? Ini mengingat elite penguasa tradisional sebagian besar berasal dari kaum militer ataupun, menurut ucapan Voltaire, bahwa raja pertama-tama merupakan seorang tentara. Sebagai tentara, biasanya berarti pula bahwa raja pertama-tama adalah penakluk rakyat. Dan elite penguasa yang kelak menjadi golongan bangsawan (kasta kesatria) biasanya terdiri dari kawan-kawan seperjuangan sang Raja. Suatu elite penakluk semacam ini dapat berasal dari luar ataupun dari dalam masyarakatnya sendiri. Elite penakluk dari luar, misalnya, golongan Arya yang menaklukkan bangsa Dravida di India dan yang kemudian melahirkan sistem kasta di sana. Beberapa dinasti Cina juga berasal dari Mongolia seperti Dinasti Yuan (1279—1368) sebagai hasil penaklukan Jengis Khan dan dinasti terakhir Ch'ing (1644—1911) yang berasal dari Manchuria; dinasti raja-raja Eropa dan para bangsawannya juga merupakan contoh yang paling jelas dan yang sampai kini masih meninggalkan bekasnya pada raja-raja dan kaum bangsawan Inggris. Pada tahun 1066, William Duke dari Normandia (pantai barat Prancis) merebut takhta Inggris dengan didampingi pengikut-pengikutnya yang haus akan jarahan perang. Karena itu, sampai kini, banyak bangsawan Inggris yang dikenal

sebagai keluarga-keluarga Norman (*Norman families*) yang merupakan keturunan keluarga "Angkatan 1066" Inggris.

Di samping terdapat elite penguasa atau para penakluk yang berasal dari luar, ada juga elite atau para penakluk yang berasal dari kalangan rakyat sendiri. Berbagai dinasti Cina, misalnya, berasal dari kaum petani seperti Dinasti Ming (1368—1644). Juga berbagai dinasti di Jawa beserta kaum priyayinya. Namun, hubungan antara elite penakluk dan rakyat adalah sedemikian rupa sehingga sering tidak dapat dibedakan mana elite penguasa yang berasal dari luar dan mana yang berasal dari dalam. Sifat hubungan tetap tak berubah yaitu bahwa sebagai penakluk dan pemenang, elite selalu berhak atas harta dan tenaga penduduk setempat. Secara struktural ini berarti bahwa kekayaan atau harta selalu mengalir pada yang berkuasa. Kekuasaan memang membuat orang kaya.

Berbeda halnya dengan masyarakat borjuis di negara Barat dewasa ini, kekuasaan ditentukan oleh kekayaan atau kekuatan ekonomi. Akan tetapi, kedua-duanya, baik dalam masyarakat tradisional maupun dalam masyarakat "Barat modern" ekonomi dalam arti harta kekayaan atau kekuatan keuangan adalah penting bagi kekuasaan politik. Dalam masyarakat tradisional pun, dengan harta dapat dibeli sekutu-sekutu politik. Singkatnya, terdapat interdependensi antara kekayaan dan kekuasaan. Kekuatan politik yang dalam masyarakat tradisional adalah sama dengan keunggulan senjata — ingat bahwa pada zaman lampau senjata masih primitif dan secara praktis lebih mudah diperoleh daripada sekarang — diperkuat dengan harta kekayaan. Sedangkan dalam dunia kini kekayaan dapat memberikan kedudukan politis sehingga harta kekayaan itu sendiri menjadi dapat diperbesar. Tujuan dan metodenya memang berlainan.

Interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional menimbulkan dua hal. Pertama, negara atau raja harus mengontrol harta para *kawula* guna menghindari berbagai ancaman politis dari mereka. Kedua, para *kawula* yang secara politis dan fisik berada di bawah harus dieksploatasi sedemikian rupa secara ekonomis atau disita sebanyak mungkin harta miliknya. Dengan sendirinya, keserakahan akan harta dan iri hati memainkan peranan penting. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai penyitaan antara sesama golongan elite dan terhadap berbagai golongan masyarakat yang lebih rendah.

Hak dan Milik Elite

Dalam sejarah, sering terjadi bahwa bila seorang bangsawan menjadi terlalu kaya atau memiliki tanah yang terlalu luas maka penyitaan dilakukan terhadap sebagian atau seluruh miliknya. Dalam kerajaan Jawa, misalnya, para pejabat yang memiliki kekayaan secara menyolok dikenakan denda oleh raja. Terlebih lagi apabila seorang pejabat dipecat atau wafat, raja menarik daripadanya atau dari keluarganya sebanyak mungkin sumber penghasilan; seperti *lungguh* atau *lahan-lahan* dari *cacah tani* yang menjadi bawahannya. Jadi, jatuhnya seorang pejabat juga berakibat ke bawah yaitu ke para petani yang ditunjuk oleh raja menjadi bawahan pejabat tersebut. Di Eropa, pada abad pertengahan, penyitaan terhadap milik bangsawan pun terjadi. Namun, baik di Jawa maupun di Eropa, biarpun berdasarkan perintah raja, sering kali pengambilalihan hak atas sumber kekayaan seperti tanah hanya dapat terlaksana dengan kekerasan dan baru berhasil apabila ada janji pada elite bangsawan atau militer bahwa tanah-tanah yang disita akan dibagikan antara para elite yang mendukung raja. Dalam struktur pemerintahan tradisional, politik adu domba memang merupakan alat ampuh raja, di mana sarana kontrol modern lain tidak berkembang.

Persoalan kekayaan seorang bangsawan atau priyayi biasanya dapat diselesaikan secara politis antara sesama golongan. Akan tetapi, yang sebenarnya dapat merupakan saingan, baik secara ekonomis maupun politis serta dalam arti memikat kesetiaan rakyat, adalah kaum cerdik-pandai. Terutama bila kaum ini tergabung dalam suatu lembaga seperti gereja atau sebagai agamawan seperti lazimnya dalam negara tradisional. Kekayaan yang dikumpulkan suatu badan agama dengan mudah sekali dapat menyaingi kekayaan negara (raja dan bangsawan), khususnya bila para pemimpin agama (agamawan) seperti dalam Gereja Katolik atau dalam agama Budha secara resmi tidak berkeluarga (*celibates*). Kekayaan badan-badan agama tersebut merupakan kekayaan lembaga. Dalam Islam pun, tanah-tanah *perdikan* desa dan *wakaf* memiliki fungsi yang sama. Kekayaan badan-badan agama dapat merupakan kekayaan yang besar sekali oleh karena tidak dibagi-bagi seperti kekayaan bangsawan dan juga tidak digunakan untuk konsumsi, pembiayaan perang dan sebagainya. Peranan politis dan ekonomisnya sangat besar dan dapat dipandang oleh raja dan para bangsawan sebagai merusak perimbangan masyarakat atau dapat menimbulkan iri hati bagi yang berkuasa.

Sejarah mengungkapkan berbagai fakta tentang penyitaan kekayaan gereja, para ulama dan para biarawan Budhis atau Hindu oleh kekuasaan duniawi. Berbagai peperangan yang dilancarkan dinasti Mataram terhadap kota-kota wali seperti Ngampel, Giri dan terhadap para ulama di sekitar Mataram dapat dilihat dari sudut ini. Dalam sejarah Eropa, misalnya, terkenal sekali proses pengadilan yang berakhir dengan penyitaan kekayaan Ordo *Tempeliers* oleh raja Prancis dalam abad pertengahan. Munculnya Protestantisme memberi kesempatan pula pada raja serta bangsawan untuk mengganti agama mereka dan menyita milik gereja. Ini misalnya terjadi di Inggris, Prusia dan lain-lain pada abad ke-16. Negara monarki absolut yang muncul dari sistem feodalisme dan yang akhirnya menuju ke negara modern tak mungkin muncul tanpa penyitaan-penyitaan terhadap milik gereja tersebut. Yang menarik di sini adalah bahwa penyitaan terhadap milik agamawan, berbeda dengan penyitaan terhadap milik bangsawan, dilakukan melalui proses hukum dan konstitusional ataupun melalui perubahan agama. Artinya: untuk mengurangi kekuasaan para agamawan. Cara yang terbaik adalah dengan mengurangi karisma para agamawan yang sedang berkuasa; sesuatu yang sebenarnya jauh lebih sukar daripada masalah kekuatan politis.

Kalau para bangsawan dan rohaniwan memperoleh kekayaan mereka melalui kedudukan maka ada golongan masyarakat lain yang dapat menumpuk harta kekayaan melalui kepandaian, usaha dan keuletan; yakni para ahli keuangan, pedagang dan para perantara ekonomis-finansial yang lain. Secara tradisional, kelompok ini sering disebut pedagang, ijon, pemakan riba dan lain sebagainya. Dalam masyarakat tradisional, golongan perantara ekonomis ini — perantara karena hanya sedikit dari mereka yang merupakan produsen seperti petani atau pemilik pabrik — biasanya merupakan minoritas-minoritas "asing". Seperti orang Cina di Indonesia, orang Minang di Jambi, orang Vietnam di Kamboja, orang Yahudi di Eropa, orang Lombard (Italia Utara) di Prancis ataupun para pedagang Flemish (Belgia—Belanda) di Inggris pada abad pertengahan. Penimbunan kekayaan di antara pedagang-pedagang asing ini menimbulkan penyitaan-penyitaan terhadap milik mereka. Bila penyitaan ini dilakukan terhadap pribadi pedagang atau bankir dari golongan minoritas, maka hal itu sering dalam bentuk suapan pada raja atau penyerahan sukarela dari harta pedagang minoritas kepada penguasa. Terkenal dalam kasus

ini, misalnya, seorang Yahudi kaya-raya yang membakar surat-surat utang raja Inggris ketika ia menjamu raja tersebut dalam pesta makan di kediamannya. Di lain pihak, pengekangan terhadap usahawan minoritas ini secara tradisional dilakukan melalui penyitaan milik atau harta kaum usahawan minoritas oleh rakyat jelata. Berlainan dengan militer dalam zaman feodal, negara borjuis modern melihat jaminan terhadap harta milik perorangan sebagai unsur yang menegakkan tata-tertib dan ketentraman masyarakat. Bagi elite tradisional, harta kekayaan yang bukan milik raja atau elite pendukung raja, merupakan ancaman terhadap tata tentram masyarakat.

Kekerasan di kalangan masyarakat ini sedikit banyak didukung oleh etos di zaman tersebut. Baik penguasa tradisional maupun gereja Kristen abad pertengahan, misalnya, melarang pengambilan bunga terhadap uang pinjaman dan menganggapnya sebagai sesuatu yang terkutuk. Sering kali para penguasa mengeluarkan fatwa yang melarang pengambilan untung tinggi dari barang dagangan yang dijual. Motif keuntungan, biarpun dilakukan oleh kebanyakan orang, dalam praktek dianggap sebagai sesuatu yang tidak suci di masyarakat tradisional. Berbeda misalnya dengan masyarakat sekarang. Dalam masyarakat tradisional, golongan yang kuat, apakah atas dasar senjata, politik maupun ekonomi, selalu mengeksploatasi golongan yang lemah melalui berbagai fatwa. Semua ini menunjukkan bahwa etos sosial pada masyarakat tradisional mencerminkan kebiasaan negara tradisional untuk mengontrol kekayaan penduduk yang dianggap dapat mengancam kedudukan politis negara dan merusak perimbangan struktur sosial masyarakatnya.

Elite dan Hak Rakyat

Bila konsepsi penaklukan dan keunggulan kekuatan fisik berpengaruh terhadap jaminan milik berbagai golongan elite dan minoritas asing, di kalangan rakyat jelata, jaminan tersebut tak ada sama sekali. Milik, menurut konsepsi tradisional, hanyalah merupakan hak guna atau hak pakai. Baru setelah perkembangan ekonomi moneter di Inggris pada abad ke-14 sampai 15, hak tersebut berubah menjadi hak milik. Akan tetapi, perubahan hak ini sering hanya terbatas pada kalangan elite. Di kalangan rakyat, hak tersebut tetap terbatas pada hak mengerjakan atau mengolah saja secara produktif dengan keuntungan yang diambil elite.

Sebenarnya, sejak awal sejarah manusia, sumber-sumber alam seperti air, hutan, padang rumput, binatang dan lain-lain digunakan oleh rakyat demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Dengan timbulnya negara berdasarkan konsep penaklukan, milik rakyat sekarang menjadi milik raja. Di kerajaan Jawa tradisional, keadaan ini tercermin dalam anggapan bahwa raja adalah penguasa seluruh tanah, sedangkan rakyat maupun priyayi hanyalah mempunyai hak pakai atau hak menikmati. Namun, biasanya raja menyerahkan miliknya ini pada para bangsawan, gereja atau lembaga rohani lain. Ataupun bila sistem ekonomi dan moneter sudah demikian maju, raja menyerahkan miliknya ini pada para pedagang. Golongan-golongan masyarakat tersebut kemudian bersengketa dengan milik "adat" rakyat ini seperti halnya yang terjadi di Eropa Barat sejak zaman Renaissance (abad ke-15) sampai permulaan Revolusi Industri (akhir abad ke-18) atau di Indonesia pada zaman kolonial (abad ke-19).

Cara paling sistematis untuk merealisasikan perampasan hak-hak rakyat oleh elite adalah melalui pajak. Baik para raja maupun para bangsawan, gerejawan dan lain-lain menuntut hak-hak mereka melalui upeti dengan diserahkannya tenaga kerja bakti (rodi) rakyat petani pada yang dipertuan oleh mereka. Tidak mengherankan jika dalam keadaan yang demikian seorang filsuf Kristen abad pertengahan: St. Thomas Aquinas, umpamanya, menanyakan apakah perbedaan antara bandit yang menodong orang di tengah jalan dengan negara yang menuntut pajak dari rakyatnya? Persoalan yang sama juga dipertanyakan Surontiko Samin di Jawa.[4] Tokoh ini, pada akhir abad ke-19, melahirkan gerakan Samin yang mengajarkan penolakan terhadap pembayaran pajak dan kerja rodi kepada pemerintah kolonial yag dianggap tidak sah dan sama dengan pencurian oleh negara. Sampai kini, misalnya, di Cina ada tradisi untuk menyebut musuh-musuh politik sebagai "bandit-bandit", istilah yang sebenarnya berkaitan erat dengan contoh di atas.

Perbedaan pengalaman sejarah antara elite dan rakyat dapat melahirkan dua pandangan yang berbeda mengenai sejarah dalam masyarakat. Elite sering menanggalkan saat kemenangan mereka sebagai waktu sejarah. Demikianlah misalnya, sejarah, bagi elite Inggris, dimulai pada 1066; ketika Inggris ditaklukkan oleh orang-orang Normandia. Di India penanggalan dimulai ketika bangsa Aria menaklukkan bangsa Dravida. Juga tahun 1644

dipakai oleh Dinasti Ch'ing (Manchu) sebagai permulaan sejarah Cina. Penanggalan sejarah di Jawa dimulai pada saat berdirinya dinasti Mataram. Namun, berlainan dengan pandangan elite, pandangan sejarah rakyat melihat zaman prapenaklukan sebagai zaman keemasan di mana sumber-sumber alam dikuasai dan dinikmati oleh mereka sendiri. Dalam hal ini, ada sebuah ucapan yang terkenal dari seorang petani Inggris, "*When Adam delved and Eve span, where was then the Gentleman?*" 'Pada zaman Adam dan Hawa di manakáh yang dipertuan itu?' Keadaan setelah zaman Adam dan Hawa dianggap merupakan penyelewengan terhadap "adat", kepribadian dan lain-lain sifat murni masyarakat. Konsepsi Ratu Adil, ramalan Joyoboyo yang memuliakan masa sebelum penaklukan yang menurut pandangan ilmiah bukanlah sejarah tetapi eskatologi, yakni harapan akan zaman emas, menggambarkan hal itu.

Zaman emas sebenarnya tidak lain daripada zaman prasejarah atau keadaan alamiah seperti dalam kisah Adam dan Hawa.

Kadang kala rakyat melihat adanya kesempatan untuk membalas berbagai perampasan yang dilakukan oleh elite terhadap mereka. Kesempatan ini biasanya timbul bila salah satu kasta-atas; entah bangsawan (militer), rohaniwan atau pedagang melemah kekuasaannya. Namun, kadang kala kekuatan massa tidak dipakai untuk melawan satu kasta, akan tetapi untuk melawan salah seorang anggota kasta-atas yang kalah dalam persaingan kekuasaan. Hal ini, misalnya, nampak pada pemberontakan-pemberontakan petani atau rakyat kota dalam sejarah. Kadang-kadang ada pula kebiasaan di mana rakyat atau massa berhak untuk merampok dan memakai kekuatan jumlahnya untuk mengoreksi ketidakadilan yang dirasakan. Misalnya pada abad ke-16, di kota Roma pada waktu wafatnya seorang Paus, rakyat Roma merasa berhak merampok istana-istana para kardinal dan keluarga Paus.[5] Dalam abad ke-17 dan ke-18, kebiasaan ini rupanya juga terulang dengan wafatnya seorang anggota pemerintahan kota Amsterdam yang terkenal kaya dan korup.[6] Di Jawa sendiri, bila ada seorang lurah yang telah lama menduduki jabatannya dan terkenal kaya, sering pada hari tuanya ia dirampok atau dikecu.[7] Tidak berbeda dari semangat "adat" di atas adalah tokoh-tokoh romantis di kalangan rakyat seperti Robin Hood atau jago-jago yang katanya mencuri dari yang kaya untuk dibagi-bagikan pada rakyat miskin. Tokoh-tokoh tersebut sampai kini masih tetap merupakan tokoh legendaris dan

dikenang baik oleh kalangan luas. Dalam kerangka ini, dapat juga dilihat gejala yang sama di kota yang tidak bercorak romantis seperti cerita Robin Hood, akan tetapi yang justru dianggap jelek dan terkutuk oleh sejarawan sekarang, yaitu penyitaan-penyitaan di kota-kota di Eropa di mana para pedagang Yahudi atau asing dirampok pada zaman abad pertengahan. Gejala ini bahkan sampai sekarang masih tetap terdapat, terutama di benua-benua selain Eropa.[8]

Semua gejala kekerasan, seperti yang dilukiskan di atas: di Roma, Amsterdam maupun di Jawa, menunjukkan bahwa masyarakat tradisional sering menghukum dan mencela penumpukan kekayaan baik oleh penguasa maupun oleh orang lain.

Masyarakat Militer

Para bangsawan di Eropa, sejak zaman feodal (pertengahan abad ke-9 sampai abad ke-15) telah mengembangkan tentara berkuda. Pakaian para kesatria ini umumnya terdiri dari besi dan dipersenjatai dengan tombak panjang serta senjata lain. Pasukan berkuda semacam ini mirip dengan pasukan tank atau panser di zaman sekarang dan merupakan salah satu hal yang menyebabkan terciptanya jurang perbedaan antara kasta bangsawan dan rakyat petani. Alat pasukan berkuda ini secara psikologis merupakan dan dianggap sebagai senjata unggul. Pembiayaannya demikian tinggi sehingga rakyat biasa tidak dapat memilikinya. Orang menganggap para bangsawan, khususnya di Prancis, memperkembangkan cara berperang ini untuk tetap mempertahankan perbedaan kelas, walaupun ternyata dalam perang salib tentara berkuda ini tidak demikian efektif menghadapi tentara Islam yang lincah.[9] Selama Perang 100 tahun melawan Inggris, tentara berkuda Prancis ini ternyata dapat dengan mudah dikalahkan oleh tentara bersenjata panah (*longbow*) dari Inggris. Senjata *longbow* ini demikian ampuh sehingga memberikan kepada Inggris keunggulan militer selama hampir 3/4 abad terhadap Prancis yang tetap memakai senjata *crossbow* 'panah yang dilepaskan secara otomat' dalam pasukan berkuda dan yang berpakaian berlapis baja. Kemudian setelah ditemukan meriam dan mesiu, baik *longbow* maupun tentara berkuda dan benteng-benteng para bangsawan tak berarti lagi.[10]

Walaupun demikian, agak terasa aneh bahwa golongan militer yang dapat menggoncangkan struktur masyarakat yang ada sering

menahan laju perkembangan senjata yang sebenarnya dapat meningkatkan daya tempurnya. Karena itu, masyarakat militer sering dianggap bersifat konservatif baik di lapangan teknologi maupun sosial. Golongan militer, yang sebenarnya merupakan ahli teknologi pada zamannya, mengingat senjata selalu berhubungan dengan teknologi, nampaknya lebih sadar akan hubungan antara teknologi dan struktur masyarakat daripada golongan lain. Karena itu, tidak saja di Eropa tetapi juga di masyarakat Asia terlihat ditundanya beberapa penemuan atau perkembangan teknologi demi mempertahankan struktur kekuasaan tertentu. Ditundanya penggunaan senjata api di Tiongkok dan di Jepang, walaupun ada mesiu, mungkin juga dapat dilihat dalam kerangka ini. Di Indonesia, umpamanya, pemakaian alat ani-ani dalam panen padi oleh para petani dapat di satu pihak dianggap memperkuat sifat-sifat kegotongroyongan di lapangan pertanian. Tetapi, di lain pihak, dipertahankan alat ini adalah dengan maksud melucuti para petani dari alat-alat pertanian lain yang dapat digunakan sebagai senjata untuk melawan golongan priyayi yang seperti bangsawan di Eropa berfungsi sebagai militer. Di Indonesia memang tidak diperkembangkan pakaian besi baja bagi para priyayi, kecuali mitos dari senjata-senjata pusaka yang ampuh. Juga di kerajaan-kerajaan, pasukan berkuda dan khususnya gajah hanya merupakan milik para bangsawan. Bahkan ada larangan bagi petani biasa untuk menaiki kuda di tempat-tempat tertentu seperti di kota kabupaten atau keraton. Gajah yang sering menjadi monopoli raja Indonesia tentu dapat disamakan dengan kuda berlapis baja di Eropa. Singkatnya, keterbelakangan masyarakat sangat erat berhubungan dengan struktur masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan terbesar yang dihadapi masyarakat militer, baik di Eropa maupun di Asia seperti di berbagai kerajaan di Indonesia dan dinasti-dinasti Tiongkok, adalah bahwa keadaan politik yang didasarkan pada kekuatan senjata belaka tidak memecahkan persoalan-persoalan politik. Dengan kata lain, bila konsepsi politik didasarkan atas mereka yang paling kuat, kontrol terhadap golongan militer menjadi sangat sulit. Bahkan kontrol politik dalam keadaan demikian hampir menjadi tidak mungkin baik bagi pimpinan sipil, militer maupun raja atau lain-lain. Misalnya zaman feodal di Eropa, di mana kasta militer demikian berkuasa, tidak ada kekuasaan pemerintah pusat. Kekuasaan selalu berada di tangan penguasa-penguasa lokal, para pemimpin perang setempat, baik besar maupun kecil beserta pengikut mereka yang

hidup atau berdiam dalam benteng-benteng yang kukuh. Raja hanyalah dianggap sebagai bangsawan utama di antara para bangsawan. Atau paling tidak, ada semacam pertalian samar-samar antara raja dan para bangsawan. Singkatnya, tunduk atau tidaknya para bangsawan terhadap kekuasaan raja sangat tergantung dari kekuatan militer sang Raja sendiri.[11] Jadi, meskipun secara ideologis dan menurut konsep kebudayaan di zaman itu, raja memang di atas segala-galanya, namun, dalam kenyataan, kekuasaannya tetap terbatas. Konsepsi keunggulan kekuasaan raja hanyalah untuk menutupi keterbatasan seperti itu. Selama berabad-abad, di Eropa terus-menerus terjadi perang antara para bangsawan, meskipun mereka berada di bawah kekuasaan raja yang sama atau berlainan, baik antara bangsawan yang besar maupun yang kecil. Perang seakan-akan dianggap sebagai cara hidup sehari-hari para bangsawan. Untungnya musim dingin tidak memungkinkan terjadinya perang dalam zaman abad pertengahan. Kadang-kadang pada musim panen atau pada hari-hari yang dianggap suci oleh gereja, perang pun dihentikan. Namun, peperangan merupakan sesuatu yang langgeng dalam masyarakat abad pertengahan dengan segala akibatnya. Hingga, ketidaktentraman merupakan gejala sehari-hari. Masyarakat seperti terdiri dari manusia serigala (*Homo Homini Lupus*) yang saling memerangi.[12]

Di Eropa, keadaan tersebut baru mereda dengan munculnya pemerintahan pusat di bawah seorang raja yang berkuasa mutlak. Munculnya kekuasaan pemerintah pusat di Eropa ini bersamaan dengan digunakannya persenjataan modern (mesiu dan senjata api) yang menerobos pakaian-pakaian besi dan yang dapat menghancurkan tembok-tembok benteng. Kekuasaan pemerintah pusat ini ditunjang pula oleh administrasi kerajaan yang baik yang dapat memungut cukup banyak pajak untuk membiayai peperangan baru yang tidak dimiliki militer-militer setempat. Di samping itu ada dua unsur masyarakat lain yang membantu munculnya pemerintah pusat di Eropa: gereja dan pedagang atau pengusaha kota yang tidak berkepentingan atas ketidaktentraman dan perang kronis dari kasta bangsawan militer. Hal yang terakhir ini tidak kurang penting artinya. Dukungan gereja pada raja mempertinggi martabat sakral (kesucian/mitos kekuasaan). Sedangkan keuangan kota memungkinkan raja membiayai tentara sewaan yang bersenjata api.

Di Tiongkok tradisional pada masa abad pertengahan, dapat

ditemui gejala yang sama. Kekuasaan tetap berada di tangan para pemimpin militer setempat sementara pusat kekuasaan melemah. Gejala ini disebut dengan *warlordisme* (*warlord* =pemimpin atau panglima perang). Daerah kekuasaan para *warlord* ini demikian luas dengan berbagai provinsi sementara konsep negara nasional belum tumbuh. Negara biasanya identik dengan kaisar atau pusat buana. Demikian halnya yang terjadi pada akhir zaman Dinasti Ch'ing (1910); secara tradisional, para literati (birokrat) kekaisaranlah yang memerintah Tiongkok. Kemudian, ketika negeri itu menghadapi berbagai tantangan Barat dan Jepang modern, ujian negara untuk menjadi birokrat dihapus. Tinggallah satu-satunya jalan untuk naik ke atas: karir militer. Namun, faktor terpenting timbulnya *warlordisme* abad ke-20 di Tiongkok adalah karena melemahnya pemerintah pusat. Para tuan tanah *(gentry)* setempat kemudian mencari dukungan petani-petani. Keunggulan senjata yang dimiliki para panglima setempat lebih sering dipergunakan untuk mendukung kepentingan-kepentingan lokal daripada nasional. Dalam perang Tiongkok — Jepang I, para *warlord* di selatan diam. Yang menghadapi Jepang hanyalah tentara di sekitar ibu kota Peking. Sama halnya pada peperangan menghadapi Barat dalam *Boxer-rebellion* (1900). Malahan, tentara selatan bekerja sama dengan musuh dinasti kekaisaran di Peking.[13]
Para *warlord* Tiongkok ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan kekuasaan daerah. Mereka juga berbeda dengan yang terdapat dalam zaman feodal Eropa. Ada *warlord* yang berasal dari kalangan birokrat, ada juga yang berasal dari Manchuria yang memulai karirnya sebagai bandit biasa dan kemudian karena subsidi keuangan Jepang menguasai daerah seluas Manchuria yang kaya raya. Memang, ada *warlord* yang memiliki cita-cita memajukan rakyat dan daerah setempatnya, namun, selalu terlepas dari politik nasional. Lagi pula keadaan Tiongkok pada waktu itu sedang kacau.[14] Jadi, baik dalam zaman tradisional maupun zaman modern, *warlordisme* dicela dan dipandang sebagai zaman malapetaka. Zaman ini berakhir dengan munculnya Republik di Cina (RRC) dalam tahun 1949.

Militerisme Sekarang

Feodalisme di Eropa pada abad pertengahan dan *warlordisme* di Tiongkok merupakan gejala di mana konsep negara nasional tidak begitu kuat. Bagaimana halnya dengan militerisme di negara-negara

di mana batas-batas geografi nasional telah ditetapkan? Di negara-negara Amerika Latin, umpamanya, meskipun konsep bangsa belum berkembang, namun batas negara nasional telah demikian kuat. Gejala *warlordisme* memang tidak terungkap dalam daerahisme akan tetapi dalam klik-klik militer yang melakukan kudeta demi kudeta. Gejala ini tidak hanya terbatas pada Amerika Latin melainkan juga di Asia Tenggara seperti Muangthai yang memperlihatkan kudeta-kudeta militer yang terjadi di pusat (secara nasional) yang dilancarkan oleh klik-klik dalam tubuh angkatan bersenjata.[15]

Kekuasaan atas dasar kekuatan militer belaka memang dapat merupakan gejala 'senjata makan tuan' seperti yang telah diperlihatkan oleh sejarah Eropa, Tiongkok maupun kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hingga, untuk menghadapi kemungkinan seperti itu, biasanya dikembangkan dua cara pendekatan. Pertama, mengembangkan disiplin tentara sendiri. Kedua, menyipilkan kekuasaan atas dasar militerisme. Pendekatan pertama bertujuan untuk menciptakan apa yang dikenal dengan militer profesional.

Sebenarnya, biarpun dikatakan bahwa militer profesional[16] baru berkembang sejak zaman modern, artinya setelah revolusi Prancis dan Industri, namun latihan militer untuk mendisiplinkan tentara telah lama merupakan bagian kehidupan para kesatria baik di Eropa maupun di Asia. Latihan militer di kerajaan-Jawa, misalnya, yang terkenal dengan sodoran/*senenan* (yang diadakan di alun-alun keraton dan kabupaten dua kali seminggu antara lain pada hari Senen — dari mana asal namanya — merupakan bagian penting dari kehidupan tentara tradisional. Sama halnya dengan latihan-latihan formasi medan peperangan. Dalam hal ini, rakyat biasa ataupun para cerdik-pandai biasanya tak punya waktu cukup untuk mengikuti latihan-latihan tersebut. Di Eropa, sejak abad ke-17, latihan-latihan ini baru terdiri dari baris-berbaris dan sampai sekarang pun masih tetap dipertahankan walaupun tidak lagi dalam medan pertempuran. Menurut sejarawan Prancis, Paul Mus[17] dalam salah satu kuliahnya, tujuan latihan dan disiplin militer ini tidak berfungsi dalam masa perang akan tetapi justru dalam masa damai di mana ketaatan dari yang bersenjata dituntut. Latihan dan disiplin militer ini dipakai untuk menanamkan perasaan pada militer bahwa fungsinya adalah untuk peperangan dan tidak untuk damai. Tesis Paul Mus mungkin ada benarnya bila diingat bahwa di Jawa kepemimpinan dalam medan peperangan

berkaitan erat dengan pertunjukan tarian atau wayang orang seperti Bedaya Ketawang, di mana koreografi mengikuti formasi militer di medan peperangan.[18] Mungkin juga di keraton Jawa, mistik dipakai dalam batas tertentu dalam latihan militer.

Berbeda dengan di zaman lampau, dewasa ini militer telah tumbuh sebagai suatu profesi bersama dengan profesi-profesi lain yang diperlukan untuk mengatasi keadaan-keadaan sosial, politik, keamanan dan sebagainya. Sebagai profesi, golongan militer dengan sendirinya tidak hanya terdiri dari kelas bangsawan atau priyayi, melainkan telah pula merakyat dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat bawah. Sementara itu, profesi militer mengalami sosialisasi dalam bentuk birokratisasi. Hal ini menandai suatu tahap baru dari perkembangan militerisme modern.

Jika di zaman lampau gejala militerisme tercermin dalam *feodalisme* dan *warlordisme*, maka dewasa ini, adanya klik-klik militer merupakan gejala lain pula. Klik-klik militer ini biasanya tumbuh dalam keadaan ketika kesadaran akan batas-batas teritorial negara dan kesatuan nasional telah mantap. Bahkan sering kesatuan nasional dan teritorial merupakan konsepsi yang dipertahankan kuat oleh golongan militer dan dipakai sebagai dasar untuk melakukan kudeta atau perebutan pengaruh di antara klik militer sendiri. Jadi, tujuan suatu klik militer yang hendak berkuasa bukanlah untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat seperti pada bentuk *feodalisme* dan *warlordisme*, melainkan untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan pemerintah pusat itu. Gejala-gejala ini, yang timbul setelah perang dunia kedua, nampak pada berbagai kudeta yang terjadi di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah ataupun Asia Tenggara seperti Muangthai. Dibanding dengan usaha penguasaan daerah oleh kekuatan militer tertentu, perebutan pengaruh di pusat pemerintahan dengan segala sumber nasionalnya tentu jauh lebih menguntungkan. Karena itu, suatu klik militer yang berkuasa melalui kudeta harus tetap waspada terhadap rongrongan klik-klik lain. Bahkan klik yang berkuasa harus juga memperhitungkan pendistribusian dana pada kelompok-kelompok lain guna dapat mempertahankan kelanggengan kekuasaan dan pengaruhnya.

Penjinakan Bahaya Militerisme

Bukti sejarah yang agaknya dapat mengajarkan pada kita adalah bahwa kekuasaan atas dasar kekuatan fisik atau militer belaka

akan membawa akibat senjata makan tuan. Dalam masyarakat yang demikian biasanya berlaku prinsip "manusia adalah serigala bagi manusia", saling bermusuhan dan saling menjegal. Karena itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut, perlu diadakan proses perdamaian di masyarakat, kompromi ataupun dikembangkan aturan-aturan untuk menjaga ketertiban sosial. Singkatnya, militerisme selalu menimbulkan persoalan bagi pemerintah, tidak terkecuali pemerintah militer sekalipun. Untuk melakukan hal ini, biasanya, berbagai negara memperkembangkan metode-metode untuk mendisiplinkan tentara. Adakalanya pula elite yang berkuasa yang mempunyai pandangan jauh ke depan mempergunakan cara menyipilkan kekuasaan untuk membatasi merajalelanya militerisme, walaupun hal yang terakhir ini kelak tidak berhasil dilakukan semua negara.

Di masyarakat mana pun, sejak adanya peradaban, dikenal berbagai metode untuk mendisiplinkan tentara atau para pejuang (*warriors*). Disiplin ini sering disebut latihan militer dan merupakan cara terbaik untuk menjinakkan golongan tersebut. Latihan untuk memperoleh keahlian dalam peperangan ini menjadi berkembang jauh sebelum timbulnya apa yang lazim disebut profesi militer. Sebenarnya, latihan-latihan militer para kesatria Jawa, Samurai Jepang atau bangsawan Eropa juga telah mengkhususkan suatu golongan ahli perang. Namun, mutu, taraf ataupun konsepnya berbeda dari militer profesional sekarang. Persamaannya terletak barangkali pada latihan-latihan itu sendiri yang tidak dilakukan oleh golongan-golongan lain dalam masyarakat.

Seperti pada kebanyakan kelas militer tradisional, hubungan antara sesama kasta dan terhadap anggota-anggota masyarakat lain tercantum dalam kode etik yang kompleks di mana termasuk aturan sopan-santun, adat-istiadat, etiket, loyalitas, kekesatriaan dan sebagainya. Namun, celakanya, sering kali sifat yang kompleks dari kode etik dan etos ini hanya untuk menutupi kekurangdisiplinan belaka. Agaknya, yang menarik juga adalah bahwa dalam proses sosialisasi militer ini, unsur-unsur seperti kesusastraan, pertunjukan kesenian dan lain cabang kebudayaan sering kali lebih berfungsi untuk menjinakkan militerisme.

Salah satu aspek yang menarik adalah bahwa tidak semua latihan militer nampaknya berfungsi sebagai latihan untuk membuat seseorang menjadi ahli perang. Bagian penting misalnya dari latihan militer adalah baris-berbaris. Di Eropa, terdapat berbagai macam baris-berbaris seperti umpamanya menaikkan kaki setinggi

sembilan puluh derajat atau dijatuhkannya kaki dengan cara-cara tertentu dan bersiap-siaga secara tertentu bila memberi hormat dan sebagainya. Baik berbaris berderetan maupun menaikkan kaki dengan lurus sembilan puluh derajat, sebenarnya tidak berguna sama sekali dalam medan peperangan ataupun pertempuran. Yang seharusnya lebih berarti adalah cara merangkak, mencari posisi untuk menembak atau untuk meluputkan diri dari peluru musuh. Demikian pula, pakaian militer yang rapih sama sekali tidak ada hubungan dengan kenyataan perang. Dengan kata lain, latihan militer untuk sebagian atau mungkin seluruhnya berfungsi sebagai latihan ketaatan dan penjinakan kalangan bersenjata yang secara fisik memang kuat. Latihan ini juga berguna bagi ketaatan di medan perang oleh bawahan terhadap atasan.

Di kerajaan Jawa tradisional, juga dikenal metode penjinakan terhadap kaum militer, khususnya para perwira yaitu dengan melalui tarian. Hubungan erat antara militer dan kesenian sebenarnya bukan khas Jawa. Di kerajaan-kerajaan Eropa tradisional hal seperti ini juga terdapat. Bahkan ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa latihan militer di Jawa yang dikembangkan melalui corak kesenian, pertunjukan, mistik dan kosmologi adalah justru hasil dari kolonialisme Belanda yang bertujuan mengekang sedapat mungkin militerisme Jawa tradisional. Belanda memang pada akhirnya menciptakan apa yang disebut *Pax—Neerlandica* 'Perdamaian Hindia Belanda', hal yang pada dasarnya memang diperlukan Indonesia untuk membatasi merajalelanya militerisme tradisional.

Kaum Cerdik Pandai

Masyarakat tradisional sering menempatkan para cerdik pandai, dan bukan golongan bersenjata, sebagai golongan utama. Di Eropa, sebelum revolusi Prancis, bila orang membicarakan golongan-golongan atau orde-orde (ada tiga) dalam masyarakat (*estates/standen*) orang sering mengurutkan, secara hirarkis, golongan gerejawan,[19] bangsawan dan baru rakyat biasa. Juga dalam masyarakat Hindu, orang menempatkan kasta Brahmana dalam kedudukan paling atas dan para kesatria sebagai kasta kedua di bawahnya. Di Masyarakat Tiongkok tradisional, orang memandang tentara sebagai profesi rendah dan negara berada di tangan para literati (cerdik-pandai) atau birokrat dengan kaisar sebagai pusat dari sistem "sipil" tersebut. Para cerdik pandai memang memiliki

fungsi dan kekuasaan atas dasar-dasar yang tidak terikat (*independent*) pada kekuatan senjata. Mereka memperoleh wibawa karena berbagai penemuan penting dalam masyarakat. Misalnya, dengan penemuan kalender dapat ditetapkan saat terbaik untuk menanam, panen, mengurus irigasi, menemukan pupuk terbaik, mempelajari pasang surut sungai atau laut dan seterusnya. Karena itu, para cerdik-pandai dianggap menaikkan produksi pangan atau memberikan sedikit banyak jaminan akan hasil-hasilnya. Kalau tentara hanya menjamin pelaksanaan penanaman secara damai oleh rakyat, maka para cerdik pandai menunjukkan bagaimana memperbesar hasil-hasilnya. Keberhasilan memperbesar panen dilihat sebagai penguasaan atas alam. Dan hasil ini hanya dapat dilakukan oleh dewa-dewa atau paling sedikit setengah dewa. Lagi pula para kesatria yang sering buta huruf maupun rakyat biasa terkesan oleh kemampuan para cerdik-pandai ini. Dengan demikian, jelaslah prestise (status) para cerdik-pandai, baik di kalangan pengusaha maupun rakyat.[20] Selain itu, sejak sebelum zaman Firaun atau mungkin dari mula adanya umat manusia, para cerdik pandai dianggap memiliki kunci rahasia tentang apa yang terjadi para akhir hidup manusia di dunia. Karena setiap orang, baik yang paling berkuasa maupun yang tertindas, menghadapi kematian, maka kekuasaan para cerdik-pandai ini besar sekali atas manusia.[21]

Suatu fungsi yang lebih duniawi dari para cerdik-pandai adalah juga sebagai juru tulis (klerk) yang mencatat hak-hak golongan atas dan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara dan sebagainya. Hak-hak ini meliputi hak pemilikan tanah, upeti, kerja bakti dan lain-lain. Dalam tugas sebagai klerk, mereka merupakan unsur sangat penting dalam konsolidasi suatu klas atau negara. Golongan militer, dalam hal ini, tidak dapat melakukan fungsi-fungsi tersebut karena, seperti rakyat, mereka juga buta huruf dan terlalu sibuk dengan perang. Karena itu tidak sedikit keuntungan yang dinikmati golongan klerk tersebut. Peranan golongan cerdik-pandai sangat menonjol mulai abad ke-15, ketika negara-negara kerajaan absolut dan pemerintahan pusat muncul, yang akan mengekang para penguasa militer lokal dan keadaan feodal.[22]

Umumnya, kaum cerdik-pandai ini menolak kekuasaan atas dasar kekuatan belaka. Dalam abad pertengahan di Eropa, peranan bebas para cerdik-pandai dalam gereja telah dapat mengekang kekuasaan bangsawan feodal dan bahkan membantu lahirnya monarki absolut

serta sistem pemerintahan pusat raja di atas kekuasaan para *warlord.* Untuk memperkuat sistem pemerintahan monarki absolut itu, raja memerlukan para cerdik-pandai, terutama dalam menangani bidang keuangan negara. Karena itu, di Prancis dalam zaman kerajaan absolut (abad ke-17 sampai 1789), para cerdik-pandai yang menjadi abdi raja diangkat menjadi golongan bangsawan (*noblesse de robe* 'bangsawan berjubah') mengimbangi bangsawan bersenjata (*noblesse d'epee* 'bangsawan berpedang'). Dalam sejarah pembentukan negara kesatuan ini, justru para cerdik-pandailah yang memegang peranan utama lebih daripada kekuatan militer sang Raja. Bahkan di masa itu, kaum cerdik pandai bersikap sekeras kaum militer dan tanpa segan-segan menindak dan menghancurkan musuhnya.[23]

Di Indonesia, sama halnya di India, dapat ditemui gejala-gejala sebaliknya. Singkatnya umur kerajaan-kerajaan di Indonesia berkaitan dengan ketidakmampuan memperkembangkan golongan birokrasi ini. Di Jepang, yang mencapai keadaan stabil dan tentram di bawah Shogun Tokugawa (1615–1860), golongan militer (samurai) dapat dikekang oleh birokrasi yang mengambil gaya kekaisaran Tiongkok. Sama halnya di masa negara kolonial modern, nampak betapa golongan cendekiawan lebih berperanan. Karena itu, salah bila dikatakan bahwa negara-negara seperti Inggris, Prancis ataupun Belanda berkuasa di koloni-koloni mereka atas dasar kekuatan. Bagian kekuatan fisik ini merupakan faktor yang tidak terlalu penting. Jauh lebih penting adalah *civil* (kolonial) *service* (para pegawai negara) Inggris, B.B. *(Bestruurs-Beambte* 'pegawai pemerintah') Belanda. Bagian *ambtenaar* inilah yang menyebabkan negara-negara kolonial tentram dan yang menjadikan negara pejabat *(beambten-staat)* diterima oleh berbagai masyarakat.

Masyarakat menganggap *beambten-staat* kolonial sebagai badan objektif yang mengurangi kesewenang-wenangan kasta bangsawan lokal, atau paling tidak inilah mitos kolonialnya.

Bila di Eropa dalam abad ke-17 raja-raja insaf betapa pentingnya peranan para cerdik-pandai dalam membentuk pemerintahan pusat, maka sejak lama sekali kekaisaran Tiongkok telah menggunakan para cerdik-pandai untuk mendirikan negara kesatuan yang kuat. Sejak Konfusianisme dijadikan ajaran resmi negara pada abad ke-5 Masehi, pekerjaan atau profesi militer dianggap rendah. Negara dikuasai para literati yang oleh Barat disebut Mandarin.

Para Mandarin ini berasal dari satu klas yang secara turun-temurun menjadi tuan tanah di pedalaman Cina. Golongan inilah yang dapat membiayai pendidikan anak-anaknya dan bila lulus menempuh ujian negara mereka dapat memperoleh karir dalam korps abdi negara (birokrasi). Tidak banyak memang yang berhasil. Namun, bila satu keluarga dalam kira-kira tiga atau empat generasi melahirkan seorang Mandarin saja, maka keluarga tersebut terjamin kekayaannya selama tiga atau empat generasi kemudian. Begitu banyak kekayaan yang diperoleh seorang birokrat Cina. Sistem mandarin ini berlaku sebelum zaman *warlordisme* yaitu semacam zaman feodal, di mana panglima-panglima daerah (raja-raja kecil) saling memerangi dan saling menundukkan satu sama lain. Untuk mengakhiri zaman ini, Konfusius mengajukan falsafahnya yang menempatkan setiap orang dalam susunan hirarki, baik dalam lingkungan kecil seperti keluarga, kampung, desa maupun negara dan di mana kaisar menempati kedudukan yang tertinggi seperti ayah/romo.[24]

Salah satu ciri yang menonjol dari para cerdik-pandai ini adalah kemampuan menciptakan konsepsi baru, kelincahan berpikir serta kemampuan yang tak terbatas dalam mencari kebenaran. Walaupun demikian, mereka sering bersikap konservatif, cepat puas dan angkuh. Bila kaum militer dianggap kaku dalam pemikiran, monolitik dalam kecerdikan berhubung dengan disiplin yang ditanamkan sebagai profesi, maka sebenarnya para cerdik-pandai konfusianis juga kaku dan konservatif seperti militer. Oleh karena itu, seorang cerdik-pandai, misalnya profesor di Barat yang angkuh dan kaku, akan disebut sebagai seorang Mandarin. Peranan para cerdik-pandai ini baru merosot ketika dalam tahun 1905 dihapus ujian negara dan syarat-syarat mandarinisme.[25] Timbullah kegoncangan dan krisis kemasyarakatan yang ditandai dengan berbagai pemberontakan petani Taiping yang mengakibatkan melemahnya dinasti serta pemerintah pusat. Pada akhirnya, para tuan tanah mencari dukungan kaum panglima setempat dan timbullah zaman *warlordisme* di Tiongkok.

Akan tetapi, adalah tidak benar apabila ada yang mengira bahwa dengan diberikannya peranan utama pada kaum cerdik-pandai ini maka semua persoalan negara dapat diatasi.

Ketika alat kontrol pusat atau masyarakat tidak kuat, dengan mudah akan timbul otonomi dalam keuangan para klerk dan terjadilah korupsi.

Ini juga berkaitan dengan sistem penggajian atau pembelian jabatan-jabatan. Berbagai jabatan, seperti penarik pajak negara atau inspeksi keuangan, dapat menjadi negara dalam negara. Contoh-contohnya cukup banyak, baik di negara-negara Eropa, Islam maupun Asia. Karena itu pula, tidak jarang tindakan-tindakan harus diambil terhadap pejabat-pejabat yang menyaingi kedudukan raja sendiri.[26]

Militer di Zaman Modern

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam negara dan masyarakat tradisional, kekuasaan golongan militer maupun cerdik-pandai dapat bersifat sangat pribadi; tergantung dari kewibawaan (kharisma) si pejabat. Sifat pribadi (perseorangan) dari kekuasaan ini menyebabkan lemahnya negara, biarpun menguntungkan orang-orang kuat di dalamnya. Namun, sejarah menunjukkan bahwa untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, di negara-negara modern, baik Barat maupun sosialis, timbul kekuatan-kekuatan masyarakat yang mengekang dan menertibkan golongan militer dan abdi sipil negara. Di Barat, ekspansi perdagangan dan revolusi industri menimbulkan golongan menengah kota, yang langsung di bawah *ruling class* tradisional para bangsawan. Sehingga, lambat laun, golongan-golongan buruh, petani dan lain-lain ditarik ke atas. Timbullah suatu masyarakat yang kompleks, di mana masing-masing golongan melahirkan para cerdik-pandai. Kemudian para cerdik pandai tradisional, seperti pejabat negara dan gereja, diintegrasikan ke dalamnya.

Singkatnya, di mana muncul kekuatan-kekuatan sosial ataupun populis seperti pedagang, petani, buruh, tukang dan lain-lain yang akan dijelaskan kelak maka di sana berakhirlah kekuatan militerisme. Disusul dengan berubahnya otoritas kesewenangan-wenangan para cerdik-pandai (abdi sipil raja). Contoh paling dramatis dapat dilihat dari revolusi Prancis (1789) yang mengawali proses pertumbuhan masyarakat modern (liberal, borjuis). Dalam revolusi Prancis timbul tentara "Nasional", yakni golongan yang tidak terdiri dari bangsawan dan gerejawan, tetapi para warga negara biasa yang kebanyakan merupakan golongan menengah kota. Untuk menjadi tentara, setiap warga harus membayar sejumlah pajak atau mempunyai harta milik tertentu. Prinsip ini sekarang kedengarannya kuno. Akan tetapi, pada masa itu mungkin konsep warga negara ini sangat revolusioner biarpun dikaitkan dengan "milik".

Tentara nasional Prancis ini merupakan contoh pertama dari suatu tentara Barat yang direkrut atas dasar konskripsi atau mobilisasi nasional. Berlawanan dengan tentara nasional ini adalah tentara bayaran para raja-raja Eropa dan para bangsawan Prancis yang menentang revolusi borjuis tersebut. Tentara nasional ini kemudian dapat mengalahkan batalyon-batalyon "asing" raja Prancis seperti: Swiss, Jerman dan lain-lain.[27]

Anehnya, tentara sewaan para raja dan bangsawan Eropa ini, khususnya pada permulaan, dipimpin para perwira yang jauh lebih profesional daripada tentara nasional revolusi Prancis. Namun, revolusi Prancis inilah yang kemudian mempertajam konsepsi militer profesional. Ada dua faktor yang mendorong ke arah konsepsi militer profesional.

Pertama, Revolusi Prancis menimbulkan struktur masyarakat baru dengan menghancurkan susunan negara tradisional di mana kasta militer (bangsawan serta ksatria) dan gerejawan (klerk) memegang peranan utama. Konsepsi negara modern yang mendasari revolusi tersebut menunjukan bahwa negara merupakan milik semua warganya. Kaum militer hanyalah merupakan suatu profesi di antara berbagai profesi seperti ahli hukum, kedokteran, dan sebagainya. Keahlian tersebut tidak memberikan kedudukan yang melebihi dari warga negara lain. Kedua, faktor perkembangan pendidikan perwira dan militer pada umumnya, sejak akhir abad ke-18 dan seterusnya, diperkuat. Persoalan politik makin lama makin dipisahkan dari golongan militer.

Dengan demikian, corak militer profesional tidak terwujud secara tiba-tiba dengan munculnya masyarakat baru setelah revolusi Prancis. Campur tangan militer dalam urusan politik sipil masih terasa di berbagai negara Eropa sampai beberapa tahun terakhir ini. Selama revolusi Prancis sendiri (1789—1814), terdapat gejala di mana kaum militer dipergunakan oleh berbagai golongan borjuis untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan mereka sendiri. Bagi golongan borjuis, kaum militer dapat merupakan unsur yang bermanfaat untuk menindas berbagai tuntutan dan gerakan rakyat yang terlalu radikal, yang selama revolusi Prancis memang telah cukup resah. Juga di masa sejarah modern Prancis, berbagai politisi memanfaatkan tentara sementara berbagai panglima tentara ingin mempengaruhi kehidupan politik. Semua gejala ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kekuatan masyarakat yang membendung penggunaan kekuatan fisik.

Dunia modern biasanya mencela dan menghukum campur tangan militer dalam politik dan menyebut "militerisme" dengan sinisme lain yaitu "*praetorianisme*" yang menunjukkan peranan para pengawal kaisar Romawi.[28] Dalam sejarah kuno Romawi, para pengawal kaisar yang di zaman imperium ini menghadapi keruntuhannya memainkan peranan besar dalam memilih kaisar baru. Dan pilihan para pengawal ini ditentukan oleh suapan-suapan yang dapat diberikan oleh para calon untuk kedudukan kaisar.
Sebelum munculnya Partai Nazi (1930) di Jerman dan khususnya, Prusia dapat dianggap sebagai contoh yang menyolok dari berperannya militerisme modern dalam politik negara. Tokoh yang terkenal adalah Otto Von Bismarck (1870) yang menyatukan Jerman dan Prusia di bawah kekuasaannya sebagai Perdana Menteri. Prusia, sejak awal memiliki suatu kasta perwira yang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan yang dianak-emaskan oleh raja dan negara. Kasta ini kebanyakan terdiri dari para bangsawan dan kesatria Eropa. Sedangkan golongan menengah sebaliknya, tidak memiliki peranan politik yang berarti. Peranan kasta militer Jerman (Prusia) ini masih tetap berlangsung setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama (1914—1918). Kekalahan ini menumbangkan takhta kaisar Jerman dan kekuasaan para raja dan pangeran Jerman. Dengan timbulnya Republik Weimar yang bercorak sosialis moderat, kedudukan Hankam dari *praetorianisme* tetap dipertahankan kaum militer Jerman.
Baru setelah munculnya gerakan massa di bawah demagog Hitler yang betapa pun gilanya, peranan militer Jerman berhasil diakhiri. Pertama-tama, dengan mengambil berbagai tindakan terhadap para jenderal yang membangkang atau yang dianggap melawan, Hitler dengan Partai Nazi melakukan kontrol terhadap fungsi Hankam sekaligus menentukan strategi peperangan dan ekspansi militernya. Demikianlah Hankam Jerman yang dahulu demikian gemilang kedudukannya, sama sekali berada di bawah pengawasan Hitler, seorang sipil, bekas sersan dari Austria dalam Perang Dunia I. Dalam tahun 1945, unsur Hankam Jerman-Prusia ini dihancurkan oleh Hitler menjelang kekalahan Jerman ketika mereka mengadakan kup militer dan mencoba membunuhnya. Anehnya, Dunia Barat, dalam kasus Jerman ini agak bersimpati terhadap Hankam Jerman yang dianggap lebih rasional ketimbang Hitler yang gila dan yang merupakan mala petaka dunia. Bagi para ahli ilmu politik dan sejarah, kasus ini memperlihatkan adanya unsur kekuatan sosial dalam sejarah, terlepas dari jeleknya Partai Nazi Jerman,

yang dapat mengawasi dan membuat kaum militer secara politis tidak berdaya.[29]
Revolusi-revolusi di berbagai negara dewasa ini seperti di Vietnam, Iran dan lain-lain membenarkan pandangan demikian. Tidak ada kekuatan yang demikian perkasa seperti militer Amerika Serikat di Vietnam, namun kekuatan fisik tersebut akhirnya kalah secara politis menghadapi gerakan rakyat Vietnam. Tidak ada seorang raja yang demikian kuat secara militer, dalam bidang rahasia, birokrasi, keuangan dan lain-lain seperti Syah Iran. Namun, raja diraja ini dikalahkan oleh gerakan yang dipimpin para ulama desa/kota kecil dan mahasiswa serta pemuda yang resah.

Dapatlah dikatakan bahwa kaum militer di abad ke-20 ini hanyalah profesional dalam kekerasan, dan bukan politik. Karena itu, setiap unsur yang ingin memainkan peranan politik, baik itu kaum militer atau bukan, haruslah memahami kenyataan dunia kini dengan masyarakatnya yang serba kompleks, dengan mencari sekutu-sekutu di antara para kekuatan sosial. Tidak seperti halnya dalam masyarakat tradisional (abad pertengahan) di mana main hakim sendiri merupakan gejala umum. Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah: siapakah yang beruntung dalam perebutan kekuasaan itu?

Umumnya, dalam abad ke-20 ini, kudeta militer bersifat kanan yaitu mempertahankan *status quo* masyarakat. Kaum militer dalam melakukan kudeta mengadakan persekutuan dengan tuan tanah, cerdik pandai (teknokrat) modal asing dan lain-lain seperti halnya yang terjadi di Amerika Latin karena mereka bertujuan menguntungkan diri sendiri. Walaupun begitu, ada juga kudeta militer yang bertujuan memperkukuh dan mengefisiensikan organisasi negara. Organisasi negara tersebut dirasakan diperlemah oleh kharisma seorang kepala negara atau, dalam hal yang berkenaan dengan monarki absolut, karena sifat turun-temurun kedudukan kepala negara. Contoh klasik dari gejala yang terakhir ini adalah oposisi ABRI terhadap tokoh Sukarno, kudeta di Muangthai terhadap raja absolut dalam tahun 1930-an yang mengubah monarki menjadi kerajaan konstitusional,[30] kudeta Nasser terhadap Raja Farouk dari Mesir dan lain-lain. Kudeta demi pendayagunaan negara itu, sering juga berfungsi untuk lebih mendayagunakan pengaliran surplus dari bawah ke atas. Dalam kasus terakhir ini, golongan teknokrat dan golongan bermodal yang mendapat tempat layak. Dengan singkat, kudeta militer yang bertujuan

mengadakan pendayagunaan negara akan memperkuat birokrasi, para pejabat, modal asing dan domestik, tergantung mana yang lebih efisien.

Kadang kala, ada juga rezim-rezim militer populis yang menciptakan gerakan massa atau memenuhi cita-cita gerakan massa, namun secara struktural tetap mempertahankan hirarki masyarakat, khususnya kedudukan kaum atasan baik kaum feodal kapitalis maupun kaum militer. Di Eropa Barat, gejala seperti ini nampak pada rezim Kaisar Napoleon III (1849—1870) sedangkan di Amerika Latin, nampak pada rezim Peron, Peru dan lain-lain.

Apa pun hasil atau tujuan militerisme dalam politik, satu hal yang selalu menyebabkannya adalah krisis negara dan masyarakat atau yang semacamnya. Dalam hubungan ini, di tahun 1950-an dan 1960-an, di masa perang-dingin, beberapa ahli politik Amerika mengajukan teori-teori yang pro-militerisme di Dunia Ketiga. Mereka menyatakan militerisme merupakan satu-satunya unsur modern (karena teknologi, organisasi, sistem komunikasi, sifat nasionalnya dan lain-lain) di negara-negara yang sedang berkembang dan yang dapat memperkuat negara serta mendorong pembangunan.[31] Anehnya, teori ini datang dari Amerika yang mungkin dianggap paling anti-militer dalam sejarah di antara negara-negara Barat dan di mana peranan negara dalam masyarakat dilihat sebagai "kebutuhan jelek" (*necessary evil*) artinya, makin sedikit peranannya, makin baik bagi masyarakat. Namun, mungkin anjuran militerisme bagi Dunia Ketiga terletak pada ketakutan Amerika akan ancaman komunisme bila militer tidak diperkuat di negara-negara tersebut. Akhir-akhir ini, setelah pengalaman perang Vietnam dan ketidakpastian kudeta militer baik kiri maupun kanan, yang nasionalis, populis dan lain-lain, para ahli politik sekali lagi mulai menguji teori militerisme bagi Dunia Ketiga dan mulai menolaknya.[32]

Akan tetapi, yang lebih penting dari ditinggalkannya teori militerisme bagi Dunia Ketiga adalah kegagalan rezim-rezim militer dalam pembangunan, betapa pun organisasi negara menjadi kuat. Memang, kalau perkembangan sejarah masyarakat disadari sedikit saja, maka tampak bahwa tidak ada kelas berkuasa yang lincah dan berorientasi pada berbagai eksperimen. *Ruling class* tradisional, apa itu militer atau kaum cerdik-pandai atau kedua-duanya, biasanya sangat kaku. Mereka hanya berpikir mengenai tata tentram dalam arti stagnasi.

Kesimpulan

Persoalan-persoalan di atas mencakup berbagai gejala di dunia. Sebagai bangsa yang hidup dalam suatu kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, kita mengira bahwa kita merupakan suatu jenis manusia yang unik yang pengalaman-pengalaman orang lain di benua-benua lain tidak menyangkut kita. Agaknya, sebagai orang kepulauan, biasanya kita sangat berorientasi pada diri sendiri (terpikat pada dirinya). Sayangnya ini hanya menimbulkan suatu ilusi saja dan bukan kenyataan. Orang kepulauan juga manusia biasa seperti yang lain. Karena itu untuk mengenal Indonesia kini dan hari depan, kita harus juga menguji pengalaman orang-orang lain.

Kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia juga memiliki *ruling class* priyayi atau orang kaya yang di samping memiliki fungsi pemerintahan juga fungsi militer. Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara fungsi sipil dan militer, walaupun tentu saja selalu ada orang-orang yang lebih unggul di satu bidang dan kurang pada bidang lain atau tidak memiliki keunggulan sama sekali. Pembentukan pertama dari suatu golongan perwira profesional di bawah masa penjajahan Belanda sedikit dan hanya sekali di bawah pendudukan Jepang (Peta) jumlah itu menjadi lebih besar.[33] Baik tentara kolonial (KNIL) maupun militer Jepang pada waktu itu memiliki ideologi yang berlainan dengan konsepsi militer di dunia Barat. Tentara-tentara kolonial yang berasal dari Barat diizinkan berperan lebih banyak daripada di negara induk. Sebab tentara kolonial dilihat sebagai pelindung dan bila perlu untuk mempertahankan kedudukan sipil Eropa dari ancaman pribumi. Penaklukan terikat pada konsep kolonialisme, biarpun kenyataan sejarah lain. Ini mungkin menjadi sebab mengapa sisa-sisa militerisme terakhir di Barat, yaitu pemerintahan sipil, ditentang oleh militer (datang dari tentara kolonial) misalnya Westerling dari KNIL dan tentara kolonial Prancis di Aljazair ketika De Gaule mau memerdekakan koloni tersebut.[34]

Di samping warisan KNIL, ada warisan Jepang yang sebelum Perang Dunia II memang bersifat *praetorian* yaitu memiliki pengaruh politik yang besar dan yang dalam konsepsi pun tidak tergantung pada pemerintahan sipil.

Akan tetapi, pembentukan tentara Indonesia sebenarnya bermula dalam revolusi. Revolusi membuka pintu bagi semua yang berminat jadi tentara dan yang dapat memanggul senjata serta

menunjukkan kualitas sebagai pemimpin. Basis untuk menjadi tentara adalah nonprofesionalisme seperti semua kedudukan dalam revolusi. Dengan sendirinya banyak tentara melakukan baik fungsi politik maupun pemerintahan. Pada perjanjian-perjanjian pertama dengan Belanda, atau malahan sampai 1950, tentara masih merupakan konsepsi yang samar-samar. Belanda malahan menyebutkan para pejuang dengan pemuda, teroris, ekstremis dan lain-lain,[35] dan mungkin dalam mata para politisi Indonesia sendiri ada pemikiran semacam itu juga. Sebab, seperti golongan politik Barat, para politisi tidak biasa memperoleh tekanan dari yang bersenjata. Pada saat yang sama, birokrasi (pangrehpraja) atau apa yang tinggal darinya makin lama makin berpindah pada nonprofesional. Dan nonbirokrat, juga dengan kementerian-kementerian, lebih merupakan *pressure groups* 'golongan politik' dari pada organisasi birokrasi. Singkatnya, pada saat revolusi, profesionalisme di berbagai bidang menjadi norma yang tidak dikenal dan memang tidak atau kurang dipersiapkan oleh penguasa sebelumnya. Apa salahnya, misalnya, kalau tentara atau orang kuat lain bisa menjadi direktur bank, pengasuh perkebunan dan seterusnya. Toh hasil karya serta pengalamanlah yang harus menentukan apakah ia dapat dipertahankan dalam kedudukan tersebut. Hal itu mungkin akibat kemerdekaan. Namun, mungkin juga itu hanya dapat bertahan selama generasi pendiri republik masih dominan. Bagaimana dengan generasi mendatang yang, seperti di negara-negara lain, melahirkan keahlian di berbagai bidang seperti halnya bidang militer profesional?

Hampir tidak bisa dibayangkan bahwa nonprofesionalisme di semua tingkat, khususnya di tingkat militer, dapat dipertahankan. Persoalannya mungkin terletak pada pembentukan klas dari Generasi 45. Dari generasi yang akan datang dapat dibentuk berbagai ahli, tidak saja ahli militer, tetapi juga birokrasi, sarjana, dan banyak pula sebagai wiraswasta. Suatu golongan menengah yang diciptakan dari putra dan putri Angkatan 45 yang bila ayah tidak ada harus berdikari dan tidak memiliki perlindungan politik lagi. Tentu juga akan ada yang mencoba beraliansi dengan klik-klik militer, pejabat dan politisi, sebab hal itu merupakan usaha manusia. Jawaban hari depan mungkin berada di tangan generasi AKABRI yang akan datang. Akan tetapi, bagaimanapun, setiap saat merupakan suatu perkembangan.

CATATAN

1. Untuk ini lihat: G. Mosca, *The Ruling Class, (Elementi di Scienza Politica)*, MacGraw Hill Book Comp. New York and London: 1939.
2. P. Anderson. *Lineages of the Absolutist State*, London : 197.
3. Dengan penemuan tenaga nuklir sebagai senjata penghancur maka alat penghancuran tergantung dari kualitas, tidak lagi dari kuantitas dan jumlah orang yang melayani, yang sebelumnya menentukan daya senjata. Misalnya satu bom nuklir sekarang dapat menghancurkan satu kota, negara bahkan benua. Sedangkan dahulu penghancuran selalu masih tergantung pada jumlah pucuk meriam, jumlah pesawat pembom dan tonase bom dan seterusnya.
4. H.J. Benda & L. Castles, "The Samin Movement". *Bijdragen Koninklijk Instituut voor Taal—, Land-en Volkenkunde*, Vol. 125, 1969, hlm. 207-240.
5. Lihat: *Autobiography of B. Cellini* (ada berbagai terjemahan dan edisi dalam bahasa Inggris dari karya tukang emas abad ke-16 ini). Lihat juga: F. Braudel, *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, Fontana/Collins-London: 1978 (jilid II—hlm. 745 ff.).
6. Anon., *De Beroerten in de Vereenigde Nederlanden van den Jaare 1300 tot op den tegenwordigen tyd.* Amsterdam—Harlingen. 1788.
7. Onghokham, "The Residency of Madiun. Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century", Yale Ph.D. dis., 1975.
8. B. Tuchmn, *A Distant Mirror. The Calamitous 14th Century*, Penguin Books, 1979.
9. Marc Bloch, *Feudal Society*, University of Chicago Press, 1971 (2 jilid).
10. B. Tuchman, *op.cit.*
11. Samuel E. Finer, "State and Nation Building in Europe: The Role of the Military", dalam buku: *The Formation of National States is Western Europe*, Charles Tilly (ed.) Princeton University Press, 1975. hlm. 84—1643.
12. M. Bloch, *op.cit.*
13. J.E. Sheridan, Chinese Warlord, *The Career of Feng Yuhsiang.* Stanford University Press, 1966.
14. *Ibid.*
15. A. Perlmutter, *The Military and Politics in Modern Times*, Yale University Press, 1977.
16. Dengan munculnya konsepsi militer-profesional sebenarnya, yang terjadi adalah bahwa orang awam tidak dapat berfungsi sebagai militer seperti pada zaman dahulu, di mana kedudukan tinggi atau kelahiran luhur (anak raja, bangsawan) menjadikan dia militer, sehingga kita bisa melihat uskup-uskup pun sebagai pejabat gereja yang tinggi yang memimpin peperangan dan berfungsi sebagai panglima.

17. Paul Mus adalah guru besar Prancis yang mengajar di Yale University 1968–1969, karyanya yang paling terkenal adalah: *Vietnam, Sociologie d'une Guerre.*
18. Untuk koreografi tarian Jawa lihat: N. Tirtaamidjaja, "A Bedaja Ketawang Dance Performance at The Court of Surakarta", *Indonesia* Vol. I, (Apri.l 1967) hlm. 31–56. Bandingkan ini dengan: J. Kats, *Het Javaansch Toneel*, Batavia, 1921.
19. Banyak kedudukan tinggi gereja yang dijabat oleh bangsawan-bangsawan penting dan orang tentu mudah pindah dari kedudukan militer (kesatria) ke kedudukan *clerk* (cerdik).
20. A. Moret and G. Davy, *From Tribe to Empire. Social Organization among Primitives and in the Ancient East*, London, 1926.
21. M. Bloch, *op.cit.*
22. *Ibid.*
23. F. Braudel, *op.cit.*
24. John K. Fairbank (ed.), *The Chinese World Order*, Cambridge, Massa, 1970.
25. E. Balasz, *Chinese Civilization and Bureaucracy*, Yale University Press, 1964.
26. F. Braudel, *op.cit.*
27. A. Soboul, *The French Revolution*, NLB, London, 1974 (dua jilid).
28. Art.: "Militarism" in *International Encyclopedia of the Social Sciences*, MacMillan & Corp. New York, 1972, vol. IX, hlm. 300–305.
29. Gordon A. Craig, *The Politics of the Prussian Army 1640–1945.* Oxford University Press, 1964.
30. D. Wyatt, *The Politics of Reform in Thailand*, Yale University Press, 1969.
31. Lihat: M. Janowitz, *Military Institutions and Coercion In The Developing Nations.* The University of Chicago Press, 1964, buku yang mungkin paling mengajukan teori tersebut. Demikian juga sebenarnya S.E. Finer. *The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics.* Penguin Books, 1975. Lebih netral adalah Amos Perlmutter. *The Military and Politics in Modern Times*, Yale University Press, 1977.
32. Lihat Umpamanya : Gary S. Fie; ds. "Who Benefits from Economic Development? – A Reexamination of the Brazilian Growth in the 1960's" dalam: *The American Economic Review*, September 1977 hlm. 570 ff.; Peter B. Evans, "The Military, the Multinationals and the "Miracle The Political Economy of the "Brazilian Model" of Development" *Studies in Comparative International Development*, Vol. IX (Fall) No. 3, 1974, hlm. 26. ff.
33. Untuk melihat pentingnya PETA dalam perkembangan TNI, lihat: Nugroho Notosusanto.
34. A. Perlmutter, *op.cit.*
35. Untuk melihat perkembangan angkatan bersenjata, lihat: karya-karya A.H. Nasution.

VI. ANGKATAN MUDA DALAM SEJARAH DAN POLITIK

Pada umumnya, golongan muda, mereka yang berumur di bawah 30 tahun, memegang peranan penting hanya pada saat-saat tertentu. Saat-saat tersebut adalah saat perang dan revolusi di mana semangat dan tenaga fisik pemuda diperlukan. Di saat-saat seperti itu, masyarakat biasanya baru membicarakan dan mengidealisir pemuda. Namun, akhir-akhir ini di Indonesia, terutama di kota-kota universitas, para pemuda sekali lagi menduduki tempat yang disoroti umum karena demonstrasi-demonstrasi mereka. Mereka yang beraksi ini terdiri dari golongan muda tertentu, yakni para pelajar, yang berpendidikan tinggi secara formal maupun informal. Singkatnya, mereka ini dapat disebutkan sebagai golongan pemuda intelektual dan aktivis. Munculnya golongan pemuda intelektual dan aktivis ini bukan merupakan sesuatu yang baru di panggung sejarah Indonesia. Boleh dikatakan, dinamik golongan pemuda ini datang dari contoh pemuda tahun 1945 dan selama tahun-tahun revolusi berikutnya, yang kemudian terkenal sebagai Angkatan '45. Pemuda sekarang melihat peranan orang-orang muda pada suatu peristiwa sejarah yang besar; seperti Revolusi '45 memberi mereka hak seumur hidup untuk menamakan diri sebagai suatu angkatan, golongan yang terpilih.

Analog dengan Angkatan '45 ini, adalah gerakan pemuda (KAMI/KAPPI) dalam tahun 1966 yang menamakan diri juga sebagai suatu angkatan-pemuda. Istilah angkatan lalu dipakai untuk menampilkan pemuda atau siswa-siswa yang dalam sejarah Indonesia memegang peranan penting, seperti Angkatan '08 yang menggerakkan Kebangkitan Nasional, Angkatan '28 yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Lebih-lebih gerakan pemuda pada dewasa ini sering menyebut diri sebagai "Angkatan Muda" sebagai julukan pada golongan pemuda intelektual dan aktivis sejak 1966. Gejala terakhir ini menunjukkan suatu perkembangan baru pada golongan muda sendiri serta pada masyarakat yang rupanya menerima kenyataan tersebut. Golongan muda melihat dirinya dan kadang-kadang disoroti sebagai aktor sejarah yang mempunyai fungsi politis tersendiri. Kedudukan politis mereka bahkan agak sentral, karena aksi-aksinya selalu dramatis dan lebih seru daripada dunia politik kaum dewasa. Kedudukan politis sentral itu berasal

dari tahun 1966. Seperti ditulis seorang sarjana ilmu politik Amerika Stephen A. Douglas, "Jadi, dalam diskusi mengenai kemungkinan keberhasilan golongan komunis di Indonesia, ... diabaikan apa yang kemudian terbukti sebagai faktor utama, yakni peranan politik murid-murid sekolah menengah dan mahasiswa"[1] (yang dimaksud di sini adalah KAPPI/KAMI).

Dalam suasana sesudah 1966 ini, seorang sejarawan Indonesia terkenal, Taufik Abdullah, mengenai peranan pemuda, menulis bahwa "sejarah kontemporer Indonesia sering dibagi dalam Angkatan '08, Angkatan '28, Angkatan '45 dan Angkatan '66 ...".[2] Lebih-lebih seorang sejarawan lain B. Anderson (1967). Ia melihat Revolusi 45 sebagai suatu "*Pemuda-Revolution*",[3] yang didorong oleh semacam kesadaran pemuda. Anderson yang menulis tesisnya untuk Ph.D. dalam tahun 1967, dan yang melakukan riset pada tahun-tahun permulaan 1960-an, mendapatkan inspirasi mengenai kesadaran pemuda ini dari suasana para pemuda zaman demokrasi terpimpin. Untuk membedakan peranan pemuda dari zaman ke zaman, pemuda zaman demokrasi terpimpin ini, di sini akan disebut sebagai Angkatan '57 yang dilingkungi oleh Konsepsi Presiden Sukarno dan meluasnya organisasi-organisasi mahasiswa partai serta pemuda-pemuda partai.

Pernyataan para sarjana tadi akan saya soroti lebih lanjut untuk melihat sampai di mana kebenaran mereka. Buat sementara, perlu dicatat bahwa bukan saja para pemuda menganggap dirinya penting, tetapi fenomena gerakan pemuda itu sendiri memang dipandang memegang peranan penting di Indonesia. Sampai di mana hal ini benar? Dalam tulisan ini dipersoalkan apakah peranan pemuda dalam politik Indonesia didorong oleh idealisme, sebagaimana mereka melihat idealisme generasi-generasi muda sebelumnya, ataukah mereka sebenarnya tidak lain daripada umpan peluru seperti peranan pemuda dalam setiap peperangan dan revolusi. Mungkin kedua unsur ini berjalan seiring. Selain itu, akan dipersoalkan juga bagaimana sifat masyarakat itu sendiri dan bagaimana pula sifat pergolakan-pergolakan politik yang didasarkan atas pemuda.

Pemuda dan Masyarakat

Struktur masyarakat biasanya dilihat sebagai sebuah bangunan yang tersusun menurut golongan atas, menengah dan rendah sesuai dengan kedudukan ekonomi atau penghasilan golongan masing-

masing. Masyarakat juga bisa dibagi dalam golongan bangsawan (priyayi), golongan rohaniwan (ulama), pedagang, petani, buruh dan lain-lain atas dasar status sosial dan fungsi yang dilakukan tiap golongan dalam masyarakat. Ada pula yang membagi masyarakat secara lebih umum yakni antara yang memerintah dan yang diperintah. Berdasarkan struktur politik atau atas dasar budaya, masyarakat Jawa kadang-kadang dibagi dalam golongan santri, abangan dan priyayi.

Golongan-golongan inilah yang biasanya dilihat sebagai faktor-faktor yang menentukan sejarah atau yang menjadi korban sejarah. Terutama golongan yang merupakan kesatuan produktif dan sosial seperti bangsawan, ulama, pedagang, petani, buruh dan lain-lain, dalam masyarakat dilihat sebagai aktor-aktor sejarah, khususnya bagi sejarawan sosial. Perbedaan umur, seperti juga seks; pembagian dunia dalam laki-laki dan wanita, tidak pernah dijadikan ukuran untuk mempertimbangkan perubahan di dunia ini. Ada perkecualian tentunya mengenai yang terakhir ini, terutama di kalangan feminis yang melihat bahwa tokoh-tokoh wanita memainkan peranan yang penting. Akan tetapi, pandangan tersebut dianggap eksentrik, seperti pandangan-pandangan kalangan homoseksual yang menganggap tokoh-tokoh besar dalam sejarah mempunyai kecenderungan-kecenderungan homoseksual.

Bayangkanlah, andai kata perkembangan sejarah dilihat sebagai sesuatu yang didorong oleh dinamis kaum muda, atas dasar ini, dunia akan dibagi menurut usia yakni antara golongan tua yang berkuasa, yang kurang militan dan sudah berkedudukan di satu pihak, dan di pihak lain golongan muda militan, yang revolusioner dan dinamis. Tidak mungkin masyarakat dibagi dalam golongan tua dan golongan muda secara demikian. Namun, untuk jelasnya dikotomi tersebut dipakai dan memang beberapa suara, akhir-akhir ini, seakan-akan membenarkan adanya realitas tersebut.

Dunia politik dan ideologi adalah dunia kaum dewasa, karena kedua-duanya berakar dalam kesatuan-kesatuan sosial produktif. Kaum muda biasanya dilihat sebagai golongan yang sedang diintegrasikan ke dalam dunia dewasa itu. Secara sendiri, kaum muda di bawah umur 30 tahun belum termasuk ke dalam kesatuan-kesatuan sosial/produktif. Ambil saja umpamanya tahap-tahap hidup seorang pemuda terpelajar: ia lulus sekolah menengah umur 19 tahun dan masuk universitas, belajar 5 tahun atau lebih, dan setelah itu mencari pekerjaan atau mengambil orientasi lain.

Secepat-cepatnya baru sesudah umur 25 tahun pemuda memegang suatu kedudukan sosial-ekonomi; atau ketika usianya mendekati 30 tahun. Baru pada saat lulus sekolah menengah itulah pemuda terpelajar mulai sadar akan persoalan-persoalan politis, sosial, ekonomi dan mengetahui secara singkat mengenai dunia ini. Kesadaran berupa keingintahuan mengenai dunia harus diperoleh pada waktu ia dilatih untuk salah satu profesi dalam hidup. Di samping itu harus juga diingat, bahwa baik dunia sekeliling maupun ilmu sendiri makin lama makin kompleks dan secara teknis makin lama makin tinggi sifatnya. Hingga, masyarakat melihat proses pematangan pemuda itu demikian lama, dan selama itu menempatkan sebagai "pelajar" dalam arti seluas-luasnya sebagai orang yang sedang dididik.

Di samping itu masyarakat juga menginsafi, bahwa golongan muda inilah yang akan menggantikannya dan telah melakukan investasi yang besar sekali. Singkatnya, masyarakat sadar akan pentingnya golongan muda, dan mereka ini sering disebut sebagai "harapan bangsa". Romantisasi dan idealisasi di sekitar pemuda ini sering terjadi. Selain itu, seperti dikatakan tadi, pada saat-saat perang dan terutama revolusi, status pemuda menjadi tinggi di kalangan masyarakat. Baru pada saat-saat demikianlah pemuda mendapat tempat yang agak istimewa yang biasanya tidak diberikan kepadanya. Pada saat-saat demikian juga tidak ada atau hampir tak ada perbedaan antara pemuda terpelajar, tidak terpelajar, kaya atau miskin. Semuanya diperlukan sebagai tentara atau tenaga.

Konsep mengenai adanya pemuda ini sebenarnya berkembang terutama di Barat, di mana golongan muda mendapat perhatian khusus, tidak dalam arti politis melainkan sebagai golongan konsumtif. Pemuda negara maju dan negara-negara di mana jumlah golongan muda yang belajar sebagai mahasiswa besar sekali, telah memperkembangkan pola-pola konsumtif tertentu seperti *jeans*, hostel pemuda (*youth hostels*), perjalanan pemuda (*youth-travel*), pop-musik, film, dan sebagainya. Juga gerakan pemuda di sekitar universitas-universitas di Barat agak lebih tua sedikit daripada di Indonesia, karena kehidupan mahasiswa dalam arti sekarang lebih dahulu berkembang di sana daripada di sini. Jadi, adanya pemuda ini berhubungan dengan struktur masyarakat, tingkat ekonomi, dan berbagai kesempatan lainnya. Singkatnya, eksistensi pemuda berhubungan erat dengan masalah belajar, yakni sebelum seseorang masuk ke dalam kesatuan sosial-ekonomi.

Di kalangan petani di Indonesia, masa muda itu sebenarnya tidak ada. Demikian juga tidak ada masa muda di kalangan buruh. Tentu, ada orang-orang berumur di bawah 30 tahun di kalangan petani maupun buruh, akan tetapi mereka. tak mengalami masa sebagai "pelajar" dan langsung didorong ke dalam dunia dewasa, ke dalam kesatuan-kesatuan ekonomi-sosial. Usia perkawinan mereka sering juga jauh lebih muda daripada golongan pemuda aktivis-intelektual. Masa hidup "belajar", senggang, hampir tak ada pada kalangan buruh dan tani, dan pemuda tidak diberi tempat yang tinggi, malahan sering lebih rendah. Usia pertengahan (sekitar 40), saat-saat yang paling produktif, diberi penghargaan paling tinggi di kalangan mereka ini.

Sebenarnya ada juga segolongan orang muda di lapisan rendah di kota atau desa yang tidak bekerja atau tidak punya tanah. Mereka merupakan semacam *Lumpenproletariat*, orang-orang muda yang tidak mempunyai penghasilan tetapi mempunyai waktu senggang, karena tidak ada kesempatan kerja. Akan tetapi, golongan ini merupakan persoalan lain dan mungkin dapat dianggap pemuda abadi dalam arti tidak akan pernah bertanggung jawab. Jumlah mereka, di kota-kota besar negara terkebelakang, besar sekali dan mungkin oportunisme kaum muda-miskin ini dapat sangat menentukan dalam pergulatan-pergulatan politik, apalagi dari kaum muda intelektual-aktivis.

Dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam masyarakat Indonesia yang agraris ini, pada umumnya, kedudukan kaum muda rendah sekali. Masyarakat tidak terlalu kompleks dan tidak banyak diperlukan investasi untuk mendidik dan mengintegrasikan pemuda ke dalam kesatuan-kesatuan produktif atau sosial. Golongan-golongan pemuda dalam masyarakat tradisional di keraton kadang-kadang dilihat sebagai fraksi politik yang mengitari pangeran mahkota kalau ada seorang raja yang mendekati akhir hidupnya atau di kalangan ulama dengan murid-muridnya.

Pada umumnya, dalam masyarakat agraris, hirarki masyarakat berdasarkan umur memberikan tempat terpenting bagi yang berusia tua. Usia tua disamakan dengan pengalaman dan kebijaksanaan . Sebenarnya, masyarakat modern tidak banyak bedanya juga; keluarga yang lebih tua juga diberi tempat paling terhormat dan paling berpengaruh. Di masyarakat Barat, juga di sebagian masyarakat Indonesia, hanya orang-orang tua yang dianggap mendekati umur terlalu tua atau pikun, kedudukan mereka kembali disamakan dengan anak-anak. Di Barat hal ini sekarang

diresmikan, orang-orang tua pada umur 65 tahun dipensiunkan. Di masyarakat Jawa, orang yang tua sekali, yang sudah mencapai umur kekanak-kanakan (*senility*), didekati dalam bahasa *ngoko* (bahasa Jawa rendah) seperti orang bicara pada anak-anak.
Dengan latar belakang semacam ini, kita berusaha memahami arti gerakan pemuda kita dewasa ini.

Gerakan Pemuda Pra-'45

Gerakan pemuda atau munculnya peranan pemuda dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena khas abad ke-20, kalau kita mengesampingkan golongan-golongan pemuda di sekitar seorang pangeran-mahkota di keraton Jawa atau di sekitar anak-anak ulama, karena yang terakhir ini dapat dilihat lebih bersifat sebagai fraksi-fraksi politik tertentu. Gerakan-gerakan pemuda abad ke-20 di Indonesia ini tidak unik, sebab juga terjadi di negara-negara Asia lainnya seperti di Cina dengan *May Fourth* (Gerakan 4 Mei)[4]-nya di India, Burma, Jepang dan sebagainya. Masyarakat Asia lainnya juga agraris-tradisional, yang menempatkan usia tua pada puncak hirarki. Tetapi di negara-negara tersebut, seperti juga di Indonesia, terjadi gerakan pemuda dan penonjolan pemuda dalam abad ke-20 ini. Ini bukan karena negara-negara Asia saling mengilhami, akan tetapi karena negara-negara Asia dalam abad ke-20 mengalami struktur-struktur perubahan yang sama.
Perubahan di Indonesia dalam abad ini sudah terlalu sering dibicarakan untuk dijelaskan secara terperinci di sini. Abad ke-20 memperlihatkan masuknya ide-ide baru, pendidikan, industrialisasi dalam batas-batas tertentu, urbanisasi, desintegrasi masyarakat kuno, teknologi baru dan sebagainya. Sering orang juga menyebut perubahan-perubahan ini sebagai suatu krisis masyarakat dalam arti desintegrasi masyarakat lama tanpa terwujudnya masyarakat baru. Dengan krisis itu, timbul berbagai pertanyaan di sekitar apa golongan yang berpengalaman itu — kaum tua dalam arti umur — memang selalu benar? Kebenaran hirarki atas dasar umur diragukan. Harus diingat bahwa segala macam perubahan ini terjadi dengan sangat cepat sehingga pertanyaan ini seakan-akan muncul dengan tiba-tiba dan secara sangat revolusioner atau secara sangat militan. Dalam tempo singkat, timbul kegoncangan dalam masyarakat. Dan dengan krisis masyarakat lama, tidak saja menyebabkan generasi muda menonjol, akan tetapi juga timbul *generation-gap* (perbedaan-generasi). Tidak di setiap masyarakat Indonesia dengan

aneka ragam daerah dan sukunya krisis tersebut selalu bersifat sama. Secara umum, kita mungkin bisa melihat timbulnya dua gerakan pemuda di Indonesia; yang satu timbul dari *generation-gap* dan yang lain muncul dari struktur politik dan sosial. Ada berbagai persamaan dan perbedaan antara kedua golongan ini yang kemudian saling melingkupi *(overlapping)*.

Kegoncangan masyarakat terlihat, terutama pada masyarakat di mana adat atau agamanya sangat konservatif dan ketat. Masuknya ide-ide baru menimbulkan *generation-gap*. Yang pertama mensinyalir adanya "kaum muda" di masyarakat-masyarakat seperti Banten dan Minangkabau adalah kontrolir Belanda. Kaum muda ini berkonfrontasi dengan kaum kolot atau tua. Pertentangan ini adalah latar belakang dari pemberontakan 1926 di kedua daerah itu. Yang penting di sini adalah apa yang dimaksudkan dengan "kaum muda"[5]. Faktor umur sebenarnya bukanlah yang terpenting biarpun mungkin sekali ide-ide baru ini terutama populer di kalangan muda. Namun tidak semua orang muda tertarik padanya sebab kaum kolot juga mempunyai pengikut-pengikut mereka di kalangan orang-orang muda. Definisi "kaum muda" di sini adalah berdasarkan pikiran-pikiran, dan bukan umur. Bagaimana juga, gerakan pembaruan dalam adat-istiadat dan agama ini mempopulerkan istilah "kaum muda" yang di masyarakat konservatif tradisional dalam adat dan agama, merupakan suatu perubahan revolusioner. Masyarakat demikian biasanya memberikan tempat tertinggi kepada "yang tua", yang sudah berlaku sejak dahulu. Adanya konsepsi bahwa "kaum muda" yang bersuara sudah merupakan langkah pembaruan tersendiri yang sangat menyolok dan merupakan tanda krisis masyarakat sendiri yang mulai goncang.

Di pihak lain, munculnya "kaum muda" di kalangan agama dan adat yang konservatif ini tidak dapat disamakan dengan peranan-peranan kaum muda dalam masyarakat-masyarakat lain, umpamanya siswa-siswa kedokteran Jawa nanti. Gerakan-gerakan "kaum muda" ini mempunyai akibat yang permanen. Muhammadiyah antara lain adalah salah satu lembaga yang lahir dari padanya. Perbedaan antara "kaum muda" dengan peranan pemuda dalam peristiwa sejarah justru terletak dalam sifat permanen atau pelembagaan gerakan tersebut. Hal itu tidak didapati pada aksi-aksi golongan muda lainnya.

Kira-kira bersamaan waktu dengan timbulnya "kaum muda", maka beberapa siswa STOVIA (sekolah dokter)[6] melancarkan

program Budi Utomo pada tahun 1908. Isyu-isyu gerakan muda ini agak berlainan dengan "kaum muda", sebab perhatian mereka lebih mengenai nasib bangsa daripada dengan keadaan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Memang benar, bahwa dari kalangan yang kemudian disebut Angkatan '08 ini didirikan Taman Siswa oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), akan tetapi, lembaga pendidikan ini tidak mempunyai fungsi yang sama terhadap kebudayaan dan pendidikan seperti Muhammadiyah terhadap Islam di Indonesia.

Salah satu sebab mengapa Pemuda '08 dan Pemuda '28 dapat berperanan dan berpengaruh demikian besar dalam masyarakat Indonesia, sehingga tindakan mereka masing-masing disebut awal dari Kebangkitan Nasional dan cikal bakal eksistensi bangsa Indonesia sendiri, adalah struktur pendidikan. Struktur pendidikan dan alam pendidikan masyarakat pada zaman sebelum 1945 menempatkan para siswa (pelajar) Indonesia pada lembaga-lembaga pendidikan Barat dalam kedudukan yang istimewa. Bayangkan, dalam suatu masyarakat yang sebagian besar hidup dalam alam agraris-religius/spiritual, buta-huruf dan terisolisasi, di mana koran belum tersebar, film belum ada dan hubungan-hubungan dengan kota masih sedikit, muncul sejumlah orang Indonesia, yang belajar untuk menyerap ide-ide baru. Pemuda-pemuda ini adalah orang Indonesia yang pertama mendapat pendidikan Barat, yang pertama kali berhubungan dengan dunia dan menjelaskannya secara lain daripada yang lazim dilihat.

Mereka berwibawa sebab mereka mendapat ilmu Barat, ilmu penguasa kolonial. Sebenarnya, para pemuda itu, karena kedudukannya yang istimewa dalam masyarakat, juga tidak mengenal masa muda. Mereka dengan segera didorong masuk ke dalam golongan inteligensia, (intelektual) yang berpikir untuk masyarakatnya. Menurut umur, mereka memang pemuda, tetapi fungsinya bukanlah demikian.

Angkatan '08 dan '28 adalah contoh klasik bagaimana segolongan cendekiawan muda dapat mendinamiskan kehidupan politik. Ide-ide golongan ini diterima oleh dunia dewasa, diperlunak dan menurut beberapa orang dijinakkan ke arah konservatisme. Ini jelas terjadi dengan ide-ide Angkatan '08 pada Kongres Budi Utomo pada tahun berikutnya yang dipimpin oleh para bupati dan priyayi tinggi lainnya. Namun, gerakan ke arah "kebangkitan" tetap berjalan. Demikian juga yang terjadi dengan Angkatan '28.

Kekuatan tersendiri tidak pernah timbul dari tindakan cendekiawan muda ini, tetapi ide-ide mereka diserap ke dunia politik dewasa. Tanggapan politisi tua terhadap ide-ide muda ini dimungkinkan karena sebenarnya kedua-duanya merupakan oposisi terhadap pemerintah kolonial dan memang dunia dewasa sudah berpikiran ke arah demikian juga. Tindakan Angkatan '08 dan '28 tidak menjadi lembaga-lembaga sendiri seperti gerakan "kaum muda" di Sumatra Barat tetapi menjadi bagian sejarah gerakan Nasional Indonesia. Terakhir, mengenai pemuda sebelum '45 ini, harus dicatat bahwa mereka menunaikan tugasnya sebagai inteligensia dengan sangat baik. Baik mereka yang belajar kedokteran, teknik, ilmu hukum atau ekonomi tidak menyempitkan diri dalam bidang-bidang mereka, akan tetapi bacaan dan pendalaman pengetahuan mereka yang luas menyebabkan sadar akan isyu-isyu besar zaman mereka seperti kolonialisme, imperialisme, hubungan internasional dan lain-lain. Generasi itu memang istimewa: berani menentang kolonialisme, menyodorkan suatu keadaan lain dari yang ada, yakni suatu Indonesia merdeka. Dalam hal itu, sampai kini belum ada yang menyamainya.

Revolusi Pemuda?

Kalau golongan pemuda pelajar sebelum 1945 dimasukkan ke dalam kategori cendekiawan karena pendidikan mereka, maka para pemuda pada tahun 1945 dijadikan pejuang. Revolusi berfungsi sebagai motor mobilitas sosial yang cepat bagi para pemuda. Revolusi mencakup golongan yang lebih luas daripada mereka yang berpendidikan tinggi saja. Struktur umur para Pejuang '45, maksudnya jumlah besar golongan muda yang aktif di dalamnya, menimbulkan julukan "Pemuda" pada tenaga-tenaga revolusioner 1945 dan konsepsi "Revolusi-Pemuda". Anderson membenarkan konsepsinya ini dengan menerangkan "Kesadaran Pemuda" yang sudah ada secara tradisional di pesantren-pesantren dan murid-murid di sekitar guru yang juga memainkan peranan pada pemberontakan petani abad-abad yang lalu.[7]

Kekuatan revolusioner biasanya dibedakan dari dan oleh lawan-lawannya atas dasar budaya atau kelas sosial, kepartaian atau atas dasar tujuan para revolusioner. Misalnya dalam revolusi Inggris abad ke-17, para revolusioner disebut *Ironheads* (kepala bundar) karena potongan rambut pendek mereka; jadi berdasarkan budaya dan pandangan hidup. Dalam revolusi Prancis (1879) para re-

volusioner disebut *sans culotte*, orang-orang yang tidak berkaus yakni kaum miskin atau biadab, yang caranya berpakaian bertentangan dengan pakaian lengkap para bangsawan dan ukuran-ukuran mode zaman itu. Di sini istilah *sans culotte* menandakan perbedaan budaya dan kelas. Pada revolusi Rusia, kekuatan revolusi disebut *Bolshevik* (kepartaian) atau proletar (tujuan). Pada revolusi Cina (1949), istilah *Kungchantang* juga berdasarkan kepartaian. Di Vietnam tenaga revolusioner disebut *Vietminh* (pejuang kemerdekaan) suatu istilah yang lebih luas daripada di Rusia dan Cina.

Istilah "pemuda" bagi kaum revolusioner di Indonesia kelihatannya agak ganjil bila tidak dijelaskan lebih lanjut. Istilah itu terlalu bersifat tidak membeda-bedakan, terlalu umum.
Anderson, setelah meneliti risalah-risalah Indonesia, Belanda dan Inggris , sampai pada kesimpulan, bahwa revolusi '45 terdiri dari pemuda-pemuda. Jadi, asal mula istilah "pemuda" untuk para revolusioner '45 harus dicari terutama dalam sumber-umber Belanda (dokumentasi terbesar adalah dari mereka). Selain bahwa secara numerik jumlah aktivis revolusioner yang muda itu besar, juga ada segi-segi psikologis yang mungkin menyebabkan orang Belanda menyebut para revolusioner itu sebagai "pemuda".

Orang Belanda pada tahun 1945 baru keluar dari kamp-kamp tahanan Jepang atau dari pengasingan di tempat lain. Mereka kenal suatu Indonesia dalam dunia kolonial. Yang biasa mereka kenal ini telah hilang, koki tua, tukang kebun tua, jongos tua, semuanya hilang. Orang-orang Indonesia yang masih setia pada mereka seperti priyayi-priyayi tua dan orang lain yang di bawah asuhan Belanda, sudah tua. Semua yang menentang Belanda, semua yang baru di Indonesia pada tahun 1945, kelihatannya muda dan "kurang ajar" orang-orang salah-asuhan karena tidak diasuh di bawah Belanda. Yang revolusioner itu kelihatan sebagai "*Japans Fascistische Jeugd*" (pemuda asuhan fasis Jepang). Hanya yang muda yang tidak dibesarkan di bawah asuhan Belanda yang berani menentang Belanda menurut penglihatan mereka. Dalam menamakan para revolusioner ini dengan "pemuda", Belanda mungkin sedikit banyak didorong oleh konsepsi tradisional Jawa bahwa pemuda itu *durung Jawa* (belum matang). Ketidakmatangan dan kekurangajaran para revolusioner inilah yang menyebabkan Belanda menyebut aktivis-aktivis sebagai "pemuda" dan bukannya karena umur.

"Pemuda" dalam Revolusi '45 harus dijelaskan sebagai mereka yang mempunyai sikap-sikap politis dan budaya tertentu tanpa batas umur. "Pemuda" harus dilihat sebagai istilah politis.

Belanda mempunyai istilah-istilah lain bagi para revolusioner ini seperti "kaum teroris", "extremis", "pelopor" dan lain-lain yang bagi mereka identik dengan istilah "pemuda". Sedangkan pemimpin-pemimpin mereka adalah *"halve intelectuelen"* (setengah-terpelajar), kalau tidak *"colaborator"* dan lain-lain.

Di pihak Indonesia sendiri, istilah-istilah yang dipakai untuk menyebut kekuatan revolusi adalah "pelopor", "pejuang", "pemuda", atau yang lebih *sophisticated* "kaum republiken" (kaum republik) dan juga "rakyat." Dalam suasana sesudah 1945, terutama akhir-akhir ini, istilah "pemuda" di antara istilah-istilah revolusioner ini melekat padanya. Angkatan '45 telah menjadi tokoh dalam pemerintahan dan masyarakat, mungkin mereka melihat kembali dengan sedikit banyak nostalgia pada masanya sebagai aktivis. Dengan singkat, masa keaktifan seorang yang penuh gairah dan cita-cita dilihat sebagai masa muda, suatu tahap hidup di mana kelakuannya bisa sedikit "kurang ajar". Ini terlepas dari kenyataan apakah mereka pada tahun 1945 itu betul-betul pemuda atau tidak, menurut umur.

Dengan demikian, istilah "pemuda" melekat pada golongan revolusioner 1945, sebab di antara julukan Belanda juga, istilah inilah yang kemudian paling "simpatik" dirasakan. Lebih simpatik daripada "teroris" atau "extremis" yang sampai kini mempunyai nada jelek. Ini merupakan suatu perkembangan yang mempunyai akibat besar terhadap generasi-generasi akan datang. Salah satu sebab mengapa "Pemuda '45" ini demikian mengikat fantasi pemuda-pemuda sekarang, kecuali romantisme peranannya dan sahamnya dalam revolusi, adalah pelembagaan Angkatan '45 itu dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan kita. Angkatan '45 sendiri merupakan suatu perkembangan pasca 1945, tetapi Angkatan ini menjadi sumber status sosial dan mobilitas mereka. Bagi pemuda sekarang, para Revolusioner '45 ini lalu disamakan dengan mereka sendiri. Artinya, terjadi usaha identifikasi dengan generasi-generasi yang mendahului orang muda sekarang ini. Para Revolusioner '45 dilihat sebagai pemuda di bawah umur 30 tahun dan istilah "pemuda" pada zaman itu tidak dilihat lagi dalam arti politis dan budaya. Betapa ganjilnya penglihatan ini akan ternyata bila dibandingkan umpamanya Revolusi '45 dengan peperangan.

Memang betul para revolusioner tahun '45 terdiri dari banyak sekali pemuda dalam arti di bawah umur 30 tahun, akan tetapi peperangan-peperangan juga terdiri dari orang muda ini. Dan tidak ada suatu peperangan yang disebut "perang-pemuda" seperti usaha menamakan revolusi '45 suatu "revolusi-pemuda". Konsepsi "revolusi-pemuda" terlalu bersifat tidak membeda-bedakan kekuatan dan arus revolusi. Istilah pemuda di sini terlalu bersifat umum.

Pemuda Sebelum dan Sesudah 1966

Karena persoalan Angkatan sering dihubungkan dengan peristiwa sejarah Indonesia yang besar, maka saya akan menyebut pemuda zaman Demokrasi Terpimpin sebagai Angkatan'57 yaitu di sekitar pergolakan Konsepsi Presiden dan kembali ke UUD '45. Prasejarah angkatan itu adalah tahun Pemilihan Umum 1955 di mana terjadi perluasan organisasi partai mahasiswa seperti HMI, GMNI, CGMI dan lain-lain. Pelembagaan dalam partai-partai, sebagai hasil aktivitas di sekitar pemilihan umum, dari gerakan pemuda zaman itu adalah sangat penting dalam memberikan arah dan tujuan ormas-ormas mahasiswa itu. Peristiwa lain yang mendominiasinya adalah bahwa di sekitar 1957, Angkatan '45 menjadi lembaga resmi, dalam arti tokoh-tokohnya muncul ke atas panggung pemerintahan dengan gerakan kembali ke UUD '45. Misalnya Chaerul Saleh[8] dan Adam Malik, yang muncul sebagai tokoh-tokoh kabinet. Dengan singkat Angkatan '45 mencapai kematangan dan menduduki kursi mereka. Ketampilan mereka memberikan tekanan dramatis inspiratif pada perubahan-perubahan politik tersebut dengan ucapan bahwa "revolusi belum selesai".

Kedua peristiwa ini rupanya berpengaruh terhadap gerakan pemuda di zaman itu. Di satu pihak, tampak bahwa gerakan pemuda disalurkan melalui partai-partai yang ada dan memang bagian pemuda dari partai-partai itu seakan-akan memberikan gaya dinamiknya pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan demonstrasi-demonstrasi, anti-imperialisme/kolonialisme, menyokong AA, negara-negara Dunia Ketiga, pidato-pidato di Senayan dan sebagainya. Sehingga pemerintah sendiri kelihatan mengontrol energi dan cita-cita pemuda zaman itu dan dapat menggunakannya. Akan tetapi, di lain pihak rupanya juga ada pengaruh kaum muda ini sendiri terhadap radikalisasi partai-partai. Dengan kata lain ada jawaban tersendiri dari pemuda terhadap tantangan bahwa "revolusi belum selesai".[9] Namun, zaman itu baru saja berlalu

dan belum ada penelitian lebih lanjut mengenai radikalisasi pemuda dan partai-partai pada masa itu untuk mengatakan dengan pasti apa yang terjadi. Perbedaan terbesar antara Angkatan '57 dan Angkatan '66 adalah persoalan ikatan. Angkatan '57 boleh dikatakan berorientasi pada pemerintah zaman itu, sedangkan Angkatan '66 dari permulaan melepaskan diri darinya. Dalam beberapa segi, munculnya Angkatan '66 menunjukkan karakteristik yang sangat individualistis dari pemuda-pelajar tersebut sehingga kita sukar berbicara mengenai angkatan dari suatu golongan pemuda dan melihatnya sebagai suatu kekuatan *uniform*. Sebab, kalau kita berbicara mengenai Angkatan '57 seakan-akan semua pemuda pada zaman itu ikut organisasi-organisasi partai, maka hal itu tidak benar. Sebab justru fenomena Angkatan '66 menunjukkan bahwa ormas-ormas partai tidak mencakup semua pelajar. Tidak semua pemuda-pelajar semasa Demokrasi Terpimpin dikontrol pemerintah. Biarpun Angkatan '66 ini bergerak dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada seperti HMI, PMKRI dan lain-lain, akan tetapi gaya radikalisasinya justru datang dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak tergabung dalam organisasi itu. Dengan singkat fenomena '66 kelihatan tidak seluruhnya benar, sebagai aksi dari mahasiswa pelajar bebas. Pahlawan-pahlawan '45 mereka adalah Adam Malik, Eri Sudewo atau penculik-penculik dalam peristiwa Rengasdengklok, dan bukan para proklamator.

Angkatan 66, yang menurut Douglas mengubah perimbangan politik di Indonesia — suatu ucapan yang saya ragukan, merupakan titik penting dalam melihat peranan pemuda dalam sejarah dan politik Indonesia. Sebenarnya, sejak saat itu historiografi Indonesia berkisar pada pemuda. Masyarakat umum menerima dan mengakui peranannya. Hanya ironis sekali peranan pemuda, dalam arti aktivis-intelektual, sebenarnya akan sangat kecil pada masa pembangunan. Adalah lazim, di mana peranan suatu golongan makin menurun maka orang mencoba untuk memperbesarnya. Apakah aktivitas dan kegemuruhan golongan muda akhir-akhir ini tidak disebabkan karena Orde Baru justru merupakan orde hirarki militer, hirarki birokrasi dan hirarki teknokrat yang memberikan tempat rendah pada pelajar, mahasiswa, golongan muda dan orang-orang yang di luarnya? Dengan kata lain keresahan dewasa ini harus dilihat dari konflik-konflik dalam masyarakat. Di pihak lain, mitos peranan pemuda diperbesar sejak '66 dan angkatan ini tidak diberi tempat. Pemuda '66 lebih elitis golongannya ber-

hubung perubahan struktural universitas sejak '66 dan tidak pernah ikut kehidupan partai-partai dengan sayap-sayap kaum tani dan buruh. Mereka adalah mahasiswa dan pemuda dalam arti sepenuhnya, suatu golongan elite atau calon elite dengan naluri-naluri golongan yang biasa memerintah, hingga dengan sendirinya mereka kelihatan resah dan tidak sabar menunggu.

Pemuda Dewasa Ini, Kesimpulan

Tadi, telah dicoba disusuri perkembangan sejarah pemuda Indonesia sepanjang abad ke-20 ini. Munculnya kekuatan pemuda sebagai pusat perhatian masyarakat bukan terjadi di Indonesia saja, akan tetapi merupakan fenomena di negara-negara Asia lainnya yang secara tradisional menempatkan pemuda dalam tingkat rendah sedangkan usia lanjut diberi tempat yang paling terhormat. Cina, sebagai contoh klasik dari keadaan terakhir ini, mengenal "Gerakan 4 Mei"; gerakan pemuda dari mana kebanyakan pemimpin modern Cina terbentuk dan berada di pihak mana pun juga. Fenomena kepemudaan di Asia membawa dua akibat. Di satu pihak tokoh-tokoh revolusi Asia terpikat padanya. Mao Tse-tung, misalnya, mencari kekuatan untuk revolusi kebudayaannya pada golongan muda, demikian juga Sukarno mengalamatkan pesannya bahwa "revolusi belum selesai" pada pemuda. Di lain pihak, pemuda menjadi gandrung akan revolusi atau paling sedikit melihat diri sendiri sebagai katalisator perubahan politik.

Di sinilah letak warisan-warisan pada pemuda. Idealisme pemuda adalah faktor yang menyebabkan mereka dengan mudah dapat bergerak. Akan tetapi, emosi-emosi yang besar ini justru menjadikan mereka sebagai umpan peluru yang paling cocok dalam suatu revolusi. Khususnya bila idealisme dan emosi ini tidak didukung oleh pengetahuan yang luas dan hanya berorientasi kepada aksi tanpa mencoba menjawab apa kedudukan dan fungsi mereka, dan sampai tingkat mana perkembangan sejarah negara ini berada. Pemuda yang terakhir ini bersifat seorang "*true believer*"[10], seorang yang hanya percaya tanpa argumentasi fakta, dan pada dasarnya adalah *psyche* totaliter dan fasis. Partai dan *isme* apa saja dapat menggunakannya, mungkin yang lebih sederhana lebih dapat memancing mereka. Memang, tak pernah ada titik sejarah di mana pemuda memainkan peranan sendiri. Namun, aktivitas dalam proses dan peristiwa sejarah bagi pemuda merupakan juga jalan ke mobilitas sosial; dan pemuda mana yang tidak ambisius? Apalagi

pemuda yang terdidik, yang sudah berasal dari golongan elite. Konsepsi angkatan yang tidak terpisah dari politik pemuda menunjukkan hal itu dan contoh klasiknya adalah Angkatan '45. Memang, mungkin di dalam masyarakat seperti kita, di mana tidak ada saluran untuk menampilkan pemuda-pemuda yang pandai dan cakap ke depan, maksudnya tidak ada saluran-saluran ekonomi, maka "aktivitas" di "jalan" merupakan satu cara terbaik bagi masyarakat untuk merekrut yang pandai di antara "Harapan Bangsa"-nya. Kalau bagi yang ambisius di antara pemuda, ini merupakan saluran untuk tampil — sesuatu yang tidak jelek atau dicemoohkan di sini, tetapi dianggap sesuatu yang alamiah — maka, bagi kebanyakan orang, "aksi jalan" tidak lain daripada suatu ritus, inisiasi untuk menunjukkan kedewasaannya; juga semacam ambisi.

Status elite pemuda sendiri, selama abad ke-20 ini, mengalami beberapa perubahan dalam arti jumlah dan sifat (kuantitatif dan kualitatif). Sebelum 45, pemuda yang belajar sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Mereka hampir semuanya berasal dari keluarga elite tinggi. Revolusi dan kemerdekaan membuka pintu universitas dan sekolah-sekolah secara lebar. Sejak tahun 1966, adanya uang pendaftaran, uang pangkal dan uang kuliah serta ujian-ujian setelah lulus SMA, sekali lagi membatasi universitas-universitas. Tidak seperti sebelum '45, namun bersifat lebih elitis bila dibandingkan dengan permulaan tahun 50-an.

Status elite inilah — dan memang golongan pemuda yang kita bicarakan di sini adalah berasal dari elite masyarakat — dengan tradisi kelas yang memerintah, ambisi, dan kesadaran bersaham terhadap perkembangan negara ini, yang mendorong golongan muda ini untuk menjadi resah, terutama di mana golongan-golongan elite ini digeser dari kedudukannya, atau menjadi kurang penting dengan munculnya elite baru. Namun bisa juga salah bagi pemerintah, untuk menganggap bahwa keresahan golongan muda sekarang ini hanya sesuatu yang terdiri dari beberapa suara yang ambisius, eksibisionis dan lain-lain. Sebab sering hal ini merupakan gejala konflik-konflik dalam negara dan masyarakat yang lebih dalam dan lebih besar.

Pada akhirnya, dapat dipertanyakan arti pemuda sebagai katalisator perubahan dan terutama di mana ada harapan demikian dari masyarakat seperti akhir-akhir ini.

Kalau pada permulaan munculnya, kepemudaan di Indonesia merupakan gejala kegoncangan masyarakat dan tanda dari desintegrasi nilai-nilai konservatif, maka keadaannya dapat berubah. Diberikannya kedudukan sentral pada pemuda sebagai faktor perubahan dapat merupakan gejala bahwa masyarakat adalah konservatif biarpun tetap sadar akan keharusan adanya perubahan. Perubahan melalui pemuda selalu berarti perubahan yang diawasi, perubahan melalui pendidikan yakni ide-ide baru dan yang disalurkan melalui elite tertentu — anak-anaknya sendiri — dengan ide yang sudah terpilih. Masyarakat yang mendudukkan pemuda dalam posisi sentral terang tidak menghendaki perubahan dengan kekerasan atau kalau itu memang ada, toh terbatas dan terang tidak menghendaki perubahan struktural atau modernisasi sebenarnya yang dapat membahayakan kedudukan elite sendiri dan yang mengguncangkannya. Jadi konsepsi pemuda sebagai alat perubahan sendiri — gejala akhir-akhir ini — sebenarnya memenuhi dua kebutuhan yaitu perubahan, tetapi suatu perubahan yang terbatas. Pada akhirnya, tidak dapat dilepaskan tugas sebagai guru yang mempertanyakan persoalan terpenting baginya. Apakah hasil terbesar yang dapat diharapkan dari golongan muda ini? Pemuda memang berhak dan seharusnya prihatin. Tetapi energi ini sebaiknya diarahkan untuk mengetahui persoalan-persoalan seperti generasi-generasi yang sebelumnya yaitu para tokoh pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Harus diingat bahwa umur belajar itu singkat dan harus dipergunakan seluruhnya. Suram sekali kelihatannya nasib bangsa dikemudian hari bila pemuda hanya menjadi umpan peluru serta sekadar bebas dari buta-huruf.
Juga harus diakui bahwa isyu-isyu yang dibawakan para pemuda akhir-akhir ini adalah isyu-isyu dewasa dan tidak dapat diabaikan sebagai omongan anak kecil, atau milik segelintir orang. Sebab, seperti dikatakan tadi, keresahan pemuda ini mungkin merupakan gejala dari konflik-konflik dalam masyarakat yang lebih mendalam dan luas. Apakah mungkin karena struktur masyarakat dan negara kita dewasa ini sedemikian rupa, sehingga hanya para pemuda saja yang dapat membawakan suara dari konflik-konflik tersebut dengan ciri-ciri khas mereka?

CATATAN

1. Stephen A. Douglas, *Political Socialization And Student Activism In Indonesia*, University of Illinois Press, 1970 hlm. 7.
2. Taufik Abdullah, *Tentang Pemuda dan Pembangunan*, (Jakarta: LEKNAS, 1972, hlm. 14.
3. B.R.O.G. Anderson, "The Pemuda Revolution: Indonesia Politics 1945–1946" Ph. D. Thesis, Cornell University, 1967 dan kemudian diterbitkan dengan judul: *Java in a Time of Revolution. Occupation and Resistance, 1944–1946*, Cornell University Press, 1972.
4. Chow Tse-tsung, *The May Fourth Movement*, Cambridge, Mass, 1960.
5. Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement In West Sumatra (1927–1933)*, Cornell University Monograph Series, 1971.
6. Jumlah dokter-dokter dalam pergerakan-pergerakan nasionalis di Asia memang besar berhubung pendidikan kedokteran adalah yang tertua di negara-negara Asia. Mungkin juga karena fungsi para dokter lebih langsung berhubungan dengan rakyat, kedudukan mereka dalam politik nasional adalah sangat penting.
7. Anderson *op.cit.*, hlm. 7–10. Akan tetapi penelitian Sartono Kartodirjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1966), hlm. 344–347, kalau ini dapat dijadikan pegangan umum, menunjukkan dalam daftar aktivis-aktivis yang dibuang pemerintah Hindia Belanda karena keterlibatan mereka pada pemberontakan Banten kebanyakan berusia lebih dari 30 tahun, banyak yang berumur lebih dari 40, ada yang 50 dan bahkan 60 tahun. Dalam pemberontakan petani tradisional ini, tidak terlihat partisipasi golongan muda, yang di bawah umur 30 tahun, atau jumlah mereka sedikit sekali.

   Biarpun demikian, buku Anderson dalam banyak hal sangat menarik dan hebat. Bukunya tetap merupakan bacaan yang mempesona.
8. Dr. S.L. van der Wal, ed., *Officiele Bescheiden Betreffende De Nederlandsch-Indonesische Betrekkingen 1945–1949*, 1971.
9. J. Elisco Rocamora, "The Partai Nasional Indonesia, 1963–1965" *Indonesia*, Cornell Modern Indonesia Project, No. 10 (October) 1970, hlm. 143–183.
10. Hoffer, *The True Believer*, Mentor.

VII. PEMBERONTAKAN MADIUN 1948: DRAMA MANUSIA DALAM REVOLUSI

Pendahuluan

Secara dramatis Sukarno berseru di depan corong radio: pilih antara Sukarno-Hatta atau PKI—Musso! Dan dengan demikian, Sukarno memainkan kartu terakhirnya. Akan tetapi, bila bagi Republik, Peristiwa Madiun adalah persoalan *survival*, bagi rakyat di daerah setempat, ini berarti melaksanakan kedaulatan rakyat menurut pengertian dan kepentingan mereka sendiri.

Tulisan ini meninjau pemberontakan Madiun, September 1948, dari sudut lokal. Ini berarti bahwa peristiwa tersebut akan ditinjau dari sudut hubungan-hubungan pimpinan revolusi pusat, yaitu Sukarno-Hatta dan para politisi nasional, dengan daerah dan dengan revolusi yang terjadi di bawah. Sebab bagaimanapun juga, terlepas dari cita-cita dan ideologi mereka yang melakukan pemberontakan dan yang memadamkannya peristiwa itu sendiri memperlihatkan adanya persoalan-persoalan manusia dan pilihan-pilihan yang dihadapinya di waktu itu. Dengan dalil inilah akan dicoba dijelaskan pemberontakan Madiun sebagai drama manusia dalam revolusi yang menempatkan orang-orang dalam kedudukan tertentu dan yang mungkin berlawanan dengan cita-cita dan keyakinannya sendiri. Lagi pula drama manusia ini adalah juga drama yang paling kritis bagi Republik Indonesia yang pada waktu itu hanya berumur lebih sedikit dari tiga tahun.

Dilihat dari sudut hubungan pimpinan revolusi dan evolusi, ada suatu persoalan yang menonjol, yaitu pertentangan antara politik diplomasi pemerintah pusat dan konsepsi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang kedengarannya bersifat nasional sebenarnya oleh daerah ditafsirkan sebagai otonomi dari pusat. Burhan Magenda dalam suatu artikel yang membandingkan revolusi Vietnam dan Indonesia menjelaskan bahwa di Vietnam ada tradisi "negara nasional" yang tidak dapat dibandingkan dengan tradisi-tradisi *negara* di Indonesia.[1] Revolusi Indonesia, dalam proses-proses sosialnya tidak dapat kita pahami tanpa melihat peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan lokal. Lokalisme mungkin merupakan kunci bagi kita untuk mengerti peristiwa-peristiwa revolusi. Seperti halnya setiap revolusi di mana saja, dan

kapan saja, dalam Revolusi Indonesia juga terkandung arti hilangnya kekuasaan pusat dan belum adanya kekuasaan baru. Bagi Indonesia kondisi dan situasi kesenjangan kekuasaan ini adalah unik. Kalau setiap revolusi adalah "unik" maka keunikan Revolusi Indonesia ini mungkin juga tidak bisa terlalu ditekankan. Dalam tulisan ini, saya akan mencoba memahami persoalan yang dihadapi oleh masing-masing pihak baik pusat pimpinan revolusi nasional maupun pihak-pihak lain. Apakah dalam menghadapi masalah-masalah ini pihak-pihak tersebut mempunyai alternatif? Perlu diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan terakhir ini muncul dari dunia pemikiran seorang sejarawan yang hidup sesudah peristiwa dramatis tersebut berlangsung dan bukan dari seorang pelaku drama sejarah itu sendiri.

Menurut teori, revolusi biasanya terjadi di mana pemerintah pusat atau rezim lama berada dalam keadaan lemah atau sedang mengalami desintegrasi dan masyarakat atau elemen-elemen sosial di dalamnya mendapat kesempatan untuk mencoba mendirikan tatanan masyarakat dan negara yang baru. Hal ini kelihatannya penting bagi Revolusi Indonesia: bertekuk lututnya Jepang sebagai pemegang kekuasaan *de facto* di Indonesia, dan belum datangnya Sekutu/Belanda. Dalam keadaan semacam itulah Republik Indonesia berdiri. Namun, dilihat dari sudut setempat, kesenjangan tersebut memberikan peluang timbulnya kedaulatan kekuasaan-kekuasaan padanya.

Di tahun 1948, terdapat tiga persoalan struktur setempat yang penting yaitu pertama, rasionalisasi reorganisasi TNI. Ini membawa akibat hancurnya struktur kekuasaan lokal dan diperkuatnya struktur kekuasaan di pusat yang sebenarnya tidak dipercayai. Kedua, keadaan-keadaan ekonomi yang memburuk yang selalu membawa revolusi ke kiri atau usaha-usaha ke arah lain. Di sini akan ditinjau struktur-struktur politik, sosial, militer dan ekonomi di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadikan pemberontakan Madiun 1948, suatu peristiwa unik. Ketiga pengaruh perkembangan politik nasional dan internasional. Akan tetapi, untuk memahami semua ini kita harus menengok ke belakang pada saat Republik Indonesia diproklamasikan dan perkembangan-perkembangan sesudahnya sampai ke pemberontakan Madiun. Tulisan ini akan berakhir di sana.

Republik Indonesia berdiri pada saat Jepang menyerah kepada Sekutu dan pada saat belum datangnya Belanda ke Indonesia. Republik seakan-akan mengisi lowongan kekuasaan yang ditimbulkan revolusi. Kenyataan ini dapat dimaklumi bila diingat bahwa selama pendudukan Jepang, memang telah dipersiapkan suatu Indonesia merdeka. Badan-badan administrasi dan lembaga-lembaga kenegaraan lain yang sebagian besar merupakan peninggalan Hindia Belanda masih tetap dipakai dan berfungsi. Dalam keadaan ini, Inggris yang ditugaskan menduduki kembali Indonesia oleh Sekutu mengakui Republik secara *de facto*, walaupun harus menghadapi protes-protes Belanda. Fakta ini oleh Republik Indonesia dijadikan modal untuk berunding dengan Sekutu dan Belanda. Politik perundingan ini terkenal sebagai "diplomasi". Segala sesuatu dalam Republik yang muda ini harus disesuaikan dengan diplomasi. Artinya Republik harus menyesuaikan diri dengan alam Sekutu. Salah satu cara adalah tidak menunjukkan sikap agresip. Karena itu, umpamanya, ide partai pelopor yang dianggap terlalu berbau "fasis Jepang" ditinggalkan.[2] Dua tokoh utama ditampilkan sebagai perantara dengan Belanda yaitu Sjahrir dan Amir Sjarifudin. Kedua-duanya mempunyai sejarah yang baik dalam pergerakan nasional, dan termasuk tokoh-tokoh perlawanan bawah tanah dalam menentang Jepang. Berbagai macam partai dianjurkan. Pertempuran-pertempuran seperti di Surabaya antara Indonesia dan Sekutu dihentikan dan Sukarno tampil sebagai penengah. Kontinuitas dengan negara yang dipersiapkan oleh Jepang sebenarnya agak terputus.

Putusnya kontinuitas lembaga kenegaraan yang paling merugikan pada masa itu, dan yang paling besar akibatnya bagi perkembangan Indonesia dan revolusi, adalah dibubarkannya alat-alat perjuangan militer dari zaman Jepang ini.[3] Selama pendudukan Jepang, ditumbuhkan dua organisasi militer yaitu Peta dan Heiho. Ini berarti bahwa dalam setiap revolusi; apakah itu bersifat nasional atau sosial, bersifat merebut kekuasaan dari tangan asing atau menuntut diakuinya kedaulatan negara baru, persoalan kekuatan senjata menjadi semakin penting (*crucial*). Ini memang disadari oleh pemimpin-pemimpin Revolusi Indonesia. Akan tetapi, untuk sementara masalah tersebut ditangguhkan karena berbagai kepentingan lain yang lebih mendesak. Memang, untuk sementara, diplomasi tidak saja diperlukan untuk menghadapi sekutu tetapi

juga untuk menghadapi kekuasaan di Indonesia yaitu Jepang.[4] Jepang memang mentoleransi proklamasi, bahkan pengibaran bendera Merah Putih dan rapat-rapat massa. Akan tetapi, dalam hal senjata dan kekuatan militer mereka tegas-tegas menolak untuk dipercayakan pada orang-orang Indonesia. Jepang mungkin takut akan keselamatannya sendiri bila Peta dan Heiho masih ada. Masih segar dalam ingatan Jepang adanya berbagai pemberontakan Peta selama masa pendudukan.[5] Peta dan Heiho dibubarkan dan usaha setengah-setengah dari pihak Sukarno gagal untuk menghindarinya. Para pemimpin Indonesia sendiri mungkin agak ragu-ragu untuk menunjukkan sikap tegas dalam hal ini. Sebab ketegasan dapat mengakibatkan konflik bersenjata dengan Jepang, dan dapat mengakibatkan matinya Republik muda ini. Para pemimpin, seperti dikatakan Hatta, tidak melihat Jepang yang sudah kalah sebagai musuh akan tetapi Belanda yang menuntut kembali koloninya. Karena itu, konflik bersenjata dengan Jepang akan berarti jatuhnya korban yang sia-sia, dan mungkin juga kalah. Persenjataan Jepang masih kuat sedangkan di pihak Indonesia belum ada persenjataan yang cukup memadai. Selain itu ada juga pertimbangan bahwa eksistensi angkatan bersenjata eks-Peta dan eks-Heiho bisa menjadi alasan bagi Sekutu untuk melancarkan aksi-aksi militer terhadap Republik.

Jadi, tekanan Jepang dan keadaan internasional menyebabkan dipercepatnya pembubaran Peta dan Heiho tanpa perlawanan dan perlucutan senjata dari satu-satunya organisasi militer yang ada pada waktu itu bagi Republik Indonesia. Dengan demikian, Republik kehilangan kontrol terhadap alat-alat bersenjata selama revolusi dan untuk waktu yang akan datang. Lagi pula organisasi sentral dari angkatan bersenjata ini akan tertunda pembentukannya untuk waktu yang lama seperti akan dijelaskan nanti. Akhirnya, kontrol terhadap angkatan bersenjata ini akan menjadi soal yang mendominasi politik "diplomasi" Pemerintah Republik sendiri. Sebab negara tanpa alat bersenjata bukanlah negara sebenarnya.

Dilema para pemimpin Indonesia pada waktu itu untuk memberikan alat perjuangan kepada Republik yang diproklamasikan tanpa menyinggung Sekutu atau Jepang, terungkap pada pendirian Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini merupakan semacam korps polisi yang menjaga tata-tertib dan yang disangkutpautkan dengan organisasi filantropis seperti bantuan korban perang untuk prajurit

dan lain-lain. Badan ini dibentuk pada tanggal 20 Agustus 1945. Kepada eks- Peta dan eks- Heiho dianjurkan untuk mengambil bagian aktif di dalamnya dengan janji, "Akan tiba waktunya, kamu akan menjadi serdadu dalam Tentara Nasional Indonesia". Akan tetapi, revolusi berkembang cepat dan BKR tidak lama kemudian menjadi sesuatu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi. Tanggal 5 Oktober 1945, Sukarno mendirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kelak menjadi TNI.[6] Namun, ini tetap merupakan pengakuan dari atas terhadap apa yang terjadi di bawah, yaitu pertumbuhan alat-alat dan golongan bersenjata karena perebutan atau penyerahan senjata dari Jepang ke tangan orang-orang Indonesia.

Revolusi dari Bawah

Kalau pimpinan revolusi, memperhitungkan siapa musuhnya, korban-korban, strategi dan lain-lain, maka perhitungan rakyat di bawah, para aktivis revolusi adalah lain. Proklamasi kemerdekaan memuat kata-kata "pemindahan kekuasaan". Dan "kekuasaan" bagi rakyat banyak adalah senjata. Padahal senjata di Indonesia dimiliki Jepang. Karena itu, baik secara diplomasi maupun kekerasan, senjata ini harus direbut dari tangan Jepang.

Dalam hal perebutan senjata dari Jepang ini, sebenarnya bukan eks-Peta dan eks- Heiho yang aktif. Juga terdapat golongan "pemuda", yang di sini artinya tenaga-tenaga revolusioner. Berlainan dengan zaman kolonial Belanda, selama pendudukan Jepang, berbagai sektor masyarakat diorganisasi untuk mendukung Jepang bila sekutu mendarat: pelajar-pelajar, alim ulama dan kiai, rukun-rukun kampung dan tetangga. Golongan pemuda memang merupakan modal revolusioner yang paling penting. Golongan terakhir ini diorganisasi dalam Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan terdiri dari mereka yang secara fisik cocok untuk menjadi serdadu atau pejuang. Di kota-kota besar, golongan ini terutama terdiri dari buruh di bengkel-bengkel dan pabrik-pabrik. Mereka inilah yang menjadi bagian penting dari TKR. Mengenai pertumbuhan tentara republik ini, A.H. Nasution menulis bahwa "...TKR telah berdiri (di atas kertas), akan tetapi, lebih tepat disebut berdirinya beratus-ratus TKR setempat yang bertindak sendiri-sendiri..."[7] TKR—TKR setempat ini bersifat otonom baik dari pusat maupun terhadap satu dan lain. Ada yang kuat, ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang berseragam merah, hijau, hitam, putih dan

lain-lain, tergantung dari persediaan yang ada dan barang Jepang yang jatuh ke tangan mereka. Dari pemerintah pusat, pada waktu itu, sama sekali tidak ada bimbingan. Persediaan peralatan dan lain-lain diusahakan sendiri.[8] Pada waktu itu, timbul "bapakisme" dan kedaulatan setiap kesatuan. Komandan-komandan yang pintar yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material anak buahnya mempunyai kedudukan kuat.

Yang khas dari proses pembentukan tentara semacam ini adalah dipilihnya Sudirman menjadi panglima besar dalam suatu konperensi komandan-komandan. Sebagai salah satu komandan yang paling berhasil merebut senjata dan perbekalan dari Jepang, Sudirman secara *de facto* dianggap sebagai komandan yang paling kuat di Jawa.[9] Hal ini mungkin menyebabkan ia terpilih sebagai panglima TKR. Pemerintah memang dihadapkan kepada keadaan nyata. Karena itu, tak ada pilihan lain selain daripada menyetujuinya. Dengan demikian otonomi tentara diciptakan. Atau sebaiknya disebut otonomi pasukan-pasukan diciptakan, sebab komandan-komandan lain juga dipilih bukan ditunjuk. Para komandan hanya menjadi pelaksana-pelaksana keinginan dari bawah.

Menurut Nasution, "Jalannya pemerintahan tidak lagi dari atas ke bawah tetapi dari bawah ke atas".[10] Keadaan tentara ini menjadi lebih rumit lagi oleh berkembangnya partai-partai yang dianjurkan pemerintah. Partai-partai ini membentuk organisasi militernya sendiri. Para pemuda, umpamanya, sebagian besar diorganisasi dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang bersenjata, demikian pula golongan Islam memiliki Hizbullah, PNI memiliki Barisan Pelopor. Gerakan Tan Malaka memiliki Barisan Banteng dan laskar buruh serta lain-lain.

Pokoknya, golongan-golongan politik, agama serta etnis mempunyai organisasi-organisasi militer sendiri-sendiri di samping TKR resmi. Ini tentu lebih merumitkan situasi militer-politis. Organisasi-organisasi militer ini sering disebut laskar-laskar. Mereka tergabung dalam Biro Perjuangan. Sebenarnya, jika persoalan militer diserahkan kepada pemerintah pusat di Jakarta, mereka mungkin cenderung mempercayakan perjuangan pada perwira-perwira yang dianggap lebih berpengalaman dan pintar terutama perwira-perwira eks KNIL (tentara kolonial) seperti Urip Sumohardjo, T.B. Simatupang, Nasution, Suryadarma, Jatikusumo, Purbonegoro dan lain-lain.[11] Akan tetapi, justru timbul kecurigaan dari bawah terhadap para perwira ini. Mereka yang eks-KNIL ini dianggap mempunyai *kadaver disciplin* 'disiplin mayat'. Pangkat dan tanda

jasa mereka selama revolusi diremehkan bahkan dicurigai, sebab perjuangan adalah tugas suci; bukannya demi karir. Penghormatan militer diberikan dengan kepalan tangan diiringi pekikan "Merdeka atau Mati.". Para perwira ini terutama berpengaruh di pasukan-pasukan di Jawa Barat yang dekat dengan pusat dan markas besar. Karena itulah markas besar para jenderal dan bintang-bintang inilah yang menjadi sasaran kecurigaan dan diremehkan oleh pasukan-pasukan setempat dan oleh mereka yang berada di medan.[12] Di sini, nampak pertentangan antara perwira populis dan perwira profesional, yang kedua-duanya sama-sama pro-Republik.

Terbentuknya golongan-golongan bersenjata semacam ini sebenarnya berakar dalam tradisi masyarakat Indonesia sendiri. Sejak dahulu masyarakat desa berkisar pada tokoh-tokoh "jagoan". Sang Jagoan bertindak sebagai komandan. Dalam zaman revolusi komandan berlaku juga sebagai "penyambung lidah" dan pejuang bagi anak buahnya dan sekaligus bapaknya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, lurah di desa ataupun tokoh oposisi di desa harus juga berfungsi seperti sang Jagoan ini. Dalam keadaan yang disebut "normal" (zaman Belanda), fungsi para lurah hanya ditekankan dalam birokrasi pemerintahan. Akan tetapi, selama pendudukan Jepang dengan cara-cara pemerintahan yang berbeda, aspek jagoan ini dihidupkan kembali, dan akhirnya mencapai puncak dalam gayanya seperti itu pada masa revolusi.

Isyu Sosial dan Politik

Sejak lama telah disadari adanya berbagai persoalan sosial-ekonomi di Indonesia seperti kekurangan tanah, lapangan kerja, perbedaan sosial, eksploatasi, pajak yang tinggi, upah buruh yang rendah dan seterusnya. Belanda, Jepang dan orang Indonesia menginsyafi hal ini tanpa kemampuan ataupun keinginan untuk memikirkan penyelesaian yang tuntas dan sungguh-sungguh. Selama penjajahan Belanda, umpamanya, komisi-komisi pemerintah datang membawa hasil penelitian dan menyebutkan keadaan menurunnya tingkat hidup di Jawa. Ahli-ahli ekonomi Belanda datang dengan penjelasan-penjelasan tetapi tidak dengan tindakan yang dapat memakmurkan masyarakat. Kelihatannya, keadaan sosial hanya dibiarkan saja bertumpuk. Namun, bagi rakyat di bawah, semuanya tetap merupakan persoalan. Dan persoalan sosial ini kelihatannya sebagai suatu ciptaan negara. Yang dimaksudkan

dengan negara pada saat pecahnya revolusi adalah Jepang, Belanda dan penguasa-penguasa lainnya seperti pamong praja, polisi, kekuasaan raja-raja yang masih ada kekuasaannya dan lain-lain. Negara memang menampakkan diri dalam bentuk penindasan. Di Jawa Timur, khususnya di kota-kota terjadi perlawanan terhadap polisi, pamong praja dan tokoh-tokoh seperti bekas bupati dan keluarga-keluarga priyayi atau yang berpendidikan Belanda. Timbul juga desas-desus yang menyebar luas bahwa Ch. O. van der Plas, Gubernur Jawa Timur zaman Belanda dan ahli Islam yang mempunyai hubungan luas dengan masyarakat Indonesia, telah mempersiapkan *Komite van Onvangst* (Komisi Penyambutan Belanda). Penculikan-penculikan pun terjadilah dan kadang-kadang pembunuhan. Tekanan keras muncul dari rakyat untuk mengganti para pejabat yang tidak populer. Terutama karena dalam zaman Jepang, berbagai pejabat pamong praja dan polisi terlalu dekat dengan Jepang dan melaksanakan perintah-perintah penguasa Jepang secara keras.[13]

Konsepsi yang sangat populer yang timbul pada zaman ini adalah "kedaulatan rakyat". Berbagai pejabat didaulat dari bawah. Namun, proses pendaulatan ini tidak begitu berjalan lancar di kota-kota besar. Pertama, karena pusat sering melindungi aparat lama. Kedua, karena di kota-kota pelabuhan seperti Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain-lain timbul persoalan menghadapi Belanda. Dan ketiga, karena sering badan-badan KNI (Komite Nasional Indonesia) setempat tidak merasa mempunyai cukup tenaga ahli untuk memenuhi semua jabatan birokrasi. Usul-usul supaya tentara dan para pejuang pemuda mengambil alih seluruh pemerintahan setempat tdak pernah dilaksanakan sungguh-sungguh ataupun dipikirkan secara serius. Hal ini memang kurang mendapat dukungan dari pimpinan Revolusi pusat. Karena itu konsepsi ini tidak pernah terlaksana. Namun, militansi revolusioner di pihak lain tak kunjung kendor malah semakin meningkat.

Banyak pendaulatan ini terjadi seperti dalam peristiwa tiga daerah di Cirebon dan lain-lain.[14] Dalam hubungan dengan pemberontakan Madiun, persoalan akan disempitkan pada daerah-daerah di sekitar Solo dan Madiun yang merupakan daerah di mana peristiwa tersebut terjadi.

Berlainan dengan di Yogyakarta di Surakarta timbul suatu gerakan antiswapraja yaitu antipemerintah susuhunan dan mangkunegaran yang menyangkut juga antara lain pengambilalihan

pabrik-pabrik gula yang dimiliki dua sisa kerajaan Mataram ini serta tanah-tanah keluarga raja.[15] Isyu swapraja ini dari permulaan meradikalisasi revolusi di Solo dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat oposisi terhadap Yogyakarta di mana bermukim pemerintah republik. Pemerintahan republik agaknya berada di belakang susuhunan dan mangkunegaran, mengingat pentingnya dana-dana dari pabrik-pabrik gula yang terancam jatuh ke tangan golongan-golongan oposisi seperti Sutarto dari tentara dan Dr. Muwardi dari Barisan Banteng. Selain itu, politik diplomasi mendorong pemerintah untuk menjamin sebanyak mungkin legalitas dan *status quo* dari struktur prarevolusi.[16] Berakhirnya isyu swapraja (1946) dengan kemenangan mutlak bagi gerakan revolusioner setempat mempunyai akibat yang sangat mendalam bagi Republik. Karena ditempat sejauh lebih dari 60 km dari pusat Republik inilah terdapat pusat oposisi bersenjata dan dengan daerah-daerahnya yang meluas ke Timur.

Radikalisasi revolusi ini juga meluas ke desa-desa. Di desa-desa timbul penggulingan kekuasaan lurah-lurah lama yang diangkat raja atau yang menjadi tidak populer karena tingkah lakunya selama zaman Jepang. Timbul suara-suara untuk menghapuskan tanah-tanah *bengkok* dan membagikannya pada petani-petani tanpa tanah. Rakyat menuntut penghapusan pembayaran pajak tanah yang sejak dahulu tidak populer. Suatu pusat lain yang sangat penting dari revolusi rakyat ini berada di sekitar pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan dan di sekitar kompleks minyak di Cepu. Para buruh dan tani (laskar) menduduki pusat-pusat tersebut. Banyak perkebunan memang dalam keadaan parah sebab selama zaman Jepang dan selama masa perang ekspor dari perkebunan-perkebunan ini ke pasaran terhenti. Di lain pihak, tanah memang diperlukan untuk sawah sebab produksi beras makin dinaikkan. Di sana-sini terjadi pergolakan untuk mengubah tanah-tanah perkebunan menjadi tanah sawah dan petani-petani tanpa tanah menduduki perkebunan-perkebunan. Di perkebunan lain, seperti di Madiun, tekanan dari buruh dan petani berhasil menghapuskan kontrak-kontrak lama antara perkebunan dan rakyat petani setempat. Kontrak-kontrak baru di Madiun lebih menguntungkan pihak petani setempat.[17]

Dari uraian di atas, bisa diketahui bahwa senjata-senjata Jepang tidak jatuh ke tangan Pemerintah Republik yang resmi akan tetapi jatuh ke tangan rakyat. TNI sendiri dan komandan-komandannya

berasal dari rakyat ini. Ini jelas akan menimbulkan situasi krisis yang dapat menjurus kepada perang saudara.

Pimpinan Nasional

Dengan perkembangan revolusi setempat dan dalam situasi hubungan internasional, pemerintah pusat yang berarti Sukarno-Hatta, kabinetnya dan para politisi di ibu kota Yogyakarta makin lama makin disudutkan ke dalam kedudukan yang sulit. Pedoman politik dari pusat adalah diplomasi atau perundingan dengan Belanda. Ini berarti tidak melakukan politik agresif terhadap musuh. Akibatnya integrasi TNI dan Biro Perjuangan menjadi satu kesatuan tertunda, baik dalam teori maupun praktek. Satu-satunya kemungkinan bagi konsolidasi pasukan-pasukan bersenjata dalam masa revolusi '45—'50 adalah politik agresi. Ini diperlukan untuk mendorong timbulnya koordinasi serta integrasi di antara berbagai kesatuan tersebut. Akan tetapi, dengan politik diplomasi tetap terdapat militansi. Malahan dalam kenyataannya tentara hanya membela diri atau harus mundur karena perjanjian-perjanjian dengan Belanda. Dengan sendirinya tentara yang revolusioner-militan terpaksa tinggal diam ketika musuh berada di pucuk hidungnya. Mereka mudah didemoralisir dan dengan demikian mudah jatuh ke pertikaian-pertikaian.
Dalam menghadapi persoalan revolusi sosial, pimpinan nasional juga hampir dihadapkan dengan hal-hal yang sama seperti dalam menghadapi persoalan militer. Politik diplomasi mendorong pemerintah ke arah konservatisme dan *status quo* masyarakat. Belanda dengan jelas mengatakan bahwa pengakuan kemerdekaan Indonesia hanya bisa diberikan bila kepentingan-kepentingan ekonomi Barat akan terjamin di Indonesia. Dalam hal ini para pemimpin Indonesia harus pertama-pertama menunjukkan bahwa mereka mampu dan mau menjamin *status quo* dan kepentingan-kepentingan seperti. jaminan bagi kelanjutan susuhunan dan mangkunegaran serta aparatur yang teratur. Singkatnya, peristiwa-peristiwa pendaulatan dapat menjauhkannya dari meja perundingan. Bila pimpinan nasional tidak dapat menjamin kepentingan struktur dan stabilitas masyarakat sendiri maka sulit diharapkan bahwa kepentingan asing dapat dijamin. Lagi pula revolusi itu sendiri bersifat antikolonial dan antikekuasaan asing. Ini menyebabkan para pemimpin nasional yang pada permulaan mungkin tidak menentang perubahan-perubahan sosial dan pemba-

ruan struktur Indonesia pada akhirnya mempertahankan *status quo* juga. Dengan sendirinya, politik diplomasi dengan Belanda dapat dengan mudah menimbulkan konflik baik dengan pasukan bersenjata maupun dengan kekuatan-kekuatan revolusi sosial. Keadaan seperti ini juga dipakai oleh golongan oposisi dalam pemerintahan sehingga membawa akibat jatuh bangunnya kabinet-kabinet di sekitar persoalan ini.

Sebenarnya semua politisi dan partai-partai politik di ibu kota menyadari pentingnya diplomasi. Namun, isyu perjuangan dan diplomasi ini dipakai oleh partai-partai, terlepas dari partai mana, sebagai alat oposisi kalau mereka berada di luar pemerintahan. Sedangkan kalau mereka berada dalam pemerintahan, senjata diplomasi dijadikan pedomannya. Jelas isyu perjuangan dan diplomasi ini hanya digunakan untuk masuk atau menjatuhkan kabinet-kabinet. Masjumi dan PNI, umpamanya, menentang persetujuan Linggajati (Maret '47 dan berhasil menjatuhkan Kabinet Sjahrir dengan dalih bahwa perdana menteri ini kurang tegas terhadap Belanda. Taktik yang sama dipakai oleh oposisi Masjumi terhadap kabinet Amir Sjarifudin yang menandatangani Perjanjian Renville (Januari 1948). Akan tetapi, PNI dan Masjumi ini jugalah yang menyokong Kabinet Hatta di mana partai-partai ini duduk dan menjadi organ yang melaksanakan perjanjian Renville. Amir Sjarifudin yang menandatangani Renville dan yang pertama-tama mempunyai konsepsi rasionalisasi tentara kemudian mengadakan oposisi terhadap Kabinet Hatta. Orang mengatakan bahwa satu-satunya politikus yang secara konsekuen menentang diplomasi dan menganjurkan perjuangan, adalah Tan Malaka yang berprinsip pada: pengakuan dahulu dari Belanda terhadap kemerdekaan yang telah diproklamasikan, baru perundingan. Akan tetapi, harus diingat bahwa Tan Malaka sendiri tidak pernah memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan selalu berada dalam oposisi. [8]

Bagaimanapun juga, masalah diplomasi dan perjuangan yang nampaknya merupakan permainan antara para politisi, lambat laun mendesak penyelesaian-penyelesaian revolusi yang sedang berkobar. Pada tahun 1948, baik keadaan nasional di Jawa maupun internasional telah mendesak diadakannya suatu penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Setelah Perjanjian Renville (Januari 1948), keadaan di daerah Republik semakin genting. Dan karena kesukaran-kesukaran ekonomis, kemungkinan penundaan penyelesaian dapat menyebabkan bubarnya republik ini. Daerah-daerah

Republik tidak mempunyai pelabuhan kecuali di Pantai Selatan yang tidak banyak gunanya. Selain itu, daerah tersebut sebagian besar merupakan daerah minus. Kesukaran-kesukaran ini semakin bertambah dengan masuknya para pengungsi daerah yang diduduki Belanda yang berjumlah kira-kira 1 juta. Akibatnya terjadilah inflasi yang membubung. Korupsi semakin meluas dan rebutan terhadap persediaan semakin meningkat.[19] Keadaan ekonomis yang jelek ini mengakibatkan perpecahan politik dan sosial. Situasinya menjadi makin tegang.
Bila keadaan nasional Republik mendesak adanya penyelesaian konflik Indonesia-Belanda sama halnya dengan situasi internasional. Perang dingin antara Blok Barat dan Soviet sedang memuncak dan keadaan di Eropa sangat genting. Amerika Serikat tidak menghendaki Belanda memakai bantuan ekonomi dan militernya untuk mempertahankan koloni di Asia Tenggara sementara kekuatan Belanda masih diperlukan di Eropa. Jadi, dari Amerika sendiri timbul desakan-desakan untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Tugas menyelesaikan pertikaian ini jatuh pada Kabinet Presidensial Hatta yang dibentuk pada permulaan 1948 setelah Kabinet Amir Sjarifudin mengundurkan diri. Kabinet ini didukung oleh Masjumi (menurut kalangan oposisi kabinet ini adalah kabinet Masjumi), PNI dan PSI (pecahan dari Partai Sosialis Amir). Hatta mengharap agar tugas penyelesaian revolusi nasional jangan dikaburkan dengan revolusi sosial. Sebab revolusi sosial menghalangi revolusi nasional dan hanya mengacaukannya saja. Bila perlu, kata Hatta, ia akan memakai tangan besi untuk menyelesaikan kekacauan. Hatta sadar bahwa pelaksanaan Perjanjian Renville dan jalan diplomasi yang ditempuh akan dapat menghadapkan Pemerintah dengan gejolak revolusi setempat yang sedang berjalan atau dengan struktur kekuasaan setempat. Sebab, menurut Perjanjian Renville, Republik akan menjadi negara bagian dari suatu Republik Indonesia Serikat (federasi) dengan tentara federal. Untuk yang terakhir ini diperlukan pemerintahan pusat republik yang kuat dan tentara pusat, yang tidak terdiri dari pasukan-pasukan otonom, serta memiliki staf yang berasal dari perwira-perwira yang berpendidikan dan berpengalaman.
Untuk melaksanakan politik yang terakhir inilah, Hatta mengumumkan rencana untuk melancarkan rasionalisasi tentara. Pengalaman militer dan pendidikan akan menggantikan nilai-nilai keberanian dan *elan revolusioner*. Rencana rasionalisasi dan reorganisasi tentara atau hal ini akan merugikan banyak komandan dan

perwira di daerah Jawa Tengah (Solo) dan Timur (Madiun-Kediri). Dan perwira-perwira yang mempunyai latar belakang KNIL dan dari status sosial yang lebih tinggi akan diangkat menduduki posisi-posisi penting dan berpengaruh. Sejak permulaan revolusi, pemerintah cenderung mempercayakan kedudukan-kedudukan militer pada perwira-perwira eks-KNIL ini yang dari semula menyokong revolusi. Kebanyakan perwira semacam itu berkedudukan di Divisi Siliwangi dari Jawa Barat.[20] Selain itu, tentara Siliwangi mempunyai perlengkapan yang baik dan secara politik lebih netral, artinya tidak terpecah belah. Di samping mereka itu berada dekat dengan musuh dan jauh dari pusat Yogyakarta. Sebagai hasil perundingan Renville tentara Siliwangi ditarik kembali dari kantong-kantong di Jawa Barat dan masuk ke Jawa Tengah dan Timur dan akhirnya menjadi "tangan" Pemerintah Republik.[21]

Solo

Oposisi terhadap Kabinet Presidensial Hatta ini datang dari golongan Partai Sosialis Amir Sjarifudin, PKI dan golongan-golongan kiri lainnya, yang menamakan dirinya Sayap Kiri, kemudian FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang akhirnya berfusi menjadi PKI. Mereka menuntut kedudukan-kedudukan penting dalam kabinet antara lain Kementerian Pertahanan. Oposisi terhadap Kabinet Hatta bersifat oposisi dari arus Marxis (kiri) yang paling utama di Indonesia. Sebenarnya, baru pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia golongan Marxis-kiri ini berada dalam oposisi. Bagi pemerintah, dengan adanya PESINDO, oposisi ini semakin berbahaya. Sebagai perdana menteri (Juli '47 Januari '48) dan menteri pertahanan(Oktober '46—'48) Amir telah menempatkan perwira-perwira Pesindo dalam kedudukan-kedudukan militer yang penting. Kabinet Amir menyalurkan sebagian besar anggaran belanja pertahanan pada apa yang disebut TNI — masyarakat Pesindo dan organisasi para-militer lainnya dari partai dan masyarakat).[22] Rencana rasionalisasi militer Amir berdasarkan konsepsi bahwa inti tentara seharusnya TNI—masyarakat dengan Pesindo dalam kedudukan kuat dan TNI resmi meleburkan diri ke dalamnya. Para perwira ini dianggap sebagai semacam komisaris politik tentara yang akan diindoktrinasi lebih jauh dengan doktrin-doktrin revolusi sehingga mereka menjadi perwira-perwira populis. Konsepsi Amir jelas dipinjam dari tentara Rusia dan berbeda dengan konsep rasionalisasi Hatta.

Kekuatan bersenjata FDR berpusat di Solo. Daerah ini secara tradisional memang mempunyai pola kebudayaan yang berlainan dengan Yogya. Dan pola ini mungkin juga merupakan faktor yang mendorong oposisinya terhadap pusat. Di Solo, sejak semula, pasukan-pasukan mempunyai kedudukan otonom yang kuat dan bersifat kiri. Usaha Pemerintah Republik dalam tahun 1946 untuk mengangkat Gusti Kanjeng Pangeran Purbonegoro dari keluarga susuhunan dan seorang perwira eks-KNIL yang berpengalaman digagalkan oleh pasukan-pasukan setempat yang memilih Jenderal Mayor Sutarto sebagai komandan mereka.[23] Sutarto dianggap sebagai perwira populis. Banyak senjata Jepang jatuh ke tangan pasukan TKR yang berwujud gerakan revolusioner sosial dan nasional. TKR—Solo (disebut : Senopati) di bawah Sutarto sangat antifeodal dan memungkinkan kemenangan-kemenangan gerakan antiswapraja. Sikap pasukan Senopati di pihak gerakan antiswapraja membina hubungan erat dengan gerakan-gerakan masyarakat, pemuda, Pesindo, yang berpusat di Solo dan sejumlah besar laskar-laskar yang berada di sekitar Solo. Dukungan lain bagi Senopati datang dari Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) yang mengungsi ke daerah subur ini sebagai akibat aksi-militer pertama Belanda. Menurut rencana rasionalisasi Hatta, yang disusun A.H. Nasution, pasukan Senopati ini akan dikenakan perubahan-perubahan. Terutama komandannya yang populer, Sutarto, akan digeser. Lebih daripada ini, rencana rasionalisasi mengancam eksistensi laskar-laskar dan TLRI. Hilangnya laskar akan menghancurkan hubungan erat antara divisi Senopati sendiri dengan unsur-unsur revolusioner masyarakat. Dan hal itu tidak saja memperlemah kedudukan laskar di masyarakat Solo tetapi juga akan menempatkannya langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat di Yogya.[24] Laskar-laskar ini kemudian menekan pasukan Senopati untuk menolak rencana rasionalisasi. Penolakan terhadap rencana rasionalisasi ini oleh para laskar dan pasukan Senopati semakin diperkuat oleh kehadiran tokoh-tokoh FDR di Solo. Dalam bulan Mei 1948, suatu demonstrasi militer untuk menentang rencana rasionalisasi dan reorganisasi tentara diadakan oleh para laskar dan pasukan Senopati di alun-alun Solo. Demonstrasi serupa juga diadakan di Blitar dan daerah-daerah lain di Jawa Timur.[25] Kekuatan-kekuatan militer di Solo sendiri lalu bergabung dalam bulan Juni 1948 menjadi Pertempuran Panembahan Senopati (PPS). Biarpun kekuatan PPS kelihatan besar, namun kedudukan sebenarnya telah menjadi lemah berhubung diperkuat-

nya pemerintah pusat. Kemudian dalam tahun 1948, Solo menjadi orbit dari pusat Republik. Yang menjadi sebabnya adalah bahwa Republik telah menjadi kecil setelah perjanjian Renville sehingga kondisi dan situasi Solo bisa dan harus mendapat perhatian khusus pemerintah pusat yang sekarang ini juga memiliki pasukan Siliwangi.

Ketegangan antara pusat dan Solo ini terwujud dalam banyak insiden perang saudara: demonstrasi PPS dalam bulan Mei menentang rasionalisasi. Tanggal 2 Juli, Sutarto dibunuh di depan rumahnya oleh anasir-anasir tak dikenal. Achmadi sebagai komandan kota Solo yang baru, yang berasal dari Tentara Pelajar, menyatakan bahwa pemerintah akan memakai tangan besi terhadap penentang rasionalisasi. Bagi pihak kiri ucapan ini merupakan bukti bahwa pemerintahlah yang membunuh Sutarto.Maka terjadilah pemogokan buruh dan tani di sekitar pabrik goni/kapas di Delanggu. Karena sangat penting, peristiwa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.[26]

Dalam bulan Juni 1948 karena kesulitan ekonomi, upah yang rendah, inflasi dan kekurangan barang, 500 buruh perkebunan kapas Delanggu berdemonstrasi di Solo menghadapi pimpinan pabrik/perkebunan pemerintah. Mereka menuntut perbaikan nasib. Pemogokan-pemogokan bertahap terjadi di pabrik kapas tersebut sebagai jawaban terhadap penolakan pemerintah untuk menyetujui tuntutannya. Peristiwa ini meluas menjadi pemogokan 17000 buruh dan tani.[27] Terjadilah bentrokan dengan tentara, yang dalam hal ini adalah tentara Siliwangi. Pemerintah terpaksa membela diri dalam parlemen bahwa pemerintah tidak anti-buruh dan tani. Namun, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara (Masjumi) memerintahkan kesatuan-kesatuan tentara Siliwangi menjaga pabrik-pabrik gula dan perkebunan-perkebunan untuk mencegah pencurian dan menjaga tata-tertib. Siliwangi yang hijrah dari kantong-kantong Jawa Barat makin tidak populer di daerah Jawa karena dianggap saingan hebat untuk memperoleh fasilitas-fasilitas dan bahan-bahan makanan yang serba kurang di daerah Republik yang sempit dan minus itu. Soal sukuisme lalu lebih mempertegang hubungan-hubungan antara Siliwangi dan pasukan Jawa Tengah.

Namun, ketegangan ini mencapai krisis ketika terjadi penculikan-penculikan. Dalam bulan September beberapa perwira TLRI diculik. Kemudian terjadi tembak-menembak yang menyebabkan beberapa orang tewas di berbagai pihak. Usaha perundingan

perdamaian antara kesatuan bersenjata di Solo dan Siliwangi gagal.
Gatot Subroto dari CPM diangkat menjadi gubernur militer di Surakarta dengan kekuasaan SOB (Staat van Oorlog en .Belgi, 'negara dalam keadaan darurat perang'). Di samping sebagai tentara Siliwangi, Gatot Subroto merupakan juga tangan pemerintah yang kuat. Lalu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap Dr. Muwardi dari Barisan Banteng yaitu laskar bersenjata dari GRR: Gerakan Revolusioner Rakyat—Tan Malaka. Sebenarnya program-program GRR tidak bertentangan dengan program FDR—-Amir. Kedua-duanya sama-sama menentang Hatta dengan politik diplomasinya. Akan tetapi, kebencian di antara kedua golongan kiri, yaitu Tan Malaka *versus* Amir, jauh lebih besar. Akibatnya GRR menyokong Hatta dan Siliwangi. Penculikan dan pembunuhan Dr. Muwardi menjadi saluran untuk menghantam sayap kiri/FDR. Pusat Pesindo diserang oleh Barisan Banteng dan Siliwangi. Dokumen-dokumen yang merugikan Pesindo ditemukan seperti bendera Belanda dan lain-lain. Pasukan-pasukan baik dari TLRI dan PPS yang ingin merebut markas Pesindo dikalahkan oleh Siliwangi yang lebih kuat. Singkatnya, konflik-konflik militer dalam bulan September di Solo berakhir dengan kemenangan mutlak bagi pemerintah pusat dan kota Solo berhasil dikuasai olehnya. Kemenangan di kota ini meluap ke beberapa daerah pedesaan di sekitar Solo. STTI (Sarekat Tani Islam Indonesia) yang telah memegang peranan aktif menyokong pemerintah dalam menghadapi pemogokan-pemogokan dengan menduduki kebun-kebun kapas, sekarang menyerang kedudukan SOBSI dan Sarbupri dari desa-desa di sekitar Solo (sarekat-sarekat buruh, kiri) dan bertempur dengan laskar Lembaga Buruh--Tani (LBT). Peranan STII dan Masjumi semakin diperluas dalam peristiwa-peristiwa di Madiun. Karena dukungan Islam, pemerintah mendapat dukungan sebagian masyarakat.[28]
Peristiwa-peristiwa di atas memang sangat mengancam pemerintah dan membahayakan revolusi nasional sebab setiap waktu Belanda dapat memasuki wilayah republik dan pimpinan gerilya akan dengan mudah jatuh ke tangan golongan-golongan kiri. Sejak Mei 1948, perkembangan golongan FDR berubah dengan pesat. Dalam bulan Mei 1948, Musso datang dari Moskow tempat di mana dia berada sejak sebelum Perang Dunia II. Musso yang tidak banyak mengetahui keadaan di Indonesia membawa penjelasan-penjelasan baru dari kubu sosialis dunia yang pada waktu itu

sedang berada dalam pergulatan perang dingin hebat dengan dunia Barat. Sifat dan sikap doktriner Musso yang sangat ketat ini memberikan angin segar bagi golongan kiri di Indonesia yang pada waktu itu sangat kacau baik dalam konsepsi, doktrin dan politik. PKI, yang dibentuk permulaan revolusi, terpecah belah oleh perebutan pimpinan di antara para tokohnya. Perpecahan ini terjadi antara tokoh-tokoh PKI yang berada di Indonesia selama perang dunia dan mereka yang baru datang dari Nederland. PKI, seperti golongan kiri lainnya lalu terjebak dalam politik sehari-hari, dalam persoalan revolusi, dalam memperhitungkan situasi dan kondisi Indonesia dan lain sebagainya. Musso mengadakan koreksi-koreksi terhadap perpecahan ini. Ia mencela Amir yang menyerahkan pemerintahan begitu saja di bulan Februari 1948. Dalam suasana yang dari hari ke hari semakin menjurus ke perang saudara, Amir dan PKI sebenarnya memiliki legalitas apabila Amir tetap memegang pucuk pimpinan pemerintah. Musso lalu menganggap bahwa Amir dan tokoh-tokoh PKI ilegal lainnya belum menunjukkan diri mereka sebagai anggota PKI yang sesungguhnya. Sikap Musso ini agaknya yang kemudian menyebabkan Amir secara terbuka mengatakan bahwa ia adalah anggota PKI sejak lama. Karena kepandaian berpidato dan sifat doktrinernya yang karismatik bagi PKI yang sedang kacau, Musso mendapatkan simpati luas. Dalam waktu dua minggu setibanya di Yogya, Musso merebut pimpinan dengan mengajukan program "jalan baru". LBT, PS dan Pesindo menggabungkan diri ke dalam PKI sedangkan BTI dan SOBSI menyokong "jalan baru". Program ini bertujuan untuk membentuk satu partai proletar yang kuat yang memimpin suatu Front Nasional. Kepadanya akan diserahkan pemerintah revolusi.

Kalau dalam pemogokan Delanggu, FDR agak hati-hati memberikan bantuannya maka sejak "jalan baru"-nya Musso, PKI secara terbuka menyokong pemogokan-pemogokan dan melakukan hasutan. Demikianlah terjadi, dalam bulan Agustus 1948, pemogokan buruh minyak Cepu, dan pemogokan pegawai-pegawai kotapraja Madiun. Timbullah konflik-konflik dengan militer (Siliwangi) yang menangkap tokoh-tokoh pemogokan. Namun pihak yang paling diperhatikan PKI—Musso ini adalah kaum tani.

Musso menekankan keharusan *land reform* yang berkisar pada demokratisasi pamong desa dan yang juga berarti penghapusan tanah—*bengkok*. Terjadilah peristiwa dalam hubungan dengan

land-reform,[29] yang dipelopori oleh BTI. Masjumi dan STTI-nya menentang aksi para petani kiri ini. Demikianlah keadaan pada September 1948.

Madiun

Sejak dahulu daerah Madiun merupakan daerah pembuangan pangeran-pangeran yang tidak setia kepada raja dan pemberontak-pemberontak lain.[30] Pada waktu revolusi sesudah Renville, kota Madiun yang berpendudukan 200.000 merupakan kota ketiga Republik. Letaknya sangat strategis karena berada di persimpangan jalan kereta api. Sejak pecahnya revolusi, kehidupan politik di Karesidenan Madiun dikuasai oleh sayap kiri yang terdiri dari Sarekat Rakyat (SR), generasi tua dan Pesindo. Golongan kiri memimpin aksi masyarakat terhadap pamong praja dan priyayi yang terlalu erat hubungannya dengan Jepang. Dalam tahun 1949, umpamanya, PS berhasil memperbaharui kontrak-kontrak perkebunan yang menguntungkan para petani. Di daerah Madiun yang agak minus dalam produksi beras, timbullah tekanan keras dari petani-petani tanpa tanah dan pihak lain untuk mengubah berbagai perkebunan menjadi tanah sawah. Aksi ini juga dipimpin golongan kiri. Pada tahun 1948, sokongan terhadap FDR — PKI datang dari petani-petani di sekitar perkebunan, buruh-buruh perkebunan dan pabrik-pabrik gula, buruh-buruh kereta api dan sarekat pegawai (buruh pamong praja.[31] Selain itu secara samar-samar datang dukungan terhadap golongan kiri dari penduduk abangan di karesidenan ini. Namun, dalam tahun 1948, golongan kiri sadar bahwa pengaruh politis mereka tidak begitu stabil karena disaingi oleh Masjumi yang mempergiat aktivitas-aktivitasnya di tahun 1946. Dukungan terhadap Masjumi datang dari pesantren-pesantren dan *perdikan-perdikan desa*.[32] Dalam tahun 1947, PNI juga berkembang dengan agak pesat di daerah Madiun dengan kongres-kongres Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) di Ponorogo. Selain itu sebagian dari SR memisahkan diri untuk bergabung dengan golongan komunis Tan Malaka. Dalam bulan September 1948, kekuatan-kekuatan kiri dan yang pro-pemerintah kira-kira sama jumlahnya.[33] Akan tetapi, bila ditinjau dari sudut persenjataan, Pesindo adalah laskar yang paling kuat. Selain itu, hubungan-hubungan antara golongan kiri dan polisi berlangsung baik. Lagi pula masih ada TLRI. Namun, di pihak lain hubungan Pesindo dengan TNI setempat jelek atau tidak ada, mengingat perwira-

perwira TNI Madiun banyak yang berasal dari golongan sosial atas.

Karena itu, politik rasionalisasi Hatta seperti di Solo akan sangat merugikan golongan kiri ini. Pesindo terpaksa bertindak sendiri, artinya memprotesnya sendiri. Ini berlainan lagi daripada di Solo di mana Pesindo dapat bertedeng pada pasukan Senopati. Dalam keadaan demikian, terbetiklah berita mengenai kekalahan FDR PKI di Solo, pusat kekuatan golongan kiri. Malah datang pula berita tentang konflik-konflik bersenjata yang juga terjadi di Kediri (13 September) di mana TLRI menderita kekalahan. Sampai pula berita lain bahwa di Blitar, Pésindo dibersihkan oleh TNI. Peristiwa-peristiwa ini sangat menggelisahkan Pesindo di Madiun, khususnya setelah kemenangan di Solo, pemerintah pusat rupanya siap meneruskan operasi-operasinya terhadap Pesindo dan pasukan-pasukan yang kesetiaannya diragukan. Ini berarti bahwa pasukan pemerintah tidak lama lagi akan bergerak menuju Madiun. Pasukan Siliwangi yang berada di Madiun menangkap para pemimpin pekerja yang mogok di pamong praja.[34]

Dalam keadaan genting ini, pasukan Pesindo yang berada di Kediri berangkat ke Madiun untuk memperkuat Pesindo di sana guna menghadapi pasukan pemerintah.

Dengan demikian, Madiun menjadi pusat Pesindo. Pesindo di Madiun dihadapkan pada dua pilihan: menunggu pasukan pemerintah dan dilucuti senjatanya atau bertindak dan mengambil alih kekuasaan di Madiun yang berarti menetralisir TNI setempat. Akhirnya, jalan kedua ini yang dipilih Pesindo. Mereka berharap dengan membuka kartu dan melancarkan kudeta terhadap Madiun, Republik akan menunda aksinya karena ragu-ragu menghadapi perang saudara terbuka. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah soal waktu dan perundingan dengan Hatta. Usul dikirimkan ke Yogya dengan tuntutan memasukkan menteri-menteri PKI dalam kabinet. Pesindo ternyata salah perhitungan. Hatta dan Sukarno justru menyelesaikan peristiwa di Madiun dengan sebuah pidato "pilih antara Sukarno-Hatta atau PKI-Musso". Menurut seorang sejarawan Inggeris, David Charles Anderson, keputusan mengam bil alih kekuasaan di Madiun ini diambil oleh Pesindo setempat dan pimpinan oposisi nasional seperti Amir, Musso dan lain-lain dianggap merugikan kedudukan internasional Republik. Namun, perhitungan terakhir untuk memukul golongan kiri adalah karena Republik secara militer lebih kuat dari golongan kiri. Sebelum

pimpinan FDR—PKI dapat menentukan sikapnya terdengarlah pidato Sukarno yang menyatakan Kup Madiun sebagai pemberontakan.[35] Dua hal yang dapat dilakukan Amir dan Musso; pertama adalah mengecam Kudeta Madiun dan kemudian melihat proses penghancuran mesin politik militer mereka, kedua: mencoba bertahan terhadap serangan pemerintah pusat meskipun kekuatan bersenjata mereka lemah dibandingkan dengan pemerintah, dan berharap dapat bertahan cukup lama untuk menghasilkan perundingan? Akhirnya, orang Madiun sendiri rupanya agak heran mendengar dari Radio Yogya bahwa mereka adalah pemberontak. Bagi mereka Kup Madiun tidak lain daripada aksi pendaulatan yang selama ini sering terjadi. Kesalahan psikologis dan politis terbesar dibuat oleh Musso ketika, berpidato di Radio Madiun, ia menjawab pidato Sukarno pada tingkat yang sama, yaitu secara nasional. Retorik Musso adalah: pilih Musso! Dan itu diucapkan dalam perkembangan revolusi di mana kepemimpinan nasional Sukarno—Hatta justru semakin kukuh tertanam, sedangkan Musso hanyalah orang baru bagi Indonesia.

Kesimpulan

Peristiwa Madiun yang sebenarnya merupakan suatu pendaulatan lokal mengungkapkan masalah hakiki tentang Revolusi Indonesia. Perlawanan bersenjata FDR PKI tidak berlangsung lama. Seandainya yang terjadi sebaliknya maka mungkin sekali akan muncul penentangan terang-terangan antara konsepsi rasionalisasi Amir dan konsepsi rasionalisasi Hatta. Amir menghendaki tentara revolusioner yang berpandangan politik. Hatta menghendaki tentara profesional yang dibantu milisi sedangkan politik diserahkan pada negara. Jalan diplomasi, khususnya sejak Renville, mungkin tidak memberikan banyak pilihan bagi Republik kecuali konsesi rasionalisasi Hatta menyetujui tuntutan PKI untuk memasukkan menteri-menteri kiri. Akan tetapi, pelaksanaan politik rasionalisasi memukul tradisi revolusi Indonesia sendiri; pasukan-pasukan mempunyai tanggung jawab politik dalam arti yang lain dari Amir yaitu bahwa tentara bukan sekadar *serdadu* tetapi *pejuang*.

Dalam ilmu politik, biasanya orang membuat perbedaan antara revolusi nasional dan sosial. Yang satu bersifat penggulingan/pengusiran kekuasaan asing dan yang lain mengandung perubahan-perubahan sosial atau kelas dan menumbuhkan hubungan-hubungan kelas lain di dalam masyarakat baru. Contoh klasik dari

revolusi nasional adalah Revolusi Indonesia, Amerika Serikat (1776) dan lain-lain. Contoh revolusi sosial adalah Prancis (1789), Rusia, Cina, Vietnam, Kamboja dan lain-lain. Tragisnya adalah bahwa Sukarno, Hatta dan tokoh-tokoh revolusi Indonesia bahkan para partisipan revolusi bercita-cita lebih daripada suatu revolusi nasional. Namun jalan yang ditempuh dan arus sejarah menyebabkan mereka gagal mencapai cita-cita ini. Di pihak lain, mungkin mudah bagi kita sekarang untuk mencela tokoh-tokoh revolusi atau mengecamnya. Akan tetapi, revolusi sosial yang dicapai Vietnam, dan Kamboja menyebabkan berlangsungnya peperangan selama 30 tahun. Tonase bom yang dijatuhkan di atasnya lebih banyak daripada seluruh tonase bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia II. Dengan jalan diplomasi, para pemimpin Indonesia dapat mencapai kemerdekaan negara ini dalam waktu hanya 5 tahun. Suatu jasa yang patut mendapat catatan sejarah!

CATATAN

*. Artikel ini dibuat dengan bantuan dua mahasiswa yang meneliti koran-koran yang terbit di tahun-tahun empat puluhan. Ryadi Gunawan, mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada dan Herwin Sumarda dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kepada mereka penulis mengucapkan terima kasih. Isi tulisan ini adalah tanggung jawab penulis sendiri.

1. Burhan D. Magenda, "The Indonesian and Vietnamese Revolutions in Comparison: An Exploratory Analysis", *Prisma*, Indonesian Journal of Social and Economic Affairs, No. 8, hlm. 53–66.
2. Onghokham, "Sukarno: Mitos dan Realitas" dalam *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta: LP3ES, 1978).
3. Untuk pembubaran Peta ini lihat: Nugroho Notosusanto, *The Peta Army During The Japanese Occupation of Indonesia*, Disertasi Universitas Indonesia, 1977, hlm. 197 ff.
4. Benedict R.O. G. Anderson, *Java in a Time of Revolution*, Cornell University Press, 1972, hlm. 99 ff.
5. Nugroho, *op. cit.*, hlm. 179 ff.
6. Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm. 105.
7. A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, (Jakarta: Seruling Masa, 1970), cetakan ke-3, hlm. 239 dan seterusnya.
8. *Ibid.*, hlm. 237.
9. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 201–203 melukiskan bagaimana Sudirman memperoleh senjata Jepang.
10. Nasution, *op.cit.*, hlm. 237.
11. David Charles Anderson, "The Military Aspects of the Madiun Affairs", dalam: *Indonesia*, Vol. XXI, April 1976, Cornell Modern Indonesia Project, hal. 1 ff. Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm. 233 ff.
12. Nasution, *op.cit.*, hlm. 237–244 mengenai pertikaian-pertikaian dalam pembentukan tentara, markas besar, kementerian pertahanan dan lain-lain.
13. David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 1 ff.
14. Anthony J. Reid, *Indonesian National Revolution*, 1945–50, Longman, 1974, hlm. 63 dan seterusnya.
15. Selo Soemardjan, *Social Changes in Jogjakarta*, Cornell University Press, 1962, hlm. 81–87.
16. Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm. 360–365.
17. David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 21.
18. A.J. Reid, *op.cit.*, hlm. 86 dan seterusnya.
19. Untuk keparahan ekonomi sesudah Renville, lihat: George Mc. Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, 1961, 5 th printing, hlm. 252.
20. David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 2 ff.

revolusi nasional adalah Revolusi Indonesia, Amerika Serikat (1776) dan lain-lain. Contoh revolusi sosial adalah Prancis (1789), Rusia, Cina, Vietnam, Kamboja dan lain-lain. Tragisnya adalah bahwa Sukarno, Hatta dan tokoh-tokoh revolusi Indonesia bahkan para partisipan revolusi bercita-cita lebih daripada suatu revolusi nasional. Namun jalan yang ditempuh dan arus sejarah menyebabkan mereka gagal mencapai cita-cita ini. Di pihak lain, mungkin mudah bagi kita sekarang untuk mencela tokoh-tokoh revolusi atau mengecamnya. Akan tetapi, revolusi sosial yang dicapai Vietnam, dan Kamboja menyebabkan berlangsungnya peperangan selama 30 tahun. Tonase bom yang dijatuhkan di atasnya lebih banyak daripada seluruh tonase bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia II. Dengan jalan diplomasi, para pemimpin Indonesia dapat mencapai kemerdekaan negara ini dalam waktu hanya 5 tahun. Suatu jasa yang patut mendapat catatan sejarah!

CATATAN

*. Artikel ini dibuat dengan bantuan dua mahasiswa yang meneliti koran-koran yang terbit di tahun-tahun empat puluhan. Ryadi Gunawan, mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada dan Herwin Sumarda dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kepada mereka penulis mengucapkan terima kasih. Isi tulisan ini adalah tanggung jawab penulis sendiri.

1. Burhan D. Magenda, "The Indonesian and Vietnamese Revolutions in Comparison: An Exploratory Analysis", *Prisma*, Indonesian Journal of Social and Economic Affairs, No. 8, hlm. 53—66.
2. Onghokham, "Sukarno: Mitos dan Realitas" dalam *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta: LP3ES, 1978).
3. Untuk pembubaran Peta ini lihat: Nugroho Notosusanto, *The Peta Army During The Japanese Occupation of Indonesia*, Disertasi Universitas Indonesia, 1977, hlm. 197 ff.
4. Benedict R.O. G. Anderson, *Java in a Time of Revolution*, Cornell University Press, 1972, hlm. 99 ff.
5. Nugroho, *op. cit.*, hlm. 179 ff.
6. Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm. 105.
7. A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, (Jakarta: Seruling Masa, 1970), cetakan ke-3, hlm. 239 dan seterusnya.
8. *Ibid.*, hlm. 237.
9. Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 201—203 melukiskan bagaimana Sudirman memperoleh senjata Jepang.
10. Nasution, *op.cit.*, hlm. 237.
11. David Charles Anderson, "The Military Aspects of the Madiun Affairs", dalam: *Indonesia*, Vol. XXI, April 1976, Cornell Modern Indonesia Project, hal. 1 ff. Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm. 233 ff.
12. Nasution, *op.cit.*, hlm. 237—244 mengenai pertikaian-pertikaian dalam pembentukan tentara, markas besar, kementerian pertahanan dan lain-lain.
13. David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 1 ff.
14. Anthony J. Reid, *Indonesian National Revolution*, 1945—50, Longman, 1974, hlm. 63 dan seterusnya.
15. Selo Soemardjan, *Social Changes in Jogjakarta*, Cornell University Press, 1962, hlm. 81—87.
16. Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm. 360—365.
17. David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 21.
18. A.J. Reid, *op.cit.*, hlm. 86 dan seterusnya.
19. Untuk keparahan ekonomi sesudah Renville, lihat: George Mc. Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, 1961, 5 th printing, hlm. 252.
20. David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 2 ff.

21. Mengenai Siliwangi di Jawa, lihat: Nasution *op.cit.*, Jilid II, hlm. 154 dan seterusnya.
22. *Nieuwsgier*, 12 September 1948, menyebut bahwa selama kabinet Amir 2/3 dari anggaran belanja militer disediakan untuk laskar-laskar dan hanya 1/3 untuk tentara resmi.
23. David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 4.
24. *Ibid.*, hlm. 7.
25. *Ibid.*, hlm. 3.
26. Untuk ini, lihat surat kabar *Nasional*, *Kedaulatan Rakyat* dan *Antara*, 1948.
27. Lihat: J. Jahmin "Kekuatan Sosial Kiri dan Persetujuan Renville", Skripsi sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1971, hlm. 46–61.
28. David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 12 dan seterusnya.
29. A.J. Reid, *op.cit.*, hlm. 138 dan seterusnya.
30. Onghokham, "The Residency of Madiun, Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century", Yale University, Diss., 1975.
31. A.J.S. Reid, *op.cit.*, hlm. 138.
32. Perdikan desa = desa yang pada zaman kerajaan Mataram diberi kebebasan membayar pajak/upeti dan dari tugas-tugas lain bagi raja karena memelihara makam raja, tempat-tempat suci atau sekolah-sekolah agama. Hak-hak desa tersebut dipertahankan oleh Belanda dan biasanya nantinya adalah penduduk kaya.
33. David Charles Anderson, hlm. 22.
34. *Ibid.*, hlm. 25.
35. *Ibid.*, hlm. 27–28.

VIII. PROSES KESENIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA.

Pendahuluan

Untuk mempermudah tugas ini dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu sejarah sosial ekonomi, pembahasan tentang sejarah kesenian Indonesia dari Masa ke Masa ini akan dilihat dari dua pokok soal atau dari dua sudut pandang. Pertama, menyangkut pengaruh berbagai faktor terhadap gejala seni, terutama faktor-faktor pemikiran, negara, struktur masyarakat dan pengaruh asing. Kedua, menyangkut pembahasan tentang seniman modern dan lingkungannya. Dengan kata lain, dilihat dari pengaruh faktor-faktor di atas, pembahasan ini tidak akan menekankan hasil seni sebagai kreasi pribadi, melainkan sebagai hasil dari interaksi dan saling pengaruh antara seniman dengan lingkungannya baik itu negara, kepercayaan bersama, struktur masyarakat ataupun perubahan zaman. Dengan demikian seniman di sini bukanlah sebagai kreator pribadi, melainkan sebagai tawanan lingkungannya.

Corak Seni Tradisional

Salah satu peninggalan yang paling kuno dari kesenian Indonesia adalah lukisan-lukisan di dinding gua-gua yang terdapat di Irian Jaya, Sulawesi, Kepulauan Kei, Kalimantan dan Seram. Lukisan-lukisan ini menunjukkan tangan, telapak tangan, garis-garis manusia dengan kemaluan yang bukan main panjangnya dan beberapa binatang seperti ikan, cicak, kura-kura, kerbau, burung ataupun kapal-kapal. Apakah yang mendorong orang-orang di zaman tersebut untuk melukis hal-hal semacam itu? Lukisan-lukisan dengan garis linier dari orang-orang dengan kemaluan yang panjang, diduga berkisar pada mitos-mitos kesuburan dan sumber hidup — yang satu sama lain dianggap tidak demikian berbeda. Sedang ikan dalam lukisan-lukisan ini mencerminkan keadaan masyarakat-masyarakat tersebut sebagai masyarakat nelayan yang hidup dari hasil laut. Sama halnya tokek atau cicak besar yang dianggap sebagai nenek moyang ikan dalam mitos-mitos kuno. Karena itulah gambar-gambar orang yang diberi bentuk cicak atau tokek sangat penting. Di Jawa, hingga kini, suara tokek masih dihitung atau dilihat sebagai tanda-tanda sesuatu. Bahkan sampai

kini, dalam kesenian rakyat, kita melihat hasil-hasil tersebut dalam bentuk cicak atau tokek kuningan.

Mengenai burung, kiranya tidak perlu dijelaskan lagi. Beberapa burung, misalnya, melukiskan kekuatan magis tertentu. Seperti garuda yang diungkapkan dalam mitos-mitos kuno dan juga diperkuat oleh pengaruh kebudayaan Hindu. Garuda, sejak dahulu sampai sekarang, masih tetap merupakan simbol baik untuk lambang negara maupun seperti yang terlukis dalam batik-batik rakyat.

Sering simbol-simbol magis kuno ini masih terungkap pada kesenian rakyat hingga kini, seperti yang berkenaan dengan tokek misalnya. Bentuk kapal yang dalam mitos-mitos sering dikatakan sebagai yang mengantarkan arwah manusia yang mati ke sorga atau dunia sesudah mati, sering menjadi bentuk makam-makam, atap rumah, obyek dalam tenunan-tenunan — khususnya di daerah-daerah di mana mitos ini kuat. Pada masyarakat-masyarakat di mana lembaga negara atau raja tidak demikian kuat seperti, umpamanya, di berbagai bagian daerah Tapanuli, pulau-pulau bagian Timur Indonesia seperti Sumba, Sumbawa, Roti dan lain-lain, Kalimantan ataupun pada kesenian rakyat Jawa, obyek-obyek seperti kapal, burung, tokek dan sebagainya masih merupakan aspek kesenian yang kuat.

Telapak tangan sebagai obyek lukisan dinding gua, mungkin merupakan lukisan yang pertama kali dibuat ketika manusia mencoba menggambarkan sesuatu dengan warna tangannya. Warna-warna tersebut adalah seperti merah dari darah binatang (babi atau kerbau), hitam dan putih, kemudian hijau dari hasil-hasil atau daun pohon. Dengan mencelupkan tangannya ke dalam warna-warna dan mencapkannya atas dinding maka lukisan pertama manusia lahir. Namun, kemudian tangan ini mendapat sifat magis tertentu. Karena itu, tangan atau lebih tepat lagi telapak tangan, tetap menjadi obyek penting dalam kesenian Indonesia. Lukisan-lukisan telapak tangan di gua-gua yang oleh sejarawan seni Indonesia, Claire Holt, diperbandingkan dengan tangan-tangan dalam tari Kecak ataupun dalam tari Barong dewasa ini, masih merupakan sesuatu yang penting, sehingga barong dan telapak tangannya sering digambarkan bersama-sama. Di kebun Istana Bogor di zaman Presiden Sukarno, umpamanya, juga terdapat patung telapak tangan yang disebut *Hand of God.* Ini tentunya tidak berarti bahwa pemikiran zaman kini yang memakai simbolisme tangan untuk menunjukkan sesuatu yang magis itu sama

dengan pemikiran manusia dahulu yang hidup di gua-gua. Kedua-duanya memang memakai simbul yang sama, tetapi untuk mengungkapkan hal yang berbeda.
Kalau pada gua-gua prasejarah, telapak tangan merupakan yang paling banyak tampak, sedangkan telapak kaki hanya beberapa, maka pada zaman Hindu dengan masuknya pengaruh India gambar telapak kaki lebih banyak nampak. Ini menunjukkan bahwa telapak kakilah yang menjadi simbol magis, khususnya telapak kaki raja-raja. Telapak kaki pada batu yang terdapat pada prasasti Batu Tulis dekat Bogor, misalnya, dianggap sebagai telapak kaki raja Purnawarman dari Taruma Negara.

Pengaruh Hindu & Transformasi Bentuk

Prasasti Batu Tulis merupakan peninggalan yang paling kuno di Jawa dari pengaruh Hinduisasi atau yang juga sering disebut Sanskritisasi. Pengaruh kebudayaan dari luar ini, menurut teori-teori terbaru, tidak datang melalui kolonialisme atau ekspansi politik raja-raja India ke Asia Tenggara atau melalui rute perdagangan akan tetapi dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana ini dapat pula terdiri dari orang-orang Indonesia sendiri atau penduduk pribumi yang belajar di India atau orang-orang Brahmana India yang berfungsi di Indonesia sebagai — menurut istilah sekarang —: konsultan asing. Para Barahmana ini berfungsi sebagai pengabsah kerajaan, dalam ritus-ritus negara dan lain sebagainya. Bahasa yang dipakai, seperti yang terlihat pada prasasti kuno, adalah bahasa Sanskerta yang memperlihatkan pengaruh yang besar sekali terhadap tulisan-tulisan atau huruf Jawa dan Asia Tenggara lainnya. Inilah sebabnya mengapa orang berbicara mengenai Sanskritisasi kebudayaan-kebudayaan Asia Tenggara.
Yang penting sebenarnya adalah bahwa adanya fungsi-fungsi para Brahmana menunjukkan lahirnya suatu bentuk politik di Indonesia atau di sebagian daerah Indonesia, di mana negara atau kerajaan merupakan lembaga monarki yang kuat. Dalam millenium pertama abad Masehi, kebudayaan Indonesia, khsususnya Jawa yang memperlihatkan kuatnya lembaga monarki, dipengaruhi oleh aliran Sanskritisasi dan kebudayaan Raja ini. Monumen-monumen besar seperti Borobudur, Mendut, Prambanan, Candi Sewu dan lain sebagainya yang kita kenal dalam kompleks candi-candi Jawa Tengah sampai hari ini merupakan bukti dari hasil kebudayaan di bawah perlindungan suatu peradaban monarki. Kompleks per-

candian ini, yang didirikan pada kira-kira sebelum abad ke-10 Masehi, merupakan zaman keemasan kesenian Jawa, karena dalam sejarah kesenian Indonesia, hasil-hasil kesenian ini mungkin merupakan yang paling monumental yang barangkali tidak pernah ada pada zaman mana juga dalam sejarah Indonesia. Selain itu, kompleks percandian Jawa Tengah ini juga memperlihatkan pengaruh India yang paling murni, dalam arti bahwa pahatan-pahatan atas dinding-dinding candi, patung-patungnya, bercorak tiga dimensi dan menunjukkan pengaruh yang paling utuh dari pengaruh asing ini.

Namun, di belakang pengaruh murni India ini masih terlihat berbagai pola khas Indonesia atau lebih tepat disebut pola Asia Tenggara. Gagasan di belakang pendirian candi-candi ini adalah obsesi nenek-moyang terhadap gunung-gunung. Dalam mitologi, baik India maupun terlebih-lebih Asia Tenggara, gunung (meru) merupakan tempat di mana dewa-dewa bersemayam. Jadi dengan diletakkannya abu-abu para raja yang wafat di candi-candi, raja disemayamkan bersama dewa. Berdasarkan ideologi kerajaan, di mana raja merupakan penjelmaan dewa dalam susunan mikrokosmos, maka candi-candi ini dianggap sebagai tempat bersemayam para raja. Dekat sekali dengan pemujaan dan simbolisme gunung ini adalah konsep-konsep di sekitar kesuburan yang di Indonesia diungkapkan dengan pemujaan phalus atau phalus dan yoni (sering dilambangkan dengan air).

Arti phalus dan yoni dalam kesenian Indonesia sedikit berbeda dengan yang terdapat di India. Di India, hal-hal seksual yang merupakan lambang kesuburan yang dilukiskan secara visual melalui pahatan-pahatan seksual seperti persetubuhan laki-laki dan wanita atau penari-penari genit dan lain sebagainya. Di Indonesia, phalus dan yoni yang merupakan lambang kesuburan, terutama kesuburan tanah dan dilukiskan melalui pahatan-pahatan manusia atau dewa-dewa yang tetapi telah kehilangan lekuk-liku genitnya. Karena itu ide-ide yang terungkap dalam kesenian Indonesia lebih bersifat abstrak daripada kongkret.

Hal terakhir inilah yang mungkin mendasari perkembangan kesenian pada candi-candi di Jawa Timur. Kira-kira pada abad ke—11, pusat kekuasaan politik berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, pertama-tama ke Kediri, kemudian ke sekitar Malang, Blitar dan akhirnya ke Trowulan di dekat kota Mojokerto yang sekarang. Hasil-hasil terakhir zaman Hindu-Budhis ini nampak di lereng

Gunung Lawu (candi Sukuh dan Ceta) yang memperlihatkan perbedaan yang nyata antara kebudayaan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Candi-candi monumental yang terdapat di Jawa Tengah tidak kita temukan di Jawa Timur. Di Jawa Timur, candi-candi lebih sederhana. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan ini adalah masalah jumlah atau tenaga manusia. Dapat dibayangkan, betapa banyak tenaga manusia yang diperlukan untuk mendirikan candi-candi di Jawa Tengah seperti Borobudur dan Prambanan yang terdiri dari batu-batu besar dengan pahatan-pahatannya. Candi-candi di Jawa Timur terdiri dari batu-batu yang lebih kecil dan hanya berbentuk teras, sedangkan bagian atasnya terdiri dari kayu. Karena itu meskipun kita tak mempunyai data statistik mengenai tingkat kepadatan penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun dapat diduga bahwa jumlah penduduk Jawa Timur di mana candi-candi tersebut didirikan jauh lebih sedikit daripada di Jawa Tengah. Lagi pula, dataran rendah yang subur di Jawa Timur lebih sempit daripada di Jawa Tengah. Di samping itu, berpindahnya kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur nampaknya juga disebabkan oleh larinya penduduk dari Jawa Tengah yang terlalu berat menderita tekanan dari peradaban monarki itu.

Eratnya kaitan antara ekspresi kesenian dengan masalah kepadatan penduduk dan lamanya daya tahan dinasti-dinasti kerajaan akan menjadi jelas bila diingat bahwa umumnya umur dinasti raja-raja Jawa Timur dengan pusat-pusat keraton mereka seperti di Kediri, Tumapel atau Majapahit sebenarnya tidak lama, kira-kira sekitar seratus tahun. Singkatnya, lama bertahannya dinasti-dinansti tersebut sangat erat berkaitan dengan batas kesabaran rakyat terhadap penghisapan oleh kebudayaan monarki. Artinya, penghisapan tidak akan mungkin dilakukan untuk jangka waktu lama tanpa terjadinya perpindahan pusat kekuasaan politik yang ada. Sudah tentu tidak berarti bahwa berakhirnya suatu dinasti selalu diakibatkan oleh pemberontakan rakyat. Bisa terjadi bahwa suatu dinasti berakhir karena perpindahan penduduk secara besar-besaran dengan akibat timbulnya kelaparan massal. Namun demikian, dilihat dari perkembangan seni, nampak bahwa usaha raja-raja Jawa Timur dalam membangun monumen-monumen kebudayaan monarki memang terbatas. Bila dibanding, misalnya, candi Panataran di Jawa Timur sebagai candi kerajaan Majapahit dengan Prambanan di Jawa Tengah, nampak sekali betapa kecilnya candi

Penataran, walaupun secara subyektif candi ini jauh lebih indah daripada candi-candi di Jawa Tengah.
Pada candi-candi di Jawa Timur, terlihat juga pahatan-pahatan yang bercorak dua dimensi yaitu bermula dari bentuk-bentuk wayang kulit yang kita kenal sampai pada para punakawan. Orang sering melihat pada punakawan sebagai unsur "pengindonesiaan" pengaruh Sanskrit atau India. Namun, tidakkah sebenarnya "indonesianisasi" hanyalah slogan nasional belaka? Sayangnya sampai kini belum banyak orang yang melakukan penyelidikan tentang unsur baru ini. Barangkali, yang menjadi menarik sebenarnya adalah peralihan bentuk tiga dimensi pahatan di atas candi kebentuk dua dimensi (wayang) dari kesenian Jawa Timur. Ini berarti terjadi suatu transformasi dari kesenian yang mengambil bentuk nyata atau riil untuk bentuk yang lebih abstrak. Tentu ini hanya suatu hipotesa yang perlu diuji kebenarannya. Mungkin orang-orang Indonesia di zaman itu, baik yang terikat pada bentuk monarki seperti di Jawa maupun pada bentuk suku seperti di daerah-daerah Sumba, Sumbawa dan lain-lain, lebih bisa mengungkapkan masalah-masalah gagasan yang abstrak ketimbang hal yang konkret. Artinya apakah tidak mungkin, misalnya bahwa, dalam kepercayaan animisme, lukisan-lukisan burung atau binatang-binatang lain maupun manusia hanyalah mencerminkan corak atau bentuk dari kekuatan magis, dan bukan binatang atau manusia itu sendiri. Artinya, bisa dikatakan bahwa kecenderungan kesenian kita adalah memang berdasar pada lukisan abstrak dan bukan pada lukisan konkret.

Ungkapan Seni di Zaman Islam

Masalah *ungkapan* dan *kongkret* merupakan suatu gejala yang menonjol pada zaman berikutnya, yaitu setelah zaman Hindu-Budhis atau bisa dikatakan secara umum: Islam. Bagaimanakah ekspresi kesenian dalam zaman dinasti-dinasti Islam?
Pada dasarnya Islam melarang diciptakannya kembali bentuk-bentuk manusia sebagai makhluk Tuhan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Islam, pada dasarnya, agak antikesenian. Namun, apakah yang kita ketemukan di Indonesia?
Islam datang ke Indonesia setelah kira-kira 15 abad setelah peradaban Hindu dengan tradisi kenegaraannya. Berbagai pola hubungan antara seni dan negara telah diletakkan dan diteruskan sampai pada abad-abad berikutnya. Karena itu biarpun agama dari

dinasti-dinasti tersebut adalah Islam, namun, kebudayaannya masih tetap bersifat Hindu-Budhis. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabrata memang tidak dipahatkan lagi atas dinding-dinding istana atau lain-lain. Namun, cerita itu masih tetap merupakan aspek yang populer melalui pertunjukan-pertunjukan wayang kulit, topeng dan sebagainya. Nyai Loro Kidul, bagi dinasti Jawa, merupakan pusat dari pusaka-pusaka keramat kraton yang bersama-sama dengan Sunan Lawu yang dianggap wadah *kesekten* Majapahit, bahkan mempunyai kedudukan seperti Nabi.

Seorang sarjana antropologi mengatakan, bahwa negara-negara di Asia Tenggara, termasuk negara Jawa atau kesultanan Cirebon, Aceh, Pontianak, Sulawesi dan sebagainya, merupakan 'negara panggung' (*theatre state*). Artinya, salah satu fungsi utama sang Raja dan istana adalah mementaskan ritus atau upacara kenegaraan di depan masyarakat atau umum. Ini misalnya terungkap dari audiensi-audiensi umum di mana raja menghadap rakyat di alun-alun dengan dikelilingi segala kebesaran dan lain-lain. Di depan massa rakyat itulah segala macam putusan diambil atau orang-orang diadili. Raja Mataram, umpamanya, paling sedikit sekali seminggu (pada hari Senin) duduk di atas tahta Siti-Inggil untuk menghadap rakyat di depan alun-alun. Demikian juga di daerah-daerah lain; ucapan-ucapan setia dinyanyikan oleh para bangsawan Bugis pada rajanya yang dinyatakan dengan syair-syair dan dengan tingkah laku seorang aktor di atas panggung di depan umum. Negara-negara pada zaman itu sangat terjalin erat dengan agama dan eksistensinya sering didasarkan atas agama atau konsep-konsep *kesekten* pada masa itu. Jadi, di kesultanan-kesultanan pesisiran Jawa dan Sumatra seperti misalnya di Aceh, setiap tahun diadakan prosesi besar dari keraton ke Mesjid dengan dikeluarkannya segala macam peralatan bagi upacara kebesaran negara. Juga di keraton Jawa hal yang demikian bersifat keramat seperti perkawinan raja dengan Nyai Loro Kidul di mana upacara divisualkan dengan tarian-tarian Bedoyo Ketawang dan lain-lain.

Di samping aspek spiritual atau keramat dari tari-tarian, ada hal yang agaknya perlu dikemukakan disini yaitu bahwa kerajaan di Jawa ataupun sebenarnya di Indonesia biasanya didirikan dengan kekerasan yaitu melalui penaklukan, perebutan takhta, kekuasaan atau daerah dan lain-lain. Dengan kata lain, negara didirikan melalui perang. Pada dasarnya, terutama sebelum kolonialisme Belanda, golongan priyayi, raja dan istananya merupakan suatu kas-

ta kesatria atau kasta perang, bukan pegawai negeri seperti perkembangannya di bawah kolonialisme Balanda. Bagaimana aspek elit atau golongan berkuasa sebagai kasta perang ini tercermin dalam kesenian terutama, misalnya, dalam tarian-tarian Jawa? Kalau diteliti, koreografi tarian-tarian Jawa, khususnya tarian keraton, dapat dilihat adanya bentuk atau formasi-formasi medan pertempuran seperti Garuda Mungkur, Supit Urang dan lain-lain. Benar bahwa formasi-formasi ini juga dipengaruhi oleh ilmu perbintangan, namun yang masih nampak tetap adalah pola-pola medan peperangan. Karena itu tidak mengherankan apabila keraton-keraton menekan latihan menari bagi pemuda dan pemudi keraton yang berhubungan erat dengan aspek keperwiraan dan kepemimpinan dalam medan peperangan. Barangkali, banyak juga gaya tarian berasal dari ilmu-ilmu perang seperti pencak silat dan lain-lain yang terlihat agak nyata dalam tarian beberapa suku di Sumatra misalnya. Di Jawa, gaya perang ini telah diabstraksikan sedemikian rupa sehingga tidak begitu tampak jelas pola asalnya. Apalagi, seperti dikatakan di atas, kesenian Indonesia telah terbiasa dengan melukiskan ide daripada hal yang konkret. Sebenarnya, perkembangan seni tari sendiri merupakan ciri suatu perkembangan seni di bawah pengaruh kasta militer dan bukan di bawah kasta birokrat. Misalnya, acara tarian laki-laki dan perempuan seperti tayuban dan lain-lain berasal dari acara untuk menghibur para perwira oleh putri-putri sesudah para perwira itu datang dari medan perang. Di Bali, misalnya, hal ini juga terlihat pada para penari wanita yang mengundang penonton pria untuk menari bersamanya dengan menjatuhkan *sampur* padanya (juga *Ketuk Tilu* di Sunda).

Sudah tentu timbul persoalan kenapa dalam pembicaraan mengenai perkembangan kesenian dari zaman prasejarah dan Hindu-Budhis disinggung lukisan-lukisan atau simbol-simbol dan arsitektur, sedangkan pada zaman dinasti-dinasti Islam tiba-tiba pembicaraan beralih pada tarian-tarian dan pemanggungan negara di depan umum? Apakah pada zaman Hindu-Budhis, misalnya, tidak ada tarian-tarian dan apakah pada zaman dinasti-dinasti Islam tidak ada arsitektur? Jawabannya adalah bahwa tidak cukup terdapat bahan-bahan yang berhubungan dengan hal-hal di atas. Sudah tentu terdapat pula arsitektur-arsitektur di zaman dinasti-dinasti Islam sama halnya seperti tarian-tarian di zaman Hindu-Budhis. Namun, yang jelas adalah bahwa arsitektur di bawah

dinasti-dinasti Islam merupakan kemunduran dari seni bangunan monumental yang telah mundur sejak akhir zaman klasik di Jawa Tengah, tepatnya ketika terjadi perpindahan pusat kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jelaslah bahwa keraton-keraton maupun mesjid dalam zaman dinasti-dinasti Islam tidak demikian menonjol seperti zaman Hindu Budhis di Jawa Timur, apalagi bila dibandingkan dengan zaman klasik di Jawa Tengah.

Perbedaan terbesar antara arsitektur zaman Hindu Budhis dan Islam adalah dalam bentuk atap dan bangunan di bawahnya.

Dalam zaman Hindu-Budhis, nampaknya, konsep pemujaan adalah demikian kuat sehingga atap-atap di atas bangunan dasar berbentuk meru, yaitu mencuat ke atas. Sedangkan Islam yang masuk ke Indonesia pada zaman itu lebih mementingkan atau menekankan 'penyatuan umat dan Tuhannya' (*manunggaling kawula lan gusti*) atau dalam bahasa politik dunia dari keraton Mataram diterjemahkan sebagai 'penyatuan antara raja dan rakyatnya', maka bentuk pendopo lebih nampak berbentuk waringin, artinya sebanyak mungkin memberikan bayangan perlindungan. Secara simbolis simbol waringan ini mementingkan yang di bawah pengayomannya (bayangannya) dan bukan ke atas seperti meru.

Mengenai perkembangan pergelaran tradisional, dapat dikatakan bertalian erat dengan legitimasi kekuasaan kerajaan. Berbagai sarjana yang mengkaji masalah wayang dan tokoh-tokohnya dalam lakon-lakon Ramayana dan Mahabrata menunjukkan kaitan erat antara pandangan hidup dan kesenian tersebut. Keeratan yang juga nampak dalam adegan-adegan wayang, upacara-upacara di kraton Jawa sendiri seperti upacara pertemuan raja dan para menterinya, tingkah laku raja setelah pertemuan-pertemuan tersebut dan lain sebagainya. Di atas telah disinggung mengenai *theatre state* dari negara-negara Asia Tenggara. Melalui wayang rupanya ada usaha untuk mengorientasikan rakyat petani di desa-desa pada pusat kerajaan yaitu keraton. Karena sebagian besar masyarakat terdiri dari petani-petani yang buta huruf, maka melalui pertunjukan-pertunjukan wayang ini, para petani menerima warisan kesusastraan dan kebudayaan secara oral. Namun, penyampaian sastra secara oral dan visual ini ke dalam masyarakat yang buta huruf membatasi bentuk-bentuk tokoh dalam pertunjukan. Atau dengan kata lain, tokoh-tokoh dalam wayang seperti tokoh halus atau kasar, baik atau buruk, kesatria atau pendeta, raja atau orang biasa, dewa atau raksasa harus mudah dimengerti dan agak

uniform di mana-mana. Para penonton harus pula segera mengenalnya, dengan akibat bahwa Arjuna digambarkan di mana-mana sebagai Arjuna, Judistira sebagai Judistira, Rahwana sebagai Rahwana dan seterusnya. Kecenderungan yang sama kita temui pada tarian topeng ataupun dalam tokoh-tokoh cerita selain Ramayana dan Mahabrata. Terbatasnya ruang gerak seni tradisional ini bukan saja meliputi seni Jawa akan tetapi juga meliputi kesenian-kesenian tradisional di daerah-daerah lain di mana fungsi negara tidak terlalu kuat.

Demikianlah, sebelum meningkat pada aspek-aspek yang mempengaruhi kesenian modern Indonesia, ada baiknya di sini diringkaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kesenian tradisional Indonesia.

1. Ungkapan kesenian tradisional mempunyai hubungan yang erat dengan alam pikiran penduduk setempat mengenai soal-soal spiritual seperti magis, agama, mistik dan sebagainya.
2. Seni sangat dipengaruhi oleh organisasi sosial atau politik dari masyarakat tersebut dalam berbagai variasinya.
3. Pengaruh luar, baik Hindu-Budhis, Islam maupun Barat, sangat mempengaruhi seni ini. Namun, proses pengindonesiaan adalah tetap merupakan faktor penting yang berhubungan dengan fungsi kesenian, baik dalam kerangka sosial politik maupun relevansi bagi rakyat setempat.

Singkatnya, keterbatasan adalah ciri khas kesenian tradisional, artinya keterbatasan bagi sang Seniman maupun kreativitas pribadinya. Walaupun demikian, keterbatasan ini tidak menghalangi kemungkinan bagi kesenian tradisional Indonesia mencapai puncak-puncak kejayaannya dan dikagumi hasil-hasilnya oleh semua orang. Puncak-puncak inilah agaknya bisa menjadi dasar utama bagi tuntutan-tuntutan kita sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab.

Seni Indonesia di Masa Kini

Tidak perlu agaknya dijelaskan lebih lanjut bahwa perkembangan seni pada masa kini adalah jauh lebih rumit. Karena itu sangat sulit

membuat generalisasi mengenai corak dan perkembangannya. Dalam bagian ini, yang hanya akan ditekankan adalah faktor perubahan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan seni tersebut.

Salah satu aspek yang menyolok mengenai perkembangan kesenian modern adalah sifat komersialnya. Tentu, istilah komersialisasi tidak boleh sekadar dipandang dari segi negatifnya saja. Justru secara positif, sifat komersialisasi tersebut memungkinkan perkembangan kesenian secara individual. Dengan perkataan lain, perkembangan kesenian modern melepaskan diri dari tradisi dan juga dari patron-patronnya yang tradisional seperti negara dan golongan-golongan tertentu masyarakat. Komersialisasi dan individualisasi ini mungkin merupakan suatu proses yang berjalan sejajar. Kesenian dapat menjadi milik pribadi dan, lebih daripada dahulu, demi kenikmatan pribadi. Orang swasta dengan modal yang ada sekarang merupakan patron dari seniman. Kalangan swasta ini bisa merupakan orang Indonesia maupun orang asing. Dengan demikian, ciri kedua yang menonjol adalah bahwa seniman Indonesia mengaitkan hasilnya dengan perkembangan kesenian dunia yang lebih luas khususnya kesenian Barat.

Dalam hubungan antara seniman dengan masyarakat dapat dilihat sebagaimana halnya di waktu dahulu, seniman bukan semata-mata merupakan pencipta seni, melainkan juga mengungkapkan apa yang hidup dalam masyarakatnya dan menyajikannya dalam lukisan-lukisan atau pementasan-pementasan. Singkatnya, seniman berfungsi sebagai cendekiawan dalam masyarakatnya seperti halnya para penulis, akademisi dan lain sebagainya.

Sebagaimana dikatakan di atas, seniman modern tidak saja hidup dalam masyarakat Indonesia akan tetapi juga memiliki hubungan-hubungan yang erat dengan perkembangan dunia seni internasional. Ini tampak sekali pada perkembangan lukisan modern lukisan modern yang terjadi di bawah proteksi Belanda. Orang asing selalu menekankan keindahan alam Indonesia. Dan perhatian pertama para pelukis Indonesia adalah pada keindahan alam seperti misalnya nampak pada karya-karya Raden Saleh, Basuki Abdullah, baik senior maupun yunior yang lebih dikenal sebagai Basuki Abdullah Pirngadi dan lain sebagainya. Memang, para pelukis Belanda di Indonesia sendiri seperti misalnya Dezentje menjadikan alam Indonesia sebagai topiknya. Baru nanti kemudian pada kira-kira permulaan tahun 1940-an, corak ini mendapat kritikan-kritikan pedas dari pelukis-pelukis seperti Sujoyono, Affandi dan

lain-lain. Kesan saya adalah bahwa jenis lukisan-lukisan seperti Basuki Abdullah dan lain-lain agak dikesampingkan dan tidak menemui penerus-penerus kecuali di daerah-daerah dan di antara pelukis-pelukis Taman Suropati.
Suatu catatan terakhir mengenai perkembangan seni modern dalam hubungan dengan suasana lingkungan adalah perkembangan seni lukis di Bandung yang sering dikatakan bersifat ekstrem dan modern. Mungkin tidak terlalu mengherankan apabila seni lukis semacam ini berkembang di Bandung dan tidak di Yogyakarta atau Surakarta misalnya. Bandung memang tidak memiliki struktur kesultanan seperti di Jawa Tengah. Juga jauh dari Ibu Kota Jakarta di mana proteksi negara tidak terlalu menonjol dan di mana masyarakat lebih konformis pada golongan menengah. Selain itu, Bandung dengan perkebunan-perkebunan di sekitarnya, merupakan suatu daerah *enclave* Barat dan karena itu pengaruh internasional cukup dapat berkembang. Ini juga yang mungkin merupakan aspek-aspek yang mendorong perkembangan lukisan dan pemahatan tertentu yang berakar pada kecenderungan seni Indonesia ke arah yag bersifat abstrak.

Penutup

Demikianlah beberapa gambaran ringkas mengenai perkembangan seni Indonesia. Kesenian memang bukan hanya lukisan saja. Pementasan, perfilman, fotografi dan lain sebagainya bisa termasuk di dalamnya. Setiap zaman atau periode memang menampilkan corak keseniannya sendiri dan bahkan penekan pada aspek-aspek tertentu sebagai fokus dari tingkat perkembangan kebudayaan masyarakat.

Biografi pengarang :

ONGHOKHAM, kelahiran Surabaya tahun 1933; gerlar kesarjanaan pertama kalinya didapat di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, kemudian memperoleh gelar Doktor (Ph.D) di Amerika Serikat pada tahun 1975 setelah mengikuti studi di bidang sejarah pada Universitas Yale.

Di samping pekerjaan tetapnya sebagai Dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia — dan pernah membantu di LEKNAS—LIPI (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) — ia juga menulis berbagai artikel, antara lain "Pulung Affair" dalam Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia (1977) "The Brotodiningrat Affair" dalam Ruth McVey (ed), *Southeast Asia in Transition*, yang diterbitkan sebagai *memorial volume* untuk Profesor H.J. Benda; dan majalah *Prisma*, LP3ES, "Kedudukan Politik Kaum Militer dalam Sejarah" (Desember 1980). Di luar itu ia juga melakukan banyak kegiatan studi lainnya lewat simposium-simposium, seminar-seminar, dan diskusi-diskusi ilmiah yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun swasta. Minat dan perhatiannya yang menggebu pada studi bidang sejarah berakar sejak duduk di bangku sekolah menengah, di mana ia sangat tertarik pada dongeng-dongeng. Lewat sejarah katanya bisa mengenal dan memahami hubungan timbal-balik antara masyarakat dan negara. Dan diterbitkannya buku *Rakyat dan Negara* ini, target yang diharapkannya sangat sederhana: *nyampai* dan bisa menjadi bahan studi dan diskusi.

PENERBIT SINAR HARAPAN

Jalan Dewi Sartika 136 D

Cawang, Jakarta Timur